

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I PENDAHULUAN.....	15
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	15
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	15
1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan	16
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD	17
2.1. Ekonomi Makro	17
2.2. Kebijakan Keuangan.....	30
2.2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah	31
2.2.2. Kebijakan Belanja Daerah.....	40
2.2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah	47
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	49
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.....	49
3.1.1. Pendapatan Daerah.....	49
3.1.2. Belanja Daerah.....	51
3.1.3. Transfer.....	52
3.1.4. Pembiayaan.....	52
3.2. Klasifikasi Belanja Menurut Fungsi dan Organisasi	53
3.3. Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan.....	55
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI	57
4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah	57
4.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	58
4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	59
4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.....	70
BAB V PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN	71
5.1. Laporan Realisasi Anggaran	71
5.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.....	100
5.3. Neraca.....	103
5.4. Laporan Operasional.....	164
5.5. Laporan Arus Kas	193
5.6. Laporan Perubahan Ekuitas	199
BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN	203
BAB VII PENUTUP	209

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Pendapatan Asli Daerah	49
Tabel 2. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	50
Tabel 3. Penerimaan Transfer Pemerintah Provinsi	50
Tabel 4. Bantuan Keuangan	51
Tabel 5. Lain-lain Pendapatan yang Sah	51
Tabel 6. Belanja Operasi	51
Tabel 7. Belanja Modal	52
Tabel 8. Penerimaan Pembiayaan Daerah	52
Tabel 9. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	53
Tabel 10. Realisasi Belanja Menurut Fungsi	53
Tabel 11. Realisasi Belanja Menurut Organisasi	53
Tabel 12. Daftar Nama SKPD se-Kab. Bojonegoro Selaku Entitas Akuntansi	57
Tabel 13. Daftar BLUD se Kab. Bojonegoro selaku Entitas Akuntansi	58
Tabel 14. Pendapatan Asli Daerah	71
Tabel 15. Pendapatan Pajak Daerah	71
Tabel 16. Pendapatan Retribusi Daerah	72
Tabel 17. Rincian Retribusi Jasa Umum	73
Tabel 18. Rincian Retribusi Jasa Usaha	73
Tabel 19. Rincian Perizinan Tertentu	75
Tabel 20. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	76
Tabel 21. Lain-lain PAD yang Sah	76
Tabel 22. Pendapatan Transfer	77
Tabel 23. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	77
Tabel 24. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	80
Tabel 25. Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	80
Tabel 26. Rincian Bantuan Keuangan	81
Tabel 27. Rincian Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	82
Tabel 28. Belanja Operasi	83
Tabel 29. Belanja Pegawai	84
Tabel 30. Belanja Barang dan Jasa	84
Tabel 31. Rincian Belanja Belanja Hibah Barang/Jasa	86
Tabel 32. Rincian Belanja Bantuan Sosial Barang	87
Tabel 33. Belanja Subsidi	87
Tabel 34. Belanja Hibah	87
Tabel 35. Belanja Bantuan Sosial	90
Tabel 36. Belanja Modal	91
Tabel 37. Belanja Modal Tanah	91

Tabel 38.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	92
Tabel 39.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	93
Tabel 40.	Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	94
Tabel 41.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	95
Tabel 42.	Belanja Tidak Terduga	96
Tabel 43.	Belanja Transfer	96
Tabel 44.	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	96
Tabel 45.	Transfer Bantuan Keuangan	97
Tabel 46.	Penerimaan Pembiayaan	99
Tabel 47.	Rincian Penerimaan Kembali Pinjaman yang Disalurkan kepada Masyarakat Melalui SKPD Terkait	100
Tabel 48.	Pengeluaran Pembiayaan	100
Tabel 49.	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	102
Tabel 50.	Kas di Bendahara Penerimaan	104
Tabel 51.	Kas di Bendahara Pengeluaran	105
Tabel 52.	Kas di Bendahara BLUD	105
Tabel 53.	Kas di Bendahara FKTP	106
Tabel 54.	Piutang Pajak	107
Tabel 55.	Piutang Retribusi	108
Tabel 56.	Bagian Lancar Piutang SKPD	109
Tabel 57.	Piutang Lainnya	112
Tabel 58.	Piutang Klaim Kesehatan	113
Tabel 59.	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	115
Tabel 60.	Rincian Penyisihan Piutang Daerah	116
Tabel 61.	Persediaan.....	121
Tabel 62.	Rincian Persediaan Alat Tulis Kantor.....	121
Tabel 63.	Rincian Persediaan Alat Listrik	123
Tabel 64.	Rincian Persediaan Obat-obatan	124
Tabel 65.	Rincian Persediaan Bahan Cetak	125
Tabel 66.	Rincian Persediaan Alat Kebersihan	125
Tabel 67.	Rincian Persediaan Radiologi	126
Tabel 68.	Rincian Persediaan Alat Kesehatan	127
Tabel 69.	Rincian Persediaan Materai	127
Tabel 70.	Rincian Persediaan Bahan Makanan Pokok.....	128
Tabel 71.	Rincian Persediaan Lain-Lain.....	128
Tabel 72.	Investasi Permanen	129
Tabel 73.	Struktur Modal PT. ADS Menurut Perubahan Anggaran Dasar Tanggal 22 Juni 2009	132
Tabel 74.	Struktur Modal PT. ADS Menurut Perubahan Anggaran Dasar Tanggal 31 Januari 2017	132
Tabel 75.	Mutasi Aset Tetap.....	133

Tabel 76.	Penambahan Aset Tanah	134
Tabel 77.	Pengurangan Aset Tanah	135
Tabel 78.	Penambahan Aset Peralatan dan Mesin	137
Tabel 79.	Penambahan Peralatan Dan Mesin Dari Mutasi Aset Antar SKPD.....	138
Tabel 80.	Pengurangan Aset Peralatan Dan Mesin	139
Tabel 81.	Pengurangan Peralatan Dan Mesin dari Mutasi Aset Antar SKPD	140
Tabel 82.	Penambahan Aset Gedung dan Bangunan.....	140
Tabel 83.	Penambahan Aset Gedung dan Bangunan dari Mutasi antar SKPD.....	141
Tabel 84.	Pengurangan Aset Gedung dan Bangunan	141
Tabel 85.	Penambahan Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan.....	143
Tabel 86.	Pengurangan Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan	144
Tabel 87.	Penambahan Aset Tetap Lainnya	145
Tabel 88.	Pengurangan Aset Tetap Lainnya	146
Tabel 89.	Penambahan Aset Konstruksi dalam Pengerjaan	146
Tabel 90.	Pengurangan Aset Konstruksi dalam Pengerjaan	147
Tabel 91.	Rincian Konstruksi dalam Pengerjaan	147
Tabel 92.	Penambahan Aset Lain-Lain dari Reklasifikasi Aset	158
Tabel 93.	Pengurangan Aset Lain-Lain	159
Tabel 94.	Mutasi Kewajiban Jangka Pendek	160
Tabel 95.	Rincian Pendapatan Diterima Di Muka	161
Tabel 96.	Rincian Utang Belanja Pegawai.....	161
Tabel 97.	Rincian Utang Jasa Pelayanan	162
Tabel 98.	Rincian Utang Usaha	162
Tabel 99.	Rincian Utang Belanja Modal.....	164
Tabel 100.	Pendapatan LO	165
Tabel 101.	Pendapatan Pajak Daerah-LO	166
Tabel 102.	Pendapatan Retribusi Daerah-LO	166
Tabel 103.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	167
Tabel 104.	Lain-lain PAD yang Sah-LO	168
Tabel 105.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda lainnya-LO.....	169
Tabel 106.	Beban LO	170
Tabel 107.	Beban Pegawai - LO.....	171
Tabel 108.	Beban Persediaan – LO	174
Tabel 109.	Beban Jasa – LO	178
Tabel 110.	Beban Pemeliharaan – LO	183
Tabel 111.	Beban Perjalanan Dinas – LO	185
Tabel 112.	Beban Hibah – LO	187
Tabel 113.	Beban Bantuan Sosial – LO	188
Tabel 114.	Beban Penyusutan – LO	189
Tabel 115.	Beban Amortisasi – LO	191
Tabel 116.	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih – LO	192

Tabel 117. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi	194
Tabel 118. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi	194
Tabel 119. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi Non Keuangan	195
Tabel 120. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi	195
Tabel 121. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pembiayaan	196
Tabel 122. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pembiayaan	196
Tabel 123. Rincian Pajak Belanja.....	197
Tabel 124. Rincian Selisih Penerimaan dan Pengeluaran UP Bendahara Pengeluaran	197
Tabel 125. Perhitungan Kenaikan/Penurunan Bersih Kas.....	197
Tabel 126. Perhitungan Saldo Awal Kas	198
Tabel 127. Perhitungan Saldo Akhir Kas.....	198
Tabel 128. Rincian Perhitungan Saldo Akhir Kas	198

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Ikhtisar Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes)
- Lampiran 2. Perhitungan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) T.A. 2019

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan, Belanja, Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Realisasi Pendapatan pada Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp4.769.828.177.733,96 atau 93,04% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp5.126.758.095.914,53.

Realisasi Belanja pada Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp3.401.676.515.143,77 atau mencapai 57,50% dari alokasi anggaran sebesar Rp5.916.118.079.759,58.

Realisasi Transfer pada Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.183.391.126.195,00 atau mencapai 96,36% dari anggaran Rp1.228.042.139.835,10.

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2019 adalah Rp2.018.047.974.917,07 atau 100,03% dari estimasi penerimaan Rp2.017.402.123.680,15.

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2019 adalah Rp0,00 atau sebesar 0,00% dari anggaran sebesar Rp0,00.

2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Saldo Anggaran Lebih pada Tanggal 01 Januari 2019 adalah sebesar Rp2.017.402.123.680,15 ditambah Surplus Rp184.760.536.395,19 ditambah pembiayaan netto (dengan SILPA awal terpasang seluruhnya) sebesar Rp2.018.047.974.917,07 sehingga Saldo Anggaran Lebih Akhir Tanggal 31 Desember 2019 adalah senilai Rp2.202.808.511.312,26.

3. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada 31 Desember 2019.

Nilai aset per 31 Desember 2019 dicatat dan disajikan sebesar Rp12.750.710.236.133,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp2.964.096.559.364,67; Investasi Jangka Panjang senilai Rp2.677.011.828.924,29; Aset Tetap (netto) sebesar Rp6.671.922.597.883,12; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp437.679.249.960,90. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp40.465.229.182,46 dan Rp12.710.245.006.950,50.

4. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit LO yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp5.637.608.655.879,84 sedangkan jumlah beban adalah Rp3.317.193.978.947,12 sehingga terdapat surplus dari kegiatan operasi sebesar Rp2.320.414.676.932,72. Kegiatan non Operasional dan Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp26.517.178.730,94 dan (Rp632.000.000,00); sehingga entitas mengalami surplus sebesar Rp2.346.299.855.663,66.

5. LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas adalah memberi informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas dari suatu entitas melalui Laporan Arus Kas yang mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan serta transitoris selama suatu periode akuntansi.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun anggaran 2019 adalah sebesar Rp1.489.485.651.521,57; Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi adalah sebesar (Rp1.304.725.115.126,38); Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan adalah Rp645.993.027,27; Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris adalah Rp26.295.761,65. Sehingga kenaikan kas selama Tahun 2019 adalah Rp185.432.825.184,11.

6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada Tanggal 01 Januari 2019 adalah sebesar Rp8.210.742.208.604,64 ditambah Surplus LO Rp2.346.299.855.663,66 ditambah dampak kumulatif senilai Rp2.153.202.942.682,22 sehingga Ekuitas akhir pada Tanggal 31 Desember 2019 adalah senilai Rp12.710.245.006.950,50.

7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas.

Sedangkan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2019 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019 di samping untuk memenuhi ketentuan yang diatur Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, juga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan informasi bagi para pengguna Laporan Keuangan dalam rangka mengevaluasi kinerja Pemerintah Daerah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran serta penilaian dalam rangka akuntabilitas guna pengambilan keputusan baik ekonomi, sosial maupun politik.

Dengan adanya Laporan Keuangan dapat diperoleh beberapa informasi yang diperlukan, diantaranya:

1. Informasi mengenai kemampuan penerimaan untuk membiayai seluruh pengeluaran dalam satu periode tertentu;
2. Cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Jumlah sumber daya ekonomi yang telah dihasilkan dan digunakan dalam kegiatan pemerintahan serta output yang dihasilkan;
4. Cara pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatan dan mencukupi kebutuhan pembiayaannya;
5. Informasi mengenai posisi keuangan;
6. Informasi tentang perubahan posisi keuangan.

1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro disusun berdasarkan ketentuan yang diatur dalam:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019;
18. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 55 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019;
19. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 32 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019;
20. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 49 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi;
21. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi.

1.3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019 disusun sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan
 - 1.1. Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
 - 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
 - 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
- Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan Dan Pencapaian Target Kinerja APBD
 - 2.1. Ekonomi Makro
 - 2.2. Kebijakan Keuangan
- Bab III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
 - 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
 - 3.2. Klasifikasi Belanja Menurut Fungsi Dan Organisasi
 - 3.3. Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan
- Bab IV Kebijakan Akuntansi
 - 4.1. Entitas Akuntansi Dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
 - 4.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
 - 4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
 - 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan
- Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
 - 5.1. Laporan Realisasi Anggaran
 - 5.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
 - 5.3. Neraca
 - 5.4. Laporan Operasional
 - 5.5. Laporan Arus Kas
 - 5.6. Laporan Perubahan Ekuitas
- Bab VI Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan
- Bab VII Penutup

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PROGRAM PENCAPAIAN
TARGET KINERJA APBD

2.1. EKONOMI MAKRO

Dengan kondisi keuangan negara semakin kondusif dengan ditetapkannya alokasi dana transfer ke daerah pada APBN tahun 2019, kinerja perekonomian Kabupaten Bojonegoro diperkirakan akan terus tumbuh di tahun 2019. Keberhasilan yang telah diraih di tahun 2016 dan 2017 diharapkan akan terulang di tahun 2018 dan 2019, angka optimis ini melebihi apa yang telah diperoleh pada tahun sebelumnya.

Berikut Realisasi dan target indikator kinerja Ekonomi Makro Kabupaten Bojonegoro.

No	Uraian	2018		2019	
		Target	Capaian	Target	Capaian
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	68,09	67,85	68,49	68,75*
2	Angka Kemiskinan (%)	13,98	13,16	13,50	12,38
3	Pertumbuhan Ekonomi:				
	- dengan Migas (%)	10,74	4,40	10,80	6,34**
	- Tanpa Migas (%)	5,60	5,74	5,65	5,39**
4	Inflasi (%)	2,33	2,42	3,60	1,83
5	Indeks Pembangunan Gender	90,12	89,77	90,26	90,42
6	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	3,64	4,19	3,38	3,7
7	Indeks Gini	0,31	0,28	0,32	0,3*

Sumber data: BPS dan Proyeksi Bappeda

Keterangan: * angka sementara

** angka sangat sementara

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bojonegoro dalam 5 tahun terakhir cenderung meningkat tetapi masih dibawah Indeks Pembangunan Manusia Provinsi. Indeks Pembangunan Manusia merupakan indeks yang mengukur pencapaian keseluruhan pembangunan non fisik suatu daerah yang direpresentasikan oleh tiga dimensi yaitu umur panjang, sehat pengetahuan dan kualitas hidup layak. Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2019 sebesar 68,75 meningkat 0,90 % dari IPM Kabupaten Bojonegoro tahun 2018 sebesar 67,85 Artinya angka tersebut merupakan peningkatan capaian IPM tertinggi di Jawa Timur. Hal tersebut menunjukkan pelaksanaan pembangunan yang fokus dalam meningkatkan kapasitas manusia dan modal manusia untuk memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap peningkatan kemampuan dan keterampilan masyarakat Bojonegoro, sehingga mampu bersaing di pasar tenaga kerja nasional dan bahkan internasional.

Selama tahun 2014-2019 persentase penduduk miskin di Kabupaten Bojonegoro mempunyai tren menurun, namun masih lebih besar daripada angka Provinsi dan Nasional. Dibandingkan tahun 2018 Kabupaten Bojonegoro mengalami penurunan 0,78%. Kemiskinan di Bojonegoro didominasi oleh penduduk di wilayah pedesaan dimana sebagian besar dengan mata pencaharian Kepala Rumah Tangga miskin di sektor pertanian. Disamping itu sebagian penduduk miskin usia produktif tidak bekerja. Dan yang paling krusial sebagian besar tingkat pendidikan penduduk miskin adalah Sekolah Dasar dan tidak tamat Sekolah Dasar, problem lainnya adalah masih terbatasnya akses penduduk miskin dan rentan miskin terhadap permodalan, akses pasar, juga belum optimalnya pemberdayaan Masyarakat Ekonomi Mikro dan Kecil.

Angka kemiskinan Kabupaten Bojonegoro tahun 2019 sebesar 12,38% menurun 0,78% dari angka kemiskinan tahun 2018 sebesar 13,16%. Hal tersebut menunjukkan tingkat kemiskinan di Bojonegoro terus berkurang akibat keberhasilan program kegiatan pengentasan kemiskinan yang terus dilaksanakan dan selalu berupaya fokus untuk mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro.

Mencermati pelaksanaan pembangunan selama satu tahun Jabatan Bupati Bojonegoro tahun 2019 telah menunjukkan hasil yang cukup baik, meskipun pada sisi lain harus diakui masih dijumpai beberapa kekurangan serta hasil yang masih belum memenuhi harapan dan perlu peningkatan penanganannya pada tahun mendatang. Dari berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Bojonegoro berkaitan dengan kondisi tersebut di atas, serta berbagai upaya dan kebijakan yang telah dilakukan guna mengantisipasi permasalahan, maka untuk melihat tingkat keberhasilannya, pendekatan pengamatan dilakukan dengan melihat laju pertumbuhan ekonomi, Tingkat Inflasi/Deflasi berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pendapatan Regional Perkapita. Dalam perjalanan selama 1 (satu) tahun anggaran, seiring dengan gerak pemulihan perekonomian nasional, maka pertumbuhan ekonomi di daerah juga memperlihatkan gerak peningkatan yang semakin positif. Berdasarkan *trend* pertumbuhan daerah tahun 2018-2019, serta mempertimbangkan berbagai faktor pendukung yang signifikan terhadap pelaksanaan pembangunan di segala bidang, pertumbuhan ekonomi (dengan Migas) Kabupaten Bojonegoro mengalami *progress* cukup baik, pada tahun 2019 mencapai 6,34%, sedangkan tahun 2018 yang mencapai 4,40%.

Inflasi yang terjadi di Bojonegoro tahun 2019 relatif stabil yaitu sebesar 1,83%, mengalami penurunan dibandingkan dari tahun 2018 sebesar 2,42%. Hal tersebut disebabkan stabilnya harga-harga kebutuhan pokok diseluruh wilayah Bojonegoro. Capaian inflasi Kabupaten Bojonegoro tersebut lebih rendah dari tingkat inflasi Nasional yang mencapai 2,72% dan inflasi Jawa Timur yang mencapai 2,12%.

Indikator utama yang sering digunakan sebagai indikator keberhasilan dalam menangani masalah ketenagakerjaan khususnya pengangguran adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan perbandingan antara jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT Tahun 2019 tercatat sebesar 3,70%, mengalami penurunan 0,49% dari tahun 2018 sebesar 4,19%.

Stabilitas ekonomi wilayah Kabupaten Bojonegoro akan tetap kondusif dalam menarik investor di Kabupaten Bojonegoro. Dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan tingkat inflasi yang terkendali diharapkan iklim usaha di Kabupaten Bojonegoro mampu membawa kondisi ekonomi menuju ke kondisi yang lebih baik. Sektor perbankan diharapkan terus meningkatkan dukungannya kepada sektor UMKM dengan fasilitasi dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui bantuan keuangan dan kredit usaha dengan bunga terjangkau diharapkan mampu memenuhi kebutuhan permodalan bagi sektor riil. PDRB Kabupaten Bojonegoro diprediksi mengalami peningkatan cukup signifikan meski terdapat sedikit fluktuasi di beberapa sektor, namun di tahun 2019 diprediksi mengalami peningkatan tajam karena didorong oleh sektor pertambangan, industri dan konstruksi menunjukkan semakin berkembangnya perekonomian di Kabupaten Bojonegoro.

Dalam penetapan prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2019, selain berpedoman pada pencapaian target kinerja RPJPD Kabupaten Bojonegoro 2005-2025 dan RPJMD Tehnokratik 2019-2023, penetapan prioritas pembangunan juga dilakukan dengan mempertimbangkan rencana pembangunan Nasional yang tercantum dalam RKP Tahun 2019 dan RKP Provinsi Jawa Timur Tahun 2019. Secara detail prioritas pembangunan Kabupaten Bojonegoro tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Menurunnya tingkat kemiskinan
 - a. Menurunnya jumlah masyarakat di bawah garis kemiskinan
 - b. Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi dengan Migas dan Tanpa Migas
 - c. Meningkatnya PDRB per kapita
 - d. Meningkatnya peran KUMKM dalam pengembangan ekonomi lokal
 - e. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk
2. Menurunnya tingkat pengangguran
 - a. Berkurangnya jumlah pengangguran
 - b. Meningkatnya kesempatan dan penyediaan lapangan kerja
3. Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat
 - a. Meningkatnya pembinaan sosial dan partisipasi sosial masyarakat
 - b. Terwujudnya pembangunan yang berkesetaraan gender
4. Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat
 - a. Meningkatnya jumlah masyarakat yang melek huruf
 - b. Meningkatnya rata-rata lama sekolah
 - c. Meningkatnya angka partisipasi murni setiap jenjang pendidikan
5. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
 - a. Meningkatnya angka harapan hidup
 - b. Meningkatnya status gizi masyarakat
 - c. Menurunnya angka kematian bayi
 - d. Menurunnya angka kematian ibu
6. Berkembangnya sektor migas yang ramah lingkungan dan berkelanjutan
 - a. Meningkatnya produksi migas yang memberi kontribusi bagi perekonomian daerah
 - b. Meningkatnya multiplier effect terbanggunnya industri lain sebagai dampak eksplorasi migas
7. Berkembangnya agrobisnis terpadu
 - a. Meningkatnya produktivitas sektor pertanian yang mendukung pengembangan agrobisnis
 - b. Meningkatnya pendapatan petani
8. Terwujudnya Bojonegoro sebagai pusat kesehatan bagi wilayah sekitarnya
 - a. Meningkatnya mutu layanan rumah sakit dan perlindungan serta keselamatan pasien
9. Terwujudnya Bojonegoro sebagai pusat pendidikan bagi wilayah sekitarnya
 - a. Berkembangnya pendidikan vakasional sesuai dengan unggulan wilayah
10. Meningkatnya pemerataan pembangunan dan layanan infrastruktur wilayah yang meliputi: infrastruktur jalan, infrastruktur jembatan, infrastruktur irigasi, penerangan umum, dan perumahan.
 - a. Meningkatnya penyediaan infrastruktur transportasi yang menghubungkan seluruh wilayah dan mendukung pergerakan orang dan barang
 - b. Terpenuhinya kebutuhan pengairan irigasi yang mendukung peningkatan produksi pertanian
 - c. Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan ketenagalistrikan
 - d. Meningkatnya kemampuan masyarakat menghuni rumah layak huni
11. Terjaganya kebersihan dan kelestarian lingkungan
 - a. Berkurangnya tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan
 - b. Terciptanya lingkungan yang bersih dari sampah
 - c. Terwujudnya penataan dan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan
12. Meningkatnya pengelolaan bencana alam
 - a. Berkurangnya resiko bencana alam
 - b. Meningkatnya penanganan korban bencana alam skala kabupaten

13. Terwujudnya organisasi, ketatalaksanaan dan sumber daya aparatur yang bersih dan berwibawa
 - a. Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang prima, transparan dan akuntabel
 - b. Meningkatnya kinerja sumber daya aparatur
14. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan
 - a. Meningkatnya penerapan perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan terpadu
 - b. Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel
 - c. Meningkatnya pembangunan dan pembinaan hukum
 - d. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
 - e. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pembangunan

Selain itu, konsistensi program prioritas pembangunan kabupaten dengan prioritas nasional tahun 2019 dapat diuraikan sebagai berikut:

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN	INDIKATOR DAN TARGET
1	2	3	4
1	Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan Peningkatan Pelayanan Dasar	1 Program Pengembangan Perumahan / Persentase masyarakat Kabupaten Bojonegoro yang memiliki rumah layak huni (%) dan jumlah backlog rumah di Kabupaten Bojonegoro (Unit)	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu / Jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) yang dibangun 583 Unit
		2 Program Pembangunan Saluran Drainase (Gorong-gorong) / lama dan luasan genangan banjir (jam dan m ²)	Pembangunan Saluran Drainase (Gorong-gorong) / Panjang Saluran Drainase (Gorong-gorong) yang dibangun 13.000 m
		3 Program Rehabilitasi (pemeliharaan) saluran drainase (gorong-gorong) / lama dan luasan genangan banjir (jam dan m ²)	Rehabilitasi (pemeliharaan) saluran drainase (gorong-gorong) / Panjang Saluran Drainase (Gorong-gorong) yang direhab (dipelihara) 280 m
		4 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan / Jumlah infrastruktur perdesaan (air bersih dan pasar desa) yang terbangun (Paket)	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan / Jumlah Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan yang dibangun 18 Unit
		5 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan / Jumlah infrastruktur perdesaan (jalan lingkungan) yang terbangun (Paket)	Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk Perdesaan / panjang jalan lingkungan yang terbangun 3.300 m
		6 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan/Tingkat elektrifikasi di Kabupaten Bojonegoro (%)	Pembangunan Instalasi Jaringan Listrik Pedesaan / Jumlah dusun gelap yang dibangun listrik 6 Dusun
		7 Program Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan / Menurunnya tingkat kecelakaan dan kejahatan lalu lintas (%)	Penerangan Jalan Umum (PJU) / Jumlah PJU yang dibangun 636 titik
		8 Program Pendidikan anak usia dini	Pengembangan PAUD BOP TK Negeri

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN	INDIKATOR DAN TARGET
1	2	3	4
		9 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Penambahan Ruang Kelas Sekolah
			Penambahan Ruang Guru
			Pembangunan Taman Lapangan Upacara dan fasilitas parkir SD
			Rehab Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
			Penyelenggaraan Kejar Paket A
			Penyelenggaraan Kejar Paket B
		10 Program Pendidikan Menengah	Pembangunan Taman Lapangan Upacara dan fasilitas parkir SLTP
			Pengadaan Alat Parkir dan Peraga Siswa
			Rehab Sedang Berat Ruang Guru Sekolah
		11 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Pembangunan Puskesmas dan sarana penunjang gedung puskesmas 10 Unit
			Pembangunan Puskesmas Pembantu dan sarana penunjang gedung Pustu 12 Unit
			Pengadaan Puskesmas Keliling 9 Unit
			Rehabilitasi Sedang / Berat Puskesmas Pembantu 15 Unit
			Pembangunan Gedung dan sarana penunjang gedung Pondok Bersalin Kelurahan 4 Unit
			Rehabilitasi Sedang /Berat Puskesmas 10 Unit
			Rehabilitasi Sedang / Berat Polindes 10 Unit
		12 Program pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas adat terpencil (KAT) dan PMKS Lainnya	Rehab rumah tidak layak huni sejumlah 250 rumah
			Stimulan UEP pada Wanita Rawan Sosial Ekonomi sebanyak 200 paket
			Stimulan UEP pada Fakir Miskin sebanyak 400 paket
		13 Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Pemberdayaan Lansia Miskin sebanyak 50 paket
		14 Program pembinaan dan pelatihan para penyandang cacat dan trauma	Stimulan pada penyandang cacat tubuh sebanyak 100 paket
			Stimulan pada keluarga penyandang cacat berat (mampu rawat) sebanyak 25 paket
		15 Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan Sosial	Stimulan KUBE UEP Kreatif pada Karang Taruna yang sudah mempunyai embrio usaha sebanyak 25 Desa

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN	INDIKATOR DAN TARGET
1	2	3	4
		16 Program Pembinaan dan pemasyarakatan Olah Raga	Pelatihan Instruktur Senam Kesegaran Jasmani dan Rekreasi kepada 340 peserta
			Pemberian Bantuan peralatan olah raga Bola Volly, sepak bola dan futsal kepada 28 klub
		17 Program Peningkatan upaya pertumbuhan dan Kecakapan hidup pemuda	Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda desa/kelurahan dengan target 172 peserta
		18 Program Pengautan Kelembagaan dan Bina Lini Lapangan	Peningkatan Jumlah Kampung KB aktif di 28 Kecamatan
			Pembangunan Balai Penyuluhan KB dan Balai Pertemuan Keluarga di 1 lokasi
2	Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Melalui Penguatan Konektivitas Dan Kemaritiman	1 Program pembangunan jalan dan jembatan (jalan kondisi baik, jembatan kondisi baik)	Terbangunnya jalan kabupaten sepanjang 1.50 Km
			Terbangunnya jembatan sebanyak 50 unit
		2 Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (jalan kondisi baik)	Terbangunnya saluran drainase/gorong-gorong sepanjang 9.45 Km
		3 Program pembangunan turap/talud/bronjong (jalan kondisi baik)	Terbangunnya turap/talud/bronjong 14. Sepanjang 74 Km
		4 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan (jalan kondisi baik, jembatan kondisi baik)	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan sepanjang 20.00 Km
			Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan sebanyak 30 unit
			Pemeliharaan rutin jalan dan sarana prasarana pendukungnya wilayah I (jalan yang dilakukan pemeliharaan)
			Pemeliharaan rutin jalan dan sarana prasarana pendukungnya wilayah II (jalan yang dilakukan pemeliharaan)
			Pemeliharaan rutin jalan dan sarana prasarana pendukungnya wilayah III (jalan yang dilakukan pemeliharaan)
			Pemeliharaan rutin jalan dan sarana prasarana pendukungnya wilayah IV (jalan yang dilakukan pemeliharaan)
			Pemeliharaan rutin jalan dan sarana prasarana pendukungnya wilayah V (jalan yang dilakukan pemeliharaan)
			Pemeliharaan rutin jalan dan sarana prasarana pendukungnya wilayah VI (jalan yang dilakukan

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN	INDIKATOR DAN TARGET
1	2	3	4
			pemeliharaan)
			Pemeliharaan rutin jalan dan sarana prasarana pendukungnya wilayah VII (jalan yang dilakukan pemeliharaan)
			Pemeliharaan rutin jalan dan sarana prasarana pendukungnya wilayah VIII (jalan yang dilakukan pemeliharaan)
			Pemeliharaan rutin jalan dan sarana prasarana pendukungnya wilayah IX (jalan yang dilakukan pemeliharaan)
			Pemeliharaan rutin jalan dan sarana prasarana pendukungnya wilayah X (jalan yang dilakukan pemeliharaan)
			Pemeliharaan rutin jalan dan sarana prasarana pendukungnya wilayah XI (jalan yang dilakukan pemeliharaan)
		5 Program pembangunan infrastruktur perdesaan (jalan kondisi baik)	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan (terbangunnya jalan kabupaten 9 Km)
		6 Program peningkatan jalan (jalan kondisi baik)	Peningkatan jalan (jalan yang dilakukan peningkatan 30.00 Km)
3	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi Melalui Pertanian, Industri dan Jasa Produktif	1 Program pengembangan industri kecil dan menengah	Bimbingan teknis sentra/Perusahaan kepada 30 IKM
			Pelatihan pola magang bagi pelaku kepada 10 IKM
			Pengurusan sertifikasi HAKI produk kepada 20 IKM
			Temu bisnis pelaku kepada 60 IKM
			Workshop klaster IKM pada produk unggulan kabupaten kepada 30 IKM
		2 Program pengembangan industri kecil dan menengah, outcome meningkatnya kualitas produk IKM	Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya (Pelatihan diversifikasi olahan makanan minuman diikuti oleh 150 peserta)
		3 Program pengembangan industri kecil dan menengah, outcome memperluas pasar dan pengenalan produk	Kegiatan promosi melalui pameran dari berbagai even tingkat nasional, regional dan lokal
			Pameran nasional diikuti oleh 10 IKM (Jakarta)
			Pameran regional diikuti oleh 20 IKM (Surabaya, Yogyakarta)
			Pameran lokal 36 IKM (Bojonegoro)

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN	INDIKATOR DAN TARGET
1	2	3	4
			Penjajakan pangsa pasar, diikuti oleh 4 IKM (Bali dan Bandung)
			Pemasaran melalui digital marketing diikuti oleh 4 IKM (Jakarta)
		4 Program pengembangan industri kecil dan menengah, outcome mengoptimalkan pemanfaatan limbah kayu	Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat
			Pelatihan peningkatan mutu produk dan pemanfaatan limbah kayu jati, diikuti oleh 180 peserta
			Pelatihan aneka kerajinan hasil hutan, diikuti oleh 180 peserta
			Pelatihan pembuatan makanan ringan, diikuti oleh 120 peserta
			Pelatihan peningkatan mutu dan finishing produk diikuti oleh 120 peserta
		5 Program peningkatan kemampuan teknologi industri	Pembinaan kemampuan teknologi industri 30 IKM
			Bantuan mesin/Peralatan pengolahan IKM pada produk unggulan 30 IKM
			Pelatihan perbengkelan bodi repair kendaraan roda 2 dan roda 4, 30 peserta
		6 program pengembangan sentra-sentra industri potensial	Pembinaan sentra potensial 30 peserta
			Pengembangan sarana dan prasarana produk IKM 30 peserta
			Sosialisasi dan pelatihan pengolahan limbah industri dalam menjaga kelestarian kawasan 30 peserta
			Study pengembangan sentra produk unggulan kerajinan rakyat 1 sentra
			Penumbuhan sentra produk unggulan kerajinan rakyat 2 sentra
			Penyediaan display promo produk IKM 1 ruang
		7 Program pengembangan 16 subsektor industri kreatif	Temu komunikasi kreatif dengan stakeholder dan shareholder 30 IKM
			Fasilitasi pengembangan mutu dan desain produk industri kreatif 30 IKM
			Penyelenggaraan even-even kreatif 1 kegiatan
		8 Program peningkatan kemitraan industri dengan berbagai pelaku	Temu pelaku IKM stakeholder dan shareholder 30 ikm

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN	INDIKATOR DAN TARGET
1	2	3	4
		ekonomi	
			Fasilitasi kerjasama IKM dengan BUMN, BUMD dan BUMS 30 industri kreatif
		9 Peningkatan kualitas produk IKM industri, outcome meningkatnya mutu dan kapasitas produksi	Fasilitasi dan pembinaan dalam pengembangan industri (Pelatihan peningkatan mutu mie lidi diikuti oleh 30 peserta)
			Pelatihan olahan berbahan baku industri , diikuti oleh 120 peserta
		10 Peningkatan standarisasi industri, outcome meningkatnya produk dan IKM yang terstandarisasi	Fasilitasi sertifikat halal untuk 30 IKM Fasilitasi barcode untuk 4 IKM Fasilitasi merk untuk 10 IKM
		11 Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja	Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi pencari kerja
			Pelatihan kerja non sertifikasi (wira usaha), Terlaksananya Pelatihan PHP sebanyak 25 orang
			Pelatihan bersertifikasi Kompetensi, Terlaksananya pelatihan Operator komputer bersertifikasi 20 orang
		12 Peningkatan Kesempatan Kerja	Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Kegiatan Padat Karya yang dapat mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah (padat karya infrastruktur) di 3 lokasi
		13 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Bimtek penyakit hewan menular (PHM), 100 orang Bimtek manajemen kesehatan reproduksi hewan, 50 Orang
			Pembinaan lalu lintas dan tata niaga hewan dan produk hewan, 50 Orang
			Bimtek pengembalian hewan yang halal, 150 orang
			Bimtek penanganan produk hewan, 150 orang
			Pembinaan peredaran obat hewan , 30 Orang
		14 Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Pembinaan usaha pembenihan rakyat (UPR : 10 Kelompok)
			Pembinaan kelompok : 5 Kelompok
			Pendampingan kelompok : 50 Kelompok

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN	INDIKATOR DAN TARGET
1	2	3	4
			Edukasi perikanan : 1.200 Siswa
			Temu usaha perikanan : 100 Orang
			Pembinaan UPP : 4 paket
			Pembinaan kelompok penerima paket budidaya ikan APP : 6 Kelompok
			Bimtek budidaya ikan : 10 Paket
			Operasional UPT BBI : 1 Paket
			Sarana dan prasarana : 1 Paket UPT Balai Benih Ikan
		15 Program pengembangan perikanan tangkap	Bantuan alat tangkap ikan : 10 Paket
			Penebaran benih ikan di perairan umum
			Pembinaan kelompok usaha bersama (KUB) : 10 Kelompok
			Pembinaan kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas)
			Papan larangan penangkapan ikan dengan bahan beracun : 10 Unit
		16 Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Bimtek olahan ikan : 200 Orang
			Lomba masakan menu ikan : 28 Tim Penggerak PKK Kecamatan
			Pembinaan kelompok pengelola dan pemasar ikan (Pohlahsar)
			Pembinaan pemasaran perikanan : 10 kelompok
		17 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Penyuluhan ternak kambing / domba, 240 Orang
			Bimtek pencegahan penyakit hewan, 100 orang
			Pelatihan pembuatan pakan ternak, 240 Orang
			Pelatihan temu usaha, 50 orang
			Pelatihan pembuatan nuggett, bakso, abon ayam, 400 Orang
			Pembinaan kelompok peternak kambing/domba, 200 Orang
			Pembinaan bagi kelompok penerima bantuan ternak dan calon penerima bantuan sebanyak 100 orang
			Bimtek pengembangan HPT 150 Orang, Rp. 250.000/Orang
			Uji Laboratorium mutu pakan ternak 30 Sampel @ Rp. 300.000

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN	INDIKATOR DAN TARGET
1	2	3	4
			Workshop 100 Orang
			Sinkronisasi Birahi 250 ekor
			PKB 1.000 ekor
		18 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Pelaksanaan lomba-lomba komoditas peternak, 500 peserta
			hasil data komoditas peternakan 1 paket
		19 Program Peningkatan Produksi Peternakan	Uji Performance : 360 ekor
			Pelatihan teknologi peternakan tepat guna (pengolahan limbah ternak mejadi energi /Biogas) 180 orang
			Penyuluhan pengolahan limbah ternak, 240 Orang
			Pembinaan kelembagaan Peternak di 4 kecamatan
			Bimtek penggunaan Alat dan mesin peternakan : 240 Orang @ Rp. 205.000
			Bimtek penyediaan bahan pakan ternak berkualitas : 240 Orang @ Rp. 205.000
		20 Program peningkatan kesejahteraan petani	Pengembangan jalan pertanian (10.281 meter Jalan Usaha Tani)
		21 Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan)	Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian (4 unit power thresher multiguna, 2 unit gudang bawang merah)
			Pengembangan intensifikasi tanaman padi palawija (bibit padi in hibrida 25.000kg, bibit padi hibrida 4.500 kg, bibit jagung hibrida 6.750 kg)
			Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian (200 unit rumah burung hantu, 100 unit pressure sprayer)
		22 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna (26 unit cultivator untuk bawang merah dan hortikultura)
			Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna (bibit bawang merah umbi 2.140 kg, bibit bawang merah biji 10 kg)
			Pengembangan budidaya ketela sebagai bahan baku mocaf (200.000 batang bibit ubi kayu)
		23 Program peningkatan produksi	Penyediaan sarana produksi

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN	INDIKATOR DAN TARGET
1	2	3	4
		pertanian/perkebunan	pertanian/perkebunan (7.920 meter JITUT/JIDES, 35 paket sumur bor dangkal/dalam)
		24 Program peningkatan kualitas bahan baku	Kegiatan standarisasi kualitas bahan baku melalui pemupukan berimbang (15.000 kg pupuk ZK (non Subsidi) untuk tembakau)
			Standarisasi kualitas bahan baku melalui bantuan sarana produksi (68 unit cultivator, 120 pressure sprayer, 8 unit alat angkut roda 3 untuk kegiatan tembakau)
		25 Program Pengembangan Sistem Pendukung Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Pelaksanaan bimtek tentang ketrampilan untuk pengembangan koperasi. Peserta : 250 Kopwan.
			Pelaksanaan bimtek kewirausahaan. Peserta : 200 pelaku Usaha.
		26 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi kepada 200 koperasi
			Pelatihan kursus basic computerbagi pengurus / pengelola Koperasi. Peserta : 150 Koperasi
			Revitalisasi Koperasi kepada 200 Koperasi
			Penertiban KJK/UJKS. Peserta : 50 Koperasi.
		27 Program Penciptaan Iklim Usaha Mikro yang Kondusif	Pelatihan ketrampilan dalam rangka menumbuhkan wirausaha baru sebanyak 160 calon wira usaha baru
		28 Program Perencanaan Tata Ruang (Tersedianya substansi muatan RTRW yang berkualitas untuk bahan draft Perda)	Pendampingan Persetujuan Muatan Substansi RTRW (Persetujuan substansi muatan RTRW dan dokumen kajian lingkungan hidup strategis RTRW)
			Pengolahan Peta Citra Satelit (Peta dasar yang dihasilkan dari pengolahan citra satelit)
			Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang (Perencanaan Tata Ruang Desa sesuai dengan pedoman peraturan yang ada)
		29 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang (terwujudnya pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Bojonegoro)	Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang (Tersusunnya dokumen intensitas pemanfaatan ruang)
		30 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang (terwujudnya pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Bojonegoro)	Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang (Terlaksananya Sosialisasi Pengendalian pemanfaatan ruang)
		31 Program Penataan Lingkungan /	Kegiatan Pengendalian dan

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN	INDIKATOR DAN TARGET
1	2	3	4
		Persentase lingkungan yang tertata dengan baik (%)	pemberdayaan kawasan kumuh / Jumlah kawasan kumuh yang dikendalikan dan diberdayakan 2 Lokasi
		32 Program Lingkungan Sehat perumahan / Persentase masyarakat yang terlayani sarana prasarana sanitasi dasar (%)	Kegiatan penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin / Jumlah sarana dan prasarana sanitasi dasar yang terbangun 552 unit jamban dan 5 unit MCK
		33 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Optimalisasi pemanfaatan pekarangan (Kawasan Rumah Pangan Lestari) sebanyak 10 Desa
			Optimalisasi pemanfaatan pekarangan (Karangkitri) sebanyak 28 Desa
			Pelatihan Olah Non-Beras sebanyak 5 Desa
			Pembinaan tentang Keberagaman Pangan, Berimbang dan Aman (B2SA) sebanyak 5 Desa
			Pembinaan Manajemen Lumbung Pangan Desa sebanyak 17 Desa
			Penguatan cadangan pangan desa (bantuan keuangan mesin pengering gabah) sebanyak 5 Desa
			Penanganan Daerah Rawan Pangan untuk Balita dari keluarga miskin kurang gizi di 7 Desa
4	Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumberdaya air melalui pelestarian lingkungan	1 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Ke Bina Margaan	Rehab dan Pemeliharaan alat-alat berat sebanyak 21 unit
		2 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Pembangunan Saluran Irigasi sepanjang 1,4 km
		3 Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya	pembangunan embung, dan bangunan penampung air lainnya dengan volume 175.000 m3
			peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau dan sumber daya air lainnya 3 kali
		4 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa dengan volume 14.400 m3
			Rehabilitasi prasarana pengambilan dan saluran pembawa dengan volume 14.400 m3
		5 Program Pengendalian Banjir	Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai sepanjang 40 km
5	Stabilitas Keamanan Nasional Dan	1 Program pengembangan wawasan kebangsaan	mengadakan sosialisasi/seminar/diskusi

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN	INDIKATOR DAN TARGET
1	2	3	4
	Kesuksesan Pemilu Dalam rangka mendukung prioritas nasional		wawasan kebangsaan kepada 200 peserta
			Pengembangan wawasan kebangsaan kepada 5 lembaga/organisasi
			menunjang Forum Pembaharuan Kebangsaan di 28 kecamatan
		2 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Penyelenggaraan diskusi/dialog wawasan kebangsaan bersama 150 lembaga
			Penyelenggaraan cerdas cermat wawasan kebangsaan dengan peserta 60 sekolah
			Penyelenggaraan sarasehan HAM bersama 125 lembaga
		3 Program pendidikan politik masyarakat	Mengadakan penyuluhan politik ke masyarakat
			melaksanakan diskusi politik dengan peserta 600 orang
			Penyelenggaraan desk Pileg dan Pilpres
			Penyebarluasan Informasi Kesbangpol melalui Media sebanyak 6 kali
		4 Program Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	penyelenggaraan sarasehan penanggulangan potensi konflik dengan peserta 100 orang
			pelaksanaan kajian permasalahan strategis daerah sebanyak 12 kali
		5 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	menyiapkan tenaga pengendalian keamanan sebanyak 170 orang
			mengadakan pelatihan pengendali keamanan sebanyak 3 kali
			mengadakan operasi kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat yang terlaksana sebanyak 24 kali
			menyiapkan biaya untuk tenaga honorer Satpol PP sebanyak 25 orang
		6 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Pengendalian kegiatan polisi pamong praja
			mengadakan kegiatan kerjasama penanganan tindak kriminal
		7 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	mengadakan pembinaan utk menjaga ketertiban lingkungan kepada 50 orang

2. 2. KEBIJAKAN KEUANGAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumberdaya yang tersedia, mengalokasikan sumberdaya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah daerah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik sesuai ketentuan. Oleh karena itu pengaturan anggaran merupakan hal penting agar dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan antara lain:

- a. Kebijakan anggaran memberikan arah kebijakan perekonomian dan menggambarkan secara tegas penggunaan sumberdaya yang dimiliki masyarakat;
- b. Mencapai keseimbangan ekonomi makro dalam perekonomian;
- c. Melakukan evaluasi dan pengendalian untuk mengurangi ketimpangan dan kesenjangan dalam berbagai hal di daerah.

Karena APBD menggambarkan besarnya kemampuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Daerah, maka untuk memenuhi tingkat kebutuhan yang cenderung terus meningkat, perlu dilakukan pendekatan dalam menyusun skala prioritas pada setiap kebijakan.

2.2.1. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

2.2.1.1. PENDAPATAN DAERAH

Untuk mengoptimalkan sumber penerimaan daerah diperlukan strategi pengelolaan keuangan daerah yang bertumpu pada peningkatan kemampuan keuangan daerah dengan menggali potensi sumber pendapatan daerah yang merupakan pendapatan asli daerah. Untuk mendorong implementasi otonomi daerah dengan desentralisasi keuangan, daerah dapat membiayai pembangunan daerah dengan pendapatan asli daerah yang didapat dari prakarsa dan kreativitas daerah dengan prinsip tidak menjadikan masyarakat sebagai obyek untuk meningkatkan pendapatan daerah sehingga pembangunan yang dilaksanakan akan semakin kuat dan yang lebih penting terbentuknya kemandirian keuangan yang bersumber dari kekuatan sendiri dan keberpihakan kepada masyarakat.

Kebijakan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro dalam APBD Tahun 2019 yang telah dirumuskan, antara lain:

1. Intensifikasi pemungutan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah
2. Ekstensifikasi yang merupakan penggalian potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang baru
3. Meningkatkan intensitas pengawasan untuk memperkecil tingkat kebocoran penggunaan keuangan daerah
4. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi untuk perhitungan perolehan dana perimbangan (DAU, DAK, Bagi hasil Pajak/Bukan Pajak)

Target Pendapatan dapat diperoleh dengan mengoptimalkan seluruh potensi-potensi sumber keuangan dengan intensifikasi perolehan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang meliputi intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta mengoptimalkan kinerja perusahaan daerah untuk memaksimalkan bagian laba perusahaan daerah. Selain itu perolehan dana perimbangan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dalam rangka perhitungan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak, serta Dana Perimbangan lainnya.

Berikut implementasi kebijakan terkait Pendapatan Daerah dalam APBD Kabupaten Bojonegoro tahun 2019:

2.2.1.1.1. **PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**

Dalam penetapan target pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

(1) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:

- (a) Berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
- (b) Penetapan Pajak Daerah dan Retribusi daerah harus didasarkan pada potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2019 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya.
- (c) Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah melakukan kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah. Penentuan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta pengawasan penyetorannya.
- (d) Pendapatan yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
- (e) Pendapatan yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Rokok, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
Pelayanan kesehatan masyarakat yang didanai dari pajak rokok mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. Dalam rangka mendukung pendanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pemerintah daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari alokasi pelayanan kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016.
- (f) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
- (g) Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan Izin

Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal dan diatur dalam peraturan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012.

- (h)) Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012.
 - (i)) Retribusi pelayanan kesehatan yang bersumber dari hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan-Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan.
 - (j)) Tidak melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang sebagaimana maksud Pasal 286 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 - (k)) Tidak menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, dan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor sebagaimana maksud Pasal 7 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- (2)) Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memperhatikan potensi penerimaan Tahun Anggaran 2019 dengan memperhatikan rasionalitas nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah. Pengertian rasionalitas dalam konteks hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan:
- (a)) Bagi perusahaan daerah yang menjalankan fungsi pemupukan laba (*profit oriented*) adalah mampu menghasilkan keuntungan atau deviden dalam rangka meningkatkan PAD;
 - (b)) Bagi perusahaan daerah yang menjalankan fungsi kemanfaatan umum (*public service oriented*) adalah mampu meningkatkan baik kualitas maupun cakupan layanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (3)) Lain-lain PAD Yang Sah:
- (a)) Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang non permanen, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah, obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir, rincian obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat Penerima.
 - (b)) Pendapatan bunga atau jasa giro dari dana cadangan, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang

Sah, obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan, rincian obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan sesuai peruntukannya.

- (c) Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang belum menerapkan PPK-BLUD, dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah, obyek Dana Kapitasi JKN pada FKTP, rincian obyek Dana Kapitasi JKN pada masing-masing FKTP dengan mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014 Hal Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah.
- (d) Pendapatan atas denda pajak daerah dan retribusi daerah dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek sesuai kode rekening berkenaan.
- (e) Pendapatan dari pengembalian dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek sesuai kode rekening berkenaan.

2.2.1.1.2. DANA PERIMBANGAN

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan perimbangan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH):
 - (a) Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2019.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2019 belum ditetapkan, maka penganggaran pendapatan dari DBH-Pajak didasarkan pada tren realisasi pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2015. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2019 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 ditetapkan, maka akan dilakukan penyesuaian alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.
 - (b) Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai

Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2019. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT Tahun Anggaran 2019 belum ditetapkan, maka penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada tren realisasi pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2015.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT Tahun Anggaran 2019 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

- (c) Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA) yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-Perikanan, DBH-Minyak Bumi, DBH-Gas Bumi, dan DBH-Pengusahaan Panas Bumi dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2019.

Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA di luar Dana Reboisasi Tahun Anggaran 2019 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2018, pendapatan lebih tersebut dianggarkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

- (d) Pendapatan DBH-Pajak, DBH-CHT dan DBH-SDA untuk daerah induk dan daerah otonom baru karena pemekaran, didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2)) Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU):

DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2018. Apabila Peraturan Presiden ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

- (3)) Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK):

DAK dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2019 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau sebelum adanya informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2019 yang

dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, maka penganggaran DAK langsung ditampung dalam mekanisme pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019. Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2019 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 ditetapkan, maka penganggaran DAK akan dilakukan penyesuaian pada perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2019 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD tahun anggaran 2019.

2.2.1.1.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

(1) Dana Otonomi Khusus dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2019. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2019 belum ditetapkan, maka penganggaran Dana Otonomi Khusus tersebut didasarkan pada alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2018 dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2017.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2019 tersebut ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 ditetapkan, maka akan dilakukan penyesuaian dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

(2) Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2019. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2019 belum ditetapkan, penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi tersebut didasarkan pada penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2018 dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2017. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2019 tersebut ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 ditetapkan, maka akan disesuaikan dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD

Tahun Anggaran 2019 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

- (3) Pendapatan Hibah Dana BOS yang diterima langsung oleh Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan pada APBD Tahun Anggaran 2019, mekanisme pencatatan dan pengesahan dana BOS dimaksud dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), Akun Pendapatan, Kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, Jenis Hibah, Obyek Hibah Dana BOS, Rincian Obyek Hibah Dana BOS masing-masing Satuan Pendidikan Negeri sesuai dengan kode rekening berkenaan. Selanjutnya, terhadap sisa dana BOS Tahun Anggaran 2018 termasuk sisa dana BOS pada satuan pendidikan negeri yang diselenggarakan akibat lebih salur yang telah ditransfer oleh pemerintah provinsi, diperhitungkan pada APBD Provinsi Tahun Anggaran 2019. Terhadap sisa Dana BOS Tahun Anggaran 2018 termasuk sisa Dana BOS pada Rekening Kas Umum Daerah Provinsi akibat belum disalurkan pada Tahun Anggaran 2018 ke rekening satuan Pendidikan Dasar Negeri yang diselenggarakan pemerintah daerah, maka akan diperhitungkan pada APBD provinsi Tahun Anggaran 2019.
- (4) Dana desa dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019 belum ditetapkan, maka penganggaran Dana Desa tersebut didasarkan pada penganggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2018. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan dana desa dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.
- (5) Pendapatan yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2019. Dalam hal penetapan APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2019 mendahului penetapan APBD provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2019, penganggarnya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2018 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2017, sedangkan bagian pemerintah daerah yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2018, ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

- (6)) Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi dianggarkan dalam APBD penerima bantuan, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

- (7)) Pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud. Untuk kepastian pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah daerah lainnya tersebut didasarkan pada perjanjian hibah antara Kepala Daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku pemberi dengan Kepala Daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku penerima, sedangkan untuk penerimaan hibah yang bersumber dari pihak ketiga juga didasarkan pada perjanjian hibah antara pihak ketiga selaku pemberi dengan Kepala Daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku penerima. Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut di atas dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan masing-masing nama pemberi hibah sesuai kode rekening berkenaan.

- (8)) Dalam hal pemerintah daerah memperoleh dana darurat dari pemerintah maka dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan Dana Darurat.

Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 296 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pendapatan dana darurat dapat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2019. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2019 ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menganggarkan dana darurat dimaksud dengan

terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019. Bagi daerah kabupaten/kota yang memperoleh pendapatan berasal dari bonus produksi perusahaan panas bumi, sesuai dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Besaran dan Tata Cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi, dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan Yang Sah, jenis bonus produksi dari perusahaan panas bumi yang diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek pendapatan berkenaan.

2.2.1.2. UPAYA-UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENCAPAI TARGET PENDAPATAN

(a) Pendapatan Asli Daerah

Upaya pencapaian target Pendapatan Asli Daerah pada prinsipnya diarahkan pada peningkatan pendapatan daerah yang dilaksanakan dengan 3 (tiga) fokus, yaitu :

- 1) Bidang Pendapatan
 - (a) Perluasan dan peningkatan sumber penerimaan dan pembiayaan daerah serta mendorong peningkatan tertib administrasi keuangan daerah
 - (b) Peningkatan hubungan kerjasama dengan pemerintah provinsi/ BUMD dalam rangka peningkatan penerimaan bagi hasil dari pemerintah provinsi/BUMD
 - (c) Pengembangan fasilitasi kerjasama dengan pemerintah provinsi/ pemerintah pusat dibidang pajak dan retribusi daerah serta lain-lain pendapatan yang sah
 - (d) Optimalisasi pemanfaatan aset dan pengelolaan BUMD yang didukung oleh sistem evaluasi kinerja yang dioptimalkan maupun dilakukan restrukturisasi
- 2) Bidang Pelayanan Publik
 - (a) Meningkatkan kualitas layanan publik melalui pengembangan/ peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kebutuhan dasar masyarakat.
 - (b) Pembangunan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat
 - (c) Meningkatkan kualitas pelayanan, dengan pemanfaatan teknologi informasi (hardware dan software) sebagai pendukung utama kualitas kinerja
- 3) Bidang Kelembagaan
 - (a) Penyederhanaan Peraturan Perundang-undangan
 - (b) Pengembangan manajemen pengelolaan pendapatan daerah dengan prinsip profesionalisme, efisiensi, transparan dan bertanggung jawab
 - (c) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Sumber Daya Aparatur dibidang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - (d) Program Rekrutmen Sumber Daya Manusia Aparatur berbasis Kompetensi

(b) Dana Perimbangan

- 1) Memperjuangkan redistribusi penerimaan dari Pemerintah Pusat ke Daerah di luar Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), khususnya perolehan dari Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi, DBHCHT dan Pajak Rokok
- 2) Optimalisasi *Revenue Sharing* terhadap Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi.

2.2.2. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. Berkaitan dengan itu, belanja daerah tersebut juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2019 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Kebijakan perencanaan belanja daerah dalam APBD 2019 dijabarkan sebagai berikut:

2.2.2.1. Belanja Tidak Langsung

(a) Belanja Pegawai

- (1)) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) disesuaikan dengan hasil rekonsiliasi jumlah pegawai dan belanja pegawai dalam rangka perhitungan DAU Tahun Anggaran 2019 dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas.
- (2)) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon PNSD sesuai formasi pegawai Tahun 2019.
- (3)) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma

lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.

- (4)) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Terkait dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk pengembangan cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS, tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD
- (5)) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi PNSD dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- (6)) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (7)) Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD sesuai amanat Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Kebijakan dan penentuan kriterianya ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
Standar satuan biaya Tambahan Penghasilan PNSD dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.
- (8)) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (9)) Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2019 melalui DAK Non Fisik dianggarkan pada kelompok Belanja Tidak Langsung, jenis Belanja Pegawai, obyek Gaji dan Tunjangan, dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.

- (b) **Belanja Subsidi**
Pemerintah daerah menganggarkan belanja subsidi kepada perusahaan/lembaga tertentu yang menyelenggarakan pelayanan publik, antara lain dalam bentuk penugasan pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum (*Public Service Obligation*). Belanja Subsidi tersebut hanya diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas. Perusahaan/lembaga tertentu yang diberi subsidi tersebut menghasilkan produk yang merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak.
- (c) **Belanja Hibah dan Bantuan Sosial**
Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial mempedomani Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, yang telah disesuaikan dengan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.
- (d) **Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah**
Penganggaran dana Bagi Hasil Pajak Daerah yang bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten harus mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
- (e) **Belanja Bantuan Keuangan**
- (1)) Penganggaran belanja bantuan keuangan kepada desa didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya, sesuai kemampuan keuangan daerah. Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula antara lain variabel: pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah/desa penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan;
 - (2)) Bantuan keuangan kepada partai politik dianggarkan pada obyek belanja bantuan keuangan kepada partai politik dan rincian obyek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan. Besaran penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan
 - (3)) Penganggaran bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten yang terdiri dari Dana Alokasi Umum dan Bagi Hasil (Pajak, terdiri dari: PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 dan Sumber Daya Alam,

terdiri dari: kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi dan pertambangan panas bumi) setelah dikurangi belanja pegawai. Bantuan keuangan ini merupakan Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

(f) **Belanja Tidak Terduga**

Penganggaran belanja tidak terduga dalam APBD 2019 dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2018 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2019, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2.2.2. Belanja Langsung

Penganggaran belanja langsung dalam APBD digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Penganggaran belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan dengan capaian kinerja yang terukur, dan dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik. Penyusunan anggaran belanja untuk setiap program dan kegiatan mempedomani SPM, Analisis Standar Belanja (ASB), dan standar satuan harga yang telah ditetapkan. ASB dan standar satuan harga ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dan digunakan sebagai dasar penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD.

(a) **Belanja Pegawai**

Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud dengan memperhatikan pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNSD sesuai ketentuan, pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai ketentuan.

Suatu kegiatan tidak diperkenankan diuraikan hanya ke dalam jenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium dan rincian obyek belanja honorarium PNSD dan/atau Non PNSD. Besaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

(b) **Belanja Barang dan Jasa**

(1)) Alokasi untuk pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan serta besarnya ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

(2)) Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri, yaitu pegawai tidak tetap, pegawai honorer, staf khusus dan pegawai lain yang dibayarkan oleh APBD, dianggarkan dalam APBD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40

Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016

- (3)) Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi. Alokasi belanja tersebut dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan.
- (4)) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2018.
- (5)) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah hanya berupa pelayanan medical check up sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak) dalam rangka pemeliharaan kesehatan dan dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Selanjutnya, pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD hanya berupa pelayanan medical check up sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak dalam rangka pemeriksaan kesehatan dan dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

Berkaitan dengan itu, pelaksanaan medical check up dimaksud dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah setempat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.

- (6)) Dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage, pemerintah daerah melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional. Penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, terutama bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, yang tidak menjadi cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan yang bersumber dari APBN, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada OPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.

- (7)) Penganggaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik pemerintah daerah dialokasikan pada masing-masing OPD sesuai amanat Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan besarnya sesuai dengan masing-masing peraturan daerah.
- (8)) Penganggaran untuk pengadaan barang (termasuk berupa aset tetap) yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa. Belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.
- (9)) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai peraturan perundang-undangan. Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (10)) Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsom, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:
 - a. Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk Bupati/Wakil Bupati, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.
 - b. Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
 - c. Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsom Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsom. Standar satuan uang harian perjalanan dinas, besarnya harus rasional sesuai dengan pengeluaran untuk kebutuhan transportasi lokal, uang makan dan uang saku di daerah tujuan. Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.
- (11)) Penyediaan anggaran untuk perjalanan dinas yang mengikutsertakan Non PNSD diperhitungkan dalam belanja perjalanan dinas. Tata cara

penganggaran perjalanan dinas dimaksud mengacu pada ketentuan perjalanan dinas yang ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah.

- (12)) Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia bagi pimpinan dan anggota DPRD, pejabat daerah/staf pemerintah daerah, serta unsur lainnya seperti tenaga ahli diprioritaskan penyelenggaraannya di kabupaten Bojonegoro. Dalam hal penyelenggaraannya di luar daerah harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan aspek urgensi kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi oleh penyelenggara. Dalam rangka orientasi dan pendalaman tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota agar berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2012 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
 - (13)) Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenisnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah dengan mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor Dalam Rangka Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Kerja Aparatur.
 - (14)) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- (c) Belanja Modal
- (1)) Pemerintah daerah dalam mengalokasikan belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2019 harus didasarkan pada *Money Follow Program Prioritas*, dan tidak lagi didasarkan pada *Money Follow Function*.
 - (2)) Penganggaran untuk pengadaan kebutuhan barang milik daerah menggunakan dasar perencanaan kebutuhan barang milik daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan memperhatikan standar barang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006.
Khusus penganggaran untuk pembangunan gedung dan bangunan milik daerah memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2012 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

2.2.3. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah pada hakekatnya merupakan transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja. Sedangkan apabila terjadi selisih negatif, pemerintah harus menutupi kekurangan dana untuk membiayai belanja dalam bentuk pinjaman atau bentuk lainnya. Agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan maksimal secara berkesinambungan, maka sebagai Daerah Otonom perlu untuk menggali potensi-potensi ekonomi serta strategi dalam pengelolaan keuangan yang lebih efisien khususnya pada sisi pembiayaan pembangunan.

Untuk mencapai hal tersebut, ditetapkan Kebijakan Pembiayaan Daerah pada APBD Kabupaten Bojonegoro tahun 2019, meliputi:

2.2.3.1. Penerimaan Pembiayaan

- (a) Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2018. Selanjutnya SiLPA dimaksud diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran 2019.
- (b) Penerimaan kembali dana bergulir dianggarkan dalam APBD pada akun pembiayaan, kelompok penerimaan pembiayaan daerah, jenis penerimaan kembali investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima.

2.2.3.2. Pengeluaran Pembiayaan

- (a) Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir sesuai Pasal 118 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dana bergulir dalam APBD dianggarkan pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, jenis penyertaan modal/investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir kepada kelompok masyarakat penerima.
- (b) Penyertaan modal pemerintah daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal.
Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dimaksud, pemerintah daerah melakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut.
- (c) Pemerintah daerah menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Bank Indonesia dan untuk memenuhi *Capital Adequacy Ratio* (CAR).
- (d) Dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pemerintah daerah melakukan penyertaan modal

dan/atau penambahan modal kepada bank perkreditan rakyat milik pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (e) Mempersiapkan pembiayaan jangka panjang (dana abadi) untuk kepentingan pembangunan Bojonegoro khususnya pembangunan sumber daya manusia. Sumber dananya didapatkan dari menyisihkan hasil pendapatan dari Dana Bagi Hasil Migas. Kebijakan ini merupakan implementasi transformasi pembangunan **eksklusif** menjadi **inklusif**, pembangunan yang dapat dinikmati oleh rakyat Bojonegoro, sekaligus mengantisipasi tidak terealisasinya target Penerimaan DBH yang ditetapkan.
- (f) Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran sebagaimana diamanatkan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

3.1.1. PENDAPATAN DAERAH

Realisasi pendapatan dalam Tahun 2019 adalah sebesar Rp4.769.828.177.733,96 atau mencapai 93,04% dari anggaran yang ditetapkan yaitu Rp5.126.758.095.914,53. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2018, pendapatan daerah mengalami penurunan sebesar Rp53.924.063.730,24 atau 1,12% dari realisasi Tahun 2018 yang senilai Rp4.823.752.241.464,20.

3.1.1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH

Secara umum, Pendapatan Asli Daerah tahun 2019 terealisasi sebesar Rp561.251.499.955,96 atau 105,81% dari anggaran sebesar Rp530.438.101.233,74. Realisasi Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp136.083.529.524,94 atau 32,01% dibandingkan realisasi Tahun 2018 yang sebesar Rp425.167.970.431,02. Adapun rincian Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Pendapatan Asli Daerah

No	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
1	Pendapatan pajak daerah	108.733.940.370,00	108.830.092.963,18	100,09	94.593.395.280,00
2	Pendapatan retribusi daerah	28.565.606.638,26	28.683.142.118,25	100,41	19.844.707.742,00
3	Pendapatan Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	17.019.037.058,48	16.816.223.663,52	98,81	18.121.803.634,95
4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	376.119.517.167,00	406.922.041.211,01	108,19	292.608.063.774,07
JUMLAH		530.438.101.233,74	561.251.499.955,96	105,81	425.167.970.431,02

3.1.1.2. PENDAPATAN TRANSFER

Pendapatan transfer Tahun 2019 terealisasi sebesar Rp4.109.980.517.778,00 atau 99,50% dari anggaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yaitu sebesar Rp4.130.522.524.680,79. Sementara itu, untuk Tahun 2018, pendapatan transfer terealisasi sebesar Rp3.991.503.924.460,00 sehingga Tahun 2019 ini pendapatan transfer mengalami kenaikan sebesar Rp118.476.593.318,00 atau 2,97%.

3.1.1.2.1. PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT

Bagian Dana Perimbangan sebagai wujud dari desentralisasi fiskal dan penyeimbang besarnya kewenangan Pemerintah Daerah, dalam Tahun 2019 terealisasi sebesar Rp3.522.411.681.988,00 atau 89,40% dari anggaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yaitu Rp3.939.970.136.300,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar 7,66% atau senilai Rp292.249.118.574,00 bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2018 yang sebesar Rp3.814.660.800.562,00. Adapun rincian pendapatan transfer pemerintah pusat-dana perimbangan adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

No.	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
1	Bagi Hasil Pajak	274.198.238.000,00	202.380.620.388,00	73,81	251.636.029.601,00
2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	2.270.342.995.300,00	1.973.193.312.507,00	86,91	2.281.171.868.831,00
3	Dana Alokasi Umum	975.387.399.000,00	975.387.399.000,00	100,00	932.357.598.649,00
4	Dana Alokasi Khusus	117.801.289.000,00	90.276.711.983,00	76,63	69.725.202.232,00
5	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	302.240.215.000,00	281.173.638.110,00	93,03	279.770.101.249,00
JUMLAH		3.939.970.136.300,00	3.522.411.681.988,00	89,40	3.814.660.800.562,00

3.1.1.2.2. PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – LAINNYA

Pendapatan transfer pemerintah pusat-lainnya Tahun 2019 terealisasi sebesar Rp400.377.303.000,00 atau 1.206,83% dari anggaran yang ditetapkan yaitu Rp33.175.993.000,00. Terdiri dari Dana Insentif Daerah sebesar Rp33.175.993.000,00 dan Dana Desa sebesar Rp367.201.310.000,00. Realisasi tersebut bila dibandingkan dengan Tahun 2018 yang senilai Rp17.250.000.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp383.127.303.000,00 atau 2.221,03%.

3.1.1.2.3. PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH DAERAH LAINNYA

Pada tahun 2019 realisasi pendapatan transfer dari pemerintah daerah lainnya yang merupakan dana bagi hasil pajak dari provinsi adalah sebesar Rp173.083.787.290,00 atau mencapai 120,77% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp143.318.649.880,79 dan mengalami kenaikan sebesar Rp25.649.563.392,00 atau 17,40% dari realisasi Tahun 2018 yaitu sebesar Rp147.434.223.898,00. Adapun rincian penerimaan transfer pemerintah provinsi sebagai berikut:

Tabel 3. Penerimaan Transfer Pemerintah Provinsi

No	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
1	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	35.465.450.661,90	50.076.854.997,00	141,20	36.529.087.032,00
2	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	21.703.420.458,90	28.300.274.095,00	130,40	37.658.157.178,00
3	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	38.160.259.252,00	49.144.369.373,00	128,78	23.351.703.360,00
4	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah	210.663.993,63	210.013.688,00	99,69	225.222.369,00
5	Bagi Hasil Pajak Rokok	47.778.855.514,36	45.352.275.137,00	94,92	49.670.053.959,00
JUMLAH		143.318.649.880,79	173.083.787.290,00	120,77	147.434.223.898,00

3.1.1.2.4. BANTUAN KEUANGAN

Secara umum, Bantuan Keuangan terealisasi Rp14.107.745.500,00 atau 100,36% dari anggaran sebesar Rp14.057.745.500,00 sehingga mengalami kenaikan senilai Rp1.948.845.500,00 atau sebesar 16,03% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2018 yaitu sebesar Rp12.158.900.000,00.

Tabel 4. Bantuan Keuangan

No.	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
1	Bantuan Keuangan	14.057.745.500,00	14.107.745.500,00	100,36	12.158.900.000,00
	JUMLAH	14.057.745.500,00	14.107.745.500,00	100,36	12.158.900.000,00

3.1.1.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Pada tahun 2019 Lain-Lain Pendapatan yang Sah terealisasi sebesar Rp98.596.160.000,00 atau 21,17% dari anggaran sebesar Rp465.797.470.000,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp308.484.186.573,18 atau sebesar 75,78% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2018 yaitu sebesar Rp407.080.346.573,18. Realisasi tersebut berasal dari Pendapatan Hibah Dana BOS dan Pendapatan Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. Lain-Lain Pendapatan yang Sah

No.	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
1	Pendapatan Hibah Dana BOS	88.789.160.000,00	98.596.160.000,00	111,05	90.715.879.573,18
2	Pendapatan Lainnya	377.008.310.000,00	0,00	0,00	316.364.467.000,00
	JUMLAH	465.797.470.000,00	98.596.160.000,00	21,17	407.080.346.573,18

3.1.2. BELANJA DAERAH

Secara akumulatif anggaran belanja Tahun 2019 terealisasi sebesar Rp3.401.676.515.143,77 atau 57,50% dari total anggaran belanja sebesar Rp5.916.118.079.759,58. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2018, belanja daerah mengalami kenaikan sebesar Rp979.183.069.774,96 atau 40,42% dari realisasi Tahun 2018 yang senilai Rp2.422.493.445.368,82. Belanja tersebut terbagi dalam belanja operasi, belanja modal dan belanja tak terduga.

3.1.2.1. BELANJA OPERASI

Belanja operasi Tahun 2019 terealisasi Rp2.096.286.212.017,39 atau 78,18% yaitu dari anggaran Rp2.681.289.577.928,34. Realisasi Tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp275.185.148.329,49 atau 15,11% dari realisasi Tahun 2018 yang sebesar Rp1.821.101.063.687,90. Rincian belanja operasi sebagai berikut:

Tabel 6. Belanja Operasi

No	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
1	Belanja Pegawai	1.267.986.220.423,88	1.058.724.416.043,02	83,50	1.017.533.334.032,98
2	Belanja Barang dan Jasa	1.145.335.970.646,64	857.025.938.441,37	74,83	671.762.552.372,57
3	Belanja Subsidi	223.000.000,00	0,00	0,00	75.600.000,00
4	Belanja Hibah	237.605.386.857,82	162.422.857.533,00	68,36	127.732.077.282,35
5	Belanja Bantuan Sosial	30.139.000.000,00	18.113.000.000,00	60,10	3.997.500.000,00
	JUMLAH	2.681.289.577.928,34	2.096.286.212.017,39	78,18	1.821.101.063.687,90

3.1.2.2. BELANJA MODAL

Belanja modal selama Tahun 2019 terealisasi sebesar Rp1.304.758.303.126,38 atau 68,38% dari target anggaran yang ditetapkan yaitu Rp1.908.205.625.181,08. Jumlah realisasi Tahun 2019 ini mengalami kenaikan 116,98% atau senilai

Rp703.420.256.045,47 dari realisasi Tahun 2018 sebesar Rp601.338.047.080,92.
Rincian belanja modal terdiri dari:

Tabel 7. Belanja Modal

No	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
1	Belanja Modal Pengadaan Tanah	89.418.245.000,00	4.151.947.000,00	4,64	725.423.250,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	276.843.119.069,60	200.607.141.462,11	72,46	142.873.891.529,80
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	426.817.161.260,73	195.316.845.448,92	45,76	153.161.358.323,09
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.076.498.435.678,24	877.712.795.837,56	81,53	286.469.922.122,91
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	36.251.139.172,51	24.739.335.657,79	68,24	17.368.341.855,12
6	Belanja Modal Aset Lainnya	2.377.525.000,00	2.230.237.720,00	93,81	739.110.000,00
JUMLAH		1.908.205.625.181,08	1.304.758.303.126,38	68,38	601.338.047.080,92

3.1.2.3. BELANJA TIDAK TERDUGA

Belanja tidak terduga Tahun 2019 terealisasi Rp632.000.000,00 mencapai 0,05% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.326.622.876.650,16 sedangkan Tahun 2018 belanja tak terduga terealisasi Rp54.334.600,00.

3.1.3. TRANSFER

Anggaran transfer bagi hasil ke Kabupaten/Kota/Desa Tahun 2019 Rp1.228.042.139.835,10 terealisasi sebesar Rp1.183.391.126.195,00 atau 96,36%. Belanja transfer mengalami kenaikan senilai Rp520.459.100.814,00 atau 78,51% dibandingkan realisasi Tahun 2018 sebesar Rp662.932.025.381,00.

3.1.4. PEMBIAYAAN

Dari hasil perhitungan APBD Tahun 2019 terdapat pembiayaan netto sebesar Rp2.018.047.974.917,07 dengan rincian pembiayaan sebagai berikut.

3.1.4.1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Dari anggaran penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan senilai Rp2.017.402.123.680,15 terealisasi sebesar Rp2.018.047.974.917,07 atau 100,03%. Realisasi Tahun 2019 mengalami kenaikan senilai Rp1.738.972.621.951,30 atau 623,12% dibanding realisasi Tahun 2018 yang sebesar Rp279.075.352.965,77. Penerimaan pembiayaan daerah tersebut terdiri atas:

Tabel 8. Penerimaan Pembiayaan Daerah

No.	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
1	Penggunaan Sisa lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	2.017.402.123.680,15	2.017.401.981.889,80	100,00	277.817.959.190,94
2	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	645.993.027,27	0,00	1.257.393.774,83
JUMLAH		2.017.402.123.680,15	2.018.047.974.917,07	100,03	279.075.352.965,77

3.1.4.2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Dari anggaran pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan sebesar Rp0,00 terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00%. Sama dengan realisasi Tahun 2018 yang sebesar Rp0,00. Rincian pengeluaran pembiayaan daerah terdiri atas:

Tabel 9. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

No	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH		0,00	0,00	0,00	0,00

3.2. KLASIFIKASI BELANJA MENURUT FUNGSI DAN ORGANISASI

3.2.1. BELANJA MENURUT FUNGSI

Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Bojonegoro juga dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsi. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.

Realisasi Belanja menurut fungsi pada TA 2019 dan 2018 adalah sebagaimana terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 10. Realisasi Belanja Menurut Fungsi

No	Fungsi	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
1	Pelayanan umum	3.282.401.482.728,08	1.678.422.554.197,90	51,13	1.036.958.007.067,25
2	Ketertiban dan Keamanan	64.280.433.734,00	38.894.031.170,03	60,51	35.059.704.486,00
3	Ekonomi	190.785.326.673,00	123.347.120.406,76	64,65	86.051.544.476,58
4	Lingkungan Hidup	146.563.996.951,00	51.666.576.336,00	35,25	35.817.330.800,00
5	Perumahan dan Fasilitas umum	1.594.405.382.046,86	1.146.402.636.773,25	71,90	441.183.418.070,54
6	Kesehatan	779.611.441.466,26	647.809.299.042,24	83,09	610.116.411.552,42
7	Pariwisata dan Budaya	37.630.833.686,00	25.786.617.314,30	68,53	19.672.096.043,47
8	Pendidikan	1.000.724.378.774,48	839.439.788.771,29	83,88	797.751.648.941,56
9	Kependudukan dan Perlindungan Sosial	47.756.943.535,00	33.299.017.327,00	69,73	22.815.309.312,00
JUMLAH		7.144.160.219.594,68	4.585.067.641.338,77	64,18	3.085.425.470.749,82

3.2.2. BELANJA MENURUT ORGANISASI

Realisasi Belanja menurut Organisasi pada TA 2019 dan 2018 adalah sebagaimana terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 11. Realisasi Belanja Menurut Organisasi

Kode	OPD	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
1.01.01	Dinas Pendidikan	982.100.989.790,48	826.436.946.038,50	84,15	760.718.381.988,63
1.02.01	Dinas Kesehatan	360.713.294.724,22	300.719.328.851,24	83,37	250.035.222.129,15
1.02.02	RSUD Kelas B Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo	294.011.225.020,26	239.181.651.681,00	81,35	210.250.171.037,00
1.02.03	RSUD Kelas D Sumberrejo	57.103.278.215,00	47.887.155.843,00	83,86	44.292.040.548,00

Kode	OPD	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
1.02.04	RSUD Kelas D Padangan	57.746.952.741,78	50.230.423.319,00	86,98	50.059.205.836,00
1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	875.090.150.540,85	718.063.758.718,89	82,06	256.157.149.844,76
1.03.02	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	64.261.047.441,01	47.812.910.200,00	74,40	22.813.668.108,15
1.03.03	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	655.096.895.065,00	380.454.417.854,36	58,08	257.567.787.502,83
1.05.01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7.194.500.607,00	5.914.236.311,00	82,20	4.468.922.611,00
1.05.02	Satuan Polisi Pamong Praja	16.600.633.337,00	13.919.581.129,00	83,85	11.710.216.343,00
1.05.03	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10.129.032.837,00	6.651.718.477,00	65,67	5.713.743.465,00
1.05.04	Dinas Pemadam Kebakaran	30.496.482.953,00	12.530.630.003,03	41,09	11.159.752.367,00
1.06.01	Dinas Sosial	19.796.498.132,00	11.559.303.705,00	58,39	6.138.178.604,00
2.02.01	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	21.809.773.395,00	18.630.314.750,00	85,42	14.829.868.837,00
2.03.01	Dinas Ketahanan Pangan	5.752.162.979,00	3.612.683.872,00	62,81	3.475.887.498,00
2.05.01	Dinas Lingkungan Hidup	54.582.180.951,00	47.176.349.116,00	86,43	22.565.252.510,00
2.06.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	15.544.525.273,00	12.468.480.632,00	80,21	7.078.125.851,00
2.07.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	8.975.109.963,00	6.822.648.936,00	76,02	6.288.481.468,00
2.09.01	Dinas Perhubungan	52.378.215.365,00	39.574.450.442,08	75,56	15.703.818.255,00
2.10.01	Dinas Komunikasi dan Informatika	21.146.602.843,00	18.643.410.631,88	88,16	8.843.671.057,00
2.11.01	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	5.715.085.536,00	4.264.253.329,00	74,61	3.634.703.960,00
2.12.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.152.254.183,00	4.478.174.554,00	72,79	3.854.693.029,00
2.13.01	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	17.835.005.484,00	12.330.926.894,79	69,14	6.980.795.628,00
2.16.01	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	37.630.833.686,00	25.786.617.314,30	68,53	19.612.096.043,47
2.18.01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.335.724.960,00	4.279.357.646,00	80,20	3.398.588.128,00
3.01.01	Dinas Peternakan dan Perikanan	15.936.472.910,00	14.151.971.620,03	88,80	12.562.150.956,00
3.03.01	Dinas Pertanian	65.624.675.956,00	28.146.891.745,00	42,89	28.144.716.071,58
3.06.01	Dinas Perdagangan	17.944.422.922,00	13.637.668.318,65	76,00	8.892.849.833,00
3.07.01	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	19.314.333.338,00	13.321.113.150,00	68,97	8.223.541.601,00
4.01.01	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	-	-	-	-
4.01.02	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.106.780.611,00	958.467.696,00	86,60	570.845.800,00
4.01.03	Sekretariat Daerah	247.286.108.252,00	104.776.565.470,02	42,37	59.980.410.861,90
4.01.04	Sekretariat DPRD	79.411.040.021,00	53.366.802.835,00	67,20	50.342.858.602,00
4.01.05	Kecamatan Bojonegoro	24.317.324.903,00	13.632.121.104,00	56,06	9.709.031.218,00

Kode	OPD	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
4.01.06	Kecamatan Kapas	3.508.469.565,00	2.859.283.807,00	81,50	2.709.031.335,00
4.01.07	Kecamatan Balen	3.764.586.997,00	3.154.385.898,00	83,79	2.824.487.047,00
4.01.08	Kecamatan Sumberrejo	3.970.312.674,00	3.088.180.971,00	77,78	2.929.445.681,00
4.01.09	Kecamatan Kanor	3.386.023.332,00	2.732.100.186,00	80,69	2.267.661.470,00
4.01.10	Kecamatan Baureno	3.567.685.557,00	2.813.979.840,00	78,87	2.711.137.133,00
4.01.11	Kecamatan Sugihwaras	2.973.372.557,00	2.287.896.145,00	76,95	2.229.179.245,00
4.01.12	Kecamatan Kepohbaru	3.446.955.038,00	2.823.356.705,00	81,91	2.446.462.752,00
4.01.13	Kecamatan Kedungadem	3.613.660.055,00	2.944.861.828,00	81,49	2.777.095.794,00
4.01.14	Kecamatan Sukosewu	2.845.336.716,00	2.379.600.611,00	83,63	2.164.986.718,00
4.01.15	Kecamatan Trucuk	2.914.216.730,00	2.326.555.559,00	79,83	2.088.494.359,00
4.01.16	Kecamatan Malo	2.813.157.352,00	2.404.384.218,00	85,47	2.160.102.879,00
4.01.17	Kecamatan Kalitidu	2.799.897.638,00	2.384.235.435,00	85,15	2.151.215.371,00
4.01.18	Kecamatan Dander	3.269.402.283,00	2.423.105.910,00	74,11	2.231.687.785,00
4.01.19	Kecamatan Padangan	2.758.018.313,00	2.211.249.067,00	80,18	2.100.948.763,00
4.01.20	Kecamatan Purwosari	2.947.448.543,00	2.388.202.468,00	81,03	2.223.661.986,00
4.01.21	Kecamatan Kasiman	2.833.147.458,00	2.366.215.966,00	83,52	2.046.412.579,00
4.01.22	Kecamatan Kedewan	2.356.355.303,00	1.838.635.640,00	78,03	1.680.407.009,00
4.01.23	Kecamatan Ngasem	2.884.255.835,00	2.367.892.662,00	82,10	2.123.552.708,00
4.01.24	Kecamatan Ngambon	2.315.926.297,00	1.878.511.064,00	81,11	1.674.463.117,00
4.01.25	Kecamatan Tambakrejo	2.915.491.252,00	2.232.148.996,00	76,56	2.029.223.137,00
4.01.26	Kecamatan Ngraho	3.028.518.665,00	2.521.440.953,00	83,26	2.179.756.246,00
4.01.27	Kecamatan Margomulyo	2.420.022.767,00	1.819.594.711,00	75,19	1.668.369.219,00
4.01.28	Kecamatan Temayang	2.704.361.925,00	2.329.749.697,00	86,15	1.962.576.192,00
4.01.29	Kecamatan Bubulan	2.173.603.229,00	1.744.592.530,00	80,26	1.477.918.710,00
4.01.30	Kecamatan Gondang	2.543.616.793,00	2.143.530.767,00	84,27	1.772.451.584,00
4.01.31	Kecamatan Sekar	2.246.870.963,00	1.789.569.660,00	79,65	1.702.462.314,00
4.01.32	Kecamatan Gayam	2.809.924.811,00	2.406.147.845,00	85,63	1.985.043.665,00
4.02.01	Inspektorat	9.438.594.278,00	6.650.517.847,00	70,46	6.280.497.593,00
4.03.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	14.152.022.645,00	10.108.450.374,00	71,43	8.477.305.950,00
4.04.01	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah - OPD	26.712.842.786,00	12.707.264.513,00	47,57	12.070.999.388,00
4.04.01	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah - SKPKD	2.822.632.403.343,08	1.364.558.983.728,00	48,34	794.791.537.263,35
4.04.02	Badan Pendapatan Daerah	22.007.048.291,00	15.003.685.907,00	68,18	11.529.969.465,00
4.05.01	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	15.267.054.668,00	9.957.997.643,00	65,23	8.180.098.700,00
JUMLAH		7.144.160.219.594,67	4.585.067.641.338,77	64,18	3.085.425.470.749,82

3.3. HAMBATAN DAN KENDALA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

Tidak semua program maupun kegiatan yang telah direncanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dapat direalisasikan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adanya efisiensi anggaran, gagal lelang, sisa tender, putus kontrak, tidak dilaksanakannya paket kegiatan, dibayarkan sesuai progres kemajuan fisik, adanya penundaan pembayaran (kurang bayar) karena diberikan kesempatan 50 hari kalender, serta kurang bayar tahun 2018 ada yang belum terealisasi karena kelewatan penganggaran. Adanya tambahan anggaran pada P-APBD tetapi tidak dapat terealisasi seluruhnya dikarenakan waktu yang tidak mencukupi untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut sehingga beberapa kegiatan diajukan kembali anggarannya untuk dikerjakan pada tahun anggaran 2020.

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1. ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH**
Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang terdiri atas entitas-entitas akuntansi, dimana menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan Pemerintah Daerah. Entitas akuntansi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebanyak 65 SKPD dan 3 Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Tabel 12. Daftar Nama SKPD se-Kab. Bojonegoro Selaku Entitas Akuntansi

Kode SKPD	Nama SKPD	Kode SKPD	Nama SKPD
1.01.01	Dinas Pendidikan	4.01.06	Kecamatan Kapas
1.02.01	Dinas Kesehatan	4.01.07	Kecamatan Balen
1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	4.01.08	Kecamatan Sumberrejo
1.03.02	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	4.01.09	Kecamatan Kanor
1.03.03	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	4.01.10	Kecamatan Baureno
1.05.01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.01.11	Kecamatan Sugihwaras
1.05.02	Satuan Polisi Pamong Praja	4.01.12	Kecamatan Kepohbaru
1.05.03	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.01.13	Kecamatan Kedungadem
1.05.04	Dinas Pemadam Kebakaran	4.01.14	Kecamatan Sukosewu
1.06.01	Dinas Sosial	4.01.15	Kecamatan Trucuk
2.02.01	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	4.01.16	Kecamatan Malo
2.03.01	Dinas Ketahanan Pangan	4.01.17	Kecamatan Kalitidu
2.05.01	Dinas Lingkungan Hidup	4.01.18	Kecamatan Dander
2.06.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.01.19	Kecamatan Padangan
2.07.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.01.20	Kecamatan Purwosari
2.09.01	Dinas Perhubungan	4.01.21	Kecamatan Kasiman
2.10.01	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.01.22	Kecamatan Kedewan
2.11.01	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	4.01.23	Kecamatan Ngasem
2.12.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.01.24	Kecamatan Ngambon
2.13.01	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	4.01.25	Kecamatan Tambakrejo
2.16.01	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	4.01.26	Kecamatan Ngraho
2.18.01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.01.27	Kecamatan Margomulyo
3.01.01	Dinas Peternakan dan Perikanan	4.01.28	Kecamatan Temayang
3.03.01	Dinas Pertanian	4.01.29	Kecamatan Bubulan
3.06.01	Dinas Perdagangan	4.01.30	Kecamatan Gondang
3.07.01	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	4.01.31	Kecamatan Sekar

Kode SKPD	Nama SKPD	Kode SKPD	Nama SKPD
4.01.01	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.01.32	Kecamatan Gayam
4.01.02	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4.02.01	Inspektorat
4.01.03	Sekretariat Daerah	4.03.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.01.04	Sekretariat DPRD	4.04.01	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4.01.05	Kecamatan Bojonegoro	4.04.02	Badan Pendapatan Daerah
4.05.01	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan		

Pada Tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro tidak lagi memiliki empat BLUD karena berdasarkan keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 974/KPT/I/2018 Tanggal 8 Nopember 2018 tentang Izin Pembukaan Program Studi di Luar Kampus Utama yang Diselenggarakan oleh Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya di Kabupaten Bojonegoro, maka Akademi Kebidanan Pemkab Bojonegoro tidak lagi menjadi BLUD dikarenakan pengelolaannya berpindah ke Kementerian Kesehatan. Sehingga pada tahun ini di Kabupaten Bojonegoro hanya terdapat tiga BLUD sebagaimana tercantum dalam daftar berikut:

Tabel 13. Daftar BLUD se Kab. Bojonegoro selaku Entitas Akuntansi

Kode SKPD	Nama BLUD
1.02.02	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo
1.02.03	Rumah Sakit Umum Daerah Sumberrejo
1.02.04	Rumah Sakit Umum Daerah Padangan

Adapun Laporan Keuangan Perusahaan Daerah yang meliputi PD BPR Bojonegoro, PDAM, PT Asri Dharma Sejahtera, PT Bojonegoro Bangun Sarana, dan PT Griya Dharma Kusuma, tidak dikonsolidasikan dengan Neraca Pemerintah Kabupaten Bojonegoro karena merupakan kekayaan yang pengelolaannya dipisahkan dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Sedangkan untuk PD Pasar, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembubaran Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Bojonegoro, mulai tanggal 1 Januari 2019 secara penuh pengelolaan pasar daerah berada dibawah tupoksi Dinas Perdagangan.

4.2. BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro adalah:

1. Basis Kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar;
2. Basis Akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca, pengakuan pendapatan-LO dan beban dalam Laporan Operasional. Yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Basis akrual untuk LO berarti pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi, walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau

entitas pelaporan.

4.3. BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

4.3.1 KEBIJAKAN UMUM

- (1) Periode akuntansi yang digunakan adalah tahunan sebagaimana tahun kalender yang berakhir pada tanggal 31 Desember;
- (2) Pengakuan dan pencatatan setiap kejadian/transaksi ekonomi dilakukan dalam mata uang Rupiah;
- (3) Transaksi yang terjadi dengan menggunakan mata uang asing dicatat dengan menggunakan mata uang Rupiah berdasar kurs tengah Bank Indonesia pada saat transaksi dibukukan;
- (4) Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah yang menggambarkan tentang realisasi dan anggaran secara tersanding di tingkat SKPD, PPKD, dan Pemda. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan daerah;
- (5) Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode dan dengan realisasi periode sebelumnya;
- (6) Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD;
- (7) Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran;
- (8) Laporan realisasi anggaran gabungan Pemda disusun di semester I dan akhir tahun anggaran, dan nilainya merupakan gabungan dari seluruh SKPD dan PPKD sebagai PPKD/BUD;
- (9) Untuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA) gabungan tidak memerlukan proses eliminasi, tetapi penggabungan langsung seluruh pendapatan dan belanja dari PPKD dan semua SKPD;
- (10) Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Penjelasan tersebut memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan;
- (11) Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu;
- (12) Neraca disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual untuk tingkat SKPD, PPKD dan Pemerintah Daerah;
- (13) Setiap entitas akuntansi/entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca;
- (14) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. (Khusus untuk Tahun 2015 LPSAL disajikan tanpa perbandingan tahun sebelumnya sesuai dengan amanat IPSAP 04)

- (15) Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
- (16) Unsur-unsur yang dicakup dalam Laporan Operasional terdiri dari Pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa.
- (17) Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. (Khusus untuk Tahun 2015 LPE disajikan tanpa perbandingan tahun sebelumnya sesuai dengan amanat IPSAP 04).
- (18) Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan dan perubahan kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas pada tanggal pelaporan.
- (19) Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan
- (20) Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas.
- (21) Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Daerah.
- (22) Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Daerah.
- (23) Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus Kas.

4.3.2 Pendapatan LRA

- (1) Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi PPKD;
- (2) Pendapatan diakui pada saat diterima oleh Bendahara Penerimaan untuk seluruh transaksi SKPD;
- (3) Pencatatan dari setiap jenis pendapatan dan masing-masing nilai pendapatannya dicatat sampai dengan rincian obyek;
- (4) Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan;
- (5) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama;
- (6) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut;
- (7) Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah;
- (8) Akuntansi pendapatan disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen pemerintah daerah, baik yang dicatat oleh SKPD maupun PPKD;

- (9) Pendapatan diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
- (10) Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

4.3.3 Belanja

- (1) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan PPKD;
- (2) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh BUD/Kuasa BUD/pengguna anggaran. Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah;
- (3) Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran;
- (4) Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam lain-lain PAD yang sah.

4.3.4 Transfer

- (1) Transfer Masuk (LRA) adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi. Pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke Rekening Kas Umum Daerah
- (2) Transfer Keluar (LRA) adalah pengeluaran dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti dana bagi hasil oleh pemerintah daerah. Untuk penyajian transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar.
- (3) Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4.3.5 Pembiayaan

- (1) Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah kecuali untuk SiLPA;
- (2) Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah;
- (3) Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
- (4) Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto;
- (5) Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto;

- (6) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA;
- (7) Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

4.3.6 Pendapatan LO

- (1) Pendapatan LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali;
- (2) Pendapatan LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*);
- (3) Pendapatan LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan;
- (4) Pendapatan LO diakui pada saat penyusunan laporan keuangan
 - (a) Pendapatan LO diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (Misalnya SKPD/SKRD yang diterbitkan dengan metode *official assesment* atau Perbup) dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh Pemerintah Daerah;
 - (b) Pendapatan LO diakui setelah penerimaan kas apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro kepada pihak lain atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima dimuka.
- (5) Pendapatan LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
- (6) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan;
- (7) Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

4.3.7 Beban

- (1) Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban;
- (2) Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik;
- (3) Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang dan Beban Lain-lain;

- (4) Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan Perundang-undangan;
- (5) Beban Non Operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan Non Operasional;
- (6) Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah;
- (7) Beban diakui pada:
 - (a) Saat timbulnya kewajiban;
 - (b) Saat terjadinya konsumsi aset; dan
 - (c) Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa;
- (8) Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah;
- (9) Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah;
- (10) Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu;
- (11) Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:
 - (a) Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
 - (b) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan
 - (c) Beban diakui setelah pengeluaran kas.
- (12) Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan;
- (13) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas;
- (14) Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pengeluaran tersebut diklasifikasikan sebagai Beban dibayar di Muka.
- (15) Pengakuan beban pada periode berjalan di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja, kecuali pengeluaran belanja modal.

4.3.8 Aset

- (1) Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
- (2) Aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah;

- (3) Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan;
- (4) Aset Lancar terdiri dari Kas dan setara kas, Investasi Jangka Pendek, Piutang, Piutang Lain-lain; dan Persediaan;
- (5) Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca;
- (6) Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi salah satu kriteria yaitu kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah;
- (7) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*);
- (8) Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek merupakan reklasifikasi aset lancar dan tidak dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran;
- (9) Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan dividen tunai (*cash dividend*) dicatat sebagai pendapatan;
- (10) Penilaian Investasi Jangka Pendek pemerintah daerah dilakukan dengan metode biaya. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait;
- (11) Secara garis besar, pengakuan piutang terjadi pada akhir periode ketika akan disusun Neraca dan diakui sebesar Surat Ketetapan tentang Piutang yang belum dilunasi, atau pada saat terjadinya pengakuan hak untuk menagih piutang pada saat terbitnya Surat Ketetapan tentang Piutang;
- (12) Untuk periode berikutnya, perlakuan untuk piutang pajak/retribusi bisa melalui mekanisme pembiayaan atau mekanisme pengakuan pendapatan tunggakan;
- (13) Perlakuan untuk piutang dari pemberian pinjaman kepada Pemda/institusi lain diakui pada saat terjadinya, untuk periode berikutnya melalui mekanisme pembiayaan;
- (14) Piutang dicatat sebesar nilai bersih, yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih;
- (15) Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
- (16) Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*);
- (17) Persediaan disajikan sebesar :
 - (a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 - (b) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - (c) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.
- (18) Penilaian investasi Jangka Panjang Pemerintah Daerah dilakukan dengan :
 - (a) Metode biaya untuk kepemilikan kurang dari 20%, dimana investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum terkait;
 - (b) Metode ekuitas untuk kepemilikan 20% sampai lebih dari 50% atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi mempunyai pengaruh yang signifikan.

Dengan menggunakan metode ini, pemerintah daerah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurang sebesar bagian laba atau rugi Pemerintah Daerah setelah tanggal perolehan. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah;

- (c) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, kriteria dalam penggunaan metode ini adalah untuk kepemilikan saham yang akan dilepas/dijual dalam waktu dekat.
- (19) Pelepasan investasi pemerintah daerah dapat terjadi karena penjualan, dan pelepasan hak karena peraturan pemerintah daerah dan lain sebagainya;
- (20) Penerimaan dari pelepasan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan;
- (21) Investasi Pemerintah dikategorikan dalam dua macam, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang;
- (22) Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- (23) Menurut sifat penanaman investasinya, investasi jangka panjang dibagi menjadi investasi permanen dan investasi non permanen;
- (24) Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar;
- (25) Investasi yang dapat digolongkan dalam investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dan atau yang dapat diperpanjang secara otomatis, dan atau pembelian obligasi pemerintah jangka pendek oleh Pemerintah Daerah;
- (26) Investasi jangka panjang yang bersifat permanen dapat berupa penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah (PD) dan Badan Usaha lainnya yang bukan milik daerah dan investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- (27) Investasi jangka panjang yang bersifat non permanen dapat berupa:
 - (a) Pembelian obligasi jangka panjang oleh Pemerintah Daerah;
 - (b) Pemberian dana talangan untuk penyehatan Perusahaan Daerah;
 - (c) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, dan;
 - (d) Investasi non permanen lainnya yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan;
 - (e) Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria, yaitu adanya kemungkinan manfaat ekonomi atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh Pemerintah, atau nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/*reliable*;
 - (f) Pengeluaran untuk investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan;
 - (g) Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri serta biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut;
 - (h) Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah Daerah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah Daerah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada;

- (i) Metode penilaian investasi yang digunakan adalah metode biaya untuk kepemilikan kurang dari 50% dan metode ekuitas untuk kepemilikan lebih besar atau sama dengan 50% ;
 - (j) Penerimaan dari penjualan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan dan dinilai menggunakan metode rata-rata;
 - (k) Nilai rata-rata diperoleh dengan cara membagi total nilai investasi terhadap total jumlah saham yang dimiliki oleh pemerintah;
 - (l) Peminjaman pos investasi dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lainnya dan sebaliknya.
- (28) Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas;
 - (29) Aset tetap berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan instalasi, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan;
 - (30) Aset tetap sebagaimana yang dimaksud adalah aset yang dipergunakan untuk keperluan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai;
 - (31) Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya
 - (32) Aset tetap dicatat dengan menggunakan biaya perolehan;
 - (33) Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan;
 - (34) Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung untuk tenaga kerja, bahan baku termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut;
 - (35) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat dibebankan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan;
 - (36) Setiap potongan harga dan rabat dikurangkan dari harga pembelian;
 - (37) Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan;
 - (38) Konstruksi dalam penyelesaian yang sudah selesai dibuat atau dibangun dan telah siap dipakai harus segera direklasifikasikan ke dalam aset tetap;
 - (39) Dalam hal suatu aset tetap diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya, biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan;
 - (40) Dalam hal suatu aset tetap diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki nilai wajar yang serupa, biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat atas aset yang dilepas;
 - (41) Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan;
 - (42) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada jumlah tercatat aset yang bersangkutan;

- (43) Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan, kecuali tanah dan konstruksi dalam pengerjaan;
- (44) Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak diperkenankan kecuali ada ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional yang memperbolehkannya;
- (45) Aset bersejarah tidak diakui sebagai aset tetap pemerintah, namun harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan dalam unit fisik dan tanpa nilai;
- (46) Aset bersejarah yang digunakan untuk ruang perkantoran, diperlakukan sebagaimana aset tetap lainnya;
- (47) Aset infrastruktur diperlakukan sebagaimana aset tetap lainnya;
- (48) Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepas atau bila aset secara permanen ditarik dari penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa datang yang diharapkan dari pelepasannya;
- (49) Atas aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas maka harus dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan;
- (50) Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya;
- (51) Suatu benda berwujud diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan jika besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh, biaya perolehan tersebut dapat diukur dengan andal, dan aset tersebut masih dalam proses pengerjaan;
- (52) Konstruksi dalam pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan dan dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan;
- (53) Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan;
- (54) Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain terdiri dari biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi, biaya yang dapat didistribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut, dan biaya lain secara khusus dapat dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan;
- (55) Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan, kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubungan dengan penyerahan pekerjaan yang belum dibayar pada tanggal pelaporan, dan pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi;
- (56) Apabila konstruksi dibiayai dari pinjaman, maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal;
- (57) Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi;
- (58) Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat *force majeure*, maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi tidak dikapitalisasi;
- (59) Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh tempo pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman;

- (60) Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan;
- (61) Batasan minimal kapitalisasi untuk belanja modal dalam aset tetap adalah Rp500.000,00, dikecualikan terhadap aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian;
- (62) Kebijakan kapitalisasi aset tersebut diterapkan untuk pengadaan belanja modal mulai Tahun Anggaran 2011.

4.3.9 Dana Cadangan

- (1) Dana Cadangan diakui pada saat dilakukan penyesuaian uang untuk tujuan pencadangan dimaksud;
- (2) Dana Cadangan berkurang pada saat terjadi pencairan Dana Cadangan;
- (3) Hasil-hasil tersebut dicatat sebagai pendapatan dalam pos lain-lain.

4.3.10 Kewajiban

- (1) Kewajiban yang dilaporkan dalam laporan keuangan diklasifikasikan dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang;
- (2) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar dalam waktu tidak lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang;
- (3) Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal;
- (4) Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima;
- (5) Kewajiban dapat timbul dari transaksi dengan pertukaran, transaksi tanpa pertukaran sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas terbayar sampai saat tanggal pelaporan, dan kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah;
- (6) Suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing-masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya, untuk itu kewajiban diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan;
- (7) Kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah adalah kejadian yang tidak didasari transaksi namun berdasarkan adanya interaksi antara Pemerintah Daerah dan lingkungannya dan kejadian tersebut mungkin berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah memutuskan untuk merespon kejadian tersebut, untuk itu secara umum kewajiban diakui dengan basis yang sama dengan kejadian yang timbul dari transaksi pertukaran;
- (8) Pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya;
- (9) Jika tagihan belum tersedia pada saat penyusunan laporan keuangan, jumlah kewajiban tersebut harus diestimasi;
- (10) Utang bunga atas utang Pemerintah Daerah dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan;
- (11) Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongannya berupa Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) yang belum disetorkan kepada pihak lain dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan;
- (12) Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan;

- (13) Pada setiap tanggal neraca, pos kewajiban moneter dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia;
- (14) Jumlah tunggakan atas pinjaman Pemerintah Daerah disajikan dalam mata uang Rupiah;
- (15) Pemerintah Daerah tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya. Meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan untuk diselesaikan dua belas bulan sejak setelah tanggal pelaporan jika jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari dua belas bulan atau Pemerintah bermaksud mendanai kembali kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang dan maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali, atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui;
- (16) Jumlah setiap kewajiban yang dikeluarkan dari kewajiban jangka pendek, bersama-sama dengan informasi yang mendukung penyajiannya, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.3.11 Ekuitas

- (1) Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas berasal dari Ekuitas Awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi aset tetap, dan lain-lain;
- (2) Ekuitas SAL digunakan untuk mencatat akun perantara dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL;
- (3) Ekuitas untuk dikonsolidasikan digunakan untuk mencatat *reciprocal account* untuk kepentingan konsolidasi, yang mencakup antara lain Rekening Koran PPKD.

4.3.12 Komponen-Komponen Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan kewajiban operasional, investasi aset non keuangan, dana cadangan, pembiayaan, dan transaksi non anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas pemerintah selama periode tertentu.

4.3.13 Koreksi Kesalahan

- (1) Terhadap setiap kesalahan harus dilakukan koreksi segera setelah diketahui;
- (2) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan;
- (3) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan atau akun belanja dari periode yang bersangkutan;
- (4) Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, serta mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain, akun aset, serta akun ekuitas dana yang terkait;
- (5) Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi

secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan pembetulan pada akun lain-lain;

- (6) Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas dana lancar.

Untuk lebih lengkap dan jelas mengenai Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dapat dilihat pada Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi.

4.4. PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

4.4.1 TELAH SESUAI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2019 telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan seperti yang tersebut pada Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan dan Basis Pengukuran yang digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan.

4.4.2 PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH

Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Tahun 2019 dihasilkan dari SIMDA Keuangan dan SIMDA BMD. SIMDA Keuangan untuk LRA, dan Laporan Perubahan SAL sedangkan SIMDA BMD untuk Laporan Mutasi Barang.

BAB V
PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

5.1.1. PENDAPATAN

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Total realisasi pendapatan Tahun 2019 sebesar Rp4.769.828.177.733,96 atau 93,04% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp5.126.758.095.914,53 dengan rincian sebagai berikut:

5.1.1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH

Realisasi Pendapatan Asli Daerah yang dicapai pada Tahun Anggaran 2019 adalah Rp561.251.499.955,96 atau 105,81% dari anggaran sebesar Rp530.438.101.233,74 yang terdiri dari:

Tabel 14. Pendapatan Asli Daerah

No	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
1.	Pajak Daerah	108.733.940.370,00	108.830.092.963,18	100,09	94.593.395.280,00
2.	Retribusi Daerah	28.565.606.638,26	28.683.142.118,25	100,41	19.844.707.742,00
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	17.019.037.058,48	16.816.223.663,52	98,81	18.121.803.634,95
4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	376.119.517.167,00	406.922.041.211,01	108,19	292.608.063.774,07
JUMLAH		530.438.101.233,74	561.251.499.955,96	105,81	425.167.970.431,02

Jumlah tersebut terdiri dari :

5.1.1.1.1. PENDAPATAN PAJAK DAERAH

Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp108.830.092.963,18 atau sebesar 100,09% dari anggaran sebesar Rp108.733.940.370,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 15. Pendapatan Pajak Daerah

No	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
1.	Pajak Hotel	5.140.501.316,00	6.001.402.475,00	116,75	3.757.429.920,00
2.	Pajak Restoran	6.235.880.925,00	9.181.298.496,62	147,23	6.838.188.415,00
3.	Pajak Hiburan	1.989.575.781,00	834.044.354,00	41,92	584.855.553,00
4.	Pajak Reklame	3.817.000.854,00	2.433.849.723,00	63,76	2.388.224.502,00
5.	Pajak Penerangan Jalan	40.073.580.664,00	41.319.763.222,77	103,11	38.503.010.257,00
6.	Pajak Parkir	477.972.057,00	255.456.442,00	53,45	362.530.622,00
7.	Pajak Air Bawah Tanah	934.262.356,00	1.114.863.348,00	119,33	683.861.425,00
8.	Pajak Sarang Burung Walet	38.100.000,00	23.425.000,00	61,48	25.142.000,00
9.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.281.882.112,00	3.821.302.365,00	116,44	1.425.641.969,00
10.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	28.717.750.000,00	32.149.392.639,79	111,95	26.524.842.102,00
11.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	18.027.434.305,00	11.695.294.897,00	64,87	13.499.668.515,00
JUMLAH		108.733.940.370,00	108.830.092.963,18	100,09	94.593.395.280,00

Dari jumlah pendapatan Pajak Daerah di atas, sebesar 37,97% atau sebesar Rp41.319.763.222,77 diperoleh dari Pajak Penerangan Jalan yang merupakan pemberi kontribusi pendapatan pajak daerah terbesar.

Tidak tercapainya target Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan secara terperinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pajak Hiburan tidak tercapai karena pada perhitungan target 2019 menggunakan asumsi bahwa ijin operasional tempat hiburan karaoke dan spa dapat dikeluarkan oleh DPMPSTP dalam waktu 1 (satu) bulan, namun pada kenyataannya sampai dengan akhir tahun belum terealisasi. Untuk desa wisata semula diasumsikan dapat dipungut pajak hiburan namun hanya beberapa obyek saja yang dapat diterapkan dengan alasan masih uji pasar sehingga minta waktu untuk pelaksanaannya dan fungsi pembinaan dalam rangka pengembangan potensi wisata. Belum terpasangnya tapping box pada tiga lokasi game elektronik sebagai penghitung volume transaksi.
2. Pajak Reklame tidak tercapai karena dalam pelaksanaannya di tahun 2019 sudah ada penerapan tarif baru, akan tetapi sampai dengan akhir tahun regulasi baru tersebut belum terbit.
3. Pajak Parkir tidak tercapai karena asumsi target tahun 2019 adalah disalah satu tempat hiburan sering mengadakan event (per minggu) diharapkan pajak sesuai dengan pelaksanaannya tidak sesuai dengan harapan. Sebagai langkah antisipasi kedepan, Bapenda akan mengadakan uji petik atas laporan sebagai uji kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan.
4. Pajak Sarang Burung tidak tercapai karena potensi yang menurun dengan adanya persaingan dengan sarang burung walet sintetis dan fluktuasi harga dan kurs dolar.
5. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tidak tercapai karena melemahnya pengembang properti di Bojonegoro.

5.1.1.1.2. PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH

Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp28.683.142.118,25 atau 100,41% dari anggaran sebesar Rp28.565.606.638,26 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 16. Pendapatan Retribusi Daerah

No	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
1.	Retribusi Jasa Umum	24.231.804.969,50	25.098.488.717,25	103,58	15.554.179.119,00
2.	Retribusi Jasa Usaha	3.287.398.295,00	2.640.951.342,00	80,34	3.567.884.353,00
3.	Retribusi Perizinan Tertentu	1.046.403.373,76	943.702.059,00	90,19	722.644.270,00
	JUMLAH	28.565.606.638,26	28.683.142.118,25	100,41	19.844.707.742,00

Dari jumlah pendapatan Retribusi Daerah tersebut, sebesar 87,50% dihasilkan dari obyek retribusi jasa umum yang totalnya mencapai Rp25.098.488.717,25. Adapun rincian pendapatan retribusi daerah tersebut adalah sebagai berikut:

1) Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum pada tahun 2019 terealisasi sebesar Rp25.098.488.717,25 atau sebesar 103,58% dari anggaran yang telah

ditetapkan sebesar Rp24.231.804.969,50. Adapun anggaran dan realisasi pendapatan retribusi jasa umum pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 17. Rincian Retribusi Jasa Umum

No	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	7.394.334.265,00	10.258.303.750,00	138,73	4.876.119.400,00
2.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	287.390.000,00	295.999.000,00	103,00	273.705.500,00
3.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	8.268.572.172,00	8.332.560.000,00	100,77	8.007.792.000,00
4.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.424.858.400,00	1.389.005.000,00	97,48	1.396.920.000,00
5.	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	1.896.811.564,50	2.360.536.827,25	124,45	852.967.719,00
6.	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	146.674.500,00	148.808.000,00	101,45	146.674.500,00
7.	Retribusi pengelolaan pasar daerah	4.685.553.158,00	2.138.143.400,00	45,63	0,00
8.	Retribusi Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi	127.610.910,00	175.132.740,00	137,24	0,00
	JUMLAH	24.231.804.969,50	25.098.488.717,25	103,58	15.554.179.119,00

Retribusi jasa umum yang tidak dapat terealisasi secara optimal di tahun 2019 adalah retribusi pengujian kendaraan bermotor dan retribusi pengelolaan pasar daerah, secara terperinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Retribusi pengujian kendaraan bermotor tidak tercapai karena banyak kendaraan Bojonegoro yang mutasi keluar kota karena proyek Bojonegoro sudah selesai, kendaraan Bojonegoro masih banyak yang tidak diujikan, fungsi pengawasan kurang (operasi lalu lintas), jembatan timbang tidak berfungsi sehingga banyak kendaraan yang tidak diujikan, dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengujikan kendaraannya.
2. Retribusi pengelolaan pasar daerah tidak tercapai dikarenakan pungutan terhadap toko, bidak dan los pasar belum dapat dilakukan karena belum ada payung hukumnya (berkenaan dengan tarifnya).

2) Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha pada tahun 2019 terealisasi sebesar Rp2.640.951.342,00 atau sebesar 80,34% dari anggaran yang telah ditetapkan. Adapun anggaran dan realisasi pendapatan retribusi jasa usaha pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 18. Rincian Retribusi Jasa Usaha

No	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
1.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.363.283.795,00	1.089.179.342,00	79,89	2.196.419.395,00
2.	Retribusi Pasar/Pertokoan yang disediakan/ diselenggarakan oleh Pemda	88.440.000,00	55.750.000,00	63,04	54.161.958,00
3.	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa	121.200.000,00	180.700.000,00	149,09	91.300.000,00
4.	Retribusi Rumah Potong Hewan	127.474.500,00	125.165.000,00	98,19	124.975.000,00

No	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
5.	Retribusi Tempat Rekreasi	1.515.000.000,00	1.127.296.000,00	74,41	1.033.313.000,00
6.	Retribusi Pelayanan Tempat Olahraga	72.000.000,00	62.861.000,00	87,31	67.715.000,00
	JUMLAH	3.287.398.295,00	2.640.951.342,00	80,34	3.567.884.353,00

Retribusi Jasa Usaha yang tidak dapat terealisasi secara optimal di tahun 2019 adalah retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar/pertokoan yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemda, retribusi rumah potong hewan, serta retribusi tempat rekreasi dan olahraga, secara terperinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Retribusi pemakaian kekayaan daerah
 - a. Penyewaan Tanah dan Bangunan tidak tercapai karena PT. BBS tidak melakukan pembayaran retribusi sewa tanah selama tahun 2016-2019 (Bapenda). Untuk sewa stadion tidak memenuhi target karena berkurangnya kegiatan/event yang diselenggarakan di Stadion Letjen H. Sudirman maupun di halamannya. Sedangkan untuk sewa alun-alun tidak ada pungutan retribusinya karena belum ada Peraturan Daerah yang mengatur mengenai pemungutan retribusi pemakaian kekayaan daerah.
 - b. Penyewaan Peralatan dan Mesin tidak tercapai karena kondisi pasar terkait industri kayu jati sekarang sedang lesu, terutama di kawasan Sentra Industri Mebel Kayu Jati Sukorejo Bojonegoro, beberapa layanan misal Mesin Open Kayu yang sudah lama rusak sehingga mengurangi pemasukan PAD, dan masih minimnya promosi layanan UPT Kayu Sukorejo Bojonegoro.
 - c. Penyewaan laboratorium tidak tercapai karena uji laboratorium bukan hanya di Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang saja, tetapi ada banyak tempat bagi penyedia untuk uji laboratorium misal di beberapa perguruan tinggi yang ada di Jawa Timur maupun di Bojonegoro sendiri.
 - d. Penyewaan alat berat tidak tercapai karena penggunaan alat berat dikonsentrasikan untuk pekerjaan internal Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang, sewa alat berat tidak hanya monopoli Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang, tetapi ada banyak tempat bagi penyedia untuk sewa alat berat di wilayah bojonegoro dan sekitarnya, jangka waktu pelaksanaan untuk pekerjaan di Perubahan APBD 2019 pendek, sehingga waktu sewa juga pendek.
 - e. Penyewaan ruangan tidak tercapai karena Gedung Serbaguna disiagakan untuk pengungsi banjir sehingga tidak disewakan untuk umum.
2. Retribusi pasar/pertokoan yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemda tidak tercapai karena daya beli masyarakat rendah, sehingga pendapatan penyewa kios sangat minim dan adanya musibah angin puting beliung pada bulan Desember 2019 lalu, sehingga para penyewa kios sampai dengan saat ini terkendala pembayarannya.
3. Retribusi rumah potong hewan tidak tercapai karena target yang ditentukan naik terlalu tinggi, sedangkan tarif retribusi tetap dengan jumlah pemotongan yang relatif stabil dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

4. Retribusi tempat rekreasi tidak memenuhi target karena akses jalan menuju lokasi wisata yang kurang memadai, kurangnya sarana transportasi umum menuju tempat wisata, munculnya destinasi wisata baru di wilayah Bojonegoro yang merupakan alternatif lain bagi pengunjung wisata (misalnya wisata desa) yang pendapatannya tidak masuk dalam PAD, pada PAPBD 2019 target pendapatan naik 100% dari jumlah sisa target induk.
5. Retribusi Pelayanan Tempat Olahraga tidak memenuhi target karena harga sewa lapangan indoor (GOR) yang terlalu tinggi sehingga tidak semua masyarakat dapat menggunakan, lapangan indoor (GOR) pada bulan Mei dan Juni 2019 digunakan untuk pemusatan pelatihan atlet Kabupaten Bojonegoro untuk mengikuti kejuaraan Porprov ke VI Jawa Timur 2019 dan pada bulan Juli 2019 digunakan sebagai tempat kejuaraan Porprov ke VI Jawa Timur 2019.

3) Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu pada tahun 2019 terealisasi sebesar Rp943.702.059,00 atau sebesar 90,19% dari anggaran yang telah ditetapkan. Adapun anggaran dan realisasi pendapatan retribusi jasa usaha pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 19. Rincian Perizinan Tertentu

No	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.023.017.373,76	936.702.059,00	91,56	701.858.270,00
2	Retribusi Izin Trayek	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	4.400.000,00
3	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	16.386.000,00	0,00	0,00	16.386.000,00
	JUMLAH	1.046.403.373,76	943.702.059,00	90,19	722.644.270,00

Pendapatan dari retribusi perizinan tertentu yang tidak terealisasi secara optimal:

1. Retribusi IMB hanya terealisasi sebesar Rp936.702.059,00 atau 91,56% dari anggaran yang telah ditetapkan karena pada tahun 2019 kecamatan hanya melayani pembuatan IMB untuk rumah lantai 1 dengan luas dibawah 200m² sedangkan rumah dengan luas dibawah 100m² tapi bertingkat pelayanan dilaksanakan oleh DPMPTSP.
2. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) tidak ada realisasi karena dengan adanya Permenaker No.10 Tahun 2018 tentang tata cara penggunaan TKA bahwa perpanjangan IMTA semua melalui pendaftaran online sehingga pembayaran retribusi langsung ke bank yang ditunjuk.

5.1.1.1.3. PENDAPATAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan mencapai Rp16.816.223.663,52 atau sebesar 98,81% dari anggaran sebesar Rp17.019.037.058,48 yang berasal dari Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah/BUMD yang terdiri dari:

Tabel 20. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

No	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
1	Bagian Laba PD Apotik Sidowaras	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Bagian Laba PT Bank Jatim	13.204.595.900,48	13.696.164.505,52	103,72	13.242.728.671,20
3	Bagian Laba PD BPR Bojonegoro	1.930.589.729,00	1.930.589.729,00	100,00	3.334.087.831,00
4	Bagian Laba PD Pasar Bojonegoro	0,00	0,00	0,00	740.628.858,75
5	Bagian Laba PT. Asri Dharma Sejahtera	700.000.000,00	0,00	0,00	0,00
6	Bagian Laba PT. Bojonegoro Bangun Sarana	415.118.429,00	415.118.429,00	100,00	120.562.274,00
7	Pendapatan BPR Jatim	768.733.000,00	774.351.000,00	100,73	683.796.000,00
8	Pendapatan Griya Dharma Kusuma	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH		17.019.037.058,48	16.816.223.663,52	98,81	18.121.803.634,95

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembubaran Perusahaan Daerah Apotek Sidowaras Kabupaten Bojonegoro, maka bagian laba PD Apotek Sidowaras tidak lagi dianggarkan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembubaran Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Bojonegoro, maka mulai tanggal 1 Januari 2019 secara penuh pengelolaan pasar daerah berada dibawah tupoksi Dinas Perdagangan serta ex karyawan PD Pasar akan dipekerjakan di Dinas Perdagangan sebagai Tenaga Harian Lepas (THL) yang diikat dalam perjanjian kontrak.

Pada Tahun 2019 pendapatan dari Griya Dharma Kusuma tidak dianggarkan karena berdasarkan hasil audit di tahun 2018, PT. Griya Dharma Kusuma masih mengalami kerugian sehingga tidak dapat menyetorkan pendapatan.

Bagian laba PT. Asri Dharma Sejahtera tidak lagi dicatat pada Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan tetapi dialihkan ke Lain-lain PAD yang Sah karena bagian laba PT ADS yang diterima oleh Pemkab Bojonegoro bukan deviden melainkan komitmen fee sebesar US\$50.000,00 per tahun.

5.1.1.1.4. LAIN-LAIN PAD YANG SAH

Lain-lain PAD yang sah yang mencapai Rp406.922.041.211,01 atau sebesar 108,19% dari anggaran sebesar Rp376.119.517.167,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 21. Lain-Lain PAD yang Sah

No	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
1	Hasil penjualan aset yang tidak dipisahkan	119.810.501,00	33.188.000,00	27,70	293.038.000,00
2	Pendapatan Jasa Giro	16.314.421.195,00	26.979.225.884,39	165,37	11.500.112.519,46
3	Pendapatan Bunga	53.561.435.944,00	90.658.088.134,90	169,26	9.444.163.082,75
4	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	6.000.000.000,00	2.541.375.289,26	42,36	5.610.571.902,78
5	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	6.000.000.000,00	1.721.574.338,43	28,69	5.537.571.565,22
6	Pendapatan dari Pengembalian	10.024.000.000,00	2.543.635.203,03	25,38	2.324.675.576,83

No	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
7	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	0,00	404.295.984,28	0,00	0,00
8	Pendapatan Denda Retribusi	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Pendapatan dari BLUD	225.009.882.000,00	218.505.763.055,32	97,11	209.110.943.972,99
10	Pendapatan Lain-lain	6.000.000.000,00	10.347.803.663,40	172,46	2.446.975.443,04
11	Hasil Penjualan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	160.989.111,00
12	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	53.089.967.527,00	53.187.091.658,00	100,18	46.179.022.600,00
JUMLAH		376.119.517.167,00	406.922.041.211,01	108,19	292.608.063.774,07

Dari jumlah pendapatan tersebut, sebesar 53,69% dihasilkan dari pendapatan BLUD RSUD Dr.R.Sosodoro Djatikoesoemo, RSUD Sumberrejo dan RSUD Padangan yaitu sebesar Rp218.505.763.055,32 dengan rincian sebagai berikut:

(a)	Pendapatan BLUD RSUD Sosodoro Djatikoesoemo	Rp 169.984.610.757,74
(b)	Pendapatan BLUD RSUD Sumberrejo	Rp 24.744.733.645,10
(c)	Pendapatan BLUD RSUD Padangan	Rp 23.776.418.652,48
Jumlah		Rp 218.505.763.055,32

Dari pendapatan BLUD senilai Rp218.505.763.055,32 tersebut, pendapatan senilai Rp2.989.036.234,00 merupakan retribusi farmasi yang disetorkan ke kas daerah.

5.1.1.2. PENDAPATAN TRANSFER

Realisasi Pendapatan Transfer yang dicapai pada Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp4.109.980.517.778,00 atau sebesar 99,50% dari anggaran sebesar Rp4.130.522.524.680,79 yang terdiri dari:

Tabel 22. Pendapatan Transfer

No	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
1	Transfer Pemerintah Pusat	3.939.970.136.300,00	3.522.411.681.988,00	89,40	3.814.660.800.562,00
2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	33.175.993.000,00	400.377.303.000,00	1.206,83	17.250.000.000,00
3	Transfer Pemerintah Daerah	143.318.649.880,79	173.083.787.290,00	120,77	147.434.223.898,00
4	Bantuan Keuangan	14.057.745.500,00	14.107.745.500,00	100,36	12.158.900.000,00
JUMLAH		4.130.522.524.680,79	4.109.980.517.778,00	99,50	3.991.503.924.460,00

5.1.1.2.1. PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT

Realisasi Pendapatan Transfer pemerintah pusat sebesar Rp3.522.411.681.988,00 atau sebesar 89,40% dari anggaran sebesar Rp3.939.970.136.300,00. Pendapatan Transfer pemerintah pusat terdiri atas:

Tabel 23. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

No	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
1	Dana Bagi Hasil Pajak	274.198.238.000,00	202.380.620.388,00	73,81	251.636.029.601,00
	- Pajak Bumi dan	0,00	0,00	0,00	153.345.543.645,00

No	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
	Bangunan Perkotaan dan Pedesaan				
	- Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan	214.962.291.000,00	148.447.455.400,00	69,06	42.890.426.800,00
	- Pajak Penghasilan Orang Pribadi	19.578.415.000,00	14.242.638.152,00	72,75	20.582.163.156,00
	- Bagi Hasil Cukai Tembakau	39.657.532.000,00	39.690.526.836,00	100,08	34.817.896.000,00
2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	2.270.342.995.300,00	1.973.193.312.507,00	86,91	2.281.171.868.831,00
	- Provisi Sumber Daya Hutan	620.478.000,00	372.286.800,00	60,00	712.842.147,00
	- Penerimaan Pungutan Hasil Perikanan	983.593.000,00	590.155.800,00	60,00	701.234.591,00
	- Pertambangan Minyak Bumi	2.186.228.132.450,00	1.892.179.760.127,00	86,55	2.244.185.894.997,00
	- Pertambangan Gas Alam/Bumi	8.648.613.150,00	7.489.975.221,00	86,60	4.352.245.562,00
	- Pertambangan Panas Bumi	33.739.000,00	34.775.673,00	103,07	31.203.994,00
	- Pertambangan Umum	811.364.000,00	567.954.800,00	70,00	814.447.240,00
	- Bagi Hasil Minyak untuk Pendidikan Dasar	73.017.075.700,00	71.958.404.086,00	98,55	30.374.000.300,00
3	Dana Alokasi Umum	975.387.399.000,00	975.387.399.000,00	100,00	932.357.598.649,00
4	Dana Alokasi Khusus	117.801.289.000,00	90.276.711.983,00	76,63	69.725.202.232,00
	- Bidang Pendidikan	26.734.418.000,00	19.939.092.600,00	74,58	6.514.042.100,00
	- Bidang Kesehatan	32.236.575.000,00	28.069.780.547,00	87,07	28.163.563.464,00
	- Bidang Lingkungan Hidup	808.817.000,00	788.848.843,00	97,53	763.839.837,00
	- Bidang Infrastruktur Jalan	26.929.971.000,00	19.860.333.438,00	73,75	17.686.095.000,00
	- Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman	3.262.144.000,00	2.283.500.800,00	70,00	2.394.704.900,00
	- Bidang Kelautan dan Perikanan	764.406.000,00	758.525.955,00	99,23	598.711.000,00
	- Bidang Perdagangan	3.775.000.000,00	3.430.000.000,00	90,86	2.747.137.226,00
	- Bidang Air Minum dan Sanitasi	13.202.221.000,00	10.210.950.400,00	77,34	9.507.961.300,00
	- Bidang Pariwisata	1.809.720.000,00	1.266.804.000,00	70,00	1.349.147.405,00
	- Bidang Kedaulatan Pangan	3.585.620.000,00	2.850.286.400,00	79,49	0,00
	- Bidang Pertanian	1.875.400.000,00	818.589.000,00	43,65	0,00
	- Bidang Industri Kecil dan Menengah	2.816.997.000,00	0,00	0,00	0,00
5	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	302.240.215.000,00	281.173.638.110,00	93,03	279.770.101.249,00
	- Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	32.185.200.000,00	30.893.057.780,00	95,99	32.884.257.543,00
	- Tunjangan Profesi Guru	217.906.218.000,00	202.873.730.230,00	93,10	216.692.071.378,00
	- Tambahan Penghasilan Guru	1.869.000.000,00	705.550.500,00	37,75	573.300.000,00
	- Bantuan Operasional Kesehatan	26.612.350.000,00	24.593.491.512,00	92,41	19.921.482.732,00
	- Akreditasi Puskesmas	2.586.820.000,00	0,00	0,00	0,00
	- Jaminan Persalinan	1.428.000.000,00	0,00	0,00	0,00

No	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
	- Bantuan Operasional KB	8.311.902.000,00	8.047.977.800,00	96,82	7.816.898.900,00
	- Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	2.296.265.000,00	1.895.530.288,00	82,55	1.651.721.696,00
	- Tunjangan Khusus Guru	0,00	0,00	0,00	230.369.000,00
	- Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	8.574.460.000,00	11.694.300.000,00	136,39	0,00
	- Dana Peningkatan Koperasi dan UKM	470.000.000,00	470.000.000,00	100,00	0,00
	JUMLAH	3.939.970.136.300,00	3.522.411.681.988,00	89,40	3.814.660.800.562,00

Realisasi DBH Pajak dan dan bukan Pajak (SDA) sampai akhir tahun 2019 masing-masing sebesar 73,81% dan 86,91% dari target pendapatan DBH yang ditetapkan, dengan rincian sebagai berikut:

- (1)) Transfer alokasi DBH TA 2019 sampai dengan triwulan 3 sejumlah Rp1.668.866.759.000,00;
- (2)) Transfer sebagian Kurang Bayar DBH s/d TA 2017 sejumlah Rp199.573.812.249,00 (sesuai PMK 77/2019 bulan Mei 2019 dan PMK 167/2019 bulan November 2019);
- (3)) Transfer sisa Kurang Bayar s/d TA 2017 dan sebagian Kurang Bayar TA 2018 berdasar PMK 180/2019 (tanggal 16 Desember 2019) sejumlah Rp307.133.361.646,00 dari total penetapan Kurang Bayar s/d TA 2018 Kabupaten Bojonegoro sejumlah Rp857.469.046.973,00 setelah dipotong LB tahap I (Perdirjen PK No.8/2019) sejumlah Rp311.012.565.172,00.

Berdasar realisasi pendapatan diatas dan memperhatikan tidak tersalurnya alokasi DBH triwulan IV TA 2019 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2019 serta ditindaklanjuti melalui PMK 180/2019, sehingga untuk pendapatan daerah Kabupaten Bojonegoro sektor DBH sampai dengan akhir tahun 2019 ada selisih kurang sejumlah Rp369.967.300.405,00 dari pagu P-APBD yang ditetapkan.

Adapun untuk alokasi DBH triwulan IV TA 2019 yang tidak disalurkan tersebut akan menjadi Kurang Bayar dalam tahun berikutnya dengan proyeksi nilai Rp798.628.407.652,00 sebagaimana dijelaskan dalam lampiran PMK 180/2019.

Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) - Provisi Sumber Daya Hutan, Penerimaan Pungutan Hasil Perikanan, dan Pertambangan Umum yang tidak mencapai target yang ditetapkan disebabkan adanya transfer Kurang Bayar s.d Tahun 2018 dan langsung dipotong sebesar jumlah yang ditransfer. Transaksi tersebut tidak dicatat karena tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

5.1.1.2.2. PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA

Pendapatan transfer pemerintah pusat-lainnya sebesar Rp400.377.303.000,00 atau sebesar 1.206,83% dari anggaran yang ditetapkan merupakan pendapatan transfer yang bersumber dari Pemerintah Pusat dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 24. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

No	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
1	Dana Penyesuaian	33.175.993.000,00	33.175.993.000,00	100,00	17.250.000.000,00
	- Dana Insentif Daerah	33.175.993.000,00	33.175.993.000,00	100,00	17.250.000.000,00
2	Dana Desa	0,00	367.201.310.000,00	0,00	0,00
	- Dana Desa	0,00	367.201.310.000,00	0,00	0,00
	JUMLAH	33.175.993.000,00	400.377.303.000,00	1.206,83	17.250.000.000,00

Kabupaten Bojonegoro menerima Dana Insentif Daerah (DID) karena memenuhi kriteria utama yang wajib dimiliki daerah penerima DID, meliputi opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Wajar Tanpa Pengecualian, penetapan Peraturan Daerah (Perda) mengenai APBD tepat waktu, ketersediaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan penggunaan *e-government* seperti *e-budgetting* dan *e-procurement*.

Dana Insentif Daerah (DID) yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro pada T.A. 2019 terdiri dari:

- Pelayanan dasar publik bidang pendidikan	Rp 11.898.274.000,00
- Pelayanan dasar publik bidang kesehatan	Rp 11.462.572.000,00
- Pelayanan dasar publik bidang infrastruktur	Rp 9.815.147.000,00
Jumlah	Rp 33.175.993.000,00

Berdasarkan Buletin Teknis SAP Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrua, dalam Laporan Realisasi Anggaran 2019, Dana Desa disajikan pada Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya. Sedangkan pada tahun 2018 Dana Desa disajikan pada Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

5.1.1.2.3. PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH DAERAH LAINNYA

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp173.083.787.290,00 atau sebesar 120,77% dari anggaran sebesar Rp143.318.649.880,79 yang merupakan pendapatan transfer yang bersumber dari Pemerintah Daerah Provinsi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 25. Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

No	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
1	Bagi Hasil Pajak				
	- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	35.465.450.661,90	50.076.854.997,00	141,20	36.529.087.032,00
	- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	21.703.420.458,90	28.300.274.095,00	130,40	37.658.157.178,00
	- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	38.160.259.252,00	49.144.369.373,00	128,78	23.351.703.360,00
	- Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah	210.663.993,63	210.013.688,00	99,69	225.222.369,00
	- Bagi Hasil Pajak Rokok	47.778.855.514,36	45.352.275.137,00	94,92	49.670.053.959,00
	JUMLAH	143.318.649.880,79	173.083.787.290,00	120,77	147.434.223.898,00

5.1.1.2.4. BANTUAN KEUANGAN

Bantuan Keuangan terealisasi sebesar Rp14.107.745.500,00 atau sebesar 100,36% dari anggaran sebesar Rp14.057.745.500,00 sehingga mengalami kenaikan 16,02% atau Rp1.948.845.500,00 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2018 yaitu sebesar Rp12.158.900.000,00. Bantuan Keuangan dari provinsi dipergunakan untuk:

Tabel 26. Rincian Bantuan Keuangan

No	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
1	Bantuan Keuangan Provinsi Pengembangan Taman Posyandu	225.000.000,00	225.000.000,00	100,00	225.000.000,00
2	Bantuan Keuangan Provinsi Honor 197 Perawat	3.427.800.000,00	3.427.800.000,00	100,00	3.427.800.000,00
3	Bantuan keuangan iuran JKN yang ditanggung oleh Pemerintah untuk perawat Puskesmas	171.390.000,00	171.390.000,00	100,00	0,00
4	Bantuan keuangan iuran JKN yang ditanggung oleh Pemerintah untuk dokter Puskesmas rawat inap standar	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	0,00
5	Bantuan keuangan pendampingan ibu hamil resiko tinggi	164.486.500,00	164.486.500,00	100,00	0,00
6	Bantuan keuangan kunjungan konseling kesehatan	1.382.940.000,00	1.382.940.000,00	100,00	0,00
7	Bantuan keuangan pendampingan Poskestren	121.029.000,00	121.029.000,00	100,00	0,00
8	Bantuan Keuangan Provinsi Honor 6 Dokter	180.000.000,00	180.000.000,00	100,00	180.000.000,00
9	Bantuan Keuangan Hari Aksara Internasional	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	10.000.000,00
10	Bantuan Keuangan Honor Guru Non PNS SMP	168.000.000,00	168.000.000,00	100,00	168.000.000,00
11	Bantuan Keuangan Honor Guru Non PNS SD	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00	24.000.000,00
12	Bantuan Keuangan Honor Guru Non PNS TK	180.000.000,00	180.000.000,00	100,00	180.000.000,00
13	Bantuan Keuangan Honor Kepala/Guru Non PNS TK/PAUD	391.200.000,00	391.200.000,00	100,00	391.200.000,00
14	Bantuan Keuangan BOP Madin	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	100.000.000,00
15	Bantuan Keuangan Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS)	7.302.900.000,00	7.302.900.000,00	100,00	7.302.900.000,00
16	Bantuan Keuangan Program Jalin Matra	0,00	50.000.000,00	0,00	100.000.000,00
17	Bantuan Keuangan Hari Jadi Provinsi	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	50.000.000,00
18	Bantuan TMMD	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	0,00
	JUMLAH	14.057.745.500,00	14.107.745.500,00	100,36	12.158.900.000,00

5.1.1.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah senilai Rp98.596.160.000,00 atau 21,17% dari anggaran senilai Rp465.797.470.000,00 merupakan pendapatan Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2019 untuk

seluruh SD Negeri dan SMP Negeri yang ada di wilayah Kabupaten Bojonegoro. Untuk Pendapatan Lainnya yang merupakan pendapatan Hibah Dana Desa, pada tahun 2019 disajikan pada Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya sesuai dengan Buletin Teknis SAP Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrua.

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2019 dapat dirinci sebagai berikut

Tabel 27. Rincian Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

No	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
I	Pendapatan Hibah Dana BOS	88.789.160.000,00	98.596.160.000,00	111,05	90.715.879.573,18
1	Pendapatan Hibah Dana BOS SD Negeri di Kecamatan Margomulyo	1.572.640.000,00	1.724.640.000,00	109,67	1.626.080.000,00
2	Pendapatan Hibah Dana BOS SD Negeri di Kecamatan Ngraho	2.603.200.000,00	2.603.200.000,00	100,00	2.680.320.000,00
3	Pendapatan Hibah Dana BOS SD Negeri di Kecamatan Tambakrejo	3.223.680.000,00	3.351.680.000,00	103,97	3.341.120.000,00
4	Pendapatan Hibah Dana BOS SD Negeri di Kecamatan Ngambon	771.520.000,00	771.520.000,00	100,00	799.200.000,00
5	Pendapatan Hibah Dana BOS SD Negeri di Kecamatan Bubulan	833.920.000,00	833.920.000,00	100,00	851.360.000,00
6	Pendapatan Hibah Dana BOS SD Negeri di Kecamatan Temayang	1.739.680.000,00	1.961.680.000,00	112,76	1.783.520.000,00
7	Pendapatan Hibah Dana BOS SD Negeri di Kecamatan Sugihwaras	2.207.840.000,00	2.783.840.000,00	126,09	2.257.120.000,00
8	Pendapatan Hibah Dana BOS SD Negeri di Kecamatan Kedungadem	3.607.840.000,00	4.183.840.000,00	115,97	3.715.040.000,00
9	Pendapatan Hibah Dana BOS SD Negeri di Kecamatan Kepohbaru	2.359.520.000,00	2.472.520.000,00	104,79	2.422.240.000,00
10	Pendapatan Hibah Dana BOS SD Negeri di Kecamatan Baureno	2.874.560.000,00	3.355.560.000,00	116,73	2.886.880.000,00
11	Pendapatan Hibah Dana BOS SD Negeri di Kecamatan Kanor	2.246.240.000,00	2.246.240.000,00	100,00	2.267.840.000,00
12	Pendapatan Hibah Dana BOS SD Negeri di Kecamatan Sumberrejo	2.599.840.000,00	3.085.840.000,00	118,69	2.643.360.000,00
13	Pendapatan Hibah Dana BOS SD Negeri di Kecamatan Balen	2.347.200.000,00	2.423.200.000,00	103,24	2.399.680.000,00
14	Pendapatan Hibah Dana BOS SD Negeri di Kecamatan Sukosewu	1.436.960.000,00	1.862.960.000,00	129,65	1.468.160.000,00
15	Pendapatan Hibah Dana BOS SD Negeri di Kecamatan Kapas	2.381.280.000,00	2.742.280.000,00	115,16	2.443.200.000,00
16	Pendapatan Hibah Dana BOS SD Negeri di Kecamatan Bojonegoro	4.513.280.000,00	4.513.280.000,00	100,00	4.608.640.000,00
17	Pendapatan Hibah Dana BOS SD Negeri di Kecamatan Trucuk	1.828.480.000,00	1.828.480.000,00	100,00	1.876.960.000,00
18	Pendapatan Hibah Dana BOS SD Negeri di Kecamatan Dander	3.978.720.000,00	4.228.720.000,00	106,28	4.047.200.000,00
19	Pendapatan Hibah Dana BOS SD Negeri di Kecamatan Ngasem	2.202.720.000,00	2.504.720.000,00	113,71	2.304.960.000,00
20	Pendapatan Hibah Dana BOS SD Negeri di Kecamatan Kalitidu	2.227.520.000,00	2.227.520.000,00	100,00	2.297.280.000,00
21	Pendapatan Hibah Dana BOS SD Negeri di Kecamatan Malo	1.667.520.000,00	2.328.520.000,00	139,64	1.711.360.000,00
22	Pendapatan Hibah Dana BOS SD Negeri di Kecamatan Purwosari	1.809.120.000,00	1.867.120.000,00	103,21	1.849.600.000,00
23	Pendapatan Hibah Dana BOS SD Negeri di Kecamatan Padangan	2.297.920.000,00	2.415.920.000,00	105,14	2.388.480.000,00
24	Pendapatan Hibah Dana BOS SD Negeri di Kecamatan Kasiman	1.741.280.000,00	2.003.280.000,00	115,05	1.764.480.000,00
25	Pendapatan Hibah Dana BOS SD	990.880.000,00	1.338.880.000,00	135,12	996.160.000,00

No	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
	Negeri di Kecamatan Kedewan				
26	Pendapatan Hibah Dana BOS SD Negeri di Kecamatan Gondang	1.449.280.000,00	2.045.280.000,00	141,12	1.454.080.000,00
27	Pendapatan Hibah Dana BOS SD Negeri di Kecamatan Sekar	1.835.840.000,00	1.835.840.000,00	100,00	1.841.920.000,00
28	Pendapatan Hibah Dana BOS SD Negeri di Kecamatan Gayam	1.643.680.000,00	1.995.680.000,00	121,42	1.681.120.000,00
29	Pendapatan Hibah Dana BOS SMP Negeri	27.797.000.000,00	31.060.000.000,00	111,74	28.025.000.000,00
30	Pendapatan Bunga BOS	0,00	0,00	0,00	283.519.573,18
II	Pendapatan Lainnya	377.008.310.000,00	0,00	0,00	316.364.467.000,00
1	Pendapatan Hibah Dana Desa	377.008.310.000,00	0,00	0,00	316.364.467.000,00
	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	465.797.470.000,00	98.596.160.000,00	21,17	407.080.346.573,18

Dari semua penjelasan atas pendapatan Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2019 dapat disimpulkan bahwa untuk sisi pendapatan, kontribusi pendapatan terbesar adalah dari Kelompok Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat yang mencapai Rp3.522.411.681.988,00 atau mencapai 73,85% dari total pendapatan. Sedangkan pemberi kontribusi terkecil adalah dari kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp465.797.470.000,00 atau sebesar 9,77%.

5.1.2. BELANJA

Belanja adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Total Belanja Tahun 2019 adalah Rp3.401.676.515.143,77 atau 57,50% dari anggaran Rp5.916.118.079.759,58 dengan rincian sebagai berikut:

5.1.2.1. BELANJA OPERASI

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial pada Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp2.096.286.212.017,39 atau sebesar 78,18% dari anggaran sebesar Rp2.681.289.577.928,34 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 28. Belanja Operasi

No.	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
1	Belanja Pegawai	1.267.986.220.423,88	1.058.724.416.043,02	83,50	1.017.533.334.032,98
2	Belanja Barang dan Jasa	1.145.335.970.646,64	857.025.938.441,37	74,83	671.762.552.372,57
3	Belanja Subsidi	223.000.000,00	0,00	0,00	75.600.000,00
4	Belanja Hibah	237.605.386.857,82	162.422.857.533,00	68,36	127.732.077.282,35
5	Bantuan Sosial	30.139.000.000,00	18.113.000.000,00	60,10	3.997.500.000,00
	Jumlah	2.681.289.577.928,34	2.096.286.212.017,39	78,18	1.821.101.063.687,90

Jumlah tersebut terdiri dari :

5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai mencapai Rp1.058.724.416.043,02 atau sebesar 83,50% dari anggaran sebesar Rp1.267.986.220.423,88 yang terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 29. Belanja Pegawai

No	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
	Belanja Tidak Langsung	1.119.817.386.443,00	924.977.757.551,00	82,60	911.779.870.321,00
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.008.331.010.461,00	842.840.310.287,00	83,59	834.452.066.790,00
2	Tambahan Penghasilan	92.587.511.402,00	66.844.114.760,00	72,20	61.913.348.727,00
3	Belanja Penerimaan Lainnya Pimp./Angg. DPRD /KDh/WKDh	9.615.657.151,00	9.600.300.000,00	99,84	10.462.400.000,00
4	Belanja Pemungutan Pajak Daerah	3.534.017.000,00	1.511.093.632,00	42,76	631.427.671,00
5	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	4.730.595.606,00	3.371.792.386,00	71,28	2.858.173.226,00
6	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1.018.594.823,00	810.146.486,00	79,54	1.462.453.907,00
	Belanja Pegawai	148.168.833.980,88	133.746.658.492,02	90,27	105.753.463.711,98
1	Uang Lembur	8.090.907.770,00	5.627.365.200,00	69,55	6.322.977.408,00
2	Honorarium Seminar/Rakor/ Sosialisasi/ Diseminasi atau Kegiatan Sejenisnya	1.305.176.300,00	494.925.000,00	37,92	-
3	Belanja Pegawai Dana BOS	21.686.704.400,00	21.607.452.100,00	99,63	74.727.000,00
4	Belanja Pegawai (Non Honorarium Pengelola) Dana BOS	-	-	-	29.400.000,00
5	Belanja Pegawai BLUD	79.776.935.450,26	71.842.243.298,00	90,05	68.816.158.611,00
6	Honorarium Pelayanan JKN	32.681.100.060,62	31.555.812.894,02	96,56	28.347.981.692,98
7	Honorarium Tim Pengelola/Penyusun/LPSE	56.560.000,00	33.800.000,00	59,76	25.005.000,00
8	Honorarium Tenaga Bidang Informatika	138.000.000,00	98.550.000,00	71,41	-
9	Honorarium Pembahasan/Pengkajian Masalah Strategis dan Kebijakan Daerah	2.409.150.000,00	1.445.300.000,00	59,99	724.684.000,00
10	Biaya Khusus Pemeriksaan/Pengawasan	2.024.300.000,00	1.041.210.000,00	51,44	1.412.530.000,00
	Jumlah Belanja Pegawai	1.267.986.220.423,88	1.058.724.416.043,02	83,50	1.017.533.334.032,98

5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Total realisasi untuk Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2019 mencapai Rp857.025.938.441,37 atau sebesar 74,83% dari anggaran sebesar Rp1.145.335.970.646,64. Sedangkan di Tahun Anggaran 2018 terealisasi sebesar Rp671.762.552.372,57 sehingga mengalami peningkatan senilai Rp185.263.386.068,80 atau 27,58%.

Tabel 30. Belanja Barang dan Jasa

No	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
1	Belanja Bahan Pakai Habis	34.138.808.765,09	26.515.524.737,30	77,67	33.411.016.769,94
2	Belanja Bahan/Material	37.969.605.863,38	33.073.927.124,03	87,11	33.341.229.967,77
3	Belanja Jasa Kantor	55.170.590.111,50	43.723.781.450,00	79,25	45.173.169.148,53
4	Belanja Premi Asuransi	58.896.715.650,00	34.179.423.590,78	58,03	3.463.684.860,00
5	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.529.213.556,01	7.626.712.648,00	72,43	8.899.845.679,00

No	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.422.875.383,60	12.518.914.805,00	76,23	21.625.433.911,40
7	Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/Parkir	4.563.354.250,00	2.763.472.215,00	60,56	1.563.882.235,00
8	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.180.475.000,00	1.319.531.943,00	60,52	1.035.008.319,00
9	Belanja Sewa Alat Berat	5.264.000,00	5.264.000,00	100,00	-
10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.717.690.000,00	4.272.497.117,00	63,60	2.825.569.233,00
11	Belanja Makanan dan Minuman	40.749.154.465,00	30.884.939.018,00	75,79	27.004.685.011,00
12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	3.624.960.000,00	1.092.411.541,00	30,14	1.037.765.800,00
13	Belanja Pakaian Kerja	2.307.155.000,00	1.709.622.343,00	74,10	1.189.667.650,00
14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	5.144.169.500,00	4.607.181.871,00	89,56	2.902.133.131,00
15	Belanja Perjalanan Dinas	114.824.779.336,00	69.689.684.894,00	60,69	53.880.436.358,63
16	Belanja Perjalanan Pindah Tugas	-	-	-	7.350.000,00
17	Belanja Pemeliharaan	25.401.623.403,00	18.676.602.688,38	73,53	9.561.902.893,00
18	Belanja Jasa Konsultansi	14.001.515.648,00	9.471.466.657,00	67,65	5.076.151.500,00
19	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	5.506.597.000,00	2.226.466.300,00	40,43	4.190.209.062,48
20	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	474.855.000,00	194.365.000,00	40,93	264.495.000,00
21	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	6.887.590.000,00	3.296.658.670,00	47,86	1.515.928.443,00
22	Belanja Honorarium Non Pegawai	-	-	-	187.756.100,00
23	Belanja Honorarium PNS	41.165.761.309,41	33.839.059.125,00	82,20	17.468.429.547,00
24	Belanja Honorarium Non PNS	122.093.448.696,40	102.744.920.800,00	84,15	86.782.205.679,00
25	Belanja Honorarium Pengelola Dana BOS	-	-	-	1.139.339.000,00
26	Belanja Barang dan Jasa Dana BOS	49.446.678.671,47	48.865.994.099,14	98,83	975.077.145,98
27	Belanja Barang Inventaris/Non Aset Tetap	10.816.025.139,00	8.880.248.373,00	82,10	9.354.094.846,55
28	Belanja Pembenihan/ Pembibitan	-	-	-	134.025.000,00
29	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	342.700.000,00	332.210.000,00	96,94	224.441.000,00
30	Belanja Beban Pajak	9.000.000,00	-	-	9.603.268,00
31	Belanja Barang dan Jasa BLUD	170.046.727.266,78	130.489.494.138,00	76,74	118.504.304.315,00
32	Belanja Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan	56.213.941.007,00	55.237.947.771,00	98,26	69.112.462.368,00
33	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	24.116.801.250,00	14.883.185.500,00	61,71	11.081.977.123,00
34	Uang untuk Diberikan kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga	4.396.750.000,00	1.059.150.000,00	24,09	586.020.000,00
35	Belanja Hibah Barang/ Jasa	123.111.308.683,00	82.983.348.071,42	67,41	47.111.250.504,29
36	Belanja Bantuan Sosial Barang	66.239.782.900,00	46.362.421.718,32	69,99	34.018.948.753,00

No	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
37	Belanja Jasa Pelatihan/ Pemberdayaan Masyarakat	1.456.299.000,00	1.377.397.650,00	94,58	103.620.000,00
38	Belanja Akomodasi Pengiriman MTQ	21.175.000,00	-	-	-
39	Belanja Seleksi/Rekrutmen	-	-	-	-
40	Belanja diklat, bimtek, lokakarya, seminar, workshop untuk pimpinan dan anggota DPRD	225.000.000,00	225.000.000,00	100,00	348.250.000,00
41	Uang Saku	8.270.338.292,00	6.962.820.000,00	84,19	6.057.111.050,00
42	Belanja pengukuran, pemetaan, pemisahan, pengembalian batas dan rekomendasi tanah	318.700.000,00	9.816.300,00	3,08	-
43	Honorarium penyelenggara ujian dan diklat	786.667.500,00	376.940.000,00	47,92	154.912.500,00
44	Honorarium Petugas Teknis	1.217.250.000,00	715.410.000,00	58,77	1.504.307.800,00
45	Honor Tim Pelaksana Kegiatan	6.456.865.000,00	4.228.030.000,00	65,48	3.768.405.000,00
46	Belanja pembayaran pendaftaran lomba yang diikuti sekolah	23.800.000,00	19.800.000,00	83,19	99.435.600,00
47	Belanja rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	4.776.800.000,00	3.437.584.855,00	71,96	5.013.887.000,00
48	Belanja penebusan salinan perkara	3.000.000,00	-	-	-
49	Belanja Jasa Kesehatan	6.308.000.000,00	5.724.650.000,00	90,75	36.951.800,00
50	Tenaga Khusus Pengawasan Bupati dan Wakil Bupati atau Pejabat Negara	864.000.000,00	221.500.000,00	25,64	-
51	Belanja Biaya Ganti Rugi	1.075.400.000,00	184.183.428,00	17,13	-
52	Belanja biaya distribusi SPPT PBB P2	16.759.000,00	16.378.000,00	97,73	16.172.000,00
Jumlah Belanja Barang dan Jasa		1.145.335.970.646,64	857.025.938.441,37	74,83	671.762.552.372,57

Dalam anggaran dan realisasi belanja barang tersebut, termasuk Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga dan Belanja Bantuan Sosial Barang/Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga yang merupakan anggaran yang dialokasikan pada belanja barang jasa untuk hibah dan bantuan sosial kepada Pihak Ketiga/Masyarakat. Belanja tersebut terealisasi masing-masing sebesar Rp82.983.348.071,42 dan Rp46.362.421.718,32. Rincian masing-masing belanja per SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 31. Rincian Belanja Belanja Hibah Barang/Jasa

No	Nama SKPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pendidikan	1.356.227.125,00
2	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	64.698.547.593,42
3	Dinas Lingkungan Hidup	693.374.000,00
4	Dinas Peternakan dan Perikanan	138.820.000,00
5	Dinas Pertanian	12.046.263.953,00
6	Bagian Perlengkapan	4.050.115.400,00
Jumlah Belanja Hibah Barang/Jasa		82.983.348.071,42

Tabel 32. Rincian Belanja Bantuan Sosial Barang

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	45.029.377.108,32
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	475.169.250,00
3	Dinas Sosial	708.148.000,00
4	Dinas Ketahanan Pangan	149.727.360,00
	Jumlah Belanja Bantuan Sosial Barang	46.362.421.718,32

5.1.2.1.3. Belanja Subsidi

Pada Tahun Anggaran 2019, belanja subsidi dianggarkan sebesar Rp223.000.000,00 tetapi tidak ada realisasi.

Tabel 33. Belanja Subsidi

No.	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
1.	Belanja Subsidi	223.000.000,00	0,00	0,00	75.600.000,00
	JUMLAH	223.000.000,00	0,00	0,00	75.600.000,00

5.1.2.1.4. Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2019 merupakan realisasi belanja hibah kepada Pemerintah dan Badan/Lembaga/Organisasi dalam bentuk uang sebesar Rp162.422.857.533,00 atau sebesar 68,36% dari anggaran sebesar Rp237.605.386.857,82 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 34. Belanja Hibah

NO	URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	%	REALISASI 2018
I	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	22.267.434.000,00	21.969.434.000,00	98,66	46.670.755.928,00
1	Hibah kepada Kemenag	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	-
2	Hibah kepada Kodim	19.187.434.000,00	19.159.434.000,00	99,85	1.357.800.000,00
3	Hibah kepada Polres	2.880.000.000,00	2.760.000.000,00	95,83	5.142.659.000,00
4	Hibah kepada Subdenpom	150.000.000,00	-	-	-
5	Hibah kepada KPU	-	-	-	33.705.499.393,00
6	Hibah kepada Panwaslu	-	-	-	6.464.797.535,00
II	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	215.337.952.857,82	140.453.423.533,00	65,22	81.061.321.354,35
1	Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	410.000.000,00	285.000.000,00	69,51	-
2	Hibah Kepada Lembaga Swadaya Masyarakat	60.000.000,00	-	-	20.000.000,00
3	Hibah kepada Palang Merah Indonesia (PMI)	1.500.000.000,00	500.000.000,00	33,33	286.000.000,00
4	Hibah Kepada PRAMUKA	200.000.000,00	-	-	100.000.000,00
5	Hibah Kepada KONI	5.702.973.000,00	5.185.648.001,00	90,93	1.402.120.854,35
6	Hibah kepada Forum PAUD Kabupaten Bojonegoro	75.000.000,00	-	-	-
7	Hibah kepada Taman Bacaan Masyarakat (TBM)	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	30.000.000,00
8	Hibah Kepada PGRI	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	57.000.000,00
9	Hibah Kepada IGTKI	75.000.000,00	-	-	-
10	Hibah Kepada Badan Amil Zakat	50.000.000,00	-	-	-

NO	URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	%	REALISASI 2018
11	Hibah Kepada Badan Hisap Rukyat	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	42.000.000,00
12	Hibah Kepada MUI	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	57.000.000,00
13	Hibah Bidang Sosial (LKSA)	-	-	-	-
14	Hibah operasional lembaga TPQ (Bagian Kesra)	884.000.000,00	207.000.000,00	23,42	-
15	Hibah untuk prestasi penyeteroran/pembayaran PBB dan pendistribusian SPPT PBB kepada LKM	89.418.021,00	-	-	-
16	Pimpinan Daerah Dewan Masjid (DMI) Kabupaten Bojonegoro	50.000.000,00	-	-	-
17	Hibah Kepada FKUB	500.000.000,00	273.000.000,00	54,60	273.000.000,00
18	Hibah kepada Rumah Sakit Muhammadiyah Kalitidu	500.000.000,00	-	-	-
19	Hibah kepada Karang Taruna	-	-	-	-
20	Hibah BOP PAUD (DAK Non Fisik BOP PAUD)	32.067.000.000,00	29.016.600.000,00	90,49	31.529.400.000,00
21	Hibah kepada Lembaga Keswadayaan Masyarakat / LKM	3.840.000.000,00	2.639.800.000,00	69,87	3.328.200.000,00
22	Hibah Infrastruktur Pedesaan Bidang Pendidikan (Dinas Pendidikan)	55.629.129.436,82	43.698.064.589,00	78,55	21.276.755.500,00
23	Hibah kepada LPTQ	495.000.000,00	-	-	-
24	Hibah BPPDGS	-	-	-	11.706.345.000,00
25	Hibah infrastruktur pedesaan bidang kesra (Bagian Kesra)	1.550.000.000,00	600.000.000,00	38,71	2.485.000.000,00
26	Hibah untuk pembangunan sarana dan prasarana air bersih	1.715.000.000,00	1.715.000.000,00	100,00	980.000.000,00
27	Hibah kepada Organisasi Kepemudaan	360.147.000,00	150.000.000,00	41,65	-
28	Hibah alat musik	6.000.000,00	-	-	-
29	Hibah kepada perguruan silat	370.000.000,00	70.000.000,00	18,92	-
30	Hibah bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan (DAK Non Fisik)	8.574.460.000,00	6.546.204.600,00	76,35	-
31	Hibah kepada Dewan Wakaf	50.000.000,00	-	-	-
32	Hibah infrastruktur pedesaan bidang keolahragaan	200.000.000,00	-	-	-
33	Hibah Program KPM	-	-	-	-
34	Hibah Program Demplot	544.700.000,00	66.300.000,00	12,17	-
35	Hibah sarana prasarana tempat ibadah (Bagian Kesra)	8.228.682.500,00	1.780.000.000,00	21,63	-
36	Hibah pembangunan Ponpes, Madin dan TPA/TPQ (Bagian Kesra)	1.533.000.000,00	1.458.000.000,00	95,11	1.350.000.000,00
37	Hibah DAK Bidang Pertanian (DAK Dinas Ketahanan Pangan)	275.000.000,00	-	-	-
38	Belanja hibah pengembangan sumber-sumber air untuk irigasi sumber-sumber air irigasi pompanisasi/sumur	1.348.600.000,00	482.400.000,00	35,77	-

NO	URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	%	REALISASI 2018
	bor (DAK Dinas Pertanian)				
39	Hibah untuk Pembangunan Tangki septic skala komunal dan Jaringan perpanjangan(SR) (DAK Sanitasi/Cipta Karya)	3.915.000.000,00	3.132.000.000,00	80,00	-
40	Hibah untuk Pembangunan MCK++ dan Jaringan Perpipaan (DAK Sanitasi/Cipta Karya)	6.097.000.000,00	4.790.500.000,00	78,57	4.680.000.000,00
41	Pemenuhan honorarium Kinerja Kepsek/Guru TK/Paud Non PNS (BKK Provinsi Jatim)	384.000.000,00	333.600.000,00	86,88	696.000.000,00
42	Pemenuhan Honorarium Kinerja Guru Non PNS Jenjang Pendidikan SMP (BKK Provinsi Jatim)	108.000.000,00	96.000.000,00	88,89	-
43	Pemenuhan Honorarium Kinerja Guru Non PNS Jenjang Pendidikan TK (BKK Provinsi Jatim)	180.000.000,00	168.000.000,00	93,33	-
44	Pemenuhan Honorarium Kinerja Guru Non PNS Jenjang Pendidikan SD (BKK Provinsi Jatim)	24.000.000,00	12.000.000,00	50,00	-
45	Hibah Untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih (DAK Penugasan/DPKP Cipta Karya)	1.763.153.000,00	1.763.153.000,00	100,00	-
46	hibah bantuan modal Program Petani Mandiri	40.000.000.000,00	6.490.513.443,00	16,23	-
47	Hibah bidang Peternakan dan Perikanan	590.400.000,00	563.600.000,00	95,46	562.500.000,00
48	Hibah kepada Yayasan Al Amin Temayang (Dinas Kominfo)	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	-
49	Hibah kepada Yayasan Gerontologi Abiyoso Bojonegoro (Dinas Sosial)	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	-
50	Hibah kepada MWC - NU Kecamatan Kapas (Disperinaker)	528.000.000,00	528.000.000,00	100,00	-
51	Hibah kepada Kelompok Usaha Bersama (KUB) Gading Putra Jaya Desa Ngraseh Kecamatan Dander (Disperinaker)	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	-
52	Hibah DAK Pendidikan untuk Madrasah Aliyah (Dinas Pendidikan)	6.609.150.000,00	5.130.620.000,00	77,63	-
53	Ponpes Al Hikam Desa Kalisari Kecamatan Baureno (DPKP Cipta Karya)	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	-
54	Hibah kepada MWC - NU Desa Banjaran Kecamatan Baureno (DPKP Cipta Karya)	400.000.000,00	-	-	-
55	Yayasan Suyitno Bojonegoro (DPKP Cipta Karya)	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	-
56	Ponpes Al Rosyid Desa	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00	-

NO	URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	%	REALISASI 2018
	Ngumpakdalem Kecamatan Dander (DPKP Cipta Karya)				-
57	Hibah kepada 15 PAC PSNU Pagar Nusa (Dinpora)	1.340.279.900,00	1.340.279.900,00	100,00	-
58	Hibah sarana prasarana tempat ibadah/pokir PAPBD 2019 (Bagian Kesra)	8.330.000.000,00	3.890.000.000,00	46,70	-
59	Hibah BPPDGS Tingkat Ula (Dinas Pendidikan)	11.092.500.000,00	11.005.740.000,00	99,22	-
60	Hibah BPPDGS Tingkat Wustho (Dinas Pendidikan)	4.438.360.000,00	4.346.400.000,00	97,93	-
61	Hibah kepada MTs N 3 Bojonegoro (Dinpora)	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	-
62	Hibah kepada kelompok Bank Sampah (Dinas Lingkungan Hidup)	465.000.000,00	-	-	-
63	Hibah PAUD (TMMD) / Dinas Pendidikan	-	-	-	200.000.000,00
Jumlah Belanja Hibah		237.605.386.857,82	162.422.857.533,00	68,36	127.732.077.282,35

Selain hibah dalam bentuk uang, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro juga menganggarkan belanja hibah dalam bentuk barang dan/atau jasa. Hibah barang/jasa ini pada tahun 2019 dianggarkan dan direalisasikan pada belanja barang jasa, dengan anggaran sebesar Rp123.111.308.683,00 dan terealisasi sebesar Rp82.983.348.071,42.

5.1.2.1.5. Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp18.113.000.000,00 atau sebesar 60,10% dari anggaran sebesar Rp30.139.000.000,00. Belanja Bantuan Sosial tersebut merupakan bantuan sosial dalam bentuk uang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 35. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
Belanja Bantuan Sosial Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	2.546.000.000,00	1.084.000.000,00	42,58	686.000.000,00
Beasiswa Diploma & Sarjana Keluarga Miskin	2.546.000.000,00	1.084.000.000,00	42,58	686.000.000,00
Bantuan Sosial Kegiatan Kemasyarakatan	27.593.000.000,00	17.029.000.000,00	61,71	3.311.500.000,00
Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni	-	-	-	940.000.000,00
Bantuan Sosial Asistensi Lanjut Usia (Dinas Sosial)	2.481.000.000,00	2.001.000.000,00	80,65	173.000.000,00
Bantuan sosial yang tidak direncanakan	7.000.000.000,00	6.287.500.000,00	89,82	323.500.000,00
Bantuan Sosial Peningkatan Kualitas Rumah)Dinas Cipta Karya)	3.115.000.000,00	2.082.500.000,00	66,85	1.875.000.000,00
Bantuan sosial asistensi penyandang cacat berat (Dinas Sosial)	402.000.000,00	348.000.000,00	86,57	-
Bantuan sosial untuk anak yatim dan anak terlantar non panti	8.576.250.000,00	5.666.250.000,00	66,07	-
Bantuan sosial untuk orang sakit kronis	903.750.000,00	643.750.000,00	71,23	-

Belanja Bantuan Sosial	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
Bantuan Sosial BPNT Daerah	5.115.000.000,00	-	-	-
JUMLAH	30.139.000.000,00	18.113.000.000,00	60,10	3.997.500.000,00

Selain bantuan sosial dalam bentuk uang, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro juga menganggarkan belanja bantuan sosial dalam bentuk barang dan/atau jasa. Bantuan sosial barang/jasa ini pada Tahun 2019 dianggarkan dan direalisasikan pada belanja barang jasa, dengan anggaran sebesar Rp66.239.782.900,00 dan terealisasi sebesar Rp46.362.421.718,32.

5.1.2.2. BELANJA MODAL

Menurut standar akuntansi pemerintahan, belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp1.304.758.303.126,38 atau sebesar 68,38% dari anggaran sebesar Rp1.908.205.625.181,08 dan terdiri dari:

Tabel 36. Belanja Modal

No	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
1	Belanja Modal Pengadaan Tanah	89.418.245.000,00	4.151.947.000,00	4,64	725.423.250,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	276.843.119.069,60	200.607.141.462,11	72,46	142.873.891.529,80
3	Belanja Gedung dan Bangunan	426.817.161.260,73	195.316.845.448,92	45,76	153.161.358.323,09
4	Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan	1.076.498.435.678,24	877.712.795.837,56	81,53	286.469.922.122,91
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	36.251.139.172,51	24.739.335.657,79	68,24	17.368.341.855,12
6	Belanja Aset Lainnya	2.377.525.000,00	2.230.237.720,00	93,81	739.110.000,00
	JUMLAH	1.908.205.625.181,08	1.304.758.303.126,38	68,38	601.338.047.080,92

5.1.2.2.1. Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp4.151.947.000,00 atau 4,64% dari anggaran sebesar Rp89.418.245.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp3.426.523.750,00 atau 472,35% dari realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp725.423.250,00.

Tabel 37. Belanja Modal Tanah

No	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
1	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	80.468.245.000,00	4.151.947.000,00	5,16	0,00
2	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	8.950.000.000,00	0,00	0,00	725.423.250,00
	JUMLAH	89.418.245.000,00	4.151.947.000,00	4,64	725.423.250,00

5.1.2.2.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp200.607.141.462,11 atau 72,46% dari anggaran sebesar Rp276.843.119.069,60. Realisasi tersebut meningkat sebesar Rp57.733.249.932,31 atau sebesar 40,41% dari realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp142.873.891.529,80.

Tabel 38. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

No	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	15.403.777.050,61	13.713.537.000,00	89,03	1.496.945.650,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	474.559.500,00	135.769.291,00	28,61	99.340.849,00
3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	45.914.427.300,00	16.220.206.750,00	35,33	21.495.621.423,00
4	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	3.177.860.000,00	2.953.271.000,00	92,93	362.575.000,00
5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor	1.225.600.000,00	502.928.000,00	41,04	0,00
6	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	290.500.000,00	285.803.600,00	98,38	144.146.000,00
8	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	197.420.000,00	172.898.000,00	87,58	47.016.000,00
9	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	2.479.000.000,00	1.307.217.985,00	52,73	1.148.122.000,00
10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan	6.823.511.000,00	324.281.000,00	4,75	384.005.000,00
11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	402.625.000,00	244.859.200,00	60,82	61.705.772,00
12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	9.148.439.823,00	6.663.041.381,00	72,83	3.986.690.661,00
13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	29.636.069.524,00	20.732.184.536,00	69,96	12.239.183.222,80
14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	22.248.418.199,00	20.744.088.684,00	93,24	13.209.027.058,27
15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	3.433.653.000,00	2.570.294.399,50	74,86	1.369.094.965,00
16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	4.925.461.220,00	3.148.076.731,00	63,91	1.817.472.932,65
17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	6.927.529.500,00	5.489.134.906,00	79,24	3.687.961.147,00
18	Belanja Modal Peralatan dan	336.100.000,00	312.914.000,00	93,10	102.942.000,00

No	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
	Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar				
19	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	90.200.694.797,50	78.836.504.039,00	87,40	69.228.510.169,70
20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	2.535.128.000,00	2.466.954.820,00	97,31	312.810.000,00
21	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	6.181.932.152,00	4.335.042.083,00	70,12	10.453.942.740,00
22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	2.496.920.480,00	2.165.528.500,00	86,73	257.407.043,38
23	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	32.660.000,00	31.515.000,00	96,49	11.200.000,00
24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	0,00	0,00	0,00	147.372.000,00
25	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	787.000.000,00	717.860.000,00	91,21	89.250.000,00
26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Radiation Application and Non Destructive Testing	0,00	0,00	0,00	1.587.500,00
27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	43.200.000,00	43.160.000,00	99,91	9.690.000,00
28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	4.222.399.010,00	4.008.764.025,00	94,94	710.272.396,00
29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan dan Mesin Dana BOS	17.048.233.513,49	12.481.306.531,61	73,21	0,00
	Jumlah	266.411.711.544,70	200.607.141.462,11	72,46	142.873.891.529,80

5.1.2.2.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp195.316.845.448,92 atau 45,76% dari anggaran sebesar Rp426.817.161.260,73. Realisasi tersebut meningkat sebesar Rp42.155.487.125,84 atau sebesar 27,52% dari realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp153.161.358.323,09.

Tabel 39. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

No	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
1	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	408.662.831.040,73	184.398.416.953,77	45,12	151.311.073.190,25
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	498.900.000,00	466.046.500,00	93,41	584.179.232,84

No	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Bersejarah	2.963.400.000,00	2.423.249.732,05	81,77	515.246.000,00
4	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan	587.960.220,00	567.596.000,00	96,54	0,00
5	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	14.059.365.000,00	7.419.829.135,10	52,77	750.859.900,00
6	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Gedung dan Bangunan Dana BOS	44.705.000,00	41.707.128,00	93,29	0,00
Jumlah		426.817.161.260,73	195.316.845.448,92	45,76	153.161.358.323,09

5.1.2.2.4. Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp877.712.795.837,56 atau 81,53% dari anggaran sebesar Rp1.076.498.435.678,24. Realisasi tersebut meningkat sebesar Rp591.242.873.714,65 atau sebesar 206,39% dari realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp286.469.922.122,91.

Tabel 40. Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan

No	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
1	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	668.185.313.845,29	557.218.537.312,81	83,39	134.997.763.640,48
2	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	101.151.270.709,03	76.803.124.969,65	75,93	54.166.480.803,12
3	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	28.257.712.820,00	25.977.480.109,00	91,93	6.025.521.000,00
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Pasang Surut	334.086.000,00	328.593.955,88	98,36	0,00
5	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan BA	90.815.287.431,92	68.381.929.962,14	75,30	28.351.396.918,31
6	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	33.000.000,00	29.896.500,00	90,60	0,00
7	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	158.000.000,00	155.371.000,00	98,34	684.951.000,00
8	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	122.860.507.524,00	98.368.139.563,15	80,06	40.869.723.527,00
9	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air	0,00	0,00	0,00	571.279.000,00
10	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	3.901.455.903,00	3.518.831.312,66	90,19	40.126.000,00
11	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan	1.936.880.000,00	223.397.000,00	11,53	15.105.705.000,00

No	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
	Instalasi Air Kotor				
12	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah	3.799.500.000,00	240.114.600,00	6,32	0,00
13	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik	0,00	0,00	0,00	124.139.000,00
14	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik	33.920.400,00	33.891.000,00	99,91	0,00
15	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengaman	23.500.000,00	18.010.000,00	76,64	0,00
16	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum	10.548.000,00	3.833.200,00	36,34	0,00
17	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	54.915.023.045,00	46.331.922.452,27	84,37	5.529.276.234,00
18	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Telepon	80.000.000,00	77.492.900,00	96,87	3.560.000,00
19	Belanja Modal Jaringan - Pengadaan Jaringan Dana BOS	2.430.000,00	2.230.000,00	91,77	0,00
	Jumlah	1.076.498.435.678,24	877.712.795.837,56	81,53	286.469.922.122,91

5.1.2.2.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp24.739.335.657,79 atau 68,24% dari anggaran sebesar Rp36.251.139.172,51. Realisasi tersebut meningkat sebesar Rp7.370.993.802,67 atau 42,44% dari realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp17.368.341.855,12.

Tabel 41. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

No	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
1	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	5.525.263.000,00	165.413.000,00	2,99	12.015.152.895,90
2	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya- Pengadaan Terbitan	0,00	0,00	0,00	5.892.000,00
3	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	7.296.135,00
4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	1.192.007.900,00	544.450.820,00	45,68	733.286.111,22
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	40.480.600,00	25.660.800,00	63,39	244.890.377,00
6	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Hewan	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman	4.870.300.000,00	4.061.911.015,04	83,40	15.591.500,00
8	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Lainnya BLUD	12.540.885.000,00	7.943.312.238,00	63,34	4.278.386.986,00

No	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
9	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Lainnya Dana BOS	12.032.202.672,51	11.998.587.784,75	99,72	67.845.850,00
	Jumlah	36.251.139.172,51	24.739.335.657,79	68,24	17.368.341.855,12

5.1.2.2.6. Belanja Modal Aset Lainnya

Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya - Pengadaan Software Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp2.230.237.720,00 atau 93,81% dari anggaran sebesar Rp2.377.525.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp1.491.127.720,00 atau 201,75% dari realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp739.110.000,00.

5.1.2.3. BELANJA TAK TERDUGA

Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp632.000.000,00 atau sebesar 0,05% dari anggaran sebesar Rp1.326.622.876.650,16. Belanja tersebut berupa santunan untuk korban bencana angin kencang/puting beliung di Kecamatan Dander, Sugihwaras, Sukosewu, Ngraho, Ngasem, Tambakrejo, Purwosari, Gayam, Margomulyo, Bojonegoro, Kapas, Balen, Sumberrejo, Kepohbaru dan Trucuk. Belanja Tidak Terduga tersebut dicairkan dengan SP2D No.1225/LS-PPKD/2019 tanggal 15 November 2019 senilai Rp632.000.000,00.

Tabel 42. Belanja Tidak Terduga

No	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
1	Belanja Tak Terduga	1.326.622.876.650,16	632.000.000,00	0,05	54.334.600,00
	Jumlah	1.326.622.876.650,16	632.000.000,00	0,05	54.334.600,00

5.1.2.4. TRANSFER

Realisasi Transfer Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp1.183.391.126.195,00 atau sebesar 96,36% dari anggaran sebesar Rp1.228.042.139.835,10. Transfer tersebut terdiri dari :

Tabel 43. Belanja Transfer

Transfer	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
Transfer Bagi Hasil Pendapatan	15.763.138.557,00	15.232.584.477,00	96,63	12.379.745.270,00
Transfer Bantuan Keuangan	1.212.279.001.278,10	1.168.158.541.718,00	96,36	650.552.280.111,00
JUMLAH	1.228.042.139.835,10	1.183.391.126.195,00	96,36	662.932.025.381,00

5.1.2.4.1. Transfer Bagi Hasil Pendapatan

Transfer Bagi Hasil Pendapatan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp15.232.584.477,00 atau sebesar 96,63% dari anggaran sebesar Rp15.763.138.557,00 yang terdiri dari:

Tabel 44. Transfer Bagi Hasil Pendapatan

Bagi Hasil Pendapatan	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa	10.873.394.037,00	10.873.394.037,00	100,00	8.849.270.545,00
Bagi Hasil Retribusi Daerah	2.837.898.165,00	2.837.898.165,00	100,00	2.047.237.150,00

Bagi Hasil Pendapatan	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
kepada Pemerintah Desa				
Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Provinsi	2.051.846.355,00	1.521.292.275,00	74,14	1.350.910.800,00
Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Perhutani	0,00	0,00	0,00	132.326.775,00
JUMLAH	15.763.138.557,00	15.232.584.477,00	96,63	12.379.745.270,00

5.1.2.4.2. Transfer Bantuan Keuangan

Transfer Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.168.158.541.718,00 atau sebesar 96,36% dari anggaran sebesar Rp1.212.279.001.278,10 yang terdiri dari:

Tabel 45. Transfer Bantuan Keuangan

Transfer Bantuan Keuangan	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)	Ket
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi Jawa Timur	470.000.000,00	-	-	-	
Pemasangan sambungan listrik bagi keluarga tidak mampu	470.000.000,00	-	-	-	
Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	1.174.258.500,00	1.131.902.500,00	96,39	1.109.703.000,00	Jumlah Kursi di DPRD:
Belanja Bantuan Kepada Partai PAN	138.916.500,00	114.067.000,00	82,11	138.916.500,00	3
Belanja bantuan keuangan kepada partai PDIP	123.262.000,00	123.262.000,00	100,00	122.401.500,00	5
Belanja bantuan keuangan kepada partai Demokrat	137.926.000,00	137.926.000,00	100,00	136.779.000,00	5
Belanja bantuan keuangan kepada partai Gerindra	115.172.000,00	115.172.000,00	100,00	114.181.500,00	6
Belanja bantuan keuangan kepada partai Golkar	148.570.500,00	146.134.000,00	98,36	148.570.500,00	6
Belanja bantuan keuangan kepada partai Hanura	49.930.500,00	47.101.000,00	94,33	49.930.500,00	1
Belanja bantuan keuangan kepada partai PKPI	46.742.500,00	46.742.500,00	100,00	39.300.000,00	2
Belanja bantuan keuangan kepada partai PKS	76.759.500,00	70.545.000,00	91,90	76.759.500,00	2
Belanja bantuan keuangan kepada partai PKB	150.851.500,00	150.851.500,00	100,00	122.667.000,00	10
Belanja bantuan keuangan kepada partai PPP	99.118.500,00	93.093.000,00	93,92	99.118.500,00	4
Belanja bantuan keuangan kepada partai Nasdem	66.873.000,00	66.873.000,00	100,00	61.078.500,00	3
Belanja bantuan keuangan kepada partai Garuda	5.165.500,00	5.165.000,00	99,99	-	1
Belanja bantuan keuangan kepada Partai Persatuan Indonesia	14.970.500,00	14.970.500,00	100,00	-	2
Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa di Kecamatan	1.210.634.742.778,10	1.167.026.639.218,00	96,40	649.442.577.111,00	
Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa di Kecamatan Bojonegoro	18.410.893.960,00	17.803.628.960,00	96,70	10.045.849.100,00	
Belanja Bantuan Keuangan	58.225.153.285,31	55.180.786.265,00	94,77	32.453.667.730,00	

Transfer Bantuan Keuangan	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)	Ket
kepada Desa di Kecamatan Kapas					
Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa di Kecamatan Trucuk	33.692.483.546,15	32.844.348.179,00	97,48	19.142.111.171,00	
Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa di Kecamatan Sukosewu	37.359.906.182,77	36.381.981.647,00	97,38	19.304.224.500,00	
Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa di Kecamatan Balen	70.149.316.505,79	59.804.577.452,00	85,25	34.177.255.710,00	
Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa di Kecamatan Sugihwaras	44.253.229.557,32	42.906.931.454,00	96,96	24.114.041.502,00	
Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa di Kecamatan Temayang	33.630.093.480,33	33.230.455.269,00	98,81	18.044.866.297,00	
Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa di Kecamatan Dander	49.586.270.425,93	47.988.884.408,00	96,78	29.307.242.373,00	
Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa di Kecamatan Baureno	69.665.192.439,98	65.813.036.700,00	94,47	37.295.700.144,00	
Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa di Kecamatan Kepohbaru	67.991.392.907,00	66.833.942.317,00	98,30	33.482.666.102,00	
Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa di Kecamatan Kedungadem	80.755.462.371,17	77.824.516.585,00	96,37	36.712.662.913,00	
Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa di Kecamatan Sumberejo	74.737.350.480,15	71.667.823.900,00	95,89	37.579.113.400,00	
Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa di Kecamatan Kanor	62.853.543.375,49	61.697.905.995,00	98,16	34.717.134.872,00	
Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa di Kecamatan Kalitidu	50.206.824.230,66	47.723.437.900,00	95,05	28.045.821.443,00	
Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa di Kecamatan Bubulan	16.968.606.376,00	16.911.076.376,00	99,66	7.429.020.695,00	
Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa di Kecamatan Gondang	22.203.684.826,00	21.575.297.709,00	97,17	12.574.977.734,00	
Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa di Kecamatan Ngasem	51.087.666.419,17	50.320.021.165,00	98,50	28.848.620.345,00	
Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa di Kecamatan Kedewan	12.587.098.969,00	12.403.603.601,00	98,54	8.429.818.500,00	
Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa di Kecamatan Malo	52.330.071.253,09	50.268.682.625,00	96,06	32.493.319.611,00	
Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa di Kecamatan Purwosari	32.467.399.592,00	31.912.791.247,00	98,29	17.112.981.727,00	
Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa di Kecamatan Ngambon	15.520.930.699,66	14.608.804.495,00	94,12	8.119.502.067,00	
Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa di Kecamatan	38.727.249.696,34	38.222.975.861,00	98,70	21.854.501.742,00	

Transfer Bantuan Keuangan	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)	Ket
Padangan					
Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa di Kecamatan Kasiman	28.955.719.461,00	28.248.279.665,00	97,56	18.175.769.177,00	
Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa di Kecamatan Tambakrejo	53.618.924.849,32	52.743.163.643,00	98,37	29.616.426.412,00	
Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa di Kecamatan Ngraho	45.770.837.436,83	44.631.552.550,00	97,51	24.547.423.900,00	
Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa di Kecamatan Margomulyo	20.518.486.152,00	20.309.098.108,00	98,98	11.551.351.145,00	
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Di Kecamatan Sekar	24.342.163.407,00	23.850.930.700,00	97,98	12.958.756.500,00	
Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa di Kecamatan Gayam	44.018.790.892,64	43.318.104.442,00	98,41	21.307.750.299,00	
JUMLAH	1.212.279.001.278,10	1.168.158.541.718,00	96,36	650.552.280.111,00	50

Bantuan Keuangan yang tidak ada realisasi dikarenakan tidak tercantum di SK tentang penerima bantuan keuangan.

5.1.3. PEMBIAYAAN

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan berasal antara lain dari pinjaman dan hasil divestasi, sedangkan pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

5.1.3.1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Realisasi penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp2.018.047.974.917,07 atau sebesar 100,03% dari anggaran sebesar Rp2.017.402.123.680,15 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 46. Penerimaan Pembiayaan

No.	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
1	Penggunaan Sisa lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	2.017.402.123.680,15	2.017.401.981.889,80	100,00	277.817.959.190,94
	Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya	2.017.402.123.680,15	2.017.401.981.889,80	100,00	277.784.999.390,94
	Koreksi SiLPA	-	-	-	32.959.800,00
2	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	645.993.027,27	-	1.257.393.774,83
	JUMLAH	2.017.402.123.680,15	2.018.047.974.917,07	100,03	279.075.352.965,77

Selisih antara realisasi dan anggaran penggunaan SiLPA tahun sebelumnya sebesar Rp141.790,35 karena adanya jurnal koreksi SiLPA Akbid. Berdasarkan keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 974/KPT/I/2018 Tanggal 8 Nopember 2018 tentang Izin Pembukaan Program Studi di Luar Kampus Utama

yang Diselenggarakan oleh Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya di Kabupaten Bojonegoro, maka Akademi Kebidanan Pemkab Bojonegoro tidak lagi menjadi BLUD dikarenakan pengelolaannya berpindah ke Kementerian Kesehatan.

Tahun 2019 tidak ada pinjaman baru baik kepada pihak pemerintah lain maupun perbankan. Jumlah penerimaan kembali pinjaman sebesar Rp645.993.027,27 adalah penerimaan kembali atas pinjaman yang disalurkan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat melalui SKPD terkait dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 47. Rincian Penerimaan Kembali Pinjaman yang Disalurkan kepada Masyarakat Melalui SKPD Terkait

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	51.881.732,10
2	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	16.480.655,82
3	Dinas Peternakan dan Perikanan	408.130.639,35
4	Dinas Pertanian	112.100.000,00
5	Dinas Ketahanan Pangan	40.950.000,00
6	Bagian Perekonomian	16.450.000,00
JUMLAH		645.993.027,27

Penerimaan pembiayaan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro senilai Rp300.012,00 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 masih berada di rekening bendahara penerimaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan baru disetorkan ke rekening kas daerah pada tanggal 2 Januari 2020. Penerimaan pembiayaan diakui pada Tahun 2019, untuk penyeteroran kas di Tahun 2020 diakui sebagai perpindahan dari kas di bendahara penerimaan ke kas daerah.

5.1.3.2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Pada Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Bojonegoro tidak mengeluarkan pinjaman modal kerja baru bagi masyarakat atas hasil rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan pada hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Bojonegoro Tahun 2014. Realisasi pengeluaran pembiayaan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp0,00 dari anggaran sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 48. Pengeluaran Pembiayaan

No.	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH		0,00	0,00	0,00	0,00

5.2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp	2.017.402.123.680,15
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp	2.017.401.981.889,80
Selisih	Rp	141.790,35
Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2019	Rp	4.769.874.121.646,21
Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2019	Rp	(3.401.722.459.056,02)
Realisasi Transfer Tahun Anggaran 2019	Rp	(1.183.391.126.195,00)

Surplus/Defisit	Rp	184.760.536.395,19
Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2019	Rp	2.018.047.974.917,07
Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2019	Rp	-
Pembiayaan Netto	Rp	2.018.047.974.917,07
Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp	2.202.808.511.312,26

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada suatu tahun anggaran dapat terjadi keadaan realisasi keuangan yang lebih atau kurang dan menyebabkan terjadinya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) atau Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA). Saldo Anggaran Lebih (SAL) merupakan akumulasi SiLPA atau SiKPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan, setelah ditutup ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan tahun sebelumnya. Rincian perhitungan perubahan SAL tahun 2019 adalah sebagai berikut:

5.2.1. SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL) AWAL

	<u>Tahun 2019 (Rp)</u>	<u>Tahun 2018 (Rp)</u>
Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal	2.017.402.123.680,15	277.784.999.390,94

Nilai SAL awal sebesar Rp2.017.402.123.680,15 merupakan saldo anggaran lebih akhir tahun 2018. Saldo tersebut merupakan penerimaan pembiayaan tahun berjalan, yang digunakan untuk menutup defisit anggaran tahun 2019.

5.2.2. PENGGUNAAN SAL SEBAGAI PENERIMAAN PEMBIAYAAN TAHUN BERJALAN

	<u>Tahun 2019 (Rp)</u>	<u>Tahun 2018 (Rp)</u>
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	2.017.401.981.889,80	277.817.959.190,94

Penggunaan SAL adalah seluruh Saldo Anggaran Lebih posisi sampai dengan 31 Desember 2018 yang digunakan seluruhnya untuk pembiayaan pada APBD 2019, yaitu sebesar Rp2.017.401.981.889,80.

5.2.3. SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA)

	<u>Tahun 2019 (Rp)</u>	<u>Tahun 2018 (Rp)</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	2.202.808.511.312,26	2.017.402.123.680,15

SiLPA adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan atau selisih lebih antara realisasi pendapatan LRA dan penerimaan pembiayaan dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan. Berdasarkan perhitungan dalam Laporan Realisasi Anggaran, nilai SiLPA pada akhir tahun 2019 adalah sebesar Rp2.202.808.511.312,26, dengan rincian sebagai berikut:

Pelampauan Pendapatan Asli Daerah	Rp	30.813.398.722,22
Pendapatan Transfer	Rp	(20.542.006.902,79)
Lain-lain Pendapatan yang Sah		(367.201.310.000,00)
Jumlah	Rp	(356.929.918.180,57)
Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya		
Belanja Pegawai dari Belanja Tak Langsung	Rp	194.839.628.892,00
Belanja Pegawai dari Belanja Langsung	Rp	45.545.326.361,67
Belanja Barang	Rp	257.186.881.332,46
Belanja Subsidi	Rp	223.000.000,00
Belanja Hibah	Rp	75.182.529.324,82
Belanja Bantuan Sosial	Rp	12.026.000.000,00
Belanja Bantuan Keuangan		-
Belanja Modal	Rp	603.447.322.054,70
Belanja Tak Terduga	Rp	1.325.990.876.650,16
Transfer	Rp	44.651.013.640,10
Jumlah	Rp	2.559.092.578.255,91
Pembiayaan		
Penerimaan Pembiayaan yang Tidak Dianggarkan	Rp	645.851.236,92
Sisa Penghematan Pengeluaran Pembiayaan		-
Pembiayaan Netto	Rp	645.851.236,92
SiLPA Tahun Anggaran 2019		Rp 2.202.808.511.312,26

Tabel 49. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
Pendapatan	5.126.758.095.914,53	4.769.828.177.733,96	93,04	4.823.752.241.464,20
Belanja dan Transfer	7.144.160.219.594,68	4.585.067.641.338,77	64,18	3.085.425.470.749,82
Surplus (Defisit)	(2.017.402.123.680,15)	184.760.536.395,19	(9,16)	1.738.326.770.714,38
Pembiayaan Netto	2.017.402.123.680,15	2.018.047.974.917,07	100,03	279.075.352.965,77
SILPA	-	2.202.808.511.312,26	-	2.017.402.123.680,15

Terjadi peningkatan SiLPA yang cukup signifikan dikarenakan adanya peningkatan pendapatan. Naiknya harga minyak (ICP) dan kurs dollar berimbas pada kenaikan PNBPN Migas, sehingga pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan RI mengambil kebijakan DBH Triwulan IV 2018 disalurkan secara utuh ditambah dengan tambahan DBH Triwulan IV atas perubahan alokasi DBH sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 153/PMK.07/2018 tentang Perubahan Rincian DBH dan Penyaluran Kurang Bayar DBH pada Tahun Anggaran 2018, serta adanya transfer atas sebagian kurang Bayar DBH s/d Tahun 2017.

Kelebihan transfer tersebut dialokasikan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2019 yang dilaksanakan pada sekitar bulan Oktober 2019, sehingga pekerjaan fisik yang besar tidak bisa dilaksanakan pada tahun 2019. Untuk pekerjaan-pekerjaan tersebut rencananya akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2020.

5.2.4. KOREKSI KESALAHAN PEMBUKUAN TAHUN SEBELUMNYA

	<u>Tahun 2019 (Rp)</u>	<u>Tahun 2018 (Rp)</u>
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	(141.790,35)	32.959.800,00

Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya sebesar (Rp141.790,35) merupakan koreksi atas sisa kas BLUD per 31 Desember 2018 pada BLUD Akademi Kebidanan Pemkab Bojonegoro dikarenakan pengelolaannya berpindah ke Kementerian Kesehatan.

5.2.5. SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL) AKHIR

	<u>Tahun 2019 (Rp)</u>	<u>Tahun 2018 (Rp)</u>
Saldo Anggaran Lebih Akhir	2.202.808.511.312,26	2.017.402.123.680,15

SAL akhir merupakan akumulasi SiLPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutup ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan tahun sebelumnya. Nilai akumulatif SAL akhir sampai dengan tahun 2019 adalah sebesar Rp2.202.808.511.312,26.

5.3. NERACA

5.3.1. ASET

Aset Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp12.750.710.236.133,00 yang terdiri dari Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan dan Aset Lainnya.

5.3.1.1. ASET LANCAR

Aset lancar Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 2.964.096.559.364,67 terdiri dari Kas, Piutang, Persediaan, dan Belanja dibayar di muka dengan penjelasan sebagai berikut.

	<u>Tahun 2019 (Rp)</u>	<u>Tahun 2018 (Rp)</u>
Kas	2.202.808.511.312,26	2.017.402.123.680,15
Piutang	751.077.375.032,42	90.257.829.855,49
Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(23.004.450.890,68)	(21.979.234.530,99)
Persediaan	32.994.086.654,00	46.095.980.106,25
Belanja dibayar di muka	221.037.256,67	29.166.666,67
Jumlah	<u>2.964.096.559.364,67</u>	<u>2.131.805.865.777,57</u>

5.3.1.1.1 Kas

	<u>Tahun 2019 (Rp)</u>	<u>Tahun 2018 (Rp)</u>
Kas	2.202.808.511.312,26	2.017.402.123.680,15

Jumlah tersebut merupakan saldo kas per 31 Desember 2019 yang terdiri dari:

- Kas di Bendahara Umum Daerah	Rp 2.141.077.698.064,92
- Kas di BLUD	Rp 46.900.433.988,85
Rek. Kas RSUD Sosodoro Dj. No.0081011866	Rp 38.913.803.671,00
Rek. Kas Akbid No.0081016500	Rp 0,00
Rek. Kas RSUD Padangan No.0081006857	Rp 3.389.890.734,26
Rek. Kas RSUD Sumberrejo No.0691002136	Rp 4.596.739.583,59
- Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp 0,00
- Kas di Bendahara Penerimaan	Rp 300.012,00
- Kas di Bendahara JKN / FKTP	Rp 9.566.402.632,52
- Kas Lainnya (BOS)	Rp 5.263.676.613,97
Jumlah	Rp 2.202.808.511.312,26

5.3.1.1.1.1 Kas di Bendahara Umum Daerah

Saldo Kas di BUD pada Neraca	Rp 2.141.077.698.064,92
Saldo Kas di Rekening Bank Jatim	Rp 2.141.077.698.064,82
Selisih	Rp 0,10

Jumlah kas di Bendahara Umum Daerah menurut buku adalah sebesar Rp2.141.077.698.064,92 sedangkan menurut rekening koran adalah sebesar Rp2.141.077.698.064,82. Terdapat selisih sebesar Rp0,10 yang merupakan selisih pembulatan SP2D karena sistem.

5.3.1.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Pada Tahun 2019 terdapat sisa kas di Bendahara Penerimaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Sedangkan Tahun 2018 terdapat sisa kas di Bendahara Penerimaan pada 4 (empat) SKPD, yaitu Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Kesehatan, Badan Pendapatan Daerah, dan Kecamatan Bojonegoro.

Tabel 50. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas Di Bendahara Penerimaan	Saldo 2018 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 2019 (Rp)
Dinas Koperasi dan UM	32.350.000,00	300.012,00	32.350.000,00	300.012,00
Dinas Kesehatan	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
Badan Pendapatan Daerah	432.344.485,00	0,00	432.344.485,00	0,00
Kec. Bojonegoro	10.311.958,00	0,00	10.311.958,00	0,00
JUMLAH	475.031.443,00	300.012,00	475.031.443,00	300.012,00

Penambahan Kas di Bendahara Penerimaan senilai Rp300.012,00 adalah kas di bendahara penerimaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang merupakan setoran dari angsuran UKM UD. Indika Computer yang masih tersimpan di rekening bendahara penerimaan per tanggal 31 Desember 2019 dan baru disetorkan ke kas daerah pada tanggal 2 Januari 2020.

Pengurangan Kas di Bendahara Penerimaan senilai Rp475.031.443,00 terdiri dari kas di bendahara penerimaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro senilai Rp32.350.000,00 yang merupakan setoran dari angsuran UKM UD. Tunas Karya senilai Rp500.000,00 yang masih tersimpan di

rekening bendahara penerimaan per tanggal 31 Desember 2018 dan baru disetorkan ke kas daerah pada tanggal 11 Januari 2019 serta retribusi kios Rajekwesi yang belum disetorkan s/d tanggal 31 Desember 2018 senilai Rp31.850.000,00 dan baru disetorkan ke kas daerah tanggal 2 April 2019. Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan senilai Rp25.000,00 adalah pengganti biaya transfer atas klaim BPJS yang belum terbayar sampai tanggal 31 Desember 2018 dan baru disetorkan ke kas daerah pada tanggal 28 Januari 2019. Kas di bendahara penerimaan Kecamatan Bojonegoro senilai Rp10.311.958,00 adalah retribusi sewa tanah ex.bengkok Kelurahan Jetak yang belum disetor s/d tanggal 31 Desember 2018 dan baru disetorkan ke kas daerah pada tanggal 7 Pebruari dan 9 April 2019. Kas di Bendahara Penerimaan Badan Pendapatan Daerah merupakan setoran pajak PBB di rekening penampungan PBB senilai Rp432.344.485,00 yang belum disetorkan ke kas daerah sampai tanggal 31 Desember 2018 dan disetorkan pada tanggal 3 Januari 2019 dan 8 Pebruari 2019.

5.3.1.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran

Pada Tahun 2019 tidak ada kas di bendahara pengeluaran. Sedangkan pada Tahun 2018, kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp26.437.552,00 dengan rincian sebagai berikut:.

Tabel 51. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas Di Bendahara Pengeluaran	Saldo 2018 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 2019 (Rp)
Kecamatan Gondang	26.437.552,00	0,00	26.437.552,00	0,00
JUMLAH	26.437.552,00	0,00	26.437.552,00	0,00

Tidak ada penambahan kas di Bendahara Pengeluaran pada tahun 2019. Sedangkan pengurangan kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp26.437.552,00 berasal dari sisa UP Kecamatan Gondang senilai Rp.4.873.152,00 yang disetorkan pada tanggal 10 Januari 2019 dan sisa TU Kecamatan Gondang senilai Rp21.564.400,00 yang disetorkan pada tanggal 11 Januari 2019.

5.3.1.1.1.4 Kas di BLUD

Kas di bendahara BLUD merupakan saldo kas di bendahara BLUD yang terdiri atas tiga RSUD. Jumlah kas pada bendahara BLUD per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp46.900.433.988,85 dan Rp41.658.898.631,88 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 52. Kas di Bendahara BLUD

No.	Nama BLUD	No. Rekening	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
1	RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo	0081011866	38.913.803.671,00	38.855.925.720,26
2	Akademi Kebidanan Pemkab Bojonegoro	0081016500	0,00	141.790,35
3	RSUD Padangan	0081006857	3.389.890.734,26	1.498.739.996,78
4	RSUD Sumberrejo	0691002136	4.596.739.583,59	1.304.091.124,49
JUMLAH			46.900.433.988,85	41.658.898.631,88

Tidak ada kas tunai pada ketiga BLUD tersebut.

5.3.1.1.1.5 Kas di Bendahara Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)

Pada Tahun 2019 terdapat Kas di beberapa FKTP, antara lain:

Tabel 53. Kas di Bendahara FKTP

No	Nama FKTP	Saldo Kas Per 31 Des 2018	Total Penerimaan (Rp)	Total Belanja (Rp)	Saldo Kas Per 31 Des 2019
1	FKTP Margomulyo	481.494.269,00	1.185.410.000,00	1.318.974.196,00	347.930.073,00
2	FKTP Ngraho	760.876.217,60	3.000.789.100,00	3.441.351.939,00	320.313.378,60
3	FKTP Tambakrejo	789.974.615,00	2.579.296.300,00	3.040.086.786,00	329.184.129,00
4	FKTP Ngambon	121.600.584,02	506.383.075,00	543.834.664,02	84.148.995,00
5	FKTP Sekar	804.106.449,00	1.448.285.300,00	2.104.296.215,00	148.095.534,00
6	FKTP Bubulan	146.543.279,00	598.359.075,00	630.604.891,00	114.297.463,00
7	FKTP Gondang	226.893.411,00	1.182.754.755,00	1.264.042.498,00	145.605.668,00
8	FKTP Temayang	427.494.980,50	1.198.508.031,00	1.439.444.444,00	186.558.567,50
9	FKTP Sugihwaras	407.455.933,00	1.914.061.000,00	2.115.312.601,00	206.204.332,00
10	FKTP Kedungadem	552.381.978,50	2.381.352.650,00	2.698.307.225,00	235.427.403,50
11	FKTP Kesongo	259.260.102,00	1.181.852.319,00	1.287.961.120,00	153.151.301,00
12	FKTP Kepohbaru	731.020.732,00	1.488.678.900,00	1.631.234.130,00	588.465.502,00
13	FKTP Nglumber	291.011.487,00	1.222.639.350,00	1.293.755.761,00	219.895.076,00
14	FKTP Baureno	249.997.624,00	2.186.308.200,00	2.234.053.118,40	202.252.705,60
15	FKTP Gunungsari	270.554.172,88	1.080.895.250,00	989.473.665,00	361.975.757,88
16	FKTP Kanor	268.576.253,00	2.185.703.275,00	2.184.996.350,00	269.283.178,00
17	FKTP Sumberrejo	293.881.760,00	1.296.831.800,00	1.237.656.675,00	353.056.885,00
18	FKTP Mejuwet	358.053.197,00	1.239.918.725,00	1.355.768.828,95	242.203.093,05
19	FKTP Balen	1.709.859.683,96	3.277.909.650,00	4.075.022.139,00	912.747.194,96
20	FKTP Sukosewu	150.513.498,00	1.324.871.550,00	1.297.232.722,00	178.152.326,00
21	FKTP Kapas	143.401.965,00	991.147.514,00	1.070.962.336,00	63.587.143,00
22	FKTP Tanjungharjo	74.091.591,00	1.054.059.800,00	957.000.953,00	171.150.438,00
23	FKTP Bojonegoro	426.653.282,00	1.526.576.850,00	1.471.091.672,00	482.138.460,00
24	FKTP Wisma Indah	106.944.036,00	971.555.550,00	995.897.163,00	82.602.423,00
25	FKTP Trucuk	114.388.582,00	1.638.736.200,00	1.615.803.774,00	137.321.008,00
26	FKTP Dander	47.770.504,00	1.545.793.500,00	1.564.523.604,00	29.040.400,00
27	FKTP Ngumpakdalem	560.074.888,00	1.651.878.600,00	1.687.715.442,00	524.238.046,00
28	FKTP Ngasem	787.572.359,44	2.292.425.500,00	2.562.091.077,00	517.906.782,44
29	FKTP Kalitidu	109.231.146,00	1.230.357.000,00	1.101.260.991,00	238.327.155,00
30	FKTP Pungpungan	115.147.448,00	860.722.300,00	880.961.937,00	94.907.811,00
31	FKTP Malo	247.225.346,00	1.278.251.050,00	1.185.059.456,00	340.416.940,00
32	FKTP Purwosari	355.657.465,00	1.557.768.300,00	1.536.167.512,00	377.258.253,00
33	FKTP Padangan	250.388.465,50	1.428.542.650,00	1.333.104.119,00	345.826.996,50
34	FKTP Kasiman	172.429.405,00	1.286.873.400,00	1.317.633.117,00	141.669.688,00
35	FKTP Kedewan	126.743.588,49	347.678.189,00	335.094.118,00	139.327.659,49
36	FKTP Gayam	475.581.608,00	1.043.916.950,00	1.237.763.692,00	281.734.866,00
	JUMLAH	13.414.851.905,89	53.187.091.658,00	57.035.540.931,37	9.566.402.632,52

Pada Tahun 2019 terdapat kas di Bendahara Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) / Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) senilai Rp9.566.402.632,52.

5.3.1.1.1.6 Kas Lainnya (Bantuan Operasional Sekolah)

Pada Tahun 2019 terdapat kas lainnya senilai Rp5.263.676.613,97. Kas tersebut merupakan Silpa Dana Bantuan Operasional Sekolah dari 720 Sekolah Dasar dan 55 Sekolah Menengah Pertama. Sisa tersebut tetap berada di sekolah dan tidak disetorkan ke kas daerah. Rincian perhitungan dana BOS disajikan dalam Lampiran 2.

5.3.1.1.2 Piutang

	<u>Tahun 2019</u> (Rp)	<u>Tahun 2018</u> (Rp)
Piutang	751.077.375.032,42	90.257.829.855,49

Jumlah tersebut merupakan saldo piutang per 31 Desember 2019 yang terdiri dari:

- Piutang Pajak	Rp	20.139.683.613,20
- Piutang Retribusi	Rp	1.457.122.321,33
- Bagian Lancar Piutang SKPD	Rp	13.382.412.752,75
- Bagian Lancar Piutang TP-TGR	Rp	9.100.000,00
- Piutang Lainnya	Rp	716.089.056.345,14
Jumlah	Rp	751.077.375.032,42

5.3.1.1.2.1 Piutang Pajak

Piutang Pajak pada Tahun 2019 sebesar Rp20.139.683.613,20 terdiri dari:

Tabel 54. Piutang Pajak

Uraian	Saldo 2018 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 2019 (Rp)
Piutang Pajak Hotel	59.465.600,00	-	-	59.465.600,00
Piutang Pajak Reklame	151.084.053,00	-	-	151.084.053,00
Piutang Bahan Galian Gol C	56.869.600,00	-	56.019.600,00	850.000,00
Piutang Pajak Restoran	6.679.458,00	-	-	6.679.458,00
Piutang Pajak Parkir	2.907.000,00	-	-	2.907.000,00
Piutang Pajak Permukaan ABT	77.131.024,00	114.042.234,00	-	191.173.258,00
Pajak Sarang Burung	21.195.400,00	-	-	21.195.400,00
Pajak Hiburan	19.450.000,00	-	-	19.450.000,00
PPJ	3.442.391.401,77	3.762.928.322,00	3.442.391.401,77	3.762.928.322,00
Piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	16.349.512.912,20	2.291.810.474,00	2.717.372.864,00	15.923.950.522,20
JUMLAH	20.186.686.448,97	6.168.781.030,00	6.215.783.865,77	20.139.683.613,20

Piutang pajak tersebut sudah termasuk piutang PBB pelimpahan dari KPP Pratama yang belum selesai diverifikasi.

Berdasarkan surat Bupati Bojonegoro kepada BPK-RI Perwakilan Jawa Timur Nomor 973/110/412.304/2020 tanggal 15 Januari 2020 dapat dijelaskan bahwa:

- a. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) pelimpahan PBB-P2 dari KPP Pratama kepada Pemkab Bojonegoro bahwa piutang PBB-P2 tahun 2001-2012 sebesar Rp8.169.455.650,00.

- b. Berdasarkan LHP BPK-RI atas LKPD Kabupaten Bojonegoro tanggal 31 Desember 2016 bahwa saldo piutang sudah berkurang menjadi Rp6.473.082.069,61 atau ada pembayaran sebesar Rp1.696.373.580,39.
- c. Berdasarkan LHP BPK-RI atas LKPD Kabupaten Bojonegoro tanggal 31 Desember 2018 bahwa saldo piutang berkurang lagi menjadi Rp6.447.175.064,61 atau ada pembayaran sebesar Rp25.907.005,00.
- d. Setelah tahun 2016 hingga sekarang sudah tidak ada lagi pembayaran piutang 2001-2012 tersebut.

Data piutang tersebut belum dapat diverifikasi dan divalidasi sehingga BPK tidak dapat meyakini kewajarannya, maka tidak ada jumlah piutang yang pasti.

Sebagaimana rekomendasi BPK-RI bahwa Pemkab Bojonegoro harus memverifikasi dan memvalidasi piutang dimaksud maka Badan Pendapatan Daerah telah mengupayakan verifikasi mulai tanggal 5 Juli 2019 sebagai berikut:

- a. Surat Bupati Bojonegoro Nomor 973/1219/412.304/2019 tanggal 5 Juli 2019 untuk verifikasi dan validasi piutang PBB-P2 desa-desa di Kecamatan Bojonegoro, Kapas, Dander, Kalitidu, dan Gayam.
- b. Surat Bupati Bojonegoro Nomor 973/209/412.304/2020 tanggal 4 Pebruari 2020 untuk verifikasi dan validasi piutang PBB-P2 desa-desa di Kecamatan Kepohbaru, Kedungadem, Trucuk, dan Baureno.
- c. Surat Bupati Bojonegoro Nomor 973/516/412.304/2020 tanggal 6 Maret 2020 untuk verifikasi dan validasi piutang PBB-P2 desa-desa di Kecamatan Padangan, Tambakrejo, dan Sumberrejo.

Untuk menyelesaikan proses verifikasi dan validasi tersebut, Badan Pendapatan Daerah telah mengirimkan surat tagihan ke masing-masing kecamatan yang belum mengirimkan hasil verifikasi. Hasil verifikasi sementara ada 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Dander, Kalitidu, dan Padangan. Setelah proses verifikasi selesai pada akhir bulan Juni 2020 maka akan ditetapkan besaran piutang PBB-P2 hasil verifikasi dengan SK Bupati.

5.3.1.1.2.2 Piutang Retribusi

Jumlah Piutang Retribusi per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.457.122.321,33 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 55. Piutang Retribusi

Uraian	Saldo 2018 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 2019 (Rp)
- Retribusi Sewa Tanah	219.065.000,33	-	-	219.065.000,33
- Retribusi Trayek	400.000,00	-	100.000,00	300.000,00
- Retribusi IMB	46.596.000,00	60.349.221,00	46.596.000,00	60.349.221,00
- Retribusi Yankes Dinas Kesehatan	3.492.714.450,00	6.220.277.800,00	8.535.584.150,00	1.177.408.100,00
JUMLAH	3.758.775.450,33	6.280.627.021,00	8.582.280.150,00	1.457.122.321,33

5.3.1.1.2.3 Bagian Lancar Piutang SKPD

Jumlah Bagian Lancar Piutang SKPD per 31 Desember 2019 sebesar Rp13.382.412.752,75. Jumlah tersebut terdiri dari:

Tabel 56. Bagian Lancar Piutang SKPD

Bagian Lancar Piutang SKPD	Saldo 2018 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 2019 (Rp)
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	1.919.217.349,28	-	16.480.655,82	1.902.736.693,46
Pinjaman Modal Industri	1.113.298.615,45	-	16.480.655,82	1.096.817.959,63
Pinjaman Modal IKDK 2005	17.542.000,00	-	-	17.542.000,00
Pinjaman Modal IKDK 2006	2.071.000,00	-	-	2.071.000,00
Pinjaman Modal IKDK 2007	3.315.000,00	-	-	3.315.000,00
Pinjaman Modal IKDK 2008	3.268.000,00	-	-	3.268.000,00
Pinjaman Modal IKDK 2009	17.957.000,00	-	750.000,00	17.207.000,00
Pinjaman Modal IKDK 2010	9.846.000,00	-	-	9.846.000,00
Pinjaman Modal IKDK 2011	83.363.000,00	-	4.200.000,00	79.163.000,00
Pinjaman Modal IKDK 2012	57.733.024,62	-	-	57.733.024,62
Pinjaman Modal IKDK 2013	22.526.364,34	-	-	22.526.364,34
Pinjaman Modal Cukai 2010	66.856.000,00	-	4.510.000,00	62.346.000,00
Pinjaman Modal Cukai 2011	229.111.000,00	-	5.793.000,00	223.318.000,00
Pinjaman Modal Cukai 2012	153.803.042,29	-	240.000,00	153.563.042,29
Pinjaman Modal Cukai 2013	66.268.155,71	-	-	66.268.155,71
Pinjaman Modal IKDK 2014	121.176.844,74	-	525.000,00	120.651.844,74
Pinjaman Modal Cukai 2014	258.462.183,75	-	462.655,82	257.999.527,93
Pinjaman Tenaga Kerja	805.918.733,83	-	-	805.918.733,83
Pinjaman TKI 2001	57.511.352,73	-	-	57.511.352,73
Pinjaman TKI 2002	81.700.363,64	-	-	81.700.363,64
Pinjaman TKI 2003	590.922.685,46	-	-	590.922.685,46
Pinjaman TKI 2004	14.000.000,00	-	-	14.000.000,00
Pinjaman TKI 2005	61.784.332,00	-	-	61.784.332,00
Dinas Pertanian	2.076.616.000,00	-	112.100.000,00	1.964.516.000,00
Pinjaman Modal Petani	186.941.000,00	-	20.400.000,00	166.541.000,00
Pinjaman Agrobisnis Kacang Tanah 2004	42.196.000,00	-	-	42.196.000,00
Agrobisnis Kacang Tanah Jagung dan Kedelai 2005	14.000.000,00	-	-	14.000.000,00
Pinjaman Modal Petani Kecil 2007	25.500.000,00	-	-	25.500.000,00
Pinjaman Modal Usaha Tani Palawija 2007	6.000.000,00	-	-	6.000.000,00
Pinjaman Pupuk Berimbang 2008	99.245.000,00	-	20.400.000,00	78.845.000,00
Pinjaman Usaha Tani Tembakau	1.889.675.000,00	-	91.700.000,00	1.797.975.000,00
Tembakau ON FARM (Kelompok Tani) 2010	96.275.000,00	-	-	96.275.000,00
Tembakau OFF FARM (Pengusaha) 2010	79.000.000,00	-	-	79.000.000,00
Tembakau OFF FARM (Pengusaha) 2011	125.000.000,00	-	-	125.000.000,00

Bagian Lancar Piutang SKPD	Saldo 2018 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 2019 (Rp)
Tembakau OFF FARM (Pengusaha) 2012	262.500.000,00	-	11.000.000,00	251.500.000,00
Tembakau ON FARM (Pengusaha) 2013	40.000.000,00	-	-	40.000.000,00
Tembakau OFF FARM (Pengusaha) 2013	1.286.900.000,00	-	80.700.000,00	1.206.200.000,00
Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah	274.600.000,00	-	16.450.000,00	258.150.000,00
Pinjaman Dekranasda 2004	7.000.000,00	-	1.500.000,00	5.500.000,00
Pinjaman Dekranasda 2005	32.000.000,00	-	8.500.000,00	23.500.000,00
Pinjaman Dekranasda 2006	14.500.000,00	-	-	14.500.000,00
Pinjaman Dekranasda 2007	5.850.000,00	-	2.500.000,00	3.350.000,00
Pengrajin kayu 2004	215.250.000,00	-	3.950.000,00	211.300.000,00
Kantor Ketahanan Pangan	308.090.000,00	-	40.950.000,00	267.140.000,00
Pinjaman Modal Dryer 2005	52.250.000,00	-	1.250.000,00	51.000.000,00
Pinjaman Modal Pembelian Gabah 2006	67.940.000,00	-	1.500.000,00	66.440.000,00
Pinjaman Modal Pembelian Gabah 2007	145.000.000,00	-	36.700.000,00	108.300.000,00
Pinjaman Modal Pembelian Gabah 2008	42.900.000,00	-	1.500.000,00	41.400.000,00
Dinas Koperasi dan UKM	2.027.128.627,62	-	51.881.732,10	1.975.246.895,52
Piutang Koperasi 2001	65.300.000,00	-	-	65.300.000,00
Piutang Koperasi 2002	27.100.000,00	-	-	27.100.000,00
Piutang Koperasi 2003	209.750.000,00	-	17.000.000,00	192.750.000,00
Piutang Koperasi 2004	34.500.000,00	-	-	34.500.000,00
Piutang Koperasi 2005	78.500.000,00	-	-	78.500.000,00
Piutang Koperasi 2006	27.665.000,00	-	-	27.665.000,00
Piutang Koperasi 2007	11.500.000,00	-	-	11.500.000,00
Piutang Koperasi 2008	46.750.000,00	-	-	46.750.000,00
Piutang Koperasi 2009	55.118.850,00	-	-	55.118.850,00
Piutang Koperasi 2010	60.826.850,00	-	-	60.826.850,00
Piutang Koperasi 2014	9.418.930,58	-	-	9.418.930,58
Piutang UKM 2004	63.500.800,00	-	-	63.500.800,00
Piutang UKM 2005	26.724.600,00	-	-	26.724.600,00
Piutang UKM 2006	36.639.383,00	-	-	36.639.383,00
Piutang UKM 2007	182.625.000,00	-	4.000.000,00	178.625.000,00
Piutang UKM 2008	275.925.660,00	-	3.250.000,00	272.675.660,00
Piutang UKM 2009	257.097.000,00	-	-	257.097.000,00
Piutang UKM 2010	165.304.998,00	-	4.102.807,00	161.202.191,00
Piutang UKM 2014	272.881.556,04	-	23.528.925,10	249.352.630,94
Piutang Cukai 2011	120.000.000,00	-	-	120.000.000,00
Dinas Peternakan dan Perikanan	7.422.753.803,12	-	408.130.639,35	7.014.623.163,77
Piutang Sapi Betina 2004	18.327.800,00	-	-	18.327.800,00
Piutang Sapi Betina 2005	48.436.050,00	-	1.000.000,00	47.436.050,00
Piutang Sapi Betina 2006	36.040.300,00	-	-	36.040.300,00
Piutang Sapi Betina 2011	323.500.000,00	-	33.000.000,00	290.500.000,00
Piutang Sapi Betina 2012	558.900.000,00	-	13.440.000,00	545.460.000,00
Piutang Sapi Kreman 2003	137.819.500,00	-	-	137.819.500,00
Piutang Sapi Kreman 2011	157.000.000,00	-	35.000.000,00	122.000.000,00

Bagian Lancar Piutang SKPD	Saldo 2018 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 2019 (Rp)
Piutang Sapi Kremas 2012	358.450.000,00	-	1.000.000,00	357.450.000,00
Piutang Kambing/Domba 2011	1.378.600.000,00	-	26.400.000,00	1.352.200.000,00
Piutang Kambing/Domba 2012	1.051.460.000,00	-	77.400.000,00	974.060.000,00
Piutang Budidaya Ikan 2012	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00
Piutang Budidaya Burung Puyuh 2012	21.100.000,00	-	-	21.100.000,00
Piutang Sapi Kremas 2013	189.200.000,00	-	19.700.000,00	169.500.000,00
Piutang Sapi Betina 2013	786.700.000,00	-	51.350.000,00	735.350.000,00
Piutang Kambing/Domba 2013	1.189.400.000,00	-	86.980.000,00	1.102.420.000,00
Piutang Ikan 2013	7.700.000,00	-	7.700.000,00	-
Sapi Keremas 2014	319.944.175,53	-	2.000.000,00	317.944.175,53
Sapi Betina 2014	316.449.498,34	-	23.500.000,00	292.949.498,34
Kambing/domba 2014	309.869.585,27	-	28.660.639,35	281.208.945,92
Budidaya Ikan 2014	203.856.893,98	-	1.000.000,00	202.856.893,98
JUMLAH	14.028.405.780,02	-	645.993.027,27	13.382.412.752,75

Bagian Lancar Piutang SKPD tersebut merupakan piutang dalam bentuk pemberian pinjaman modal yang diberikan kepada masyarakat dan sentra Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di enam SKPD dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pinjaman modal tersebut harus di kembalikan ke Kas daerah dengan tenggat waktu pinjaman yang telah ditentukan dengan sifat lunas putus. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah memberikan pinjaman modal tersebut sejak Tahun 2004 sampai dengan 2014. Pada Tahun 2019 tidak ada pemberian pinjaman baru.

Secara rinci hal tersebut terurai sebagai berikut:

- (a) **Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja**
Selama Tahun 2019 tidak ada penambahan piutang pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Pengurangan piutang senilai Rp16.480.655,82 merupakan pembayaran angsuran pinjaman selama Tahun 2019.
- (b) **Dinas Pertanian**
Selama Tahun 2019 tidak ada penambahan piutang pada Dinas Pertanian. Sedangkan pengurangan senilai Rp112.100.000,00 merupakan pembayaran angsuran pinjaman selama Tahun 2019.
- (c) **Bagian Perekonomian**
Selama Tahun 2019 tidak terdapat penambahan piutang pada Bagian Perekonomian. Pengurangan piutang senilai Rp16.450.000,00 merupakan pembayaran pinjaman di Tahun 2019.
- (d) **Dinas Ketahanan Pangan**
Selama Tahun 2019 tidak ada penambahan piutang pada Dinas Ketahanan Pangan. Sedangkan pengurangan piutang senilai Rp40.950.000,00 merupakan pembayaran pinjaman selama Tahun 2019.

(e) **Dinas Koperasi dan Usaha Mikro**

Selama Tahun 2019 tidak ada penambahan piutang pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, sedangkan pengurangan senilai Rp51.881.732,10 merupakan pembayaran selama Tahun 2019.

(f) **Dinas Peternakan dan Perikanan**

Selama Tahun 2019 tidak ada penambahan piutang pada Dinas Peternakan dan Perikanan. Sedangkan pengurangan senilai Rp408.130.639,35 merupakan pembayaran selama Tahun 2019.

5.3.1.1.2.4 Bagian Lancar Piutang TP-TGR

Jumlah Piutang Lancar TP-TGR per 31 Desember 2019 sama dengan 31 Desember 2018 yaitu senilai Rp9.100.000,00 yang merupakan Piutang TP-TGR a.n. Baidowi.

5.3.1.1.2.5 Piutang Lainnya

Jumlah Piutang Lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp716.089.056.345,14 tersebut terdiri dari:

- Piutang Bunga	Rp	179.317.835,17
- Piutang Klaim Kesehatan	Rp	60.176.731.737,00
- Piutang DBH Pajak dan Bukan Pajak	Rp	644.679.003.984,00
- Piutang Dividen	Rp	0,00
- Piutang Lainnya	Rp	11.054.002.788,97
Jumlah	Rp	716.089.056.345,14

Mutasi piutang lainnya dirinci sebagai berikut :

Tabel 57. Piutang Lainnya

Piutang Lainnya	Saldo 2018 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 2019 (Rp)
Piutang Bunga	185.967.835,17	-	6.650.000,00	179.317.835,17
- Dinas Peternakan dan Perikanan	53.132.080,00	-	4.500.000,00	48.632.080,00
- Dinas Ketahanan Pangan	2.800.000,00	-	2.150.000,00	650.000,00
- Dinas Koperasi dan UM	101.301.490,00	-	-	101.301.490,00
- Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	28.734.265,17	-	-	28.734.265,17
Piutang Klaim Kesehatan	41.499.868.541,00	140.836.944.651,00	122.160.081.455,00	60.176.731.737,00
- KAI	518.073,00	2.667.335,00	3.056.418,00	128.990,00
- Inhealth	38.160.403,00	266.212.376,00	274.176.032,00	30.196.747,00
- BPJS kesehatan	40.141.724.348,00	135.084.483.918,00	115.882.982.894,00	59.343.225.372,00
- Jasa Raharja	1.071.893.186,00	4.965.616.798,00	5.514.287.035,00	523.222.949,00
- Pihak Ketiga	201.350.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	201.350.000,00
- BPJS Ketenagakerjaan	42.596.167,00	367.526.013,00	331.514.501,00	78.607.679,00
- Yakes Pertamina	3.626.364,00	148.438.211,00	152.064.575,00	-
Piutang DBH Pajak dan Bukan Pajak	9.864.975.800,00	644.679.003.984,00	9.864.975.800,00	644.679.003.984,00
- DBH-Pajak PKB	-	-	-	-
- DBH-Pajak BBNKB	-	-	-	-

Piutang Lainnya	Saldo 2018 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 2019 (Rp)
- DBH-Pajak PBBKB	-	-	-	-
- DBH-Pajak AP	-	-	-	-
- DBH-Pajak Rokok	9.864.975.800,00	6.041.679.999,00	9.864.975.800,00	6.041.679.999,00
- DBH- PBB	-	299.994.906.865,00		299.994.906.865,00
- DBH- SDA	-	338.642.417.120,00		338.642.417.120,00
Piutang Deviden	-	-	-	-
- Deviden Bank Jatim	-	-	-	-
- Deviden BPR Bojonegoro	-	-	-	-
- Deviden PT GDK	-	-	-	-
- Dividen BPR Jatim	-	-	-	-
- Deviden PT. BBS	-	-	-	-
Piutang Lainnya	724.050.000,00	10.358.952.288,97	28.999.500,00	11.054.002.788,97
- Piutang Komitmen Fee PT. ADS	724.050.000,00	695.050.500,00	28.999.500,00	1.390.101.000,00
- Piutang Belanja Modal DPU Bina Marga	-	2.955.642.273,59	-	2.955.642.273,59
- Piutang Pihak Ketiga	-	6.708.259.515,38	-	6.708.259.515,38
JUMLAH	52.274.862.176,17	795.874.900.923,97	132.060.706.755,00	716.089.056.345,14

(a) Piutang Bunga

Pengurangan piutang bunga sebesar Rp6.650.000,00 terdiri dari pembayaran bunga pinjaman modal pada Dinas Peternakan dan Perikanan sebesar Rp4.500.000,00 dan Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp2.150.000,00.

(b) Piutang Klaim Kesehatan

Penambahan piutang klaim kesehatan senilai Rp140.836.944.651,00 disebabkan adanya tagihan yang belum terbayar atas klaim KAI, *inhealth*, BPJS Kesehatan, Jasa Raharja, Pihak Ketiga dan BPJS Ketenagakerjaan selama Tahun 2019. Sedangkan pengurangan piutang klaim kesehatan sebesar Rp122.160.081.455,00 merupakan pembayaran klaim kesehatan selama Tahun 2019.

Tabel 58. Piutang Klaim Kesehatan

No	Uraian	Saldo 2018 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 2019 (Rp)
1	KAI	518.073,00	2.667.335,00	3.056.418,00	128.990,00
	- RSUD Sosodoro Djatikoesoemo	518.073,00	2.667.335,00	3.056.418,00	128.990,00
2	Inhealth	38.160.403,00	266.212.376,00	274.176.032,00	30.196.747,00
	- RSUD Sosodoro Djatikoesoemo	38.160.403,00	266.212.376,00	274.176.032,00	30.196.747,00
3	BPJS Kesehatan	40.141.724.348,00	135.084.483.918,00	115.882.982.894,00	59.343.225.372,00
	- RSUD	36.422.674.620,00	119.844.985.264,00	103.672.358.421,00	52.595.301.463,00

No	Uraian	Saldo 2018 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 2019 (Rp)
	Sosodoro Djatikoesoemo				
	- RSUD Sumberrejo	667.152.200,00	3.019.304.354,00	667.152.200,00	3.019.304.354,00
	- RSUD padangan	3.051.897.528,00	12.220.194.300,00	11.543.472.273,00	3.728.619.555,00
4	Jasa Raharja	1.071.893.186,00	4.965.616.798,00	5.514.287.035,00	523.222.949,00
	- RSUD Sosodoro Djatikoesoemo	1.046.231.562,00	4.571.928.591,00	5.142.358.911,00	475.801.242,00
	- RSUD Sumberrejo	25.661.624,00	22.122.307,00	25.661.624,00	22.122.307,00
	- RSUD padangan	0,00	371.565.900,00	346.266.500,00	25.299.400,00
5	Pihak Ketiga	201.350.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	201.350.000,00
	- RSUD Sosodoro Djatikoesoemo	201.350.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	201.350.000,00
6	BPJS Ketenagakerjaan	42.596.167,00	367.526.013,00	331.514.501,00	78.607.679,00
	- RSUD Sosodoro Djatikoesoemo	42.596.167,00	367.526.013,00	331.514.501,00	78.607.679,00
7	Yakes Pertamina	3.626.364,00	148.438.211,00	152.064.575,00	-
	- RSUD Sosodoro Djatikoesoemo	3.626.364,00	148.438.211,00	152.064.575,00	-
	Jumlah	41.499.868.541,00	140.836.944.651,00	122.160.081.455,00	60.176.731.737,00

(c) **Piutang DBH Pajak dan Bukan Pajak**

Penambahan sebesar Rp644.679.003.984,00 terdiri penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Triwulan IV TA 2019 sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 188/7/KPTS/013/2020 sebesar Rp6.041.679.999,00 dan penambahan piutang transfer senilai Rp638.637.323.985,00 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 20/PMK.07/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2020 serta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 36/PMK.07/2020 tanggal 17 April 2020 tentang Penetapan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2019 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19).

Pengurangan senilai Rp9.864.975.800,00 merupakan penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok yang ditransfer pada tanggal 17 Januari 2019.

(d) **Piutang Deviden**

Tidak ada penambahan piutang deviden pada tahun 2019.

(e) **Piutang Lainnya**

Penambahan Piutang Lainnya sebesar Rp10.358.952.288,97 terdiri dari Piutang Belanja Modal DPU Bina Marga senilai Rp2.955.642.273,59 yang merupakan pengembalian uang muka 20% pekerjaan Peningkatan Jalan Sroyo-Nglinggo I dan II (SK No. 188/246/KEP/412.013/2017; Ruas No. 19) yang akan

dilakukan pada tahun 2020 karena putus kontrak. Penambahan piutang Pihak Ketiga senilai Rp6.708.259.515,38 berasal dari koreksi atas kurang volume pemeriksaan BPK PDDT Belanja TA 2019 yang berpengaruh ke nilai aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan serta penyusutan. Penambahan piutang senilai Rp695.050.500,00 merupakan piutang Komitmen Fee PT ADS Tahun 2019 senilai USD50.000 yang dinilai berdasarkan kurs tengah BI per tanggal 31 Desember 2019.

Pengurangan senilai Rp28.999.500,00 merupakan penyesuaian rugi selisih kurs atas piutang Komitmen Fee Tahun 2018 yang belum terbayar sampai dengan 31 Desember 2019.

5.3.1.1.3 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(23.004.450.890,68)	(21.979.234.530,99)

Penyisihan piutang tidak tertagih Tahun 2019 sebesar Rp23.004.450.890,68 terdiri dari:

Tabel 59. Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Uraian	Saldo 2018 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 2019 (Rp)
Badan Pendapatan Daerah	8.383.349.725,94	872.548.566,63	150.161.822,48	9.105.736.470,09
Dinas Pertanian	2.076.616.000,00	-	112.100.000,00	1.964.516.000,00
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	1.758.132.100,21	188.831.858,42	15.493.000,00	1.931.470.958,63
Dinas Peternakan dan Perikanan	6.900.825.806,57	519.899.437,20	357.470.000,00	7.063.255.243,77
Dinas Ketahanan Pangan	310.890.000,00	-	43.100.000,00	267.790.000,00
Bagian Perekonomian Setda	274.600.000,00	-	16.450.000,00	258.150.000,00
Dinas Koperasi dan UKM	1.987.279.874,31	117.621.318,21	28.352.807,00	2.076.548.385,52
Dinas Penanaman Modal & PTSP	532.980,00	5.801.942,10	-	6.334.922,10
RSUD Sosodoro	188.775.785,95	266.906.930,61	188.775.785,95	266.906.930,61
RSUD Padangan	15.259.487,64	18.769.594,78	15.259.487,64	18.769.594,78
RSUD Sumberjo	3.464.069,12	15.207.133,31	3.464.069,12	15.207.133,31
PPKD	62.045.129,00	-	52.945.129,00	9.100.000,00
Dinas Kesehatan	17.463.572,25	5.887.040,50	17.463.572,25	5.887.040,50
DPU Bina Marga	-	14.778.211,37	-	14.778.211,37
JUMLAH	21.979.234.530,99	2.026.252.033,13	1.001.035.673,44	23.004.450.890,68

Penyisihan Piutang Tidak tertagih sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi ditetapkan sebagai berikut :

- (1) Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat)

klasifikasi yakni kualitas piutang lancar, kurang lancar, diragukan dan macet.

- (2) Penggolongan kualitas piutang pajak dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Kualitas lancar, jika umur piutang kurang dari 1 tahun;
 - b. Kualitas kurang lancar, jika umur piutang 1 sampai dengan 3 tahun;
 - c. Kualitas diragukan, jika umur piutang 3 sampai dengan 5 tahun;
 - d. Kualitas macet, jika umur piutang diatas 5 tahun.
- (3) Penggolongan kualitas piutang bukan pajak khusus untuk objek retribusi, dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Kualitas lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 tahun;
 - b. Kualitas kurang lancar, jika umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun;
 - c. Kualitas diragukan, jika umur piutang 2 sampai dengan 3 tahun;
 - d. Kualitas macet, jika umur piutang lebih dari 3 tahun.
- (4) Penggolongan kualitas piutang bukan pajak khusus selain yang disebutkan retribusi, dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Kualitas lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
 - b. Kualitas kurang lancar, apabila dalam jangka waktu 1 tahun terhitung sejak tanggal jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan;
 - c. Kualitas diragukan, apabila dalam jangka waktu 2 tahun terhitung sejak tanggal jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan;
 - d. Kualitas macet, apabila dalam jangka waktu 3 tahun terhitung sejak tanggal jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan.
- (5) Penyisihan piutang daerah tidak tertagih yang umum ditetapkan paling sedikit sebesar lima permil dari piutang daerah yang memiliki kualitas lancar;
- (6) Penyisihan piutang daerah tidak tertagih yang khusus ditetapkan sebesar:
 - a. 10% (sepuluh perseratus) dari piutang daerah dengan kualitas kurang lancar;
 - b. 50% (lima puluh perseratus) dari piutang daerah dengan kualitas diragukan; dan
 - c. 100% (seratus perseratus) dari piutang daerah dengan kualitas macet.

Rincian atas Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah sebagai berikut :

Tabel 60. Rincian Penyisihan Piutang Daerah

No	SKPD	Uraian	Pengakuan Piutang	Umur	Sisa Piutang		Penyisihan (%)	Jumlah Penyisihan		Total Penyisihan
					Pokok	Bunga		Penyisihan Pokok	Penyisihan Bunga	
1	Badan Pendapatan Daerah	Piutang Pajak Hotel	2009	10	15.946.000,00	-	100,00	15.946.000,00	-	15.946.000,00
		Piutang Pajak Hotel	2012	7	43.007.600,00	-	100,00	43.007.600,00	-	43.007.600,00
		Piutang Pajak Hotel	2014	5	512.000,00	-	50,00	256.000,00	-	256.000,00
		Piutang Pajak Hotel	2018	1	-	-	10,00	-	-	-
		Piutang Pajak Hotel	2019	0	-	-	0,50	-	-	-
		Piutang Pajak Reklame	2009	10	24.739.500,00	-	100,00	24.739.500,00	-	24.739.500,00
		Piutang Pajak Reklame	2012	7	2.737.500,00	-	100,00	2.737.500,00	-	2.737.500,00
		Piutang Pajak Reklame	2013	6	5.919.010,00	-	100,00	5.919.010,00	-	5.919.010,00
		Piutang Pajak Reklame	2016	3	117.688.043,00	-	10,00	11.768.804,30	-	11.768.804,30
		Piutang Pajak Reklame	2017	2	-	-	10,00	-	-	-
		Piutang Pajak Reklame	2018	1	-	-	10,00	-	-	-
		Piutang Pajak Reklame	2019	0	-	-	0,50	-	-	-
		Piutang Pajak Bahan Gol C	2009	10	850.000,00	-	100,00	850.000,00	-	850.000,00
		Piutang Pajak Bahan Gol C	2018	1	-	-	10,00	-	-	-
		Piutang Pajak Bahan Gol C	2019	0	-	-	0,50	-	-	-

No	SKPD	Uraian	Pengkakuan Piutang	Umur	Sisa Piutang		Penyisihan (%)	Jumlah Penyisihan		Total Penyisihan
					Pokok	Bunga		Penyisihan Pokok	Penyisihan Bunga	
		Piutang Pajak Sarang Burung	2009	10	19.650.000,00	-	100,00	19.650.000,00	-	19.650.000,00
		Piutang Pajak Sarang Burung	2013	6	95.400,00	-	100,00	95.400,00	-	95.400,00
		Piutang Pajak Sarang Burung	2015	4	1.450.000,00	-	50,00	725.000,00	-	725.000,00
		Piutang Pajak Restoran	2012	7	1.800.000,00	-	100,00	1.800.000,00	-	1.800.000,00
		Piutang Pajak Restoran	2013	6	225.000,00	-	100,00	225.000,00	-	225.000,00
		Piutang Pajak Restoran	2014	5	1.042.858,00	-	50,00	521.429,00	-	521.429,00
		Piutang Pajak Restoran	2015	4	3.611.600,00	-	50,00	1.805.800,00	-	1.805.800,00
		Piutang Pajak Restoran	2018	1	-	-	10,00	-	-	-
		Piutang Pajak Restoran	2019	0	-	-	0,50	-	-	-
		Piutang Pajak Parkir	2013	6	811.000,00	-	100,00	811.000,00	-	811.000,00
		Piutang Pajak Parkir	2014	5	153.000,00	-	50,00	76.500,00	-	76.500,00
		Piutang Pajak Parkir	2015	4	1.943.000,00	-	50,00	971.500,00	-	971.500,00
		Piutang Pajak Parkir	2018	1	-	-	10,00	-	-	-
		Piutang Pajak Parkir	2019	0	-	-	0,50	-	-	-
		Piutang Pajak ABT	2012	7	2.714.140,00	-	100,00	2.714.140,00	-	2.714.140,00
		Piutang Pajak ABT	2013	6	1.924.596,00	-	100,00	1.924.596,00	-	1.924.596,00
		Piutang Pajak ABT	2014	5	45.132.314,00	-	50,00	22.566.157,00	-	22.566.157,00
		Piutang Pajak ABT	2015	4	27.359.974,00	-	50,00	13.679.987,00	-	13.679.987,00
		Piutang Pajak ABT	2018	1	-	-	10,00	-	-	-
		Piutang Pajak ABT	2019	0	114.042.234,00	-	0,50	570.211,17	-	570.211,17
		PPJ	2015	4	-	-	50,00	-	-	-
		PPJ	2017	2	-	-	10,00	-	-	-
		PPJ	2018	1	-	-	10,00	-	-	-
		PPJ	2019	0	3.762.928.322,00	-	0,50	18.814.641,61	-	18.814.641,61
		Pajak Hiburan	2012	7	2.950.000,00	-	100,00	2.950.000,00	-	2.950.000,00
		Pajak Hiburan	2013	6	16.500.000,00	-	100,00	16.500.000,00	-	16.500.000,00
		Pajak Hiburan	2018	1	-	-	10,00	-	-	-
		Pajak Hiburan	2019	0	-	-	0,50	-	-	-
		PBB	2009<	10	3.557.793.886,92	-	100,00	3.557.793.886,92	-	3.557.793.886,92
		PBB	2010	9	665.773.948,44	-	100,00	665.773.948,44	-	665.773.948,44
		PBB	2011	8	840.788.751,88	-	100,00	840.788.751,88	-	840.788.751,88
		PBB	2012	7	1.383.246.519,37	-	100,00	1.383.246.519,37	-	1.383.246.519,37
		PBB	2013	6	922.964.038,00	-	100,00	922.964.038,00	-	922.964.038,00
		PBB	2014	5	1.285.440.802,00	-	50,00	642.720.401,00	-	642.720.401,00
		PBB	2015	4	874.610.964,59	-	50,00	437.305.482,30	-	437.305.482,30
		PBB	2016	3	1.141.457.486,00	-	10,00	114.145.748,60	-	114.145.748,60
		PBB	2017	2	1.493.634.804,00	-	10,00	149.363.480,40	-	149.363.480,40
		PBB	2018	1	1.466.428.847,00	-	10,00	146.642.884,70	-	146.642.884,70
		PBB	2019	0	2.291.810.474,00	-	0,50	11.459.052,37	-	11.459.052,37
		Retribusi Sewa Tanah	2016	3	217.865.000,33	-	10,00	21.786.500,03	-	21.786.500,03
		Retribusi Sewa Tanah	2017	2	1.200.000,00	-	10,00	120.000,00	-	120.000,00
		Retribusi Sewa Tanah	2018	1	-	-	10,00	-	-	-
		Retribusi Sewa Tanah	2019	0	-	-	0,50	-	-	-
		Sub Jumlah 1			20.358.748.613,53			9.105.736.470,09		9.105.736.470,09
2	Dinas Pertanian	Pinjaman Modal Petani			166.541.000,00			166.541.000,00		166.541.000,00
		Pinjaman Agrobisnis Kacang Tanah	2004	15	42.196.000,00	-	100,00	42.196.000,00	-	42.196.000,00
		Pengembangan Agrobisnis Kacang Tanah Jagung dan Kedelai	2005	14	14.000.000,00	-	100,00	14.000.000,00	-	14.000.000,00
		Pinjaman Modal Petani	2007	12	25.500.000,00	-	100,00	25.500.000,00	-	25.500.000,00
		Pinjaman Modal Usaha Tani Palawija	2007	12	6.000.000,00	-	100,00	6.000.000,00	-	6.000.000,00
		Pinjaman Pupuk Berimbang	2008	11	78.845.000,00	-	100,00	78.845.000,00	-	78.845.000,00
		Pinjaman Usaha Tani Tembakau			1.797.975.000,00			1.797.975.000,00		1.797.975.000,00
		Pinjaman Modal	2010	9	96.275.000,00	-	100,00	96.275.000,00	-	96.275.000,00

No	SKPD	Uraian	Pengkakuan Piutang	Umur	Sisa Piutang		Penyisihan (%)	Jumlah Penyisihan		Total Penyisihan
					Pokok	Bunga		Penyisihan Pokok	Penyisihan Bunga	
		Untuk Usaha Tani Tembakau ON FARM (Kelompok Tani)								
		Pinjaman Modal Untuk Usaha Tani Tembakau OFF FARM (Pengusaha)	2010	9	79.000.000,00	-	100,00	79.000.000,00	-	79.000.000,00
		Pinjaman Modal Untuk Usaha Tani Tembakau OFF FARM (Pengusaha)	2011	8	125.000.000,00	-	100,00	125.000.000,00	-	125.000.000,00
		Pinjaman Modal Untuk Usaha Tani Tembakau OFF FARM (Pengusaha)	2012	7	251.500.000,00	-	100,00	251.500.000,00	-	251.500.000,00
		Pinjaman Modal Untuk Usaha Tani Tembakau ON FARM (Pengusaha)	2013	6	40.000.000,00	-	100,00	40.000.000,00	-	40.000.000,00
		Pinjaman Modal Untuk Usaha Tani Tembakau OFF FARM (Pengusaha)	2013	6	1.206.200.000,00	-	100,00	1.206.200.000,00	-	1.206.200.000,00
		Sub Jumlah 2			1.964.516.000,00	-		1.964.516.000,00	-	1.964.516.000,00
3	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Pinjaman Modal Industri			1.096.817.959,63	-		1.096.817.959,63	-	1.096.817.959,63
		Pinjaman Modal IKDK	2005	14	17.542.000,00	-	100,00	17.542.000,00	-	17.542.000,00
		Pinjaman Modal IKDK	2006	13	2.071.000,00	-	100,00	2.071.000,00	-	2.071.000,00
		Pinjaman Modal IKDK	2007	12	3.315.000,00	-	100,00	3.315.000,00	-	3.315.000,00
		Pinjaman Modal IKDK	2008	11	3.268.000,00	-	100,00	3.268.000,00	-	3.268.000,00
		Pinjaman Modal IKDK	2009	10	17.207.000,00	-	100,00	17.207.000,00	-	17.207.000,00
		Pinjaman Modal IKDK	2010	9	9.846.000,00	-	100,00	9.846.000,00	-	9.846.000,00
		Pinjaman Modal Cukai	2010	9	62.346.000,00	-	100,00	62.346.000,00	-	62.346.000,00
		Pinjaman Modal IKDK	2011	8	79.163.000,00	-	100,00	79.163.000,00	-	79.163.000,00
		Pinjaman Modal Cukai	2011	8	223.318.000,00	-	100,00	223.318.000,00	-	223.318.000,00
		Pinjaman Modal IKDK	2012	7	57.733.024,62	-	100,00	57.733.024,62	-	57.733.024,62
		Pinjaman Modal Cukai	2012	7	153.563.042,29	-	100,00	153.563.042,29	-	153.563.042,29
		Pinjaman Modal IKDK	2013	6	22.526.364,34	-	100,00	22.526.364,34	-	22.526.364,34
		Pinjaman Modal Cukai	2013	6	66.268.155,71	-	100,00	66.268.155,71	-	66.268.155,71
		Pinjaman Modal IKDK	2014	5	120.651.844,74	-	100,00	120.651.844,74	-	120.651.844,74
		Pinjaman Modal Cukai	2014	5	257.999.527,93	-	100,00	257.999.527,93	-	257.999.527,93
		Pinjaman Tenaga Kerja			805.918.733,83	28.734.265,17		805.918.733,83	28.734.265,17	834.652.999,00
		Pinjaman TKI	2001	18	57.511.352,73	8.093.136,00	100,00	57.511.352,73	8.093.136,00	65.604.488,73
		Pinjaman TKI	2002	17	81.700.363,64	9.899.636,06	100,00	81.700.363,64	9.899.636,06	91.599.999,70
		Pinjaman TKI	2003	16	590.922.685,46	10.741.493,11	100,00	590.922.685,46	10.741.493,11	601.664.178,57
		Pinjaman TKI	2004	15	14.000.000,00	-	100,00	14.000.000,00	-	14.000.000,00
		Pinjaman TKI	2005	14	61.784.332,00	-	100,00	61.784.332,00	-	61.784.332,00
		Sub Jumlah 3			1.902.736.693,46	28.734.265,17		1.902.736.693,46	28.734.265,17	1.931.470.958,63
4	Dinas Peternakan dan Perikanan	Piutang Sapi Kreman	2003	16	137.819.500,00	8.842.580,00	100,00	137.819.500,00	8.842.580,00	146.662.080,00
		Piutang Sapi Betina	2004	15	18.327.800,00	6.433.200,00	100,00	18.327.800,00	6.433.200,00	24.761.000,00
		Piutang Sapi Betina	2005	14	47.436.050,00	18.000.800,00	100,00	47.436.050,00	18.000.800,00	65.436.850,00
		Piutang Sapi Betina	2006	13	36.040.300,00	15.355.500,00	100,00	36.040.300,00	15.355.500,00	51.395.800,00
		Piutang Sapi Betina	2011	8	290.500.000,00	-	100,00	290.500.000,00	-	290.500.000,00
		Piutang Sapi Kreman	2011	8	122.000.000,00	-	100,00	122.000.000,00	-	122.000.000,00
		Piutang Kambing/Domba	2011	8	1.352.200.000,00	-	100,00	1.352.200.000,00	-	1.352.200.000,00
		Piutang Sapi Betina	2012	7	545.460.000,00	-	100,00	545.460.000,00	-	545.460.000,00
		Piutang Sapi Kreman	2012	7	357.450.000,00	-	100,00	357.450.000,00	-	357.450.000,00
		Piutang Kambing/ Domba	2012	7	974.060.000,00	-	100,00	974.060.000,00	-	974.060.000,00
		Piutang Burung Puyuh	2012	7	21.100.000,00	-	100,00	21.100.000,00	-	21.100.000,00
		Piutang Budidaya Ikan	2012	7	10.000.000,00	-	100,00	10.000.000,00	-	10.000.000,00

No	SKPD	Uraian	Pengakuan Piutang	Umur	Sisa Piutang		Penyisihan (%)	Jumlah Penyisihan		Total Penyisihan
					Pokok	Bunga		Penyisihan Pokok	Penyisihan Bunga	
		Piutang Sapi Kreman	2013	6	169.500.000,00	-	100,00	169.500.000,00	-	169.500.000,00
		Piutang Sapi Betina	2013	6	735.350.000,00	-	100,00	735.350.000,00	-	735.350.000,00
		Piutang Kambing/Domba	2013	6	1.102.420.000,00	-	100,00	1.102.420.000,00	-	1.102.420.000,00
		Piutang Ikan	2013	6	-	-	100,00	-	-	-
		Sapi Kereman	2014	5	317.944.175,53	-	100,00	317.944.175,53	-	317.944.175,53
		Sapi Betina	2014	5	292.949.498,34	-	100,00	292.949.498,34	-	292.949.498,34
		Kambing/domba	2014	5	281.208.945,92	-	100,00	281.208.945,92	-	281.208.945,92
		Budidaya Ikan	2014	5	202.856.893,98	-	100,00	202.856.893,98	-	202.856.893,98
		Sub Jumlah 4			7.014.623.163,77	48.632.080,00		7.014.623.163,77	48.632.080,00	7.063.255.243,77
5	Dinas Ketahanan Pangan	Pinjaman Modal Dryer	2005	14	51.000.000,00	-	100,00	51.000.000,00	-	51.000.000,00
		Pinjaman Modal Pembelian Gabah	2006	13	66.440.000,00	-	100,00	66.440.000,00	-	66.440.000,00
		Pinjaman Modal Pembelian Gabah	2007	12	108.300.000,00	650.000,00	100,00	108.300.000,00	650.000,00	108.950.000,00
		Pinjaman Modal Pembelian Gabah	2008	11	41.400.000,00	-	100,00	41.400.000,00	-	41.400.000,00
		Sub Jumlah 5			267.140.000,00	650.000,00		267.140.000,00	650.000,00	267.790.000,00
6	Bagian Perekonomian Setda	Pinjaman Dekranasda	2004	15	5.500.000,00	-	100,00	5.500.000,00	-	5.500.000,00
		Pinjaman Dekranasda	2005	14	23.500.000,00	-	100,00	23.500.000,00	-	23.500.000,00
		Pinjaman Dekranasda	2006	13	14.500.000,00	-	100,00	14.500.000,00	-	14.500.000,00
		Pinjaman Dekranasda	2007	12	3.350.000,00	-	100,00	3.350.000,00	-	3.350.000,00
		Pengrajin kayu 2004	2004	15	211.300.000,00	-	100,00	211.300.000,00	-	211.300.000,00
		Sub Jumlah 6			258.150.000,00	-		258.150.000,00	-	258.150.000,00
7	Dinas Koperasi dan UKM	Piutang Koperasi	2001	18	65.300.000,00	-	100,00	65.300.000,00	-	65.300.000,00
		Piutang Koperasi	2002	17	27.100.000,00	-	100,00	27.100.000,00	-	27.100.000,00
		Piutang Koperasi	2003	16	192.750.000,00	-	100,00	192.750.000,00	-	192.750.000,00
		Piutang Koperasi	2004	15	34.500.000,00	4.500.000,00	100,00	34.500.000,00	4.500.000,00	39.000.000,00
		Piutang UKM	2004	15	63.500.800,00	-	100,00	63.500.800,00	-	63.500.800,00
		Piutang Koperasi (PAK)	2005	14	19.500.000,00	700.000,00	100,00	19.500.000,00	700.000,00	20.200.000,00
		Piutang Koperasi	2005	14	59.000.000,00	5.400.000,00	100,00	59.000.000,00	5.400.000,00	64.400.000,00
		Piutang UKM	2005	14	26.724.600,00	-	100,00	26.724.600,00	-	26.724.600,00
		Piutang Koperasi	2006	13	27.665.000,00	1.900.000,00	100,00	27.665.000,00	1.900.000,00	29.565.000,00
		Piutang Koperasi (PAK)	2006	13	-	1.200.000,00	100,00	-	1.200.000,00	1.200.000,00
		Piutang UKM	2006	13	36.639.383,00	-	100,00	36.639.383,00	-	36.639.383,00
		Piutang Koperasi	2007	12	11.500.000,00	-	100,00	11.500.000,00	-	11.500.000,00
		Piutang UKM (PAK)	2007	12	134.925.000,00	-	100,00	134.925.000,00	-	134.925.000,00
		Piutang UKM	2007	12	43.700.000,00	-	100,00	43.700.000,00	-	43.700.000,00
		Piutang Koperasi	2008	11	46.750.000,00	-	100,00	46.750.000,00	-	46.750.000,00
		Piutang UKM	2008	11	272.675.660,00	8.424.340,00	100,00	272.675.660,00	8.424.340,00	281.100.000,00
		Piutang Koperasi	2009	10	55.118.850,00	17.447.150,00	100,00	55.118.850,00	17.447.150,00	72.566.000,00
		Piutang UKM	2009	10	257.097.000,00	35.500.000,00	100,00	257.097.000,00	35.500.000,00	292.597.000,00
		Piutang Koperasi	2010	9	60.826.850,00	13.200.000,00	100,00	60.826.850,00	13.200.000,00	74.026.850,00
		Piutang UKM	2010	9	161.202.191,00	13.030.000,00	100,00	161.202.191,00	13.030.000,00	174.232.191,00
		Piutang Cukai	2011	8	120.000.000,00	-	100,00	120.000.000,00	-	120.000.000,00
		Piutang Koperasi	2014	5	9.418.930,58	-	100,00	9.418.930,58	-	9.418.930,58
		Piutang UKM	2014	5	249.352.630,94	-	100,00	249.352.630,94	-	249.352.630,94
		Sub Jumlah 7			1.975.246.895,52	101.301.490,00		1.975.246.895,52	101.301.490,00	2.076.548.385,52
8	Dinas Penanaman Modal & PTSP	Piutang Retribusi Trayek	2013	6	300.000,00	-	100,00	300.000,00	-	300.000,00
		Piutang Retribusi IMB	2018	1	60.349.221,00	-	10,00	6.034.922,10	-	6.034.922,10
		Sub Jumlah 8			60.649.221,00	-		6.334.922,10	-	6.334.922,10
9	RSUD Sosodoro	Klaim Kesehatan	2019	0	53.381.386.121,00	-	0,50	266.906.930,61	-	266.906.930,61
		Sub Jumlah 9			53.381.386.121,00	-		266.906.930,61	-	266.906.930,61
10	RSUD Padangan	Klaim Kesehatan	2019	0	3.753.918.955,00	-	0,50	18.769.594,78	-	18.769.594,78
		Sub Jumlah 10			3.753.918.955,00	-		18.769.594,78	-	18.769.594,78
11	RSUD Sumberrejo	Klaim Kesehatan	2019	0	3.041.426.661,00	-	0,50	15.207.133,31	-	15.207.133,31
		Sub Jumlah 11			3.041.426.661,00	-		15.207.133,31	-	15.207.133,31
12	PPKD	TGR an Baidowi	2010	9	9.100.000,00	-	100,00	9.100.000,00	-	9.100.000,00
		Sub Jumlah 12			9.100.000,00	-		9.100.000,00	-	9.100.000,00

No	SKPD	Uraian	Pengakuan Piutang	Umur	Sisa Piutang		Penyisihan (%)	Jumlah Penyisihan		Total Penyisihan
					Pokok	Bunga		Penyisihan Pokok	Penyisihan Bunga	
13	Dinas Kesehatan	JKN non Kapitasi (BPJS)	2019	0	1.177.408.100,00	-	0,50	5.887.040,50	-	5.887.040,50
		Sub Jumlah 13			1.177.408.100,00	-		5.887.040,50	-	5.887.040,50
14	DPU Bina Marga	Piutang Belanja Modal	2019	0	2.955.642.273,59	-	0,50	14.778.211,37	-	14.778.211,37
		Sub Jumlah 14			2.955.642.273,59			14.778.211,37	-	14.778.211,37
		JUMLAH TOTAL			98.120.692.697,87	179.317.835,17		22.825.133.055,51	179.317.835,17	23.004.450.890,68

Pada Tahun 2019 tidak dilakukan penyisihan piutang atas piutang Komitmen Fee karena tingkat ketertagihan diasumsikan 100% selain itu juga dilakukan penyesuaian atas penyisihan piutang Tahun 2018.

Pada Tahun 2019 tidak dilakukan penyisihan piutang atas piutang piutang transfer karena tingkat ketertagihan diasumsikan 100%.

5.3.1.1.4 Belanja Dibayar Di Muka

	Tahun 2019	Tahun 2018
	(Rp)	(Rp)
Belanja Dibayar Di Muka	221.037.256,67	29.166.666,67

Belanja dibayar di muka per 31 Desember 2019 sebesar Rp221.037.256,67 terdiri dari belanja dari Dinas Sosial sebesar Rp131.041.666,67 atas Belanja Sewa Rumah Singgah untuk pasien PBI-JKN dan PBI-D yang dirujuk ke RSUD Dr Soetomo Surabaya yang dibayarkan selama 2 tahun senilai Rp185.000.000,00 dengan masa kontrak 1 Juni 2019 sampai dengan 1 Juni 2021 sesuai dengan Akta Perjanjian Perpanjangan Sewa Menyewa Nomor 18 Tanggal 16 Mei 2019. Rumah singgah tersebut beralamat di Jalan Gubeng Kertajaya VII-F/3 Surabaya atas nama Bambang Soeyitno Liem. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 masa sewa yang telah digunakan adalah 7 bulan yaitu Juni 2019 sampai dengan Desember 2019, sedangkan sisanya selama 17 bulan diakui sebagai belanja dibayar dimuka.

Tambahan Belanja Dibayar Dimuka senilai Rp89.995.590,00 merupakan penyelenggaraan Dukungan Pembiayaan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) bagi petani oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang dilaksanakan antara Dinas Pertanian dengan PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Kantor Cabang Surabaya Nomor : PKS 575/539-1/x/2019 melalui SP2D Nomor 7232/LS-BJ/2019 Tanggal 3 Desember 2019 senilai Rp119.994.120,00.

Jumlah peserta yang didaftarkan dalam Dukungan Pembiayaan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) adalah lahan budidaya padi maksimal seluas 60.000 hektar sebagaimana tercantum dalam anggaran Dinas Pertanian. Peserta yang didaftarkan adalah petani yang mengelola sawah di wilayah Kabupaten Bojonegoro dan mengupayakan sektor penanaman pangan dengan komoditas padi sebagaimana terdaftar pada Surat Keputusan Bupati tentang Penerima Bantuan AUTP Tahun 2019. Peserta mendapatkan polis atas nama kelompok tani dengan lampiran nama masing-masing anggota sebagai peserta beserta luas lahannya yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Kantor Cabang Surabaya.

Pelaksanaan perjanjian berlaku satu tahun terhitung sejak tanggal 4 Oktober 2019 dan berakhir pada tanggal 4 Oktober 2020.

5.3.1.1.5 Persediaan

	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
Persediaan	32.994.086.654,00	46.095.980.106,25

Jumlah persediaan per 31 Desember 2019 sebesar Rp32.994.086.654,00. Pengakuan persediaan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Jumlah tersebut terdiri dari:

Tabel 61. Persediaan

No	Uraian	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
1	Persediaan Alat Tulis Kantor	722.757.340,50	650.025.914,00
2	Persediaan Alat Listrik	157.849.879,00	57.318.100,00
3	Persediaan Suku Cadang Sarana Mobilitas	82.870.559,00	104.280.059,00
4	Persediaan Bahan/Bibit Tanaman	766.351.200,00	747.086.000,00
5	Persediaan Bibit Ternak	97.895.000,00	27.400.000,00
6	Persediaan Obat-obatan	13.678.562.819,05	24.377.347.265,83
7	Persediaan Bahan Kimia	681.823.572,00	1.189.015.480,00
8	Persediaan Bahan Cetakan	2.869.212.255,50	2.768.984.503,25
9	Persediaan Alat Kebersihan	52.608.795,00	37.096.180,00
10	Persediaan Radiologi	914.776.169,00	325.252.996,00
11	Persediaan Linen	958.519.329,00	461.031.145,50
12	Persediaan Haemodialisa	341.496.228,00	404.875.365,00
13	Persediaan Alat Pelindung Diri	110.027.690,00	87.168.860,00
14	Persediaan CSSD	274.394.760,89	156.465.783,00
15	Persediaan Alat Kesehatan	4.428.398.092,23	4.570.087.020,00
16	Persediaan Bahan Laboratorium	317.113.098,73	423.316.906,00
17	Persediaan Materai	9.099.000,00	13.890.000,00
18	Persediaan Bahan Bakar Minyak	275.890.620,00	224.265.000,00
19	Persediaan Bahan Makanan Pokok	40.126.247,50	69.595.385,00
20	Persediaan Lain-lain	6.214.313.998,60	8.560.938.368,67
21	Persediaan Reagent	-	840.539.775,00
	JUMLAH	32.994.086.654,00	46.095.980.106,25

1. Persediaan Alat Tulis Kantor

Saldo persediaan alat tulis kantor per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp722.757.340,50, sedangkan saldo persediaan alat tulis kantor per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp650.025.914,00, yaitu dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 62. Rincian Persediaan Alat Tulis Kantor

No	Nama SKPD	Persediaan ATK 2018 Rp	Pembelian Rp	Pemakaian Rp	Persediaan ATK 2019 Rp
1	Dinas Pendidikan	50.972.000,00	342.606.950,00	362.864.700,00	30.714.250,00
2	Dinas Kesehatan	219.582.635,00	2.341.281.654,00	2.238.786.809,00	322.077.480,00
3	RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo	181.065.071,00	495.047.047,00	484.123.650,00	191.988.468,00
4	RSUD Sumberrejo	0,00	46.923.500,00	46.923.500,00	0,00
5	RSUD Padangan	4.130.491,00	74.597.050,00	75.450.272,50	3.277.268,50
6	Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang	959.500,00	201.426.153,00	200.690.653,00	1.695.000,00
7	Dinas PU Sumber Daya	6.733.300,00	52.896.142,00	59.629.442,00	0,00

No	Nama SKPD	Persediaan ATK 2018 Rp	Pembelian Rp	Pemakaian Rp	Persediaan ATK 2019 Rp
	Air				
8	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya	2.349.500,00	106.646.000,00	106.126.666,00	2.868.834,00
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	985.000,00	41.436.000,00	41.371.700,00	1.049.300,00
10	Satuan Polisi Pamong Praja	340.000,00	77.608.700,00	77.540.200,00	408.500,00
11	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	675.000,00	142.349.000,00	141.814.000,00	1.210.000,00
12	Dinas Pemadam Kebakaran	1.805.000,00	22.816.500,00	24.621.500,00	0,00
13	Dinas Sosial	777.000,00	54.098.500,00	53.950.500,00	925.000,00
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	160.000,00	134.451.100,00	134.526.100,00	85.000,00
15	Dinas Ketahanan Pangan	961.572,00	19.825.704,00	19.809.576,00	977.700,00
16	Dinas Lingkungan Hidup	820.000,00	57.284.300,00	57.442.800,00	661.500,00
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	54.664.376,00	38.212.376,00	16.452.000,00
18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.844.500,00	85.642.000,00	82.156.500,00	5.330.000,00
19	Dinas Perhubungan	1.455.000,00	92.167.500,00	93.622.500,00	0,00
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	227.000,00	74.727.850,00	74.673.250,00	281.600,00
21	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	2.221.075,00	61.499.400,00	60.556.675,00	3.163.800,00
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	810.000,00	89.856.975,00	90.239.975,00	427.000,00
23	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2.757.500,00	54.297.000,00	57.054.500,00	0,00
24	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	219.000,00	49.925.500,00	47.984.500,00	2.160.000,00
25	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.078.000,00	57.271.460,00	56.932.460,00	1.417.000,00
26	Dinas Peternakan dan Perikanan	351.500,00	219.382.600,00	218.959.100,00	775.000,00
27	Dinas Pertanian	4.298.120,00	128.626.989,00	129.526.919,00	3.398.190,00
28	Dinas Perdagangan	825.000,00	41.616.704,00	41.353.704,00	1.088.000,00
29	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	1.679.500,00	109.921.063,00	109.382.563,00	2.218.000,00
30	Bagian Organisasi dan Tata Laksana	8.716.500,00	223.644.300,00	226.324.300,00	6.036.500,00
31	Bagian Pemerintahan	200.000,00	20.974.000,00	20.924.000,00	250.000,00
32	Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan	200.000,00	71.175.000,00	71.175.000,00	200.000,00
33	Bagian Sumber Daya Alam	733.000,00	12.000.000,00	11.811.500,00	921.500,00
34	Bagian Perlengkapan	129.282.250,00	192.037.000,00	227.848.000,00	93.471.250,00
35	Bagian Pembangunan	185.000,00	12.025.000,00	12.038.000,00	172.000,00
36	Bagian Perekonomian	120.000,00	9.543.409,00	9.363.409,00	300.000,00
37	Bagian Umum dan Keuangan	140.000,00	47.090.000,00	47.035.000,00	195.000,00
38	Bagian Humas dan Protokol	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
39	Bagian Kesejahteraan Rakyat	50.000,00	6.974.000,00	6.902.000,00	122.000,00
40	Bagian Layanan	1.710.000,00	47.185.300,00	46.636.300,00	2.259.000,00

No	Nama SKPD	Persediaan ATK 2018 Rp	Pembelian Rp	Pemakaian Rp	Persediaan ATK 2019 Rp
	Pengadaan Barang/Jasa				
41	Sekretariat DPRD	263.000,00	243.852.573,00	243.660.373,00	455.200,00
42	Inspektorat	715.000,00	46.294.600,00	45.939.100,00	1.070.500,00
43	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.051.700,00	51.486.886,00	49.929.086,00	2.609.500,00
44	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.080.000,00	149.402.720,00	148.267.720,00	2.215.000,00
45	Badan Pendapatan Daerah	5.453.000,00	163.580.500,00	162.299.000,00	6.734.500,00
46	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	982.500,00	108.271.400,00	108.022.900,00	1.231.000,00
47	Kecamatan Bojonegoro	365.000,00	240.605.437,00	240.541.437,00	429.000,00
48	Kecamatan Kapas	257.500,00	14.125.853,00	13.589.353,00	794.000,00
49	Kecamatan Balen	152.000,00	15.816.300,00	15.808.300,00	160.000,00
50	Kecamatan Sumberrejo	278.000,00	16.024.000,00	16.202.000,00	100.000,00
51	Kecamatan Kanor	287.000,00	19.805.950,00	19.845.950,00	247.000,00
52	Kecamatan Baureno	275.000,00	32.629.500,00	31.844.500,00	1.060.000,00
53	Kecamatan Sugihwaras	370.000,00	15.313.000,00	15.273.000,00	410.000,00
54	Kecamatan Kepohbaru	73.000,00	28.872.000,00	28.785.000,00	160.000,00
55	Kecamatan Kedungadem	100.000,00	31.394.500,00	31.244.500,00	250.000,00
56	Kecamatan Sukosewu	0,00	40.262.500,00	40.262.500,00	0,00
57	Kecamatan Trucuk	535.200,00	19.706.904,00	19.782.104,00	460.000,00
58	Kecamatan Malo	250.000,00	13.107.000,00	12.707.000,00	650.000,00
59	Kecamatan Kalitidu	165.000,00	41.226.000,00	41.131.000,00	260.000,00
60	Kecamatan Dander	560.000,00	17.788.000,00	17.978.000,00	370.000,00
61	Kecamatan Padangan	270.000,00	10.724.500,00	10.804.500,00	190.000,00
62	Kecamatan Purwosari	429.000,00	26.104.500,00	26.073.500,00	460.000,00
63	Kecamatan Kasiman	450.000,00	10.357.000,00	10.467.000,00	340.000,00
64	Kecamatan Kedewan	221.000,00	17.663.000,00	17.544.000,00	340.000,00
65	Kecamatan Ngasem	430.000,00	16.795.500,00	16.669.000,00	556.500,00
66	Kecamatan Ngambon	220.000,00	17.078.200,00	17.008.200,00	290.000,00
67	Kecamatan Tambakrejo	304.000,00	22.774.000,00	22.682.000,00	396.000,00
68	Kecamatan Ngraho	200.000,00	18.935.000,00	18.925.000,00	210.000,00
69	Kecamatan Margomulyo	450.000,00	7.879.430,00	8.271.430,00	58.000,00
70	Kecamatan Temayang	230.000,00	13.863.500,00	13.863.500,00	230.000,00
71	Kecamatan Bubulan	320.000,00	29.790.000,00	29.780.000,00	330.000,00
72	Kecamatan Gondang	1.480.000,00	17.500.700,00	18.130.700,00	850.000,00
73	Kecamatan Sekar	130.000,00	14.991.000,00	15.121.000,00	0,00
74	Kecamatan Gayam	260.000,00	13.289.200,00	13.284.200,00	265.000,00
	JUMLAH	650.025.914,00	7.522.352.879,00	7.449.621.452,50	722.757.340,50

2. Persediaan Alat Listrik

Saldo persediaan alat listrik per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp157.849.879,00, sedangkan saldo persediaan alat listrik per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp57.318.100,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 63. Rincian Persediaan Alat Listrik

No	Nama SKPD	Saldo 2019 Rp	Saldo 2018 Rp
1.	Dinas Kesehatan	10.353.595,00	200.000,00
2.	RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo	109.285.304,00	31.142.100,00
3.	RSUD Sumberrejo	8.999.830,00	-
4.	RSUD Padangan	22.881.850,00	18.017.000,00
5.	Dinas PU Sumber Daya Air	1.170.500,00	2.867.000,00
6.	Satuan Polisi Pamong Praja	249.800,00	252.000,00

No	Nama SKPD	Saldo 2019 Rp	Saldo 2018 Rp
7.	Dinas Pemadam Kebakaran	2.240.000,00	3.690.000,00
8.	Dinas Pertanian	2.490.000,00	1.050.000,00
9.	Kecamatan Kanor	103.000,00	
10.	Inspektorat	76.000,00	100.000,00
	JUMLAH	157.849.879,00	57.318.100,00

3. Persediaan Suku Cadang Sarana Mobilitas
Persediaan suku cadang sarana mobilitas terdapat pada Dinas PU Sumber Daya Air. Saldo per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp82.870.559,00, sedangkan saldo persediaan suku cadang sarana mobilitas per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp104.280.059,00.
4. Persediaan Bahan/Bibit Tanaman
Persediaan Bahan/Bibit Tanaman terdapat pada Dinas Pertanian. Saldo per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp766.351.200,00, sedangkan saldo persediaan Bahan/Bibit Tanaman per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp747.086.000,00.
5. Persediaan Bibit Ternak
Persediaan Bibit Ternak terdapat pada Dinas Peternakan dan Perikanan. Saldo per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp97.895.000,00, sedangkan saldo persediaan Bibit Ternak per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp27.400.000,00.
6. Persediaan Obat-obatan
Saldo Persediaan Obat-obatan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp13.678.562.819,05, sedangkan saldo persediaan obat-obatan per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp24.377.347.265,83 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 64. Rincian Persediaan Obat-obatan

No	Nama SKPD	Saldo 2019 Rp	Saldo 2018 Rp
1.	Dinas Kesehatan	6.102.264.975,00	16.125.163.508,00
2.	RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo	3.799.956.650,31	4.540.446.998,00
3.	RSUD Sumberrejo	809.909.725,89	1.041.247.918,59
4.	RSUD Padangan	3.083.201.283,58	2.560.136.101,24
5.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	775.400,00	11.016.320,00
6.	Dinas Peternakan dan Perikanan	2.241.000,00	1.655.000,00
7.	Dinas Pertanian	425.413.000,00	97.681.420,00
	JUMLAH	13.678.562.819,05	24.377.347.265,83

Persediaan berkurang senilai Rp561.589.694,05 berasal dari persediaan obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) yang sudah kedaluarsa pada Rumah Sakit Umum Daerah Padangan masing-masing senilai Rp474.296.179,51 dan Rp87.293.514,54. Atas persediaan kedaluarsa tersebut rencananya akan dilakukan pemusnahan pada Tahun 2020.

Selain itu persediaan obat-obatan dalam kondisi baik dan tidak ada yang *expired* ataupun rusak karena sebelum sampai *expired*, barang sudah ditukar dengan yang baru.

7. Persediaan Bahan Kimia
 Persediaan Bahan Kimia terdapat pada RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo. Saldo per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp681.823.572,00, sedangkan saldo persediaan Bahan Kimia per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp1.189.015.480,00.
8. Persediaan Bahan Cetakan
 Saldo Persediaan Bahan Cetakan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp2.869.212.255,50, sedangkan saldo persediaan Bahan Cetakan per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp2.768.984.503,25, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 65. Rincian Persediaan Bahan Cetakan

No	Nama SKPD	Saldo 2019 Rp	Saldo 2018 Rp
1.	Dinas Kesehatan	173.629.800,00	35.840.500,00
2.	RSUD Sumberrejo	68.699.000,00	108.647.500,00
3.	RSUD Padangan	77.403.985,00	113.282.300,00
4.	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya	1.538.406,00	308.750,00
5.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	512.500,00	700.000,00
6.	Dinas Pemadam Kebakaran	-	1.000.000,00
7.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	140.000,00	1.520.000,00
8.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.010.068.316,00	2.159.962.816,00
9.	Dinas Perhubungan	347.689.248,50	86.025.637,25
10.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	247.500,00	-
11.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	86.845.000,00	166.641.000,00
12.	Dinas Pertanian	1.600.000,00	4.900.000,00
13.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	225.000,00	-
14.	Kecamatan Gondang	220.000,00	-
15.	Inspektorat	1.303.500,00	4.176.500,00
16.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2.425.000,00	3.350.000,00
17.	Badan Pendapatan Daerah	96.665.000,00	82.629.500,00
	JUMLAH	2.869.212.255,50	2.768.984.503,25

9. Persediaan Alat Kebersihan
 Saldo Persediaan Alat Kebersihan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp52.608.795,00, sedangkan saldo persediaan Alat Kebersihan per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp37.096.180,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 66. Rincian Persediaan Alat Kebersihan

No	Nama SKPD	Saldo 2019 Rp	Saldo 2018 Rp
1.	Dinas Kesehatan	8.937.130,00	6.655.000,00
2.	RSUD Sumberrejo	39.105.825,00	16.358.500,00
3.	RSUD Padangan	3.566.640,00	12.962.180,00
4.	Satuan Polisi Pamong Praja	174.700,00	73.000,00
5.	Dinas Pemadam Kebakaran	190.000,00	-
6.	Dinas Pemberdayaan	-	276.000,00

No	Nama SKPD	Saldo 2019 Rp	Saldo 2018 Rp
	Masyarakat dan Desa		
7.	Dinas Perhubungan	-	382.000,00
8.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	147.000,00	135.000,00
9.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	213.500,00	-
10.	Inspektorat	224.000,00	108.000,00
11.	Kecamatan Kanor	50.000,00	-
12.	Kecamatan Purwosari	-	123.000,00
13.	Kecamatan Kedewan	-	23.500,00
	JUMLAH	52.608.795,00	37.096.180,00

10. Persediaan Radiologi

Saldo Persediaan Radiologi per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp914.776.169,00, sedangkan saldo persediaan Radiologi per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp325.252.996,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 67. Rincian Persediaan Radiologi

No	Nama SKPD	Saldo 2019 Rp	Saldo 2018 Rp
1.	RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo	619.594.062,00	181.727.196,00
2.	RSUD Sumberrejo	75.913.200,00	74.844.000,00
3.	RSUD Padangan	219.268.907,00	68.681.800,00
	JUMLAH	914.776.169,00	325.252.996,00

11. Persediaan Linen

Persediaan Linen terdapat pada RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo. Saldo per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp958.519.329,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp461.031.145,50.

12. Persediaan Haemodialisa

Persediaan Haemodialisa terdapat pada RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo. Saldo per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp341.496.228,00, sedangkan saldo per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp404.875.365,00.

13. Persediaan Alat Pelindung Diri

Persediaan Alat Pelindung Diri terdapat pada RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo. Saldo per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp110.027.690,00, sedangkan saldo persediaan Alat Pelindung Diri per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp87.168.860,00.

14. Persediaan CSSD

Persediaan CSSD terdapat pada RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo. Saldo per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp274.394.760,89, sedangkan saldo persediaan CSSD per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp156.465.783,00.

15. Persediaan Alat Kesehatan

Saldo Persediaan Alat Kesehatan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp4.428.398.092,23, sedangkan saldo persediaan Alat Kesehatan per 31

Desember 2018 adalah sebesar Rp4.570.087.020,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 68. Rincian Persediaan Alat Kesehatan

No	Nama SKPD	Saldo 2019 Rp	Saldo 2018 Rp
1.	RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo	3.358.428.073,57	3.363.822.518,00
2.	RSUD Sumberrejo	1.069.145.018,66	1.205.989.502,00
3.	Dinas Peternakan dan Perikanan	825.000,00	275.000,00
	JUMLAH	4.428.398.092,23	4.570.087.020,00

16. Persediaan Bahan Laboratorium

Saldo Persediaan Bahan Laboratorium per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp317.113.098,73 yang berasal dari RSUD Sumberrejo sebesar Rp131.145.281,00 dan RSUD Padangan sebesar Rp185.967.817,73. Sedangkan saldo persediaan Bahan Laboratorium per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp423.316.906,00 yang berasal dari RSUD Sumberrejo sebesar Rp248.912.579,00 dan RSUD Padangan sebesar Rp174.404.327,00.

17. Persediaan Materai

Saldo Persediaan Materai per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp9.099.000,00, sedangkan saldo persediaan Materai per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp13.890.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 69. Rincian Persediaan Materai

No	Nama SKPD	Saldo 2019 Rp	Saldo 2018 Rp
1.	Dinas Kesehatan	807.000,00	1.062.000,00
2.	Dinas Pertanian	7.050.000,00	12.000.000,00
3.	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	126.000,00	141.000,00
4.	Inspektorat	60.000,00	120.000,00
5.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	540.000,00	435.000,00
6.	Kecamatan Purwosari	96.000,00	66.000,00
7.	Kecamatan Kedewan	120.000,00	66.000,00
8.	Kecamatan Gondang	300.000,00	-
	JUMLAH	9.099.000,00	13.890.000,00

18. Persediaan Bahan Bakar Minyak

Persediaan Bahan Bakar Minyak terdapat pada Dinas PU Sumber Daya Air. Saldo per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp275.890.620,00, sedangkan saldo persediaan Bahan Bakar Minyak per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp224.265.000,00.

19. Persediaan Bahan Makanan Pokok

Saldo Persediaan Bahan Makanan Pokok per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp40.126.247,50, sedangkan saldo persediaan Bahan Makanan Pokok per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp69.595.385,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 70. Rincian Persediaan Bahan Makanan Pokok

No	Nama SKPD	Saldo 2019 Rp	Saldo 2018 Rp
1.	RSUD Sumberrejo	10.481.300,00	19.138.200,00
2.	RSUD Padangan	29.644.947,50	50.457.185,00
	JUMLAH	40.126.247,50	69.595.385,00

20. Persediaan Lain-Lain

Saldo Persediaan Lain-Lain per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp6.214.313.998,60, sedangkan saldo Persediaan Lain-Lain per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp8.560.938.368,67, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 71. Rincian Persediaan Lain-Lain

No	Nama SKPD	Saldo 2019 Rp	Saldo 2018 Rp
1.	Dinas Kesehatan	4.135.837.500,00	4.320.000,00
2.	RSUD Sumberrejo	16.140.750,00	32.535.500,00
3.	RSUD Padangan	3.187.800,00	11.363.542,00
4.	Dinas PU Sumber Daya Air	108.447.600,00	242.772.670,00
5.	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya	1.846.403.748,00	8.265.421.656,67
6.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-
7.	Dinas Peternakan dan Perikanan	65.000,00	4.225.000,00
8.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	149.000,00	300.000,00
	JUMLAH	6.214.313.998,60	8.560.938.368,67

Persediaan lain-lain terdiri dari plastik pembungkus obat, plastik dapur, tabung oksigen, karung, bahan baku bangunan, bahan percontohan, karcis RPH dan perlengkapan komputer.

21. Persediaan Reagent

Saldo Persediaan Reagent per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp0,00 karena oleh RSUD dicatat dalam persediaan bahan kimia, sedangkan saldo persediaan reagent per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp840.539.775,00.

5.3.1.2. INVESTASI JANGKA PANJANG

	<u>31 Desember 2019</u> (Rp)	<u>31 Desember 2018</u> (Rp)
Investasi Non Permanen	-	-
Investasi Permanen	<u>2.677.011.828.924,29</u>	<u>395.994.740.790,35</u>
Jumlah	<u>2.677.011.828.924,29</u>	<u>395.994.740.790,35</u>

Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp2.677.011.828.924,29 terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen dengan penjelasan sebagai berikut:

(a) Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2019 adalah nihil karena tidak ada penempatan dana dalam bentuk investasi non permanen.

(b) Investasi Permanen

Investasi Permanen Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2019 sebesar Rp2.677.011.828.924,29 yang merupakan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada BUMD dan Badan Hukum Lainnya bukan milik Negara/Daerah yang terdiri dari:

	<u>Tahun 2019</u> (Rp)	<u>Tahun 2018</u> (Rp)
Investasi Permanen	2.677.011.828.924,29	395.994.740.790,35

Jumlah tersebut merupakan penyertaan modal pemerintah daerah yang terdiri dari :

Tabel 72. Investasi Permanen

Investasi Permanen	Saldo 2018 (Rp)	Penambahan		Pengurangan		Saldo 2019 (Rp)
		Karena Penyertaan (Rp)	Laba Tahun Berjalan/Koreksi (Rp)	Koreksi (Rp)	Rugi Tahun Berjalan (Rp)	
PD BPR Bojonegoro	223.717.403.845,00	-	10.332.261.935,00	-	-	234.049.665.780,00
PD Apotik Sidowaras	197.584.305,53	-	-	-	-	197.584.305,53
PD Pasar Bojonegoro	26.838.432.269,06	-	-	26.838.432.269,06	-	-
PDAM Bojonegoro	19.129.588.989,76	-	39.210.458.619,79	-	-	58.340.047.609,55
PT Asri Dharma Sejahtera	2.008.000.000,00	-	2.258.312.799.848,21	-	-	2.260.320.799.848,21
PT Bank Jatim	75.072.158.000,00	-	-	-	-	75.072.158.000,00
PT Bojonegoro Bangun Sarana	23.668.406.259,12	-	-	-	-	23.668.406.259,12
BPR Jatim	18.000.000.000,00	-	-	-	-	18.000.000.000,00
PT, GDK	7.363.167.121,88	-	-	-	-	7.363.167.121,88
JUMLAH	395.994.740.790,35	-	2.307.855.520.403,00	26.838.432.269,06	-	2.677.011.828.924,29

(1) PD BPR Bojonegoro

Penilaian investasi di PD BPR Bojonegoro menggunakan metode ekuitas dengan porsi kepemilikan modal Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebesar 100%. Penyertaan modal pada PD BPR Bojonegoro sebagaimana Perda Nomor 15 Tahun 2013 tanggal 18 November 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal di Kabupaten Bojonegoro. Penyertaan modal pada PD BPR Kabupaten Bojonegoro berdasarkan pada Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2005 tanggal 27 September 2005 tentang Perubahan Kedua Perda No 14 Tahun 1995 yaitu perubahan modal dasar dari Rp1.000.000.000,00 menjadi Rp10.000.000.000,00. Penyertaan tersebut direncanakan untuk perluasan jaringan kantor berupa pembukaan kantor cabang dan kantor kas serta rencana renovasi kantor pusat maupun pengembangan IT (Informasi Teknologi).

Penambahan investasi permanen pada PD BPR adalah berasal dari laba yang diperoleh selama Tahun 2019 sebesar Rp10.332.261.935,00.

(2)) PD Apotik Sidowaras

Penilaian investasi di PD Apotik Sidowaras menggunakan metode ekuitas dengan porsi kepemilikan modal Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebesar 100%.

Penyertaan modal pada PD Apotik Sidowaras Kabupaten Bojonegoro berdasarkan pada Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 07 Tahun 1989 tanggal 04 Juli 1989 tentang Perusahaan Daerah Apotik "SIDOWARAS". Pada Tahun 2014 ini PD Apotik Sidowaras kegiatan operasionalnya dibekukan sedangkan karyawannya dilimpahkan ke RSUD Sosodoro Djatikoesoemo sesuai Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor: 188/232/KEP/412.11/2014.

Setelah dilakukan pembekuan sementara telah dilakukan audit penutupan sebagaimana hasil Audit KAP Budiman, Wawan, Pamudji dan Rekan Nomor LAI-162/LK/KAP-BWP/XII/2014 Tanggal 05 Desember 2014.

Kondisi aset dan kewajiban sebagaimana hasil audit per 30 September 2014 :

(a)) Aset lancar dengan total Rp212.168.932,06 dengan rincian:

Kas dan setara kas : Rp 90.057.733,57

(dititipkan di RKUD, sebagai titipan uang operasional)

Persediaan barang : Rp 32.781.060,00

Uang muka pajak : Rp 89.330.138,49

(b)) Aset tetap dengan total Rp10.883.447,63

(c)) Kewajiban kepada para pihak :

Hutang pajak : Rp 2.804.566,74

Hutang pembagian laba : Rp 22.663.507,42

Terdapat hutang pajak sebesar Rp559.096.904,00 sebagaimana surat dari KPP Pratama Bojonegoro nomor SPHP-00025/WPJ.24/KP.0505/RIK.SIS/2015 tanggal 11 Maret 2015 tentang Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan.

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sudah memproses pembubaran PD Apotik Sidowaras dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2016 Tanggal 4 Pebruari 2016 tentang Pembubaran Perusahaan Daerah Apotek Sidowaras Kabupaten Bojonegoro. Sebagai tindak lanjut atas Perda tersebut, Bagian Perekonomian sedang dalam proses membuat usulan pembentukan Tim Likuidatur dan pendamping Tim Likuidatur yang akan bertugas mengurus terkait masalah aset, kewajiban dan ekuitas dari BUMD bersangkutan.

(3)) PD Pasar Bojonegoro

Penilaian investasi di PD Pasar Bojonegoro menggunakan metode ekuitas dengan porsi kepemilikan modal Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebesar 100%. Penyertaan modal pada PD. Pasar Kabupaten Bojonegoro berdasarkan pada Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 30 Tahun 2003 tanggal 6 Nopember 2003 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Bojonegoro.

Pada tahun 2019 terdapat pengurangan investasi permanen sebesar Rp26.838.432.269,06 karena PD Pasar dialihkelolakan kepada Dinas Perdagangan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembubaran Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Bojonegoro.

(4) PDAM Bojonegoro

Penilaian investasi di PDAM Bojonegoro menggunakan metode ekuitas dengan kepemilikan modal Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2014 sebesar 100%. Adapun penambahan investasi Permanen senilai Rp39.210.458.619,79 terdiri dari berasal dari laba yang diperoleh Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bojonegoro selama Tahun 2019 senilai Rp6.168.964.552,00 dan koreksi atas penyertaan yang selama ini belum ditentukan statusnya senilai Rp33.041.494.067,79..

(5) PT Asri Dharma Sejahtera

Penambahan investasi permanen senilai Rp2.258.312.799.848,21 pada PT Asri Dharma Sejahtera berasal dari perubahan penggunaan metode pencatatan yang digunakan yaitu dari metode cost menjadi metode ekuitas sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 06 tentang akuntansi investasi.

Penyertaan modal pada PT Asri Dharma Sejahtera berdasarkan pada Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 08 Tahun 2002 tanggal 12 April 2002 tentang Pembentukan Perseroan Daerah PT Asri Dharma Sejahtera.

Sebagaimana perjanjian pemegang saham tanggal 31 Maret 2009 pada pasal 10.1 huruf h yang menyatakan bahwa SER akan memberikan dana sebesar US\$50.000 yang akan dibayarkan setiap tahunnya.

PT. ADS merupakan salah satu BUMD Pemkab Bojonegoro dengan bidang usaha semula dibidang kegiatan usaha minyak bumi dan gas. Pendirian tersebut selanjutnya disahkan dengan Akta Notaris Yatiman Hadisuparjo, SH Nomor 484 Tahun 2002 dengan bidang usaha antara lain ekspor dan impor, perdagangan lokal, jasa angkutan, jasa pergudangan. Berdasarkan Perjanjian Penempatan Saham antara Pemkab Bojonegoro, PT. ADS dan PT. SER tanggal 31 Maret 2009, kepemilikan saham PT. ADS dari semula dimiliki oleh Pemkab Bojonegoro dan INS menjadi dimiliki Pemkab Bojonegoro dan PT. SER. Selain Perjanjian Penempatan Saham, pada tahun 2009 tersebut juga dibuat Perjanjian Pemegang Saham antara Pemkab Bojonegoro dan PT. SER yang salah satu klausulnya adalah merubah anggaran dasar perusahaan. Dalam rangka memenuhi salah satu kesepakatan perjanjian tersebut, Pemkab Bojonegoro mengeluarkan Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Perseroan Daerah PT. ADS.

Selain itu, PT. ADS juga membuat perubahan anggaran dasar yang telah diaktakan pada Notaris Sutjipto, SH, M.Kn dengan Akta Nomor 183 tanggal 22 Juni 2009 dan mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-31870.AH.01.02 tahun 2009 tanggal 10 Juli 2009. Pada saat perubahan anggaran dasar tersebut, modal saham seri A dan B telah disetorkan seluruhnya, sedangkan untuk saham seri C,

dari modal dasar sebanyak 35.294 lembar, baru ditempatkan sebanyak 21.480 lembar dengan nilai nominal Rp270.825.897.360,00.

Berdasarkan Akta Notaris M. Nova Faisal, SH, MKn, Nomor 5 tanggal 25 Juni 2010, modal saham seri C ditambah menjadi 28.643 lembar saham dan kemudian dengan Akta Notaris M. Nova Faisal, SH, MKn Nomor 31 tanggal 15 Pebruari 2012, ditambah lagi menjadi 30.511 lembar saham atau senilai Rp384.691.292.102,00. Kedua perubahan tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Keputusan Nomor AHU-AH.01.10-17846 tertanggal 14 Juli 2010, Nomor AHU-AH.01.10-09096 tanggal 15 Maret 2012. Dengan akta perubahan anggaran dasar dan dua akta perubahan modal tersebut, maka jumlah modal dasar serta saham ditempatkan dan disetorkan PT. ADS menjadi sebagai berikut:

Tabel 73. Struktur Modal PT. ADS Menurut Perubahan Anggaran Dasar Tanggal 22 Juni 2009

Jenis Saham	Pemilik	Modal Dasar			Modal Ditempatkan dan Disetor		
		Jumlah Lembar	Nilai per Lembar (Rp)	Jumlah (Rp)	Jumlah Lembar	Nilai per Lembar (Rp)	Jumlah (Rp)
Seri A	Pemkab Bojonegoro	160.000	50,00	8.000.000,00	160.000	50,00	8.000.000,00
Seri B	Pemkab Bojonegoro	20.000	100.000,00	2.000.000.000,00	20.000	100.000,00	2.000.000.000,00
	PT. SER	60.000	100.000,00	6.000.000.000,00	60.000	100.000,00	6.000.000.000,00
Seri C	PT. SER	35.294	12.608.282,00	444.996.704.908,00	30.511	12.608.282,00	384.691.292.102,00
Jumlah		275.294		453.004.704.908,00	270.511		392.699.292.102,00

Berdasarkan Akta Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH, MKn, Nomor 298 tanggal 31 Januari 2017, modal saham seri C ditambah menjadi 52.434 lembar saham dan disepakati kenaikan harga saham dari Rp12.608.282,00 menjadi Rp26.000.000,00 dengan pertimbangan agar Pemkab Bojonegoro tetap menjadi pemegang saham mayoritas di PT. ADS. Perubahan tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Keputusan Nomor AHU-AH.01.03-0086878 tanggal 24 Pebruari 2017. Dengan akta perubahan anggaran dasar dan perubahan modal tersebut, maka jumlah modal dasar serta saham ditempatkan dan disetorkan PT. ADS menjadi sebagai berikut:

Tabel 74. Struktur Modal PT. ADS Menurut Perubahan Anggaran Dasar Tanggal 31 Januari 2017

Jenis Saham	Pemilik	Modal Dasar			Modal Ditempatkan dan Disetor		
		Jumlah Lembar	Nilai per Lembar (Rp)	Jumlah (Rp)	Jumlah Lembar	Nilai per Lembar (Rp)	Jumlah (Rp)
Seri A	Pemkab Bojonegoro	160.000	50,00	8.000.000,00	160.000	50,00	8.000.000,00
Seri B	Pemkab Bojonegoro	20.000	100.000,00	2.000.000.000,00	20.000	100.000,00	2.000.000.000,00
	PT. SER	60.000	100.000,00	6.000.000.000,00	60.000	100.000,00	6.000.000.000,00
Seri C	PT. SER	52.434	26.000.000,00	1.363.284.000.000,00	52.434	26.000.000,00	1.363.284.000.000,00
Jumlah		292.434		1.371.292.000.000,00	292.434		1.371.292.000.000,00

(6) PT Bank Jatim

Penilaian investasi di PT Bank Jatim menggunakan metode biaya. Penyertaan modal pada PT Bank Jatim berdasarkan pada Perda

Kabupaten Bojonegoro Nomor 04 Tahun 2008 Tanggal 30 Juni 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Bank-Bank dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Saham Pemerintah Kabupaten Bojonegoro pada Bank Jatim berjumlah 300.288.632 lembar saham dengan nilai Rp250,00 per lembar saham.

(7) PT Bojonegoro Bangun Sarana

Penilaian investasi di PT Bojonegoro Bangun Sarana menggunakan metode ekuitas dengan porsi kepemilikan modal Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebesar 99%.

(8) BPR Jatim

Penilaian investasi di BPR Jatim menggunakan metode biaya. Kepemilikan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro atas BPR Jatim sebesar nilai saham yang disetor yaitu Rp18.000.000.000,00.

(9) Griya Dharma Kusuma (GDK)

Penilaian investasi di PT Griya Dharma Kusuma (GDK) menggunakan metode ekuitas dengan porsi kepemilikan modal Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebesar 99%. PT.Griya Dharma Kusuma dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 27 Tahun 2011 tentang Perseroan Terbatas (PT) Griya Dharma Kusuma.

Dalam pencatatan dan pengakuan penyertaan modal tersebut Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menggunakan metode biaya untuk PT. Bank Jatim dan BPR Jatim sedangkan kepemilikan atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bojonegoro pada PD PDAM, BPR Bojonegoro, PT Bangkit Bangun Sarana, Apotik Sidowaras, PT.Griya Dharma Kusuma dan PT Asri Dharma Sejahtera, adalah lebih dari 50% sehingga menggunakan metode ekuitas.

5.3.1.3. ASET TETAP

Aset Tetap merupakan harta berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum, diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan dari sitaan atau dari rampasan.

Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp6.671.922.597.883,12 dan saldo awal Tahun 2019 sebesar Rp5.387.521.020.529,50. Penambahan dan pengurangan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Bojonegoro selama tahun 2019 seperti digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 75. Mutasi Aset Tetap

Aset Tetap	Saldo 31 Desember 2018 (Rp)	Mutasi 2019		Saldo 31 Desember 2019 (Rp)
		Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
Tanah	2.053.525.051.669,00	181.144.939.755,80	67.729.108.570,00	2.166.940.882.854,80
Peralatan dan Mesin	1.004.603.848.947,59	230.145.750.237,15	53.287.691.585,82	1.181.461.907.598,92
Gedung dan Bangunan	1.814.826.257.325,13	329.692.639.257,92	122.536.433.026,98	2.021.982.463.556,07
Jalan Irigasi dan Jaringan	2.536.635.721.966,42	892.850.211.963,02	98.045.207.791,68	3.331.440.726.137,76
Aset Tetap Lainnya	80.594.206.010,91	24.746.785.658,79	8.272.706.883,06	97.068.284.786,64

Aset Tetap	Saldo 31 Desember 2018 (Rp)	Mutasi 2019		Saldo 31 Desember 2019 (Rp)
		Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
Konstruksi dalam Pengerjaan	209.175.069.947,45	61.838.695.105,53	55.077.837.810,70	215.935.927.242,28
Akumulasi Penyusutan	(2.311.839.135.337,00)	391.600.785.823,56	360.532.326.867,21	(2.342.907.594.293,35)
Jumlah	5.387.521.020.529,50	2.112.019.807.801,77	765.481.312.535,45	6.671.922.597.883,12

5.3.1.3.1 Tanah

	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
Tanah	2.166.940.882.854,80	2.053.525.051.669,00

Nilai Aset Tetap Tanah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp2.166.940.882.854,80, dengan uraian sebagai berikut:

1 Saldo per 31 Desember 2018	2.053.525.051.669,00
2 Penambahan TA 2019:	
3 Belanja Modal	4.151.947.000,00 a)
4 Reklas	1.968.512.564,80 b)
5 Penambahan Lain	174.274.480.191,00 c)
6 Mutasi antar SKPD	750.000.000,00 d)
7 Jumlah (3 sd 6)	181.144.939.755,80
8 Pengurangan TA 2019:	
9 Reklas	(15.778.380.000,00) e)
10 Pengurangan Lain	(51.200.728.570,00) f)
11 Mutasi antar SKPD	(750.000.000,00) g)
12 Jumlah (9 sd 11)	(67.729.108.570,00)
13 Saldo per 31 Desember 2019 (1+7+12)	2.166.940.882.854,80

Penjelasan terinci atas penambahan aset tetap tanah pada Tahun 2019 sebesar Rp181.144.939.755,80 adalah sebagai berikut:

Tabel 76. Penambahan Aset Tanah

No. Ref	Uraian	Nilai (Rp)
a)	Belanja Modal Tahun 2019	4.151.947.000,00
b)	Reklas	1.968.512.564,80
	Reklas urug makam kelurahan Sumbang	224.113.000,00
	Urug lahan Tempat Penampungan Sementara (TPS) Pedagang Relokasi Pasar Kota	890.397.300,00
	Pengurukan Sarpras Parkir Gedung UPT Industri Mamin	854.002.264,80
c)	Penambahan Lain	174.274.480.191,00
	Koreksi ekuitas atas aset tanah yang sebelumnya tercatat dengan nilai Rp1,00 dan Rp0,00 dilakukan penaksiran harga perolehan dengan pendekatan NJOB setempat	1.152.599.197,00
	Penambahan Aset tetap tanah dibawah Jalan dan Bahu Jalan Kabupaten Tahap 6 Surat Persetujuan Bupati Bojonegoro Nomor 032/1153/412,303/2019 perihal Persetujuan Penetapan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah Dalam Rangka Pencatatan Aset Tetap Tanah dibawah jalan dan Bahu Jalan Kabupaten Tahap 6	126.169.004.000,00

No. Ref	Uraian	Nilai (Rp)
	Koreksi Ekuitas untuk Aset yang sebelumnya dicatat dengan nilai Rp.0,00 dengan pendekatan Harga Taksiran NJOP setempat untuk Aset 3 Bidang Tanah yang berlokasi di Jl. Raya Dander Kecamatan Dander dengan Luas 15.230m ² senilai Rp.1.568.690.000,00 penggunaan Tirtawana Dander; Luas 189m ² untuk penggunaan Taman Wisata Wahana Dander Rp.19.467.000,00; Luas 2.497m ² penggunaan Tirtawana Dander Rp.257.191.000,00 , Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1.845.348.000,00
	Koreksi ekuitas untuk tanah Eks Bengkok Kelurahan Sumbang deangan luas 5953m ² yang sebelumnya tercatat dengan nilai Rp1,00, Kecamatan Bojonegoro	160.730.999,00
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah koreksi ekuitas atas 4 bidang tanah ysng sebelumnya masing-masing tercatat dengan nilai Rp1,00 dan 1 bidang tanah yang sebelumnya tercatat dengan nilai Rp0,00 dilakukan penaksiran harga perolehan dengan pendekatan NJOB setempat yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebidang tanah untuk tempat peribadatan (Masjid Al- Muswa Djabah) yang terletak dikelurahan Kadipaten Kecamatan Bojonegoro dengan luas tanah 2.535m² Rp1.197.366.000,00; 2. Tanah lokasi Desa Banjarsari Kecamatan Trucuk 214m² dengan Sertifikat Hak Pakai No. 10 Tahun 2017 tanah untuk PAUD dan TK Rp22.042.000,00; 3. Tanah lokasi Desa Banjarsari Kecamatan Trucuk Luas 244m² dengan Sertifikat Hak Pakai No. 09 Tahun 2017, tanah untuk PAUD dan TK Rp25.132.000,00; 4. Tanah lokasi Desa Banjarsari Kecamatan Trucuk Luas 175m² sebidang tanah untuk masjid dengan Sertifikat Hak Pakai No. 08 Tahun 2017 Rp18.025.000,00; 5. Tanah dengam lokasi Desa Talok Kec. Kalitidu dengan luas tanah 21.430m² dengan Sertifikat No. 05 Tanggal 19 Desember 2017 dengan nilai taksiran harga Rp578.610.000,00. 	1.841.174.996,00
	Penambahan yang berasal dari koreksi tanah Puskesmas Pembantu Meduri pada UPTD Puskesmas Margomulyo yang semula bernilai Rp1,00.	20.139.999,00
	Penambahan yang berasal dari koreksi pencatatan divestasi PD Pasar	43.105.622.999,00
d)	Mutasi Aset Antar SKPD	750.000.000,00
	Mutasi aset dari Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air ke Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	750.000.000,00
	JUMLAH	181.144.939.755,80

Sedangkan untuk pengurangan aset tetap tanah pada tahun 2019 senilai Rp67.729.108.570,00 dengan rincian nilai sebagai berikut:

Tabel 77. Pengurangan Aset Tanah

No. Ref	Uraian	Nilai (Rp)
e)	Reklas	15.778.380.000,00
	Reklas aset Tanah ke Aset lainnya untuk Aset yang telah dilimpahkan ke Kementerian Kesehatan RI (Poltekes Surabaya) sesuai BAST Hibah antara Pemkab Bojonegoro dengan Poltekes Surabaya sehubungan pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2014 akan tetapi masih belum dilaksanakan penyerahan asetnya.	1.892.620.000,00
	Koreksi ekuitas Aset Tanah Setren/Waduk Leran Desa Leran Kec. Kalitidu yang masih tercatat di KIB A Dinas PU Sumberdaya Air senilai Rp30.000.000.000,00 yang seharusnya nilai Perolehan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Sebagian Urusan Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Dalam Bidang Pekerjaan Umum Pengairan Kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro Tanggal 5 Agustus Tahun 1996 Aset tersebut tercatat dengan harga senilai Rp30.000.000,00. Selanjutnya berdasarkan Berita Acara	30.000.000,00

No. Ref	Uraian	Nilai (Rp)
	Klarifikasi Data Aset Dinas PU Prov. Jatim dengan Dinas Pengairan Bojonegoro Poin 2 disebutkan bahwa "aset-aset tanah yang masuk dalam penyerahan P3D namun sesuai kewenangan (PP No. 20 Tahun 2006) merupakan kewenangan Pemprov Jatim, namun masuk dalam daftar kekayaan Pemkab. Bojonegoro, maka Pemkab. Bojonegoro harus mengeluarkan (menghapus) dari Daftar Kekayaan Pemkab. Bojonegoro dan Pemprov Jatim harus mencatat ke dalam daftar kekayaan Pemprov. Jatim." sehingga dilakukan reklas ke aset lainnya sampai diterbitkan SK Penghapusan.	
	Reklas ke Aset Lainnya akan dilimpahkan ke provinsi Lokasi Jl. Panglima Polim No. A, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	300.000.000,00
	Aset Tanah Terminal Tipe A dengan lokasi Jl. Veteran 62115 Sukorejo (terminal Rajekwesi) yang dilimpahkan ke Direktorat Jendral Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan dengan BAST Nomor:188/1500/412,303/2019; Nomor: BA,281/PL,201/DJPD/2019 Tanggal 12 Agustus 2019, direklas ke aset lainnya sampai diterbitkan SK Penghapusan.	13.555.760.000,00
f)	Pengurangan lain	51.200.728.570,00
	Koreksi ekuitas untuk aset tanah kas desa yang tercatat pada KIB A SD dan SMP	8.743.228.570,00
	Koreksi Ekuitas untuk 4 lokasi Tanah Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Sebagian Urusan Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Dalam Bidang Pekerjaan Umum Pengairan Kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro Tanggal 5 Agustus Tahun 1996 terdapat lebih saji Rp73.957.500.000,00 dengan rincian Aset Tanah Kantor Cabang Seksi Pengairan Sumberjo Desa Tlumbang Kec. Sumberrejo senilai Rp4.995.000.000,00 tercatat dengan harga Rp5.000.000,00 sedangkan di KIB A Dinas PU SDA tercatat Rp5.000.000.000,00 dan Tanah kantor Cabang Seksi Pengairan Baureno, Desa Ketawang Kec. Boureno senilai Rp3.996.000.000,00 yang seharusnya Rp4.000.000,00 namun di KIB A Dinas PU SDA tercatat Rp4.000.000.000,00, dan Aset tanah setren di Desa Jatiblimbing Kecamatan Dander yang digunakan untuk rumah juru pirang lebih saji Rp3.496.500.000,00 seharusnya Rp3.500.000,00 tercatat Rp3.500.000.000,00	42.457.500.000,00
g)	Mutasi Aset Antar SKPD	750.000.000,00
	Mutasi aset dari Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air ke Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	750.000.000,00
	JUMLAH	67.729.108.570,00

5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin

	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
Peralatan dan Mesin	1.181.461.907.598,92	1.004.603.848.947,59

Nilai aset tetap Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.181.461.907.598,92 dengan uraian sebagai berikut:

1	Saldo per 31 Desember 2018	1.004.603.848.947,58	
2	Penambahan TA 2019:		
3	Belanja Modal	200.607.141.462,11	a)
4	Hibah Pihak Ketiga	1.771.679.970,00	b)
5	Reklasifikasi	5.865.158.317,04	c)
6	Penambahan Lain	793.355.500,01	d)
7	Mutasi aset antar SKPD	21.108.414.988,00	e)

8	Jumlah (3 s.d. 7)	230.145.750.237,15	
9	Pengurangan TA 2019:		
10	Tidak Memenuhi Kriteria Aset Tetap	(166.497.300,00)	f)
11	Reklasifikasi	(12.522.270.928,00)	g)
12	Pengurangan Lain	(19.490.508.369,82)	h)
13	Mutasi aset antar SKPD	(21.108.414.988,00)	i)
14	Jumlah (10 s.d. 13)	(53.287.691.585,82)	
15	Saldo per 31 Desember 2019 (1+8+14)	1.181.461.907.598,92	

Penjelasan rinci atas penambahan aset tetap peralatan dan mesin pada Tahun 2019 sebesar Rp230.145.750.237,15 adalah sebagai berikut:

Tabel 78. Penambahan Aset Peralatan dan Mesin

No. Ref	Uraian	Nilai (Rp)
a)	Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2019 sebesar	200.607.141.462,11
b)	Hibah	1.771.679.970,00
	Hibah APBN 2019	1.704.388.928,00
	Hibah Komite	57.050.000,00
	Hibah dari Direktorat Jendral Perikanan Tangkap BA No. B14715/DJPT/PL,430,DI/XI/2018 Tanggal 8 Nopember 2018 berupa 6 Pencetakkan Papan Swaka untuk Dinas Peternakan dan Perikanan	10.241.042,00
c)	Reklasifikasi	5.865.158.317,04
	Reklas dari ATB, Dinas Pendidikan	254.975.000,00
	Peralatan dan Mesin Belanja BLUD RSUD Sosodoro DK	4.064.391.873,00
	Peralatan dan Mesin Belanja BLUD RSUD Kelas D Sumberrejo	130.856.269,00
	Peralatan dan Mesin Belanja BLUD RSUD RSUD Kelas D Padangan	381.978.715,00
	Reklas Aset Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya yang akan dimutasikan ke SKPD Lain	61.679.755,00
	Reklas ke Peralatan dan Mesin untuk 9 unit Pompa Air Sibel	85.792.500,00
	Reklas dari KDP 2018 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	472.304.448,00
	Koreksi atas reklas aset CCTV 413,179,757,04 dari gedung bangunan menjadi peralatan dan mesin No. SP2D 5773 Rp118.240.445,11; No.5772 Rp88.245.095,11; No.5770 Rp88.376.383,41 dan No.5769 Rp118.317.833,41 Dinas Perhubungan	413.179.757,04
d)	Penambahan Lain	793.355.500,00
	Hadiah/ Penghargaan pemenang lomba /pemilihan petugas operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi teladan kategori UPT/Pengamat Pengairan Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor:032/22613/104.4/2018 berupa 1 unit kendaraan dinas roda 3 merk Viar Type V30R; 1 unit kendaraan dinas roda 2 Merk Honda Type B5D02M29M2P J M/T; PC Merk HP Type Core i3-7100U dan Printer merk EPSON L120 Ink Tank Printer, Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	61.830.500,00
	Penambahan aset dari belanja barang dan jasa LED 1 unit 1,700,000; 2 unit gerobak sampah @ 4,750,000 dari Dinas Peternakan dan Perikanan	11.200.000,00
	Kurang catat honda Revo nopol S4729CP, Kecamatan Sugihwaras	10.825.000,00
	Koreksi ekuitas untuk aset kurang catat 3 kendaraan dinas nopol S1079BP Rp417.500.000,00; Nopol S1154AP Rp102.000.000,00; dan Nopol S1235AP Rp190.000.000,00	709.500.000,00
e)	Penambahan aset dari mutasi aset antar SKPD untuk peralatan dan mesin (dapat dilihat pada tabel berikutnya)	21.108.414.988,00
	JUMLAH	230.145.750.237,15

Tabel 79. Penambahan Peralatan Dan Mesin Dari Mutasi Aset Antar SKPD

Nama SKPD	Nilai (Rp)
Dinas Pendidikan	1.750.000,00
Dinas Kesehatan	1.077.164.000,00
RSUD Kelas B Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro	2.816.000,00
Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Sumberrejo	296.020.000,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	387.082.950,00
Satuan Polisi Pamong Praja	903.385.000,00
Dinas Pemadam Kebakaran	413.125.000,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB	84.124.000,00
Dinas Ketahanan Pangan	575.330.150,00
Dinas Perhubungan	1.096.414.150,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	310.852.850,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.601.815.485,00
Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	52.603.400,00
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	42.602.200,00
Sekretariat Daerah	8.059.224.003,00
Kecamatan Bojonegoro	1.419.296.150,00
Kecamatan Kapas	155.257.975,00
Kecamatan Balen	112.322.125,00
Kecamatan Sumberrejo	124.272.350,00
Kecamatan Kanor	84.523.725,00
Kecamatan Baureno	132.464.525,00
Kecamatan Sugihwaras	98.374.050,00
Kecamatan Kepohbaru	110.447.025,00
Kecamatan Kedungadem	132.625.725,00
Kecamatan Sukosewu	195.255.125,00
Kecamatan Trucuk	80.322.275,00
Kecamatan Malo	126.107.975,00
Kecamatan Kalitidu	160.244.275,00
Kecamatan Dander	193.193.975,00
Kecamatan Padangan	84.491.175,00
Kecamatan Purwosari	68.902.575,00
Kecamatan Kasiman	145.218.450,00
Kecamatan Kedewan	118.033.450,00
Kecamatan Ngasem	129.428.525,00
Kecamatan Ngambon	132.767.325,00
Kecamatan Tambakrejo	137.886.100,00
Kecamatan Ngraho	157.340.625,00
Kecamatan Margomulyo	159.030.975,00
Kecamatan Temayang	247.066.275,00
Kecamatan Bubulan	204.226.575,00
Kecamatan Gondang	122.411.750,00

Nama SKPD	Nilai (Rp)
Kecamatan Sekar	116.606.950,00
Kecamatan Gayam	137.117.775,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	17.875.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	665.620.000,00
Badan Pendapatan Daerah	417.500.000,00
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	17.875.000,00
Jumlah	21.108.414.988,00

Penjelasan rinci atas pengurangan aset tetap peralatan dan mesin pada Tahun 2019 sebesar Rp53.287.691.585,82 adalah sebagai berikut:

Tabel 80. Pengurangan Aset Peralatan Dan Mesin

No. Ref	Uraian	Nilai (Rp)
f)	Tidak memenuhi kriteria aset tetap baik karena harga satuan kurang dari Rp.500,000,00 maupun masa manfaat yang tidak lebih dari 1 tahun	166.497.300,00
g)	Reklas	12.522.270.928,00
	Reklas ke kondisi rusak berat :	
	Dinas Pendidikan	23.320.000,00
	RSUD Kelas B Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro	7.158.115.925,00
	Dinas Kesehatan	144.418.746,00
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	15.000.000,00
	Dinas Perhubungan	300.600.000,00
	Dinas Komunikasi dan Informatika	88.809.727,00
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	140.000.000,00
	Bagian SDA - Sekretariat Daerah	6.000.000,00
	Kecamatan Baureno	50.062.030,00
	Badan Pendapatan Daerah	150.000.000,00
	Reklas aset ke Aset lainnya untuk Aset AKBID yang telah dilimpahkan ke Kementerian Kesehatan RI (Poltekes Surabaya) sesuai BAST Hibah antara Pemkab Bojonegoro dengan Poltekes Surabaya sehubungan pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2014 akan tetapi masih belum dilaksanakan penyerahan asetnya	4.296.730.500,00
	KDP Perencanaan Mebelair RSUD Kelas B Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro	11.114.000,00
	Biaya pengadaan mobil pemadam gagal lelang, Dinas Pemadam Kebakaran	43.100.000,00
	Koreksi atas kendaraan pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan yang kondisinya rusak berat sehingga direklasifikasi pada aset lain-lain.	95.000.000,00
h)	Pengurangan Lain	19.490.508.369,82
	Aset yang sudah diakui Tahun 2018 Rp472.304.448,00	472.304.448,00
	Koreksi ekuitas untuk kendaraan dinas Puskesmas Ngasem lebih saji	23.000.000,00
	Pokja kendaraan operasional metrologi legal yang gagal lelang, Dinas Perdagangan	1.440.000,00
	Koreksi dampak dari perubahan pengaturan Intra ke Ekstrakomptabel	18.993.763.921,82
i)	Pengurangan aset dari mutasi aset antar SKPD untuk peralatan dan mesin	21.108.414.988,00
	JUMLAH	53.287.691.585,82

Tabel 81. Pengurangan Peralatan Dan Mesin dari Mutasi Aset Antar SKPD

Nama SKPD	Nilai (Rp)
Dinas Pendidikan	30.188.400,00
Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	3.340.000,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	448.762.705,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	2.816.000,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	310.852.850,00
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	387.082.950,00
Sekretariat Daerah	19.066.372.083,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	859.000.000,00
JUMLAH	21.108.414.988,00

5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan

	<u>Tahun 2019 (Rp)</u>	<u>Tahun 2018 (Rp)</u>
Gedung dan Bangunan	2.021.982.463.556,07	1.814.826.257.325,13

Nilai aset tetap Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp2.021.982.463.556,07 dengan uraian sebagai berikut:

1 Saldo per 31 Desember 2018	1.814.826.257.325,13	
2 Penambahan TA 2019:		
3 Belanja Modal	195.362.789.361,17	a)
4 Hibah dari Pihak Lain	950.795.580,00	b)
5 Reklasifikasi Aset	58.761.532.723,43	c)
6 Penambahan Lain	10.290.888.491,17	d)
7 Mutasi aset antar SKPD	64.326.633.102,15	e)
8 Jumlah (3 s.d. 7)	329.692.639.257,92	
9 Pengurangan TA 2019:		
10 Tidak memenuhi kriteria aset tetap	(54.707.128,00)	f)
11 Reklasifikasi Aset	(41.316.155.712,27)	g)
12 Pengurangan Lain	(16.838.937.084,56)	h)
13 Mutasi aset antar SKPD	(64.326.633.102,15)	i)
14 Jumlah (10 s.d. 13)	(122.536.433.026,98)	
15 Saldo per 31 Desember 2019 (1+8+14)	2.021.982.463.556,07	

Penjelasan rinci atas penambahan aset tetap gedung dan bangunan pada Tahun 2019 sebesar Rp319.431.439.257,92 adalah sebagai berikut:

Tabel 82. Penambahan Aset Gedung dan Bangunan

No. Ref	Uraian	Nilai (Rp)
a)	Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2019 sebesar	195.362.789.361,17
b)	Hibah dari pihak lain	950.795.580,00
	Hibah APBN 2019	914.495.580,00
	Hibah Komite 2019	36.300.000,00
c)	Reklasifikasi Aset	58.761.532.723,43
	Rubah kondisi dari rusak berat menjadi baik aset bangunan mess Persibo, Dinas Pertanian	9.084.000.000,00
	Reklas dari Belanja BLUD RSUD Kelas B Dr. R.	3.265.651.381,00

No. Ref	Uraian	Nilai (Rp)
	Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro	
	Reklas dari Belanja BLUD RSUD Sumberejo	20.500.000,00
	Reklas dari KDP 2018	46.391.381.342,43
d)	Penambahan Lain	10.290.888.491,17
	Koreksi ekuitas aset dr utang belanja 2018 dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	52,17
	koreksi pencatatan divestasi PD Pasar	10.261.200.000,00
	Denda yang dipotongkan termyn dari Dinas Perdagangan Tahun 2019 Rp23.750.751,00 dan Tahun 2018 Rp5.937.688,00	29.688.439,00
e)	Mutasi aset antar SKPD untuk Aset Gedung dan Bangunan	64.326.633.102,15
	JUMLAH	329.692.639.257,92

Tabel 83. Penambahan Aset Gedung dan Bangunan dari Mutasi antar SKPD

Nama SKPD	Nilai (Rp)
Dinas Pendidikan	29.410.806.457,15
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	13.017.927.038,50
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	416.524.350,00
Dinas Sosial	2.541.205.023,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	1.243.349.000,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	208.916.400,00
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	424.158.025,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	14.010.708.183,50
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2.189.220.000,00
Dinas Pertanian	486.827.125,00
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	251.921.500,00
Kecamatan Sukosewu	125.070.000,00
JUMLAH	64.326.633.102,15

Sedangkan untuk pengurangan aset tetap gedung dan bangunan pada tahun 2019 senilai Rp122.536.433.026,98 dengan rincian nilai sebagai berikut:

Tabel 84. Pengurangan Aset Gedung dan Bangunan

No. Ref	Uraian	Nilai (Rp)
f)	Tidak memenuhi kriteria Aset Tetap	54.707.128,00
	Dinas Pendidikan	34.207.128,00
	Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Sumberrejo	20.500.000,00
g)	Reklasifikasi	41.316.155.712,27
	Reklas kondisi rusak berat :	
	Dinas Pendidikan	9.259.238.053,00
	Dinas Kesehatan	461.163.000,00
	Kecamatan Balen	365.000.000,00
	Kecamatan Trucuk	268.048.000,00
	Kecamatan Dander	433.958.000,00
	Kecamatan Kasiman	95.500.000,00
	Kecamatan Tambakrejo	534.845.500,00
	Kecamatan Temayang	36.000.000,00
	Kecamatan Gondang	217.900.000,00

No. Ref	Uraian	Nilai (Rp)
	Dinas Lingkungan Hidup	400.658.319,00
	Dinas Sosial	289.950.000,00
	Kecamatan Ngambon	482.590.000,00
	Kecamatan Bojonegoro	427.350.000,00
	Perencanaan gedung kantor dishub th 2013 yang tidak dilanjutkan pembangunannya , Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	49.475.000,00
	Reklas ke KDP :	
	Dinas Pendidikan	449.141.391,00
	Dinas Kesehatan	905.393.903,96
	RSUD Kelas B Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo	2.681.621.089,00
	Dinas Perdagangan	1.143.702.890,00
	Bag. Pemerintahan	1.619.617.437,98
	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	86.460.000,00
	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	7.826.035.589,74
	Jasa konsultasi dan perencanaan gedung dan pagar BPP Kasiman, BPP Temayang, BPP Tambakrejo, tandon air dan pagar BPP Kapas Dinas Pertanian	78.720.000,00
	Reklas ke Tanah:	
	Reklas urug makam kel sumbang	224.113.000,00
	Urug lahan Tempat Penampungan Sementara (TPS) Pedagang Relokasi Pasar Kota	890.397.300,00
	Pengurukan Sarpras Parkir Gedung UPT Industri Mamin	854.002.264,80
	Reklas ke Jalan Jaringan dan Irigasi:	
	Reklas aset Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya yang akan diserahkan ke SKPD	379.940.458,75
	Reklas ke Aset Jalan Fasilitas disabilitas di alun-alun	216.561.135,00
	Reklas ke Peralatan dan Mesin aset CCTV Dinas Perhubungan	413.179.757,04
	Reklas ke Aset Lainnya lainnya akan dihibahkan ke provinsi, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	362.246.423,00
	Bangunan Terminal, sumur BOR dan Papan Nama Terminal Rajekwesi	3.084.344.200,00
	Reklas ke Aset Lainnya aset gedung dan bangunan AKBID yang telah dilimpahkan ke Kementerian Kesehatan RI (Poltekes Surabaya) sesuai BAST Hibah antara Pemkab Bojonegoro dengan Poltekes Surabaya sehubungan pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2014 akan tetapi masih belum dilaksanakan penyerahan asetnya	6.779.003.000,00
h)	Pengurangan Lain	16.838.937.084,56
	Koreksi ekuitas untuk aset tralis SMPN SATAP Sugihwaras Kec. Ngraho	1.020.000,00
	Koreksi ekuitas untuk pekerjaan Rehabilitasi gedung DPRD (sesuai data kontrak yaitu pekerjaan penggantian plafon, wallpaper dll)	206.440.000,00
	Koreksi akuitas untuk aset yang sudah diakui Tahun 2018	13.607.655.356,33
	Aset yang sudah diakui KDP 2018 setelah dikurangi Lebih saji Pengakuan KDP 2018	2.792.148.760,98
	Koreksi ekuitas untuk aset yang seharusnya masuk belanja barang dan jasa namun perencanaan masuk belanja modal, Perencanaan Gedung PMI Jl. Sawunggaling	23.682.120,00
	Pengurangan yang berasal kurang volume pada pekerjaan pembangunan Pasar Ngasem pada Dinas Perdagangan.	45.943.912,25

No. Ref	Uraian	Nilai (Rp)
	Koreksi dampak dari perubahan pengaturan Intra ke Ekstrakomptabel	162.046.935,00
i)	Mutasi aset antar SKPD	64.326.633.102,15
	Dinas Kesehatan	146.600.000,00
	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	43.600.000,00
	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	50.426.949.663,65
	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	13.017.927.038,50
	Kecamatan Baureno	150.000.000,00
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	541.556.400,00
	JUMLAH	122.536.433.026,98

5.3.1.3.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

	<u>Tahun 2019</u> (Rp)	<u>Tahun 2018</u> (Rp)
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	3.331.440.726.137,76	2.536.635.721.966,42

Nilai aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp3.331.440.726.137,76 dengan uraian sebagai berikut.

1	Saldo per 31 Desember 2018	2.536.635.721.966,42
2	Penambahan TA 2019:	
3	Belanja Modal	877.712.795.837,56 a)
4	Hibah Pihak Lain	5.097.277.464,00 b)
5	Reklasifikasi Aset	7.928.253.301,75 c)
6	Penambahan Lain	469.960.632,96 d)
7	Mutasi aset antar SKPD	1.641.924.726,75 e)
8	Jumlah (3 s.d. 7)	892.850.211.963,02
9	Pengurangan TA 2019:	
10	Tidak memenuhi kriteria aset tetap	(414.800,00) f)
11	Reklasifikasi Aset	(42.206.409.285,17) g)
12	Pengurangan Lainnya	(54.196.458.979,76) h)
13	Mutasi aset antar SKPD	(1.641.924.726,75) j)
14	Jumlah (10 s.d. 13)	(98.045.207.791,68)
15	Saldo per 31 Desember 2019 (1 + 8 + 14)	3.331.440.726.137,76

Rincian penambahan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebagai berikut:

Tabel 85. Penambahan Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan

No. Ref	Uraian	Nilai (Rp)
a)	Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan (JIJ) TA 2019	877.712.795.837,56
b)	Hibah Pihak Lain	5.097.277.464,00
	Hibah dari Kementerian ESDM dengan BAST No. 1671,BAST/554/412.023/2019 dan Naskah Hibah No. 1667,NH/03,04/SDE/2019 PJU tenaga surya 175 unit dengan nilai perolehan Rp2.883.311.393,00 dan 125 unit dengan harga perolehan Rp2.213.966.071,00	5.097.277.464,00
c)	Reklasifikasi Aset	7.928.253.301,75
	Belanja BLUD RSUD Kelas B Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro	358.591.000,00
	reklas ke Aset Tetap JJI dari KDP Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	6.880.633.486,00

No. Ref	Uraian	Nilai (Rp)
	Reklas aset yang akan dimutasikan ke SKPD lain	318.260.703,75
	Reklas dari Bangunan Gedung untuk aset Fasilitas disabilitas di alun-alun	216.561.135,00
	Reklas dari KDP 2018 setelah dikurangi lebih saji pengakuan aset drainase Kedungadem 2018	154.206.977,00
d)	Penambahan Lain	469.960.632,96
	Penambahan aset Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya dari utang belanja 2019 berupa Drainase JL. Kapten Martono Rp.97.688.824,96 dan Trotoar JL. KH. Mansyur Rp.372.271.808,00	469.960.632,96
e).	Mutasi Aset antar SKPD Jalan, Irigasi, dan Jaringan (JIJ)	1.641.924.726,75
	Dinas Pendidikan	199.436.626,75
	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	661.832.011,50
	Dinas Sosial	103.508.777,00
	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	9.260.000,00
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	667.887.311,50
	JUMLAH	892.850.211.963,02

Rincian pengurangan aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebagai berikut:

Tabel 86. Pengurangan Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan

No. Ref	Uraian	Nilai (Rp)
g)	Pengurangan Aset JIJ yang tidak sesuai Kriteria	414.800,00
	Pengurangan Aset yang tidak memenuhi kriteria Aset Tetap JIJ dari kelurahan kepatihan jaringan listrik lainnya	414.800,00
h)	Reklasifikasi Aset	42.206.409.285,17
	Reklas ke Aset Lainnya dari Dinas Pendidikan	35,00
	Perencanaan jaringan pengolahan sampah organik ke KDP RSUD Kelas B Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro Rp79.400.000,00 dan ke Peralatan dan Mesin Rp335.607.000,00	415.007.000,00
	Reklas KDP dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	38.691.008.879,11
	Reklas KDP Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	741.587.690,00
	Reklas ke Peralatan dan Mesin untuk 9 unit Pompa Air Sibel Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	85.792.500,00
	Reklas ke KDP Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	2.133.425.941,06
	Penyerahan Jaringan Terminal Tipe A dengan lokasi Jl. Veteran 621115 Sukorejo (terminal Rajekwesi) kepada Direktorat Jendral Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan dengan BAST Nomor:188/1500/412,303/2019; Nomor: BA,281/PL,201/DJPD/2019 Tanggal 12 Agustus 2019, Dinas Perhubungan	136.137.240,00
	Biaya Perencanaan dan honor Pejabat pengadaan pengadaan instalasi jaringan air bersih gleri bengawan solo fisik belum dilaksanakan dikarenakan waktu yang tidak mencukupi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	3.450.000,00
i)	Pengurangan Lainnya	54.196.458.979,76
	Pembayaran hutang belanja yang aset sudah diakui 2018 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	29.013.110.060,00

No. Ref	Uraian	Nilai (Rp)
	Aset yang sudah diakui Tahun 2018 setelah dikurangi Lebih saji aset KDP 2018, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	11.620.087.351,00
	Pengurangan yang berasal kurang volume pada pekerjaan pembangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK PDDT Belanja Tahun 2019.	6.708.259.515,38
	Koreksi dampak dari perubahan pengaturan Intra ke Ekstrakomptabel	6.855.002.053,38
j)	Mutasi Aset antar SKPD Jalan, Irigasi, dan Jaringan (JIJ)	1.641.924.726,75
	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	980.092.715,25
	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	661.832.011,50
	JUMLAH	98.045.207.791,68

5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

	<u>Tahun 2019</u> (Rp)	<u>Tahun 2018</u> (Rp)
Aset Tetap Lainnya	97.068.284.786,64	80.594.206.010,91

Nilai aset tetap Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp97.068.284.786,64 dengan uraian sebagai berikut:

1	Saldo per 31 Desember 2018	80.594.206.010,91	
2	Penambahan TA 2019:		
3	Belanja Modal	24.739.335.657,79	a)
4	Reklasifikasi	7.450.000,00	b)
5	Penambahan Lain	1,00	c)
6	Jumlah (3 s.d. 5)	24.746.785.658,79	
7	Pengurangan TA 2019:		
8	Tidak memenuhi kriteria aset tetap	(30.818.200,00)	d)
9	Reklasifikasi Aset	(8.241.888.683,00)	e)
10	Pengurangan Lain	(0,06)	f)
11	Jumlah (8 s.d. 10)	(8.272.706.883,06)	
	Saldo per 31 Desember 2019 (1+6+10)	97.068.284.786,64	

Realisasi penambahan aset tetap lainnya, sebagai berikut:

Tabel 87. Penambahan Aset Tetap Lainnya

No. Ref	Uraian	Nilai (Rp)
a)	Realisasi dari Belanja Modal	24.739.335.657,79
b)	Reklas	7.450.000,00
	Belanja BLUD RSUD Kelas B Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro	7.450.000,00
c)	Penambahan Lain	1,00
	Situs perahu kuno Desa Padang Kec. Trucuk	1,00
	Jumlah	24.746.785.658,79

Sedangkan, rincian pengurangan aset tetap lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel 88. Pengurangan Aset Tetap Lainnya

No. Ref	Uraian	Nilai (Rp)
d)	Aset yang tidak memenuhi kriteria sebagai aset tetap dari Dinas Pendidikan	30.818.200,00
e)	Reklasifikasi	8.241.888.683,00
	Aset Tetap Lainnya AKBID	298.576.445,00
	Reklas dari Belanja BLUD RSUD Kelas B Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro	7.360.477.254,00
	Reklas dari Belanja BLUD RSUD Kelas D Sumberrejo	200.856.269,00
	Reklas dari Belanja BLUD RSUD Kelas D Padangan	381.978.715,00
f)	Pengurangan Lain	0,06
	Koreksi ekuitas untuk pembulatan dari Dinas Pendidikan	0,06
	Jumlah	8.272.706.883,06

5.3.1.3.6 Konstruksi dalam Pengerjaan

	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
Konstruksi dalam Pengerjaan	215.935.927.242,28	209.175.069.947,45

Nilai Konstruksi dalam Pengerjaan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp215.935.927.242,28 dengan uraian sebagai berikut.

1	Saldo per 31 Desember 2018	209.175.069.947,45
2	Penambahan TA 2019:	
3	Reklasifikasi Aset	56.521.223.811,85 a)
4	Penambahan Lain	5.317.471.293,68 b)
5	Jumlah (3 s.d 4)	61.838.695.105,53
6	Pengurangan TA 2019:	
7	Reklasifikasi Aset	(53.898.526.253,43) c)
8	Pengurangan Lain	(1.179.311.557,27) d)
9	Jumlah (7 s.d 8)	(55.077.837.810,70)
10	Saldo per 31 Desember 2019 (1 + 5+ 7)	215.935.927.242,28

Rincian penambahan aset Konstruksi Dalam Pengerjaan sebagai berikut:

Tabel 89. Penambahan Aset Konstruksi dalam Pengerjaan

No. Ref	Uraian	Nilai (Rp)
a)	Reklasifikasi Aset	56.521.223.811,85
	Perencanaan Bangunan SD yang akan di kerjakan tahun 2020, Dinas Pendidikan	449.141.391,00
	Rehab sedang/berat ruang kelas sekolah SDN Jelu II Kec. Ngasem	27.445.000,00
	Dinas Kesehatan	905.393.903,96
	RSUD Kelas B Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro	2.772.135.089,00
	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	38.691.008.879,11
	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	741.587.690,00
	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	9.959.461.530,80
	Dinas Pemadam Kebakaran	43.100.000,00
	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	3.450.000,00

No. Ref	Uraian	Nilai (Rp)
	Dinas Pertanian	78.720.000,00
	Dinas Perdagangan	1.143.702.890,00
	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	86.460.000,00
	Bag. Pemerintahan	1.619.617.437,98
b)	Penambahan Lainnya (Aset tetap KDP yang berasal dari Hutang Belanja 2019)	5.317.471.293,68
	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	5.317.471.293,68
	Jumlah	61.838.695.105,53

Rincian pengurangan aset Konstruksi Dalam Pengerjaan sebagai berikut:

Tabel 90. Pengurangan Aset Konstruksi dalam Pengerjaan

No. Ref	Uraian	Nilai (Rp)
c)	Reklasifikasi Aset	53.898.526.253,43
	Aset KDP yang sudah jadi Aset Tetap, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	6.880.633.486,00
	Aset KDP yang sudah jadi Aset Tetap, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	47.017.892.767,43
d)	Pengurangan Lain	1.179.311.557,27
	Koreksi ekuitas atas lebih saji KDP Tahun 2018 Rehabilitasi ruang kelas SDN Turi 4 Kec. Tambakrejo	406.947.788,27
	Koreksi ekuitas atas lebih saji KDP Tahun 2018 Pembangunan Saluran Drainase Jl. Serma Abdullah RW. 1 Desa Pacul Kecamatan Bojonegoro	711.324.349,00
	Koreksi ekuitas atas lebih saji KDP Tahun 2018 Pembangunan Saluran Drainase IKK Kedungadem Desa Drokilo	42.942.020,00
	Koreksi dampak dari perubahan pengaturan Intra ke Ekstrakomptabel)	18.097.400,00
	Jumlah	55.077.837.810,70

Konstruksi dalam Pengerjaan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2019 sebesar Rp215.935.927.242,28 terdiri dari:

Tabel 91. Rincian Konstruksi dalam Pengerjaan

No	Uraian Pekerjaan	Tahun	Nilai (Rp)
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya			
1	Gedung RSUD Dr. Sosodoro Djatikoesoemo	2017	57.683.926.999,50
2	Gedung RSUD Padangan	2017	92.589.199.685,27
3	Pembangunan Sarana dan Prasarana GOR DABONSIA Kab. Bojonegoro	2018	1.661.130.519,98
4	Pembangunan Saluran Drainase Jl. Serma Abdullah RW. 1 Desa Pacul Kecamatan Bojonegoro	2018	844.557.582,00
5	Perencanaan Pembangunan gedung kantor Jl. Trunojoyo Bojonegoro (P-APBD) (DBHM)	2019	98.802.000,00
6	Perencanaan Pembangunan gedung arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Bojonegoro (P-APBD) (DBHM)	2019	98.395.000,00
7	Perencanaan Pengadaan genset tipe silent Gedung Mal Pelayanan Publik (P-APBD) (DBHM)	2019	25.135.000,00
8	Perencanaan dan Pembangunan gedung kantor Dinas Kesehatan Kab. Bojonegoro (P-APBD) (DAU)	2019	196.080.500,00
9	Pekerjaan Studi Kelayakan dan Amdal Lalin	2019	195.937.500,00

No	Uraian Pekerjaan	Tahun	Nilai (Rp)
	Pembangunan Gedung DPRD (P-APBD) (DBHM)		
10	Perencanaan Pembangunan Gedung Penyimpanan Sarana Prasarana Informasi Diskominfo(P-APBD) (DBHM)	2019	44.935.000,00
11	Perencanaan Rehabilitasi kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Jl. Pattimura Kec. Bojonegoro (PAD)	2019	22.220.000,00
12	Perencanaan Rehabilitasi gedung kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Bojonegoro (PAD)	2019	87.159.600,00
13	Perencanaan Pembangunan gudang logistik EBAGA BPBD Desa Sumberjo Kec. Trucuk (DAU)	2019	48.452.800,00
14	Perencanaan Peningkatan sarana prasarana RSUD Sosodoro Djatikoesoemo Lanjutan (P-APBD) (DBHM)	2019	99.825.000,00
15	Pembangunan Sarana dan Prasarana Selasar RSUD Sosodoro Djatikoesoemo (DBHM)	2019	2.337.387.400,00
16	Peningkatan Sarana Prasarana Pendukung Instalasi ME RSUD Padangan (DBHM)	2019	1.639.324.000,00
17	Peningkatan Sarana Prasarana RSUD Padangan Tahap V (DBHM)	2019	5.645.697.400,00
18	Perencanaan Pembangunan gedung SDN Ngelo 1 Kec. Margomulyo, SDN Padangan 2 Kec. Padangan dan SDN Turi 4 Kec. Tambakrejo Lanjutan (P-APBD) (DBHM)	2019	68.475.000,00
19	Perencanaan Pembangunan Gedung SDN Tanggir Desa Tanggir Kecamatan Malo dan SDN Mlaten I Desa Mlaten Kecamatan Kalitidu (P-APBD) (DBHM)	2019	54.615.000,00
20	Perencanaan Pembangunan RKB SDN Growok I Desa Growok Kecamatan Dander, SDN Sumengko II Desa Sumengko Kecamatan Kalitidu dan SDN Pomahan III Desa Pomahan Kecamatan Baureno (P-APBD) (DBHM)	2019	77.715.000,00
21	Perencanaan Rehab. Gedung SDN Kendung Kec. Padangan	2019	13.127.390,00
22	Perencanaan Rehab. Gedung SDN Purwosari 3 Kec. Purwosari	2019	19.014.389,00
23	Perencanaan Rehab. Gedung SDN Sranak Kec. Trucuk	2019	14.481.078,00
24	Perencanaan Rehab. Gedung SDN Ngasem 4 Kec. Ngasem (P-APBD)	2019	89.650.000,00
25	Perencanaan Rehab. Gedung SDN Napis Kec. Tambakrejo	2019	54.596.959,00
26	Perencanaan Rehab. Gedung SDN Dander Kec. Dander Lanjutan (P-PBD)	2019	23.558.041,00
27	Perencanaan Rehab. Gedung SDN Sumberoto Kec. Kepohbaru	2019	14.975.971,00
28	Perencanaan Rehab. Gedung SDN Sumbertlaseh 2 Kec. Dander	2019	16.901.402,00
29	Perencanaan Rehab. Gedung SDN Tambakrejo 1 Kec. Tambakrejo	2019	30.941.065,00
30	Perencanaan Rehab. Gedung SDN Malingmati 2 Kec. Tambakrejo	2019	10.721.435,00
31	Perencanaan Rehabilitasi ruang kelas SDN Sumberharjo 1 Kec. Sumberrejo, SDN Banjarjo Kec. Sumberrejo dan SDN Sumberagung Desa Sumberagung Kecamatan Kepohbaru(P-APBD) (DBHM PENDIDIKAN)	2019	97.955.000,00
32	Perencanaan Rehabilitasi ruang kelas SDN Dukohkidul Kec. Ngasem dan SDN Ngampal 1 Kec. Sumberrejo (P-APBD) (DBHM)	2019	47.850.000,00
33	Perencanaan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Ngujung Kec. Malo	2019	11.678.754,00
34	Perencanaan Pembangunan Gedung SDN Besah 1 Kec. Kasiman	2019	13.020.518,50
35	Pembangunan Gedung SDN Kalitidu 1 Kec. Kalitidu	2019	882.010.346,08
36	Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana olahraga SMT Bojonegoro (DBHM)	2019	99.000.000,00
37	Pemasangan audio dan layar skor (<i>scoring board</i>) Stadion Letjend H. Soedirman (P-APBD) (DBHM)	2019	81.565.000,00

No	Uraian Pekerjaan	Tahun	Nilai (Rp)
38	Perencanaan Pembangunan pagar halaman dan sarana pendukungnya Stadion Letjend H. Soedirman (P-APBD) (DBHM)	2019	27.423.000,00
39	Studi Kelayakan dan Amdal lalin Pembangunan Pasar Kota Bojonegoro (P-APBD) (DBHM)	2019	195.937.500,00
40	Perencanaan, UKL UPL dan Amdal Lalin Pembangunan gedung Rumah Potong Hewan Kec. Bojonegoro (P-APBD) (DBHM)	2019	292.874.750,00
41	Perencanaan dan Amdal Lalin Pembangunan gedung Rumah Potong Hewan Kec. Padangan (P-APBD) (DBHM)	2019	58.825.000,00
42	Perencanaa Pembangunan Perpustakaan SDN Jatiblimbing 2 Kec. Dander	2019	11.039.484,84
43	Perencanaan Pembangunan Perpustakaan SDN Semen Pinggir Kec. Kapas (P-APBD)	2019	16.028.100,00
44	Perencanaan Pembuatan Tugu Perbatasan Kesongo-Babat (Kedungadem) (P-APBD)	2019	28.957.500,00
45	Perencanaan Pembangunan Taman Alun-alun Sebelah Utara (P-APBD)	2019	59.537.500,00
46	Perencanaan Pembuatan Tugu Perbatasan Pajeng-Nganjuk (Gondang) (P-APBD)	2019	29.397.500,00
47	Perencanaan Pembangunan Taman Wisata Atas Angin	2019	79.893.000,00
48	Pembangunan Trotoar Jl. Gajahmada Kec. Bojonegoro (DBHM)	2019	1.088.888.041,06
49	Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase IKK Kedewan Desa Wonocolo	2019	9.884.000,00
50	Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase IKK Kedewan Desa Kedewan	2019	9.919.400,00
51	Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase Jalan jalan sadewa RW. 1 dekat TPU Jintel lor dan jalan nakula RW. 2, dekat SDN III Desa Kasiman Kecamatan Kasiman	2019	9.372.600,00
52	Perencanaan Pembanguna Saluran Drainase IKK Kasiman Desa Sekaran	2019	12.402.900,00
53	Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase Gg. Srinayan Kelurahan Kepatihan Kecamatan Bojonegoro	2019	5.142.400,00
56	Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase Jl. Cut Nyak Dien Rt. 11 RW. 3 , Rt. 03 Kelurahan Kadipaten Kecamatan Bojonegoro	2019	5.975.700,00
58	Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase Rt. 12, Jl. Kenanga Rt. 13 Jl. Lettu Suwolo Gg. Masjid Rt 15 Gg. Bader Rt. 16 RW. 02 Kel. Ngrowo Kec. Bojonegoro	2019	5.254.500,00
60	Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase Dusun Madean Kelurahan Jetak Kecamatan Bojonegoro (Lanjutan Belakang Polindes)	2019	7.322.800,00
61	Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase IKK Tambakrejo Desa Sukorjo	2019	6.863.100,00
62	Perencanaan Pembanguna Saluran Drainase IKK Gondang Desa Gondang	2019	6.001.200,00
63	Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase IKK Purwosari Kecamatan Purwosari	2019	9.910.400,00
64	Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase Depan Pasar Kepohbaru Desa Kepohbaru Kecamatan Kepohbaru	2019	7.409.600,00
65	Perencanaan Pembangunan sistim penanganan genangan Desa Pacul ke arah Jl. HOS. Cokro Aminoto Kecamatan Bojonegoro	2019	10.400.000,00
66	Pekerjaan Perencanaan Pemasangan PJU (Klino-Sekar, Paldaplang-Sekar, Sekar-Bobol, Bobol-Karangjati, Senganten-Pragelan, Dander-Temayang, Senganten-Klino, Jono-Sugihwaras)	2019	86.130.000,00
67	Pekerjaan Perencanaan Pemasangan PJU (Margomulyo-Bulaklo, Kabunan-Sidobandung, Mayangkawis-Kenep, Penganten-Pekuwon, Kedungdowo, Sidobandung-Sepat, Tegalkodo-Semenkidul, Klepek-Pancur, Sidodadi-	2019	84.920.000,00

No	Uraian Pekerjaan	Tahun	Nilai (Rp)
	Kumpul, Sugihwaras-Temayang)		
68	Pekerjaan Perencanaan Penggantian Lampu LED Jalan Perkotaan (Suharso, KS.Tubun, Pemuda, Tendean, T.Tunggal, K.Martono, Hartono, D.Sartika, R.Sunjani, Mustajab, C.N. Dien, K.Kasan, Suyitno lama, M. Putih, Suprpto)	2019	68.805.000,00
69	Pekerjaan Perencanaan Penggantian Lampu LED Jalan Perkotaan (Rajawali, H.Wuruk, Mayangkoro, Wahidin, Monginsidi, AI.Suryani, S.Suratman, K.Mojo, Sarimulyo, TGP, Sawunggaling, B.Rahmat, A.Yani, HOS Cokroaminoto)	2019	69.300.000,00
70	Pekerjaan Perencanaan Pemasangan PJU (Padangan-Kasiman, Jembatan Padangan, Batas Kab-Sambeng, Sambeng-Kedewan, Kedewan-Beji, Purwosari-Glagah, Purwosari-Malingmati, Malingmati-Bakalan, Banjarjo-Bakalan)	2019	83.292.000,00
71	Pekerjaan Perencanaan Pemasangan PJU (Selogabus-Malo, Jembatan Kaliketek, Pemuda-Semanding, Sambiroto-Tikusan, Sukowati-Bakalan, Kapas-Glendeng, Kapas-Sampang, PJI Tanggul Klagon, PJI Klagon Barat, Margomulyo-Sobontoro)	2019	83.820.000,00
72	Pekerjaan Perencanaan Pemasangan PJU (Taji-Ngraho, Ngraho-Luwehaji, Sumberarum-Payaman, Jembatan Meduri, Jembatan Geneng, Taji-Tinggang, Mojosari-Becok, Nasional Padangan-Ngawi, Pluntu-Jipang, Kalitidu-Ngasem, Ngujo-Jampet)	2019	84.370.000,00
73	Pekerjaan Perencanaan Penggantian Lampu LED Jalan Perkotaan (KH. Mansyur, Hasanudin, Setyo Budi, Dr. Cipto, Dr. Sutomo, P. Mastumapel, Pahlawan, Imam Bonjol, L. Suraji, K. Ramli, Serma Maun, Serma Kusman, Lettu Suwolo, Lisman)	2019	68.319.900,00
74	Pekerjaan Perencanaan Pemasangan PJU (Sugihwaras-Kepohkidul, Prayungan-Mlinjeng, Baureno-Kepohbaru, Kedungadem-Nglinggo, Nglinggo-Kepohbaru, Sroyo-Nglinggo, Drokilo-Kepohbaru, Gunungsari-Kepohbaru)	2019	80.850.000,00
75	Pekerjaan Perencanaan Pemasangan PJU (Ngumpak-Ngujo, Bjn-Kunci, Dander-Bubulan, Trenggulun-Ngambon, Stren-Bandungrejo, Dander-Ngasem, Ngasem-Trenggulun, Talok-Malo, Nglampin-Bondol, Judeg-Bubulan, Temayang-Betek)	2019	84.370.000,00
76	Pekerjaan Perencanaan Penggantian Lampu LED Jalan Perkotaan (Veteran, Diponegoro, Panglima Sudirman, Teuku Umar, AKBPM Suroko, Trunojoyo, MH. Thamrin, Mastrip)	2019	49.335.000,00
77	Pekerjaan Perencanaan Pemasangan PJU (Balen-Sugihwaras, Kanor-Semambung, Sumberrejo-Kanor, Medalem-Simorejo, Simorejo-Baureno, Sumberrejo-Kepohkidul, Bakung-Piyak, Talun-Sumberwangi)	2019	80.520.000,00
78	Perencanaan peningkatan sarana prasarana GOR	2019	82.390.000,00
Jumlah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya			168.041.100.211,23
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang			
1	Pembangunan Jembatan Gantung Sranak Kec. Trucuk	2018	2.349.410.174,65
2	Peningkatan Jalan Paldaplang - Sekar I dan II (SK No. : 188/246/KEP/412.013/2017; Ruas No. : 37)	2019	16.576.518.753,76
3	Peningkatan Jalan Kedungadem - Kesongo I dan II (SK No. : 188/246/KEP/412.013/2017; Ruas No. : 31)	2019	10.113.754.956,79
4	Peningkatan Jalan Sroyo - Nglinggo I dan II (SK No. : 188/246/KEP/412.013/2017; Ruas No. : 19)	2019	3.269.255.273,59
5	Perencanaan Peningkatan Jalan Balen - Sugihwaras (untuk pekerjaan fisik 2020) (DAU)	2019	99.110.000,00
6	Perencanaan Peningkatan Jalan Balenrejo - Kedungdowo	2019	68.101.000,00

No	Uraian Pekerjaan	Tahun	Nilai (Rp)
	(untuk pekerjaan fisik 2020) (DAU)		
7	Perencanaan Peningkatan Jalan Bandungrejo - Setren (untuk pekerjaan fisik 2020) (DAU)	2019	89.859.000,00
8	Perencanaan Peningkatan Jalan Baureno - Kepohbaru (untuk pekerjaan fisik 2020) (DAU)	2019	99.121.000,00
9	Perencanaan Peningkatan Jalan Betek - Senganten (untuk pekerjaan fisik 2020) (DBH PROV)	2019	84.928.800,00
10	Perencanaan Peningkatan Jalan Bobol - Karangjati (untuk pekerjaan fisik 2020) (DAU)	2019	89.771.000,00
11	Perencanaan Peningkatan Jalan Bojonegoro - Kunci (Untuk Pekerjaan Fisik 2020) (DBH Prov)	2019	94.641.800,00
12	Perencanaan Peningkatan Jalan Drokilo - Kepohbaru (untuk pekerjaan fisik 2020) (DBH PROV)	2019	94.715.500,00
13	Perencanaan Peningkatan Jalan Gayam - Beged (untuk pekerjaan fisik 2020) (DAU)	2019	70.185.500,00
14	Perencanaan Peningkatan Jalan Glagah - Turi (untuk pekerjaan fisik 2020), Perencanaan Peningkatan Jalan Sumberarum - Payaman (untuk pekerjaan fisik 2020), Perencanaan Peningkatan Jalan Sukowati - Bakalan (untuk pekerja	2019	93.126.000,00
15	Perencanaan Peningkatan Jalan Jelu - Gayam (untuk pekerjaan fisik 2020) (DBH PROV)	2019	89.859.000,00
16	Perencanaan Peningkatan Jalan Kabunan - Sidobandung (untuk pekerjaan fisik 2020) (DAU)	2019	89.647.800,00
17	Perencanaan Peningkatan Jalan Kalianyar - Ngumpakdalem (untuk pekerjaan fisik 2020) (DAU)	2019	94.435.000,00
18	Perencanaan Peningkatan Jalan Kalitidu - Ngasem (untuk pekerjaan fisik 2020)	2019	89.793.000,00
19	Perencanaan Peningkatan Jalan Kapas - Glendeng (untuk pekerjaan fisik 2020) (DBH PROV)	2019	85.057.500,00
20	Perencanaan Peningkatan Jalan Kapas - Sampang (untuk pekerjaan fisik 2020) (DAU)	2019	94.446.000,00
21	Perencanaan Peningkatan Jalan Kedaton - Tanjungharjo (untuk pekerjaan fisik 2020) (DAU)	2019	94.611.000,00
22	Perencanaan Peningkatan Jalan Kedungadem - Nglinggo (untuk pekerjaan fisik 2020) (DAU)	2019	85.093.800,00
23	Perencanaan Peningkatan Jalan Kenep - Penganten (untuk pekerjaan fisik 2020) (DAU)	2019	78.559.800,00
24	Perencanaan Peningkatan Jalan Kepohbaru - Gunungsari (untuk pekerjaan fisik 2020) (DAU)	2019	99.121.000,00
25	Perencanaan Peningkatan Jalan Klino - Sekar (untuk pekerjaan fisik 2020) (DBH PROV)	2019	89.622.500,00
26	Perencanaan Peningkatan Jalan Kumpulrejo - Bendo (untuk pekerjaan fisik 2020) (DBH PROV)	2019	89.639.000,00
27	Perencanaan Peningkatan Jalan Malo - Selogabus (untuk pekerjaan fisik 2020) (DAU)	2019	89.771.000,00
28	Perencanaan Peningkatan Jalan Margomulyo - Bulaklo (untuk pekerjaan fisik 2020) (DBH PROV)	2019	89.584.000,00
29	Perencanaan Peningkatan Jalan Mojosari - Becok (untuk pekerjaan fisik 2020) (DBH PROV)	2019	89.655.500,00
30	Perencanaan Peningkatan Jalan Ngambon - Bobol (untuk pekerjaan fisik 2020) (DAU)	2019	89.606.000,00
31	Perencanaan Peningkatan Jalan Ngasem - Bandungrejo (untuk pekerjaan fisik 2020) (DBH PROV)	2019	89.655.500,00
32	Perencanaan Peningkatan Jalan Ngasem - Trenggulunan (untuk pekerjaan fisik 2020) (DAU)	2019	78.336.500,00
33	Perencanaan Peningkatan Jalan Nglampin - Bondol (untuk pekerjaan fisik 2020) (DAU)	2019	45.265.000,00
34	Perencanaan Peningkatan Jalan Nglinggo - Kepohbaru (untuk pekerjaan fisik 2020) (DBH PROV)	2019	89.793.000,00
35	Perencanaan Peningkatan Jalan Ngraho - Taji (untuk pekerjaan fisik 2020) (DAU)	2019	89.441.000,00

No	Uraian Pekerjaan	Tahun	Nilai (Rp)
36	Perencanaan Peningkatan Jalan Ngumpakdalem - Ngujo (untuk pekerjaan fisik 2020) (DAU)	2019	94.611.000,00
37	Perencanaan Peningkatan Jalan Pemuda - Semanding (untuk pekerjaan fisik 2020) (DAU)	2019	89.606.000,00
38	Perencanaan Peningkatan Jalan Pluntu - Jepang (untuk pekerjaan fisik 2020) (DBH PROV)	2019	85.090.500,00
39	Perencanaan Peningkatan Jalan Prayungan - Mlinjeng (untuk pekerjaan fisik 2020) (DAU)	2019	89.441.000,00
40	Perencanaan Peningkatan Jalan Sambeng - Kedewan (untuk pekerjaan fisik 2020) (DBH PROV)	2019	99.165.000,00
41	Perencanaan Peningkatan Jalan Sambeng - Tambakromo (untuk pekerjaan fisik 2020) (DAU)	2019	89.567.500,00
42	Perencanaan Peningkatan Jalan Senganten - Pragelan (untuk pekerjaan fisik 2020) (DAU)	2019	89.606.000,00
43	Perencanaan Peningkatan Jalan Sidodadi - Kumpulrejo (untuk pekerjaan fisik 2020) (DBH PROV)	2019	70.125.000,00
44	Perencanaan Peningkatan Jalan Simorejo - Baureno (untuk pekerjaan fisik 2020) (DBH PROV)	2019	94.704.500,00
45	Perencanaan Peningkatan Jalan Sobontoro - Margomulyo (untuk pekerjaan fisik 2020) (DBH PROV)	2019	89.584.000,00
46	Perencanaan Peningkatan Jalan Sumberejo - Kanor (untuk pekerjaan fisik 2020) (DAU)	2019	94.589.000,00
47	Perencanaan Peningkatan Jalan Taji - Tinggang (untuk pekerjaan fisik 2020) (DBH PROV)	2019	89.859.000,00
48	Perencanaan Peningkatan Jalan Talok - Malo (untuk pekerjaan fisik 2020) (DAU)	2019	89.567.500,00
49	Perencanaan Peningkatan Jalan Talun - Sumberwangi (untuk pekerjaan fisik 2020) (DAU)	2019	84.821.000,00
50	Perencanaan Peningkatan Jalan Tanggungan - Pandan (untuk pekerjaan fisik 2020) (DBH PROV)	2019	56.380.500,00
51	Perencanaan Peningkatan Jalan Tegalkodo - Semenkidul (untuk pekerjaan fisik 2020) (DAU)	2019	68.145.000,00
52	Perencanaan Peningkatan Jalan Tikusan - Sambiroto (untuk pekerjaan fisik 2020) (DAU)	2019	84.983.800,00
53	Perencanaan Peningkatan Jalan Watujago - Ngelo (untuk pekerjaan fisik 2020) (DBH PROV)	2019	89.820.500,00
54	Perencanaan Peningkatan Jalan Glagah - Ngambon (untuk pekerjaan fisik 2020) (DAU)	2019	89.386.000,00
55	Perencanaan Rehabilitasi Jalan Batas Kabupaten - Sambeng (DAU)	2019	89.364.000,00
56	Perencanaan Rehabilitasi Jalan Dalam Kota Sumberejo (DAU)	2019	43.461.000,00
57	Perencanaan Rehabilitasi Jalan Dander - Bubulan (DAU)	2019	93.093.000,00
58	Perencanaan Rehabilitasi Jalan Dr. Suharso (DAU)	2019	60.445.000,00
59	Perencanaan Rehabilitasi Jalan Dr. Sutomo (DAU)	2019	53.361.000,00
60	Perencanaan Rehabilitasi Jalan Dr. Wahidin (DAU)	2019	26.070.000,00
61	Perencanaan Rehabilitasi Jalan Hayam Wuruk (DAU)	2019	60.431.800,00
62	Perencanaan Rehabilitasi Jalan Kartini, Perencanaan Rehabilitasi Jalan Hasanudin, Perencanaan Rehabilitasi Jalan Wedi - Sukorejo (DAU)	2019	72.636.300,00
63	Perencanaan Rehabilitasi Jalan Kedewan - Beji (DBHM)	2019	89.364.000,00
64	Perencanaan Rehabilitasi Jalan Kedungsumber - Wadukpacal (DAU)	2019	89.149.500,00
65	Perencanaan Rehabilitasi Jalan Kol. Sugiono (DAU)	2019	60.445.000,00
66	Perencanaan Rehabilitasi Jalan Koprak Kasan (DAU)	2019	28.006.000,00
67	Perencanaan Rehabilitasi Jalan Kusnandar (DBHM)	2019	41.800.000,00
68	Perencanaan Rehabilitasi Jalan Lisman (DAU)	2019	60.346.000,00
69	Perencanaan Rehabilitasi Jalan Mliwis Putih (DAU)	2019	46.596.000,00
70	Perencanaan Rehabilitasi Jalan Mojoranu - Mastrip, Kalicilik - Tanjungharjo, Simorejo - Semabung,	2019	76.596.300,00

No	Uraian Pekerjaan	Tahun	Nilai (Rp)
	Sidodadi - Kumpulrejo, Senganten - Prageman		
71	Perencanaan Rehabilitasi Jalan Monginsidi (DAU)	2019	26.070.000,00
72	Perencanaan Rehabilitasi Jalan Panglima Polim (DAU)	2019	60.401.000,00
73	Perencanaan Rehabilitasi Jalan Rajawali (DAU)	2019	60.431.800,00
74	Perencanaan Rehabilitasi Jalan Serma Abdullah (DBHM)	2019	60.401.000,00
75	Perencanaan Rehabilitasi Jalan WR. Supratman (DAU)	2019	38.456.000,00
76	Perencanaan Penggantian Jembatan Jalan poros antar desa Simbatan Kec. Kanor (RW 03 (Selatan perusahaan kayu))	2019	97.200.000,00
77	Perencanaan Penggantian Jembatan Sitiaji 1 (Tegalkodo - Semenkidul) Kec. Sukosewu (Sesuai dengan SK No. 188/246/KEP/412.013/2017; Ruas No. 80)	2019	87.400.000,00
78	Perencanaan Penggantian Jembatan Kesongo (Kedungadem - Kesongo) Kec. Kedungadem (Sesuai dengan SK No. 188/246/KEP/412.013/2017; Ruas No. 31)	2019	79.200.000,00
79	Penggantian Jembatan Meduri (WatuJago-Bobol) Kec. Margomulyo (SK No. : 188/246/KEP/412.013/2017; Ruas No. : 58)	2019	472.271.205,00
80	Perencanaan Rehabilitasi Jbtkomposit Bobol I (Bobol - Karangjati) Kec. Sekar (Sesuai dengan SK No. 188/246/KEP/412.013/2017; Ruas No. 45)	2019	87.600.000,00
81	Perencanaan Rehabilitasi Jembatan Napis 3 (Taji - Napis) Kec. Tambakrejo (Sesuai dengan SK No. 188/246/KEP/412.013/2017; Ruas No. 57)	2019	87.600.000,00
82	Perencanaan Rehabilitasi Jembatan Kayu Tambakromo II (Sambeng - Tambakromo) Kec. Malo (Sesuai dengan SK No. 188/246/KEP/412.013/2017; Ruas No. 73)	2019	87.600.000,00
83	Perencanaan Rehabilitasi Berat Jembatan Poros antar desa Penganten kec. Balen (Dusun sawal RT 10 RW 02)	2019	87.600.000,00
84	Pembangunan Jembatan Pleret Meduri (Pleret - Meduri) (DBHM)	2019	678.039.265,32
85	Pengawasan Pembangunan Jembatan Pleret Meduri (Pleret - Meduri) (DBHM)	2019	71.400.000,00
86	Perencanaan Pembangunan Jembatan Pleret Meduri (Pleret - Meduri) (DBHM)	2019	95.799.000,00
87	Biaya Administrasi	2019	1.845.000,00
88	Review DED Pembangunan Jembatan Kanor - Rengel (P-APBD) (DBHM)	2019	97.400.000,00
89	Review DED Pembangunan Jembatan Luwihaji - Medalem (LUME) (P-APBD) (DBHP)	2019	97.100.000,00
Jumlah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang			40.027.523.629,11
Dinas Pendidikan			
1	Perencanaan dari Bangunan SD yang akan dikerjakan di tahun 2020	2019	449.141.391,00
2	Bangunan SDN Jelu II Kec. Ngasem		27.445.000,00
Jumlah Dinas Pendidikan			476.586.391,00
Dinas Kesehatan			
1	Pembangunan Puskesmas Balen	2019	465.024.003,96
2	Perencanaan rehabilitasi Puskesmas Balen Kec. Balen	2019	103.568.000,00
3	Pekerjaan Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Rumah Dinas Dokter Puskesmas Gayam Kecamatan Gayam	2019	11.950.000,00
4	Pembayaran Belanja Modal Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Puskesmas Kepohbaru Kecamatan Kepohbaru	2019	99.000.000,00
5	Belanja Modal Termyn 100% Pekerjaan Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Ruang Bersalin dan Rawat Inap Puskesmas Trucuk Kecamatan Trucuk	2019	71.170.000,00

No	Uraian Pekerjaan	Tahun	Nilai (Rp)
	(Lantai 2)		
6	Belanja Modal Termyn 100% Pekerjaan Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Ruang Bersalin Puskesmas Wisma Indah (Lantai 2)	2019	36.630.000,00
7	Belanja Modal Jasa Konsultasi Pembangunan Pagar Puskesmas Ngumpakdalem Kecamatan Dander	2019	12.200.100,00
8	Belanja Modal Termyn 100% Pekerjaan Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Pagar Puskesmas Nglumber Kecamatan Kepohbaru	2019	16.753.000,00
9	Belanja Modal Jasa Konsultasi (Perencanaan) Pembangunan Paving/Taman Puskesmas Bubulan Kecamatan Bubulan	2019	18.502.000,00
10	Belanja Modal Termyn 100% Pekerjaan Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Pagar/TPT Puskesmas Sugihwaras Kecamatan Sugihwaras	2019	16.720.000,00
11	Belanja Modal Jasa Konsultasi Perencanaan Rehab Sedang Ruang Rawat Inap Puskesmas Bojonegoro Kecamatan Bojonegoro	2019	17.124.800,00
12	Belanja Modal Jasa Konsultasi (Perencanaan) Rehab Sedang Puskesmas Margomulyo Kecamatan Margomulyo	2019	12.452.000,00
13	Belanja Modal Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Pagar Puskesmas Ngasem Kecamatan Ngasem	2019	24.300.000,00
Jumlah Dinas Kesehatan			905.393.903,96
RSUD Sosodoro Djatikoesoemo			
1	Gedung Penunjang Pelayanan	2019	11.114.000,00
2	Pengolahan Air Limbah	2019	2.681.621.089,00
3	Meubelair	2019	79.400.000,00
Jumlah RSUD Sosodoro Djatikoesoemo			2.772.135.089,00
Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air			
1	Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Saluran Irigasi D.I Rondono Kec. Gondang	2019	65.323.000,00
2	Jasa konsultasi perencanaan Pembangunan Saluran Irigasi D.I Panjang Kec. Kedungadem	2019	70.180.000,00
3	Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Saluran Irigasi D.I Plumpung Kec. Gondang dan D.I Bilo Kec. Kalitidu	2019	32.285.000,00
4	Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Saluran Irigasi D.I Pajeng Kec. Gondang	2019	34.950.000,00
5	Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Saluran Irigasi D.I Nolo/Ngasinan Kec. Padangan	2019	29.766.000,00
6	Pembangunan Tebing Kali Ds. Kuncen Kec. Padangan	2019	88.680.690,00
7	Feasability Pembangunan rumah dan pompa Ds. Semanding Kec. Bojonegoro	2019	86.603.000,00
8	Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Rumah Pompa dan pompa Ds. Semanding Kec. Bojonegoro	2019	200.750.000,00
9	Jasa Konsultasi Pembangunan Check Dam wil. Kedungadem.sumberrejo.sugihwaras	2019	60.500.000,00
10	Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Check Dam wil.dander. Tambakrejo. Ngraho	2019	72.550.000,00
Jumlah Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air			741.587.690,00
Dinas Pemadam Kebakaran			
1	Biaya-biaya Pengadaan Mobil Pemadam - Gagal Lelang	2019	43.100.000,00
Jumlah Dinas Pemadam Kebakaran			43.100.000,00
Dinas Pertanian			
1	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Gedung Kantor dan Bangunan Pagar BPP Kasiman	2019	22.753.000,00
2	Belanjaa Jasa Konsultansi Perencanaan Gedung Kantor dan Paving Halaman BPP Temayang	2019	22.808.000,00

No	Uraian Pekerjaan	Tahun	Nilai (Rp)
3	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Bangunan Gudang BPP Tambakrejo dan BPP Kapas	2019	23.619.500,00
4	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Tandon Air dan Pembangunan Pagar Depan BPP Kapas	2019	9.539.500,00
	Jumlah Dinas Pertanian		78.720.000,00
Dinas Perdagangan			
1	Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Permanen Jl. Bojonegoro - Babad Ds Sroyo Kec. Kanor	2019	1.143.702.890,00
	Jumlah Dinas Perdagangan		1.143.702.890,00
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja			
1	Perencanaan Ulang DED Pembangunan Gedung Sarana dan Prasarana Sentra Industri Gerabah	2019	86.460.000,00
	Jumlah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		86.460.000,00
Bagian Pemerintahan			
1	Pembangunan Gedung Kantor 30 % Kecamatan Trucuk	2019	700.066.937,98
2	Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Malo	2019	81.026.000,00
3	Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Kedewan	2019	89.100.000,00
4	Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Sugihwaras	2019	54.230.000,00
5	Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Padangan	2019	94.160.000,00
6	Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Kedungadem	2019	82.280.000,00
7	Perencanaan Pembangunan Pagar Kantor Kecamatan Bubulan	2019	42.273.000,00
8	Perencanaan Pembangunan Pendopo Kelurahan Karangpacar Kecamatan Bojonegoro	2019	42.427.000,00
9	Perencanaan Pembangunan Paving dan Pagar Kelurahan Ledok kulon Kecamatan Bojonegoro	2019	12.100.000,00
10	Perencanaan Pembangunan Pendopo Kecamatan Kalitidu	2019	12.221.000,00
11	Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Kanor	2019	12.210.000,00
12	Perencanaan Pembangunan Pendopo Kecamatan Ngraho	2019	12.265.000,00
13	Perencanaan Pembangunan Pendopo Kecamatan Gayam	2019	12.105.500,00
14	Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Sekar	2019	93.995.000,00
15	Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Temayang	2019	98.725.000,00
16	Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Margomulyo	2019	89.111.000,00
17	Perencanaan Pembangunan Rumah Dinas Kecamatan Sekar	2019	42.295.000,00
18	Perencanaan Pembangunan Rumah Dinas	2019	42.075.000,00
19	Perencanaan Rehab Rumah Dinas Kecamatan Temayang	2019	6.952.000,00
	Jumlah Bagian Pemerintahan		1.619.617.437,98
	JUMLAH TOTAL		215.935.927.242,28

5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan

Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode garis lurus (*Straight line method*).

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap. Aset Tetap berikut yang tidak disusutkan, yaitu Tanah, konstruksi dalam pengerjaan, buku-buku perpustakaan, hewan ternak

dan tanaman. Terhadap aset tetap lainnya tersebut diterapkan penghapusan untuk aset yang sudah tidak dapat digunakan atau mati.

Pada Tahun 2019 terdapat perubahan pencatatan aset tetap, yaitu telah dilakukan atribusi atas pekerjaan rehabilitasi/renovasi pada aset induk Gedung dan Bangunan serta Jalan, Irigasi dan Jaringan yang sebelumnya dicatat sebagai aset induk tersendiri. Terhadap atribusi aset-aset tersebut berdampak pada perubahan masa manfaat aset dan perhitungan akumulasi penyusutan.

Pengecualian atas penyusutan buku perpustakaan berbeda dengan kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro No.49 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi tanggal 16 Mei 2016.

	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
Akumulasi Penyusutan	(2.342.907.594.293,35)	(2.311.839.135.337,00)

Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp2.342.907.594.293,35.

5.3.1.4. ASET LAINNYA

Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah tuntutan ganti rugi, aset tak berwujud, aset kondisi rusak berat dan amortisasi.

Nilai Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp437.679.249.960,90, terdiri atas:

	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Tuntutan Ganti Rugi	3.190.000,00	3.190.000,00
Aset Tidak Berwujud	8.042.926.085,00	6.023.163.365,00
Aset Lain-lain	1.001.258.462.556,94	958.122.102.413,94
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(565.814.046.857,37)	(557.775.880.744,37)
Amortisasi	(5.811.281.823,67)	(4.949.494.228,00)
Jumlah Aset Lainnya	437.679.249.960,90	401.423.080.806,57

5.3.1.4.1 Tuntutan Ganti Rugi

	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
Tuntutan Ganti Rugi	3.190.000,00	3.190.000,00

Jumlah Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2019 Rp3.190.000,00 tidak ada perubahan dengan tahun sebelumnya. Jumlah tersebut merupakan TGR An. Rusman.

Terdapat perbedaan antara jumlah yang disajikan pada laporan keuangan dengan rekapitulasi hasil pemantauan atas penyelesaian kerugian daerah. Hal ini dikarenakan:

1. Sudah lunas tapi belum terhapus karena belum dilengkapi Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tapi sudah ada penetapan oleh Majelis TP-TGR;
2. Temuan yang sudah ditindaklanjuti oleh Aparat Penegak Hukum tetapi belum dihapuskan dari daftar temuan;
3. Sudah lunas tapi belum melalui proses mekanisme TP-TGR sehingga belum bisa diselesaikan;
4. Belum dilakukan pelunasan.

5.3.1.4.2 Aset Tak Berwujud

	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
Aset Tak Berwujud	8.042.926.085,00	6.023.163.365,00

Aset Tak Berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud terdiri atas *goodwill*, hak paten atau hak cipta, *royalty*, *software*, lisensi, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang, aset tak berwujud lainnya, dan aset tak berwujud dalam pengerjaan.

Nilai Aset Tak Berwujud Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp8.042.926.085,00.

1 Saldo per 31 Desember 2018	6.023.163.365,00	
2 Penambahan TA 2019:		
3 Belanja Modal	2.230.237.720,00	a)
4 Reklasifikasi Aset	49.500.000,00	b)
5 Jumlah (3 s.d 4)	2.279.737.720,00	
6 Pengurangan TA 2019:		
7 Tidak memenuhi kriteria ATB	(5.000.000,00)	c)
8 Reklasifikasi Aset	(254.975.000,00)	d)
9 Jumlah (7 s.d 8)	(259.975.000,00)	
10 Saldo per 31 Desember 2019 (1+5+9)	8.042.926.085,00	

Keterangan :

- a) Realisasi Belanja Modal Aset Tak Berwujud Tahun Anggaran 2019 Rp2.230.237.720,00
- b) Penambahan reklasifikasi dari aset tak berwujud berupa SIM Rumah Sakit dari Belanja BLUD RSUD Sumberejo.
- c) Pengurangan dari ATB yang merupakan memenuhi kriteria sebagai aset tetap Rp5.000.000,00 adalah antivirus.
- d) Pengurangan reklasifikasi aset Rp254.975.000,00 dari Dinas pendidikan yang berupa OS Office komputer bidang SMP yang diklasifikasikan menjadi peralatan dan mesin yang menyatu pada peralatan komputernya.

5.3.1.4.3 Aset Lain-lain

	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
Aset Lain-lain	1.001.258.462.556,94	958.122.102.413,94

Nilai Aset Lain-lain Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per

31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.001.258.462.556,94 dengan uraian sebagai berikut:

1	Saldo per 31 Desember 2018	958.122.102.413,94
2	Penambahan TA 2019:	
3	Reklasifikasi Aset	52.239.329.143,00 a)
4	Pengurangan TA 2019:	
5	Reklasifikasi Aset	(9.102.969.000,00) b)
6	Saldo per 31 Desember 2019 (1+3+5)	1.001.258.462.556,94

Penambahan senilai Rp95.000.000,00 berasal dari koreksi atas kendaraan pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan yang kondisinya rusak berat

Rincian penambahan aset lainnya dari reklasifikasi aset adalah sebagai berikut:

Tabel 92. Penambahan Aset Lain-Lain dari Reklasifikasi Aset

No	Uraian	Nilai
1	Reklas penurunan kondisi Rusak Berat :	
	Dinas Pendidikan	9.282.558.088,00
	Dinas Kesehatan	605.581.746,00
	RSUD Kelas B Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro	7.158.115.925,00
	Dinas Lingkungan Hidup	400.658.319,00
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	15.000.000,00
	Dinas Perhubungan	3.521.081.440,00
	Dinas Komunikasi dan Informatika	88.809.727,00
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	140.000.000,00
	Kecamatan Bojonegoro	427.350.000,00
	Kecamatan Balen	365.000.000,00
	Kecamatan Baureno	50.062.030,00
	Kecamatan Trucuk	268.048.000,00
	Kecamatan Dander	433.958.000,00
	Kecamatan Kasiman	95.500.000,00
	Kecamatan Ngambon	482.590.000,00
	Kecamatan Tambakrejo	534.845.500,00
	Kecamatan Temayang	36.000.000,00
	Kecamatan Gondang	217.900.000,00
	Badan Pendapatan Daerah	150.000.000,00
	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	49.475.000,00
	Dinas Sosial	289.950.000,00
	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	95.000.000,00
2.	Aset yang diserahkan ke Provinsi (masih dalam proses) :	
	Dinas Kesehatan (AKBID)	13.277.838.945,00
	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (Aset Tanah Setren/Waduk Leran Desa Leran Kec. Kalitidu)	30.000.000,00
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	662.246.423,00
	Bag. SDA-Sekretariat Daerah	6.000.000,00
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	13.555.760.000,00
	JUMLAH	52.239.329.143,00

Sedangkan, rincian penghapusan adalah sebagai berikut

Tabel 93. Pengurangan Aset Lain-Lain

No	Uraian	Nilai
1	Dinas Kesehatan	10.909.000,00
2	Dinas Pertanian	9.084.000.000,00
3	Koreksi dampak dari perubahan pengaturan Intra ke Ekstrakomptabel)	8.060.000,00
	JUMLAH	9.102.969.000,00

5.3.1.4.4 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain

	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(565.814.046.857,37)	(557.775.880.744,37)

Berdasarkan Buletin Teknis Nomor 15 tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrual yang menyatakan bahwa aset disajikan sesuai dengan nilai netto, maka pada tahun ini dilakukan koreksi atas akumulasi penyusutan aset lainnya sehingga diharapkan aset lainnya dapat disajikan dengan benar.

Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya sebesar Rp565.814.046.857,37 terdiri dari akumulasi penyusutan aset lain-lain 2018 sebesar Rp557.775.880.744,37 ditambah akumulasi penyusutan aset lain-lain yang berasal dari penambahan aset lain lain sebesar Rp17.179.441.113,00 dikurangi akumulasi penyusutan aset lain-lain yang berasal dari pengurangan aset lain lain sebesar Rp9.057.900.000,00 dan koreksi dampak dari perubahan pengaturan Intra ke Ekstrakomptabel sebesar Rp83.375.000,00.

5.3.1.4.5 Amortisasi

	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
Amortisasi	(5.811.281.823,67)	(4.949.494.228,00)

Penambahan nilai amortisasi senilai Rp861.787.595,67 merupakan penambahan Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud selama tahun 2019. Nilai tersebut didapatkan dari peningkatan beban amortisasi aset tak berwujud selama tahun berjalan.

5.3.2. KEWAJIBAN

Kewajiban Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp40.465.229.182,46 yang merupakan kewajiban jangka pendek, sedangkan kewajiban jangka panjang adalah nihil.

5.3.2.1. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp40.465.229.182,46 yang terdiri dari:

	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
Utang Perhit.Pihak Ketiga	-	-
Pendapatan diterima Dimuka	2.695.751.023,67	1.408.332.318,67
Utang Jk Pendek Lainnya	37.769.478.158,79	104.594.166.980,68
Jumlah	40.465.229.182,46	106.002.499.299,35

Jumlah tersebut merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam suatu periode akuntansi yang terdiri dari :

Tabel 94. Mutasi Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban	Saldo 2018 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 2019 (Rp)
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	-	-	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	1.408.332.318,67	2.695.751.023,67	1.408.332.318,67	2.695.751.023,67
Utang Jangka Pendek Lainnya	104.594.166.980,68	37.822.604.027,04	104.594.166.980,68	37.769.478.158,79
- Utang Pegawai	2.190.523.715,00	1.924.165.288,00	2.190.523.715,00	1.924.165.288,00
- Utang Jasa Pelayanan	23.455.581.333,02	18.327.481.820,62	23.455.581.333,02	18.327.481.820,62
- Utang Usaha	19.479.563.801,08	11.670.020.123,53	19.479.563.801,08	11.670.020.123,53
- Utang Belanja Modal	59.458.498.131,58	5.847.810.926,64	59.458.498.131,58	5.847.810.926,64
- Utang Pengembalian jasa giro BLUD	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-
JUMLAH	106.002.499.299,35	40.465.229.182,46	106.002.499.299,35	40.465.229.182,46

Utang jangka pendek bertambah senilai Rp55.698.680,02 berasal dari kurang catat utang pegawai, utang Jasa Pelayanan, serta utang telepon pada RSUD Sosodoro Djatikoesoemo masing-masing senilai Rp3.681.705,00, Rp52.013.475,02 dan Rp3.500,00 sedangkan pengurangan senilai Rp118.821.048,27 berasal dari koreksi atas kelebihan pencatatan utang obat pada RSUD Sosodoro Djatikoesoemo senilai Rp108.824.548,27 dan utang pengembalian jasa giro pada BLUD Sosodoro Djatikoesoemo senilai Rp10.000.000,00

5.3.2.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga

Tidak ada penambahan maupun pengurangan pada utang perhitungan pihak ketiga.

5.3.2.1.2 Pendapatan Diterima di Muka

Penambahan pendapatan diterima dimuka sebesar Rp2.695.751.023,67 terdiri dari pendapatan diterima dimuka atas pajak reklame senilai Rp964.070.788,00, retribusi sewa tanah senilai Rp27.797.655,00, Retribusi Izin Trayek senilai Rp3.700.000,00, retribusi uji kendaraan bermotor senilai Rp305.702.500,00, sewa tanah dan bangunan di Jl. Panglima Polim senilai Rp5.488.000,00, sewa ruang milik jalan Kecamatan Bojonegoro senilai Rp70.728.500,00, sewa beberapa tanah eks. bengkok kelurahan senilai Rp1.253.440.764,00, dan sewa tanah milik Pemkab Bojonegoro di Jl. Mastrip No.35 senilai Rp64.822.816,67.

Pengurangan pendapatan diterima di muka sebesar Rp1.408.332.318,67 terdiri dari pendapatan diterima dimuka atas Pajak Reklame senilai Rp966.491.925,00, Retribusi Izin Trayek senilai Rp1.791.666,67,00, Retribusi Sewa Tanah senilai Rp28.936.152,00, Retribusi Uji Kendaraan Bermotor senilai Rp304.445.075,00, Sewa Tanah dan Bangunan di Jalan Panglima Polim senilai Rp10.976.000,00 dan Sewa Ruang Milik Jalan Kecamatan Bojonegoro senilai Rp95.691.500,00. Sehingga saldo pendapatan diterima di muka tahun 2019 adalah sebesar Rp2.695.751.023,67.

Tabel 95. Rincian Pendapatan Diterima Di Muka

Kewajiban	Saldo 2018 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 2019 (Rp)
Pajak Reklame	966.491.925,00	964.070.788,00	966.491.925,00	964.070.788,00
Retribusi Izin Trayek	1.791.666,67	3.700.000,00	1.791.666,67	3.700.000,00
Retribusi Sewa Tanah	28.936.152,00	27.797.655,00	28.936.152,00	27.797.655,00
Retribusi Uji Kendaraan Bermotor	304.445.075,00	305.702.500,00	304.445.075,00	305.702.500,00
Sewa Ruang Milik Jalan	95.691.500,00	70.728.500,00	95.691.500,00	70.728.500,00
Sewa Tanah dan Bangunan di Jalan Panglima Polim	10.976.000,00	5.488.000,00	10.976.000,00	5.488.000,00
Sewa Beberapa Tanah Eks. Bengkulu Kelurahan	-	1.253.440.764,00	-	1.253.440.764,00
Sewa Tanah Milik di Jl. Mastrip No.35	-	64.822.816,67	-	64.822.816,67
JUMLAH	1.408.332.318,67	2.695.751.023,67	1.408.332.318,67	2.695.751.023,67

5.3.2.1.3 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp40.518.355.050,71 terdiri dari:

1. Utang Belanja Pegawai

Penambahan Utang Belanja Pegawai merupakan utang dari kekurangan gaji pegawai, biaya insentif PBB dan insentif retribusi tahun 2019 yang dibayarkan pada tahun 2020 senilai Rp1.924.165.288,00, sedangkan pengurangan senilai Rp2.190.523.715,00 merupakan pembayaran yang telah dilakukan atas Utang Belanja Pegawai tahun 2018, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 96. Rincian Utang Belanja Pegawai

Nama SKPD	Saldo 2018 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 2019 (Rp)
RSUD Sosodoro Djatikusumo	36.418.938,00	21.732.705,00	36.418.938,00	21.732.705,00
Dinas Perdagangan	418.200,00	-	418.200,00	-
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.274.300,00	-	2.274.300,00	-
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	370.800,00	-	370.800,00	-
Badan Pendapatan Daerah	2.151.041.477,00	1.902.432.583,00	2.151.041.477,00	1.902.432.583,00
JUMLAH	2.190.523.715,00	1.924.165.288,00	2.190.523.715,00	1.924.165.288,00

2. Utang Jasa Pelayanan

Utang Jasa Pelayanan tahun 2019 terdiri atas penambahan Utang Jasa Pelayanan pada Dinas Kesehatan dan 3 (tiga) RSUD senilai Rp18.327.481.820,62. Sedangkan pengurangan sebesar Rp23.455.581.333,02 berasal dari pembayaran yang telah dilakukan atas Utang Jasa Pelayanan tahun 2018, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 97. Rincian Utang Jasa Pelayanan

Nama SKPD	Saldo 2018 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 2019 (Rp)
Dinas Kesehatan	7.566.246.197,02	2.965.137.152,62	7.566.246.197,02	2.965.137.152,62
RSUD Sosodoro Djatikusumo	12.800.086.007,00	13.117.783.214,00	12.800.086.007,00	13.117.783.214,00
RSUD Sumberrejo	1.631.020.354,00	1.886.629.854,00	1.631.020.354,00	1.886.629.854,00
RSUD Padangan	1.458.228.775,00	357.931.600,00	1.458.228.775,00	357.931.600,00
JUMLAH	23.455.581.333,02	18.327.481.820,62	23.455.581.333,02	18.327.481.820,62

3. Utang Usaha

Penambahan Utang Usaha senilai Rp11.670.020.123,53 terdiri dari utang listrik, air, telepon, surat kabar pada semua SKPD, utang kepada pihak ketiga (PMI), obat, bahan medis habis pakai, jasa uji laborat, reagen laboratorium, sampah medis dan non medis pada RSUD dan Dinas Kesehatan, serta utang kepada rekanan atas pekerjaan yang sudah dilaksanakan tapi belum terbayar. Sedangkan pengurangan sebesar Rp19.479.563.801,08 berasal dari pembayaran yang telah dilakukan atas Utang Usaha tahun 2018.

Tabel 98. Rincian Utang Usaha

Nama SKPD	Saldo 2018 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 2019 (Rp)
Dinas Pendidikan	56.904.177,00	61.670.178,00	56.904.177,00	61.670.178,00
Dinas Kesehatan	291.454.073,00	1.521.432.588,88	291.454.073,00	1.521.432.588,88
RSUD Sosodoro Djatikusumo	8.925.792.048,00	4.487.709.010,00	8.925.792.048,00	4.487.709.010,00
RSUD Sumberrejo	30.072.900,00	55.318.640,00	30.072.900,00	55.318.640,00
RSUD Padangan	188.815.193,00	239.017.481,00	188.815.193,00	239.017.481,00
Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang	-	2.797.822.491,65	-	2.797.822.491,65
Dinas PU Sumber Daya Air	8.795.255,00	-	8.795.255,00	-
Dinas PKP & Cipta Karya	9.715.069.353,08	2.387.210.880,00	9.715.069.353,08	2.387.210.880,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.932.531,00	48.000,00	2.932.531,00	48.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.821.902,00	5.099.245,00	5.821.902,00	5.099.245,00
Dinas Sosial	655.450,00	657.100,00	655.450,00	657.100,00
Dinas Ketahanan Pangan	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	352.700,00	615.400,00	352.700,00	615.400,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	10.515.941,00	12.166.537,00	10.515.941,00	12.166.537,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.587.800,00	400.600,00	1.587.800,00	400.600,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	12.615.572,00	19.895.670,00	12.615.572,00	19.895.670,00
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	3.487.784,00	4.176.303,00	3.487.784,00	4.176.303,00
Dinas Kepemudaan	17.425.333,00	19.298.879,00	17.425.333,00	19.298.879,00

Nama SKPD	Saldo 2018 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 2019 (Rp)
& Olah Raga				
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1.535.000,00	1.235.000,00	1.535.000,00	1.235.000,00
Dinas Peternakan & Perikanan	2.042.450,00	10.458.122,00	2.042.450,00	10.458.122,00
Dinas Pertanian	7.883.382,00	7.798.855,00	7.883.382,00	7.798.855,00
Dinas Perdagangan	155.179.152,00	8.729.583,00	155.179.152,00	8.729.583,00
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	11.502.346,00	11.369.136,00	11.502.346,00	11.369.136,00
Bagian Umum & Keuangan	1.329.050,00	-	1.329.050,00	-
Sekretariat DPRD	6.875.714,00	54.550,00	6.875.714,00	54.550,00
Kecamatan Balen	-	1.151.000,00	-	1.151.000,00
Kecamatan Sumberrejo	2.218.870,00	-	2.218.870,00	-
Kecamatan Sugihwaras	82.500,00	200.579,00	82.500,00	200.579,00
Kecamatan Malo	501.600,00	459.800,00	501.600,00	459.800,00
Kecamatan Dander	4.820.200,00	-	4.820.200,00	-
Kecamatan Padangan	455.750,00	467.250,00	455.750,00	467.250,00
Kecamatan Kasiman	846.955,00	1.166.866,00	846.955,00	1.166.866,00
Kecamatan Ngambon	1.710.348,00	-	1.710.348,00	-
Kecamatan Ngraho	1.902.888,00	3.167.756,00	1.902.888,00	3.167.756,00
Kecamatan Margomulyo	-	1.616.820,00	-	1.616.820,00
Kecamatan Temayang	189.724,00	450.000,00	189.724,00	450.000,00
Inspektorat	6.939.860,00	8.497.403,00	6.939.860,00	8.497.403,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	815.000,00	223.400,00	815.000,00	223.400,00
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
JUMLAH	19.479.563.801,08	11.670.020.123,53	19.479.563.801,08	11.670.020.123,53

4. Utang Pengembalian jasa giro BLUD

Saldo tahun 2018 senilai Rp10.000.000,00 merupakan utang atas kurang setor jasa giro RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo yang terlanjur disetor ke kas daerah. Pada tahun 2019 dilakukan koreksi atas utang kurang setor jasa giro RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo yang seharusnya merupakan jurnal eliminasi konsolidasi LKPD sehingga saldo utang pengembalian jasa giro BLUD tahun 2019 adalah Rp0,00

5. Utang Belanja Modal

Penambahan utang belanja modal sebesar Rp5.847.810.926,64 merupakan utang atas kegiatan tahun anggaran 2019 yang masih belum terbayar sampai dengan akhir tahun anggaran 2019. Sedangkan pengurangannya sebesar Rp59.458.498.131,58 merupakan pembayaran atas utang belanja modal tahun 2018, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 99. Rincian Utang Belanja Modal

Nama SKPD	Saldo 2018 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 2019 (Rp)
Dinas Pendidikan	-	27.445.000,00	-	27.445.000,00
Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang	29.605.119.058,00	-	29.605.119.058,00	-
Dinas PKP & Cipta Karya	29.853.379.073,58	5.820.365.926,64	29.853.379.073,58	5.820.365.926,64
JUMLAH	59.458.498.131,58	5.847.810.926,64	59.458.498.131,58	5.847.810.926,64

5.3.2.2. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Kewajiban Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2019 adalah nihil.

	<u>Tahun 2019 (Rp)</u>	<u>Tahun 2018 (Rp)</u>
Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00

5.3.3. EKUITAS

Ekuitas merupakan selisih antara total Aset dengan total Utang. Ekuitas Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp12.710.245.006.950,50.

	<u>Tahun 2019 (Rp)</u>	<u>Tahun 2018 (Rp)</u>
Ekuitas	12.710.245.006.950,50	8.210.742.208.604,64

Termasuk dalam komponen ekuitas tersebut adalah SILPA senilai Rp2.202.808.511.312,26 yang terdiri atas:

- Kas di Bendahara Umum Daerah	Rp 2.141.077.698.064,92
- Kas di BLUD	Rp 46.900.433.988,85
Rek. Kas RSUD Sosodoro Dj. No.0081011866	Rp 38.913.803.671,00
Rek. Kas RSUD Padangan No.0081006857	Rp 3.389.890.734,26
Rek. Kas RSUD Sumberrejo No.0691002136	Rp 4.596.739.583,59
- Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp -
- Kas di Bendahara Penerimaan	Rp 300.012,00
- Kas di Bendahara JKN / FKTP	Rp 9.566.402.632,52
- Kas Lainnya (BOS)	Rp 5.263.676.613,97
Jumlah	Rp 2.202.808.511.312,26

5.4. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional merupakan salah satu unsur laporan keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai :

- a) Besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah untuk menjalankan pelayanan;

- b) Operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi, efektifitas dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- c) Prediksi pendapatan LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah dalam periode mendatang ;
- d) Penurunan ekuitas (bila defisit operasional) dan kenaikan ekuitas (bila surplus operasional).

Unsur-unsur yang dicakup dalam Laporan Operasional terdiri dari Pendapatan LO, beban, transfer dan pos luar biasa.

5.4.1. PENDAPATAN LO

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah Rp5.637.608.655.879,84 terdiri atas:

Tabel 100. Pendapatan LO

Uraian	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)
Pendapatan Asli Daerah	1.153.599.506.903,84	434.159.560.769,91
Pendapatan Pajak Daerah – LO	108.785.511.264,41	96.196.244.379,00
Pendapatan Retribusi Daerah - LO	26.379.461.727,92	21.528.472.373,33
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LO	590.488.327.311,58	10.935.810.627,51
Lain-lain PAD yang sah - LO	427.946.206.599,93	305.499.033.390,07
Pendapatan Transfer	4.377.593.235.962,00	3.974.298.454.303,00
Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan	4.161.049.005.973,00	3.814.660.800.562,00
Dana Bagi Hasil Pajak - LO	502.375.527.253,00	251.636.029.601,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LO	2.311.835.729.627,00	2.281.171.868.831,00
Dana Alokasi Umum - LO	975.387.399.000,00	932.357.598.649,00
Dana Alokasi Khusus - LO	371.450.350.093,00	349.495.303.481,00
Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	33.175.993.000,00	17.250.000.000,00
Dana Otonomi Khusus - LO	-	-
Dana Penyesuaian - LO	33.175.993.000,00	17.250.000.000,00
Transfer Pemerintah Provinsi	183.368.236.989,00	142.387.653.741,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda lainnya - LO	169.260.491.489,00	130.228.753.741,00
Pendapatan lainnya (Bantuan Keuangan) - LO	14.107.745.500,00	12.158.900.000,00
Lain-lain Pendapatan yang Sah	106.415.913.014,00	126.823.272.065,18
Pendapatan Hibah - LO	106.415.913.014,00	111.305.766.074,18
Pendapatan Lainnya - LO	-	15.517.505.991,00
Total Pendapatan	5.637.608.655.879,84	4.535.281.287.138,09

5.4.1.1 Pendapatan Pajak Daerah - LO

Pendapatan Pajak Daerah - LO berasal dari semua pendapatan pajak LRA selama tahun 2019 yaitu Rp108.830.092.963,18 dikurangi pembayaran piutang pajak tahun sebelumnya senilai Rp6.215.783.865,77 ditambah piutang yang timbul selama tahun 2019 senilai Rp6.168.781.030,00 ditambah pendapatan diterima dimuka tahun 2018 senilai Rp966.491.925,00 dikurangi pendapatan diterima dimuka tahun 2019 senilai Rp964.070.788,00. Sehingga total pendapatan pajak daerah LO tahun 2019 adalah sebesar Rp108.785.511.264,41 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 101. Pendapatan Pajak Daerah - LO

No	Uraian	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
1	Pajak Hotel - LO	6.001.402.475,00	3.592.330.953,00
2	Pajak Restoran - LO	9.181.298.496,62	6.724.839.332,00
3	Pajak Hiburan - LO	834.044.354,00	531.962.626,00
4	Pajak Reklame - LO	2.436.270.860,00	2.312.041.987,00
5	PPJU - LO	41.640.300.143,00	38.869.204.525,00
6	Pajak Golongan C - LO	3.765.282.765,00	1.382.701.169,00
7	Pajak Parkir - LO	255.456.442,00	354.183.992,00
8	Pajak ABT - LO	1.228.905.582,00	654.988.801,00
9	Pajak Sarang Burung - LO	23.425.000,00	25.142.000,00
10	PBB - LO	31.723.830.249,79	28.249.180.479,00
11	BPHTB - LO	11.695.294.897,00	13.499.668.515,00
	JUMLAH	108.785.511.264,41	96.196.244.379,00

5.4.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah - LO

Pendapatan Retribusi Daerah - LO berasal dari semua pendapatan LRA tahun 2019 senilai Rp28.683.142.118,25 dikurangi piutang retribusi tahun sebelumnya yang terbayar selama tahun 2019 senilai Rp8.582.280.150,00 ditambah piutang retribusi yang timbul selama tahun 2019 senilai Rp6.280.627.021,00 ditambah dengan pendapatan diterima dimuka tahun 2018 senilai Rp Rp335.172.893,67 dikurangi pendapatan diterima dimuka tahun 2019 senilai Rp337.200.155,00. Sehingga total pendapatan retribusi daerah tahun 2019 adalah sebesar Rp26.379.461.727,92 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 102. Pendapatan Retribusi Daerah - LO

No	Uraian	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
1	Retribusi Jasa Umum - LO	22.781.924.942,25	17.212.994.494,00
	Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO	7.942.997.400,00	6.839.379.850,00
	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan - LO	295.999.000,00	273.705.500,00
	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum - LO	8.332.560.000,00	8.007.792.000,00
	Retribusi Pelayanan Pasar - LO	2.138.143.400,00	-
	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LO	1.387.747.575,00	1.092.474.925,00
	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta - LO	2.360.536.827,25	852.967.719,00
	Retribusi pelayanan tera dan tera ulang - LO	148.808.000,00	146.674.500,00
	Retribusi Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi - LO	175.132.740,00	-
2	Retribusi Jasa Usaha - LO	2.642.089.839,00	3.562.816.509,00
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	1.090.317.839,00	2.201.663.509,00
	Retribusi Pasar atau Pertokoan yang Disediakan/Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah - LO	55.750.000,00	43.850.000,00
	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa - LO	180.700.000,00	91.300.000,00
	Retribusi Tempat Rekreasi - LO	1.127.296.000,00	1.033.313.000,00
	Retribusi Pelayanan Tempat Olahraga - LO	62.861.000,00	67.715.000,00

No	Uraian	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
	Retribusi Rumah Potong Hewan – LO	125.165.000,00	124.975.000,00
3	Retribusi Jasa Perizinan Tertentu - LO	955.446.946,67	752.661.370,33
	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LO	950.455.280,00	728.075.370,00
	Retribusi Pemberian Izin Trayek - LO	4.991.666,67	8.200.000,33
	Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing - LO	-	16.386.000,00
	Jumlah	26.379.461.727,92	21.528.472.373,33

5.4.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO senilai Rp590.488.327.311,58 berasal dari jumlah keseluruhan penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada tahun 2019. Nilainya sama dengan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan LRA yaitu Rp16.816.223.663,52 dikurangi dengan piutang tahun sebelumnya senilai Rp0,00 ditambah dengan pendapatan yang diterima karena penggunaan metode ekuitas senilai Rp573.672.103.648,06 yang berasal dari laba tahun 2019 PDAM sebesar Rp6.168.964.552,00, laba tahun 2019 PD BPR Bojonegoro Rp10.332.261.935,00 dan laba tahun 2019 PT Asri Dharma Sejahtera sebesar Rp557.170.877.161,06.

Tabel 103. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO

No	Uraian	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
1.	BPD Jawa Timur	13.696.164.505,52	-
2.	PD BPR Kabupaten Bojonegoro	12.262.851.664,00	2.198.668.039,00
3.	PD Pasar Bojonegoro	-	740.628.858,75
4.	PT Asri Dharma Sejahtera	557.170.877.161,06	-
5.	PT Bojonegoro Bangun Sarana	415.118.429,00	1.041.972.326,85
6.	BPR Jatim	774.351.000,00	-
7.	Griya Dharma Kusuma	-	-
8.	PDAM	6.168.964.552,00	6.954.541.402,91
	JUMLAH	590.488.327.311,58	10.935.810.627,51

5.4.1.4 Lain-Lain PAD yang Sah - LO

Lain-Lain PAD yang Sah - LO berasal dari penerimaan atas jasa giro, pendapatan bunga, tuntutan ganti kerugian daerah, denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan dari pengembalian, pendapatan dari BLUD, FKTP serta pendapatan lain-lain. Nilainya adalah sama dengan penerimaan lain-lain PAD yang sah LRA yaitu Rp406.967.985.123,26 ditambah dengan penambahan piutang selama tahun 2019 yang terdiri dari piutang klaim kesehatan RSUD Sosodoro Djatikoesoemo senilai Rp125.203.757.790,00, RSUD Sumberrejo senilai Rp3.041.426.661,00, dan RSUD Padangan senilai Rp12.591.760.200,00 serta piutang pengembalian uang muka belanja modal dari DPU Bina Marga senilai Rp2.955.642.273,59. Ditambah pendapatan diterima dimuka atas sewa tanah dan bangunan tahun 2018 Rp106.667.500,00. Ditambah Rp695.050.500,00 merupakan pendapatan komitmen fee pada PT ADS senilai USD 50.000 yang dinilai berdasarkan kurs tengah BI per 31 Desember 2019 dan Rp24.260.000,00 merupakan

reklasifikasi dari penjualan benih ikan pada Dinas Peternakan dan Perikanan yang semula tercatat sebagai surplus penjualan aset non lancar.

Dikurangi piutang klaim kesehatan tahun sebelumnya dari RSUD Sosodoro Djatikoesoemo senilai Rp109.577.528.858,00, RSUD Sumberrejo senilai Rp692.813.824,00, dan RSUD Padangan senilai Rp11.889.738.773,00. Dikurangi piutang bunga tahun sebelumnya senilai Rp6.650.000,00 yang berasal dari Dinas Peternakan dan Perikanan Rp4.500.000,00 dan Dinas Ketahanan Pangan Rp 2.150.000,00. Dikurangi pendapatan diterima dimuka atas sewa tanah dan bangunan tahun 2019 senilai Rp1.394.480.080,67. Dikurangi hasil penjualan aset lainnya yang dianggap penjualan barang bekas Rp33.188.000,00. Dikurangi senilai Rp45.943.912,25 berasal dari reklasifikasi pendapatan yang semula tercatat sebagai pendapatan lain-lain - Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) atas pembangunan pasar Ngasem pada Dinas Perdagangan menjadi pengurang belanja karena berpengaruh pada nilai asetnya. Sehingga total lain-lain PAD yang sah tahun 2019 adalah senilai Rp427.946.206.599,93, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 104. Lain-lain PAD yang Sah - LO

Uraian	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
Penerimaan Jasa Giro	26.979.225.884,39	11.500.112.519,46
Penerimaan Bunga Deposito	90.651.438.134,90	9.434.353.549,75
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)	2.541.376.077,01	5.610.571.902,78
Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.721.574.338,43	5.119.425.670,60
Pendapatan Denda Pajak	-	-
Pendapatan Dari Pengembalian	5.499.277.476,62	2.324.675.576,83
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	404.295.984,28	-
Pendapatan BLUD	237.182.626.251,32	220.967.828.114,38
Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	9.755.040.794,98	4.363.043.456,27
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	24.260.000,00	-
Pendapatan Dana Kapitasi JKN	53.187.091.658,00	46.179.022.600,00
Pendapatan Dana BOS	-	-
JUMLAH	427.946.206.599,93	305.499.033.390,07

5.4.1.5 Dana Bagi Hasil Pajak - LO

Dana Bagi Hasil Pajak bertambah senilai Rp299.994.906.865,00 sebagai konsekuensi atas terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 20/PMK.07/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2020 serta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 36/PMK.07/2020 tanggal 17 April 2020 tentang Penetapan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2019 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19).

5.4.1.6 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LO

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam bertambah senilai Rp38.642.417.120,00 sebagai konsekuensi atas terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 20/PMK.07/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Penyaluran

Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2020 serta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 36/PMK.07/2020 tanggal 17 April 2020 tentang Penetapan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2019 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19).

5.4.1.7 Dana Alokasi Umum - LO

Realisasi Dana Alokasi Umum - LO sama dengan realisasi pendapatan Dana Alokasi Umum LRA Rp975.387.399.000,00 karena tidak ada piutang baik di Tahun 2018 maupun 2019.

5.4.1.8 Dana Alokasi Khusus - LO

Realisasi Dana Alokasi Khusus - LO sebesar Rp371.450.350.093,00 sama dengan jumlah realisasi pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik LRA sebesar Rp90.276.711.983,00 dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik LRA yaitu sebesar Rp 281.173.638.110,00. Tidak ada piutang baik di Tahun 2018 maupun 2019. Dana Alokasi Khusus Non Fisik terdiri dari Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD, Tunjangan Profesi Guru, Tambahan Penghasilan Guru, Bantuan Operasional Kesehatan, Bantuan Operasional KB, Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan, Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan dan Dana Peningkatan Koperasi dan UKM.

5.4.1.9 Dana Penyesuaian - LO

Realisasi Dana Penyesuaian - LO sama dengan realisasi pendapatan Dana Penyesuaian LRA yaitu Dana Insentif Daerah sebesar Rp33.175.993.000,00 karena tidak ada piutang baik di Tahun 2018 maupun 2019.

5.4.1.10 Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda lainnya - LO

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda lainnya - LO sama dengan realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda lainnya LRA dikurangi dengan piutang Bagi Hasil Pajak Propinsi tahun 2018. Besarnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda lainnya LRA adalah Rp173.083.787.290,00 dikurangi dengan piutang dana bagi hasil pajak propinsi 2018 sebesar Rp9.864.975.800,00. Ditambah piutang bagi hasil pajak provinsi Tahun 2019 senilai Rp6.041.679.999,00, sehingga nilai pendapatan bagi hasil pajak dari provinsi dan pemda lainnya - LO adalah Rp169.260.491.489,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 105. Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda lainnya - LO

No	Uraian	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
1.	Pajak Kendaraan Bermotor	58.020.328.907,00	29.997.787.032,00
2.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	28.300.274.095,00	33.521.745.810,00
3.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	41.200.895.463,00	15.812.740.550,00
4.	PPABT	210.013.688,00	174.686.874,00
5.	Pajak Rokok	41.528.979.336,00	50.721.793.475,00
	JUMLAH	169.260.491.489,00	130.228.753.741,00

5.4.1.11 Bantuan Keuangan Provinsi - LO

Realisasi Bantuan Keuangan Provinsi - LO adalah sama dengan Bantuan Keuangan Provinsi LRA yaitu sebesar Rp14.107.745.500,00 karena tidak ada piutang baik di Tahun 2018 maupun di Tahun 2019.

5.4.1.12 Pendapatan Hibah - LO

Pendapatan Hibah bertambah Rp7.819.753.014,00 merupakan hibah barang yang diterima selama Tahun 2019 yang semula diklasifikasikan sebagai koreksi ekuitas, yang terdiri dari:

a. Peralatan Mesin:

- Hibah APBN 2019, Dinas Pendidikan sebesar Rp1.704.388.928,00;
- Hibah Komite, Dinas Pendidikan sebesar Rp57.050.000,00;
- Hibah dari Direktorat Jendral Perikanan Tangkap BA No. B14715/DJPT/PL,430,DI/XI/2018 Tanggal 8 Nopember 2018 berupa 6 Pencetak Papan Swaka untuk Dinas Peternakan dan Perikanan sebesar Rp10.241.042,00.

b. Gedung dan Bangunan:

- Hibah APBN 2019 sebesar Rp914.495.580,00;
- Hibah Komite 2019 sebesar Rp36.300.000,00.

c. Jalan, Irigasi dan Jaringan:

Hibah dari Kementerian ESDM sebesar Rp5.097.277.464,00 dengan BAST No. 1671,BAST/554/412.023/2019 dan Naskah Hibah No. 1667,NH/03,04/SDE/2019 PJU tenaga surya 175 unit dengan nilai perolehan Rp2.883.311.393,00 dan 125 unit dengan harga perolehan Rp2.213.966.071,00.

5.4.1.13 Pendapatan Lainnya - LO

Pada tahun 2019 tidak ada realisasi Pendapatan Lainnya - LO.

5.4.2. BEBAN LO

Jumlah beban untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah Rp3.317.193.978.947,12 yang terdiri dari:

Tabel 106. Beban LO

Uraian	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)
BEBAN OPERASI	2.501.004.162.752,12	2.394.219.574.340,74
Beban Pegawai	1.058.458.057.616,02	1.017.265.010.808,98
Beban Persediaan	164.242.683.572,09	97.990.421.538,24
Beban Jasa	458.421.246.547,97	438.189.961.480,95
Beban Pemeliharaan	32.503.004.750,38	18.461.748.572,00
Beban Perjalanan Dinas	70.629.433.500,00	53.880.436.358,63
Beban Bunga	-	-
Beban Subsidi	-	75.600.000,00
Beban Hibah	245.406.205.604,42	183.669.107.085,97
Beban Bantuan Sosial	64.475.421.718,32	37.821.060.373,00
Beban Penyusutan	387.541.947.446,56	543.965.406.588,43
Beban Amortisasi	861.787.595,67	803.732.006,60
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	1.097.621.359,69	2.097.089.527,94
Beban Penyusutan Aset Lain-Lain	17.080.316.113,00	-
Beban Lain-Lain	286.436.928,00	-
BEBAN TRANSFER	816.189.816.195,00	346.567.558.381,00
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	15.232.584.477,00	12.379.745.270,00
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	800.957.231.718,00	334.187.813.111,00
JUMLAH BEBAN	3.317.193.978.947,12	2.740.787.132.721,74

5.4.2.1 Beban Pegawai-LO

	LO	LRA	Selisih
Beban/Belanja Pegawai	1.058.458.057.616,02	1.058.724.416.043,02	266.358.427,00

Nilai beban pegawai dalam laporan operasional per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.058.458.057.616,02, sedangkan nilai realisasi belanja pegawai dalam laporan realisasi anggaran per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.058.724.416.043,02. Selisih antara beban pegawai-LO dan belanja pegawai-LRA adalah sebesar Rp266.358.427,00. Selisih tersebut dapat dijelaskan dalam perhitungan di bawah ini:

Belanja Pegawai-LRA	Rp	1.058.724.416.043,02
Penambahan		
a. Utang belanja gaji tahun 2019	Rp	18.051.000,00
b. Utang belanja insentif PBB P2 tribulan III & IV 2019 pada Bapenda	Rp	297.132.133
c. Utang belanja insentif pajak daerah 2019 pada Bapenda	Rp	1.282.969.017
d. Utang belanja Biaya insentif retribusi daerah 2019 pada Bapenda	Rp	322.331.433
e. Koreksi Utang belanja pegawai tahun 2019	Rp	3.681.705,00
Jumlah Penambahan	Rp	1.924.165.288
Pengurangan		
a. Pembayaran utang gaji tahun 2018	Rp	39.482.238,00
b. Pembayaran Utang belanja insentif PBB P2 tribulan III & IV 2018 pada Bapenda	Rp	734.001.803,00
c. Pembayaran utang insentif pajak daerah 2018 pada Bapenda	Rp	1.195.613.174,00
d. Pembayaran utang belanja retribusi daerah 2018 pada Bapenda	Rp	221.426.500,00
Jumlah Pengurangan	Rp	2.190.523.715,00
Beban Pegawai - LO	Rp	1.058.458.057.616,02

Beban Pegawai bertambah senilai Rp3.681.705,00 berasal dari koreksi atas utang pegawai RSUD Sosodoro Djatikoesoemo.

Tabel 107. Beban Pegawai - LO

No	SKPD	Utang Belanja Pegawai 2018 (Rp)	Belanja Pegawai 2019 (Rp)	Utang Belanja Pegawai 2019 (Rp)	Beban Pegawai 2019 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan	-	633.929.345.702,00	-	633.929.345.702,00
2.	Dinas Kesehatan	-	91.788.741.202,02	-	91.788.741.202,02
3.	RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikusumo	36.418.938,00	93.082.157.522,00	21.732.705,00	93.067.471.289,00
4.	RSUD Sumberrejo	-	6.145.446.112,00	-	6.145.446.112,00
5.	RSUD Padangan	-	5.633.709.461,00	-	5.633.709.461,00
6.	Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang	-	6.114.747.008,00	-	6.114.747.008,00
7.	Dinas PU Sumber Daya Air	-	4.392.794.583,00	-	4.392.794.583,00

No	SKPD	Utang Belanja Pegawai 2018 (Rp)	Belanja Pegawai 2019 (Rp)	Utang Belanja Pegawai 2019 (Rp)	Beban Pegawai 2019 (Rp)
8.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	-	7.883.833.887,00	-	7.883.833.887,00
9.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	2.962.557.585,00	-	2.962.557.585,00
10.	Satpol PP	-	3.919.490.249,00	-	3.919.490.249,00
11.	BPBD	-	1.157.933.052,00	-	1.157.933.052,00
12.	Dinas Pemadam Kebakaran	-	2.418.299.630,00	-	2.418.299.630,00
13.	Dinas Sosial	-	2.937.935.021,00	-	2.937.935.021,00
14.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB	-	3.429.703.186,00	-	3.429.703.186,00
15.	Dinas Ketahanan Pangan	-	2.220.718.119,00	-	2.220.718.119,00
16.	Dinas Lingkungan Hidup	-	10.591.881.132,00	-	10.591.881.132,00
17.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	3.082.860.077,00	-	3.082.860.077,00
18.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	2.903.424.441,00	-	2.903.424.441,00
19.	Dinas Perhubungan	-	7.138.277.114,00	-	7.138.277.114,00
20.	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	3.544.818.055,00	-	3.544.818.055,00
21.	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	-	2.251.454.271,00	-	2.251.454.271,00
22.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	2.292.300.907,00	-	2.292.300.907,00
23.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	-	2.512.894.540,00	-	2.512.894.540,00
24.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	-	4.102.661.381,00	-	4.102.661.381,00
25.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	2.640.968.676,00	-	2.640.968.676,00
26.	Dinas Peternakan dan Perikanan	-	7.094.870.563,00	-	7.094.870.563,00
27.	Dinas Pertanian	-	8.935.086.466,00	-	8.935.086.466,00
28.	Dinas Perdagangan	418.200,00	2.231.662.195,00	-	2.231.243.995,00
29.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	-	3.377.780.681,00	-	3.377.780.681,00
30.	KDH WKDH	-	958.467.696,00	-	958.467.696,00
31.	Bagian Organisasi dan Tata Laksana	-	44.365.500,00	-	44.365.500,00
32.	Bagian Pemerintahan	-	608.416.000,00	-	608.416.000,00
33.	Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan	-	369.524.000,00	-	369.524.000,00
34.	Bagian Perlengkapan	-	4.925.000,00	-	4.925.000,00
35.	Bagian Pembangunan	-	21.382.000,00	-	21.382.000,00
36.	Bagian Perekonomian	-	29.891.000,00	-	29.891.000,00
37.	Bagian Umum dan Keuangan	-	15.675.615.909,00	-	15.675.615.909,00
38.	Bagian Humas dan Protokol	-	135.333.000,00	-	135.333.000,00

No	SKPD	Utang Belanja Pegawai 2018 (Rp)	Belanja Pegawai 2019 (Rp)	Utang Belanja Pegawai 2019 (Rp)	Beban Pegawai 2019 (Rp)
39.	Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	-	224.235.000,00	-	224.235.000,00
40.	Sekretariat DPRD	-	26.752.160.025,00	-	26.752.160.025,00
41.	Kecamatan Bojonegoro	-	7.212.254.000,00	-	7.212.254.000,00
42.	Kecamatan Kapas	-	2.255.366.607,00	-	2.255.366.607,00
43.	Kecamatan Balen	-	2.430.370.798,00	-	2.430.370.798,00
44.	Kecamatan Sumberrejo	-	2.476.733.746,00	-	2.476.733.746,00
45.	Kecamatan Kanor	-	2.138.091.382,00	-	2.138.091.382,00
46.	Kecamatan Baureno	-	2.064.984.914,00	-	2.064.984.914,00
47.	Kecamatan Sugihwaras	-	1.797.235.155,00	-	1.797.235.155,00
48.	Kecamatan Kepohbaru	-	2.134.839.424,00	-	2.134.839.424,00
49.	Kecamatan Kedungadem	-	2.182.539.925,00	-	2.182.539.925,00
50.	Kecamatan Sukosewu	-	1.747.573.547,00	-	1.747.573.547,00
51.	Kecamatan Trucuk	-	1.861.767.555,00	-	1.861.767.555,00
52.	Kecamatan Malo	-	1.785.134.664,00	-	1.785.134.664,00
53.	Kecamatan Kalitidu	-	1.702.614.029,00	-	1.702.614.029,00
54.	Kecamatan Dander	-	1.907.674.241,00	-	1.907.674.241,00
55.	Kecamatan Padangan	-	1.783.462.168,00	-	1.783.462.168,00
56.	Kecamatan Purwosari	-	1.839.692.048,00	-	1.839.692.048,00
57.	Kecamatan Kasiman	-	1.846.123.691,00	-	1.846.123.691,00
58.	Kecamatan Kedewan	-	1.323.629.240,00	-	1.323.629.240,00
59.	Kecamatan Ngasem	-	1.642.689.162,00	-	1.642.689.162,00
60.	Kecamatan Ngambon	-	1.440.172.797,00	-	1.440.172.797,00
61.	Kecamatan Tambakrejo	-	1.666.436.536,00	-	1.666.436.536,00
62.	Kecamatan Ngraho	-	2.019.267.641,00	-	2.019.267.641,00
63.	Kecamatan Margomulyo	-	1.343.082.225,00	-	1.343.082.225,00
64.	Kecamatan Temayang	-	1.762.355.947,00	-	1.762.355.947,00
65.	Kecamatan Bubulan	-	1.230.771.334,00	-	1.230.771.334,00
66.	Kecamatan Gondang	-	1.645.702.575,00	-	1.645.702.575,00
67.	Kecamatan Sekar	-	1.302.045.660,00	-	1.302.045.660,00
68.	Kecamatan Gayam	-	1.793.320.895,00	-	1.793.320.895,00
69.	Inspektorat	-	4.861.052.981,00	-	4.861.052.981,00
70.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.274.300,00	3.734.244.586,00		3.731.970.286,00
71.	BPKAD	370.800,00	4.457.662.960,00		4.457.292.160,00
72.	Badan Pendapatan Daerah	2.151.041.477,00	9.738.324.395,00	1.902.432.583,00	9.489.715.501,00
73.	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	-	4.054.531.267,00	-	4.054.531.267,00
	JUMLAH	2.190.523.715,00	1.058.724.416.043,02	1.924.165.288,00	1.058.458.057.616,02

5.4.2.2 Beban Persediaan-LO

	LO	LRA	Selisih
Beban/Belanja Persediaan	164.242.683.572,09	151.613.767.573,33	12.628.915.998,76

Nilai beban persediaan dalam laporan operasional per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp164.242.683.572,09, sedangkan nilai realisasi belanja persediaan dalam laporan realisasi anggaran per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp151.613.767.573,33. Selisih antara beban persediaan-LO dan belanja persediaan-LRA adalah sebesar Rp12.628.915.998,76. Selisih tersebut dapat dijelaskan dalam perhitungan di bawah ini:

Saldo awal persediaan	Rp 46.095.980.106,25
Penambahan	
a. Belanja Bahan Pakai Habis 2019	Rp 28.410.402.350,30
b. Belanja Bahan Material 2019	Rp 110.015.001.728,03
c. Belanja Cetak dan Penggandaan 2019	Rp 13.188.363.495,00
d. Koreksi Persediaan expired tahun 2019	Rp 88.612.240,56
Jumlah Penambahan	Rp 151.702.379.813,89
Pengurangan	
a. Saldo akhir persediaan	Rp 33.555.676.348,05
Jumlah Pengurangan	Rp 33.555.676.348,05
Beban Persediaan - LO	Rp 164.242.683.572,09

Tabel 108. Beban Persediaan - LO

No	SKPD	Persediaan 2018 (Rp)	Belanja Bahan Pakai Habis (Rp)	Belanja Bahan Material (Rp)	Belanja Cetak dan Penggandaan (Rp)	Persediaan 2019 (Rp)	Koreksi (Rp)	Beban Persediaan 2019 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan	50.972.000,00	495.785.950,00	7.547.000,00	1.451.690.400,00	30.714.250,00	-	1.975.281.100,00
2.	Dinas Kesehatan	17.233.363.418,00	5.994.342.381,30	10.738.926.601,05	3.577.900.290,00	10.753.907.480,00	-	26.790.625.210,35
3.	RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikusumo	10.596.760.516,50	1.263.970.840,00	68.901.938.582,00	365.884.190,00	10.445.514.137,77	-	70.683.039.990,73
4.	RSUD Sumberrejo	2.747.673.699,59	223.859.210,00	7.947.796.407,00	180.642.300,00	2.229.539.930,55	-	8.870.431.686,04
5.	RSUD Padangan	3.013.434.926,24	2.506.886.957,00	5.823.611.830,00	122.922.200,00	3.644.790.977,63	88.612.240,56	7.910.677.176,17
6.	Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang	959.500,00	600.775.953,00	7.852.521.958,98	78.835.000,00	1.695.000,00	-	8.531.397.411,98
7.	Dinas PU Sumber Daya Air	580.918.029,00	2.746.731.836,00	194.980.000,00	22.930.050,00	468.379.279,00	-	3.077.180.636,00
8.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	8.268.079.906,67	2.203.606.600,00	883.835.700,00	40.131.000,00	1.850.810.988,00	-	9.544.842.218,67
9.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	985.000,00	130.082.040,00	-	149.699.500,00	1.049.300,00	-	279.717.240,00
10.	Satpol PP	665.000,00	273.064.700,00	4.050.000,00	27.870.400,00	833.000,00	-	304.817.100,00
11.	BPBD	1.375.000,00	267.756.900,00	611.945.000,00	94.790.500,00	1.722.500,00	-	974.144.900,00
12.	Dinas Pemadam Kebakaran	6.495.000,00	382.777.247,00	22.515.115,00	33.584.000,00	2.430.000,00	-	442.941.362,00
13.	Dinas Sosial	777.000,00	395.805.550,00	474.311.200,00	112.023.950,00	925.000,00	-	981.992.700,00
14.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB	12.696.320,00	190.796.100,00	7.899.000,00	70.450.250,00	1.000.400,00	-	280.841.270,00

No	SKPD	Persediaan 2018 (Rp)	Belanja Bahan Pakai Habis (Rp)	Belanja Bahan Material (Rp)	Belanja Cetak dan Penggandaan (Rp)	Persediaan 2019 (Rp)	Koreksi (Rp)	Beban Persediaan 2019 (Rp)
15.	Dinas Ketahanan Pangan	961.572,00	51.967.897,00	123.612.950,00	25.551.200,00	977.700,00	-	201.115.919,00
16.	Dinas Lingkungan Hidup	820.000,00	1.560.752.454,00	1.822.928.374,00	126.848.800,00	661.500,00	-	3.510.688.128,00
17.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.159.962.816,00	107.363.626,00	275.000,00	1.028.488.130,00	2.026.520.316,00	-	1.269.569.256,00
18.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.120.500,00	156.981.100,00	23.875.000,00	105.608.000,00	5.330.000,00	-	283.254.600,00
19.	Dinas Perhubungan	87.862.637,25	392.389.200,00	-	1.151.494.600,00	347.689.248,50	-	1.284.057.188,75
20.	Dinas Komunikasi dan Informatika	227.000,00	154.506.296,00	-	46.616.200,00	281.600,00	-	201.067.896,00
21.	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	2.221.075,00	102.691.880,00	75.616.000,00	23.168.750,00	3.163.800,00	-	200.533.905,00
22.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	810.000,00	132.311.575,00	-	212.696.700,00	674.500,00	-	345.143.775,00
23.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2.757.500,00	119.838.034,00	9.000.000,00	44.089.000,00	-	-	175.684.534,00
24.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	166.995.000,00	603.656.799,00	188.200.000,00	519.898.901,00	89.152.000,00	-	1.389.598.700,00
25.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.078.000,00	112.629.010,00	11.872.500,00	42.342.450,00	1.630.500,00	-	166.291.460,00
26.	Dinas Peternakan dan Perikanan	33.906.500,00	363.241.550,00	616.653.725,00	282.666.800,00	101.801.000,00	-	1.194.667.575,00
27.	Dinas Pertanian	867.015.540,00	260.722.889,00	796.188.000,00	181.567.800,00	1.206.302.390,00	-	899.191.839,00
28.	Dinas Perdagangan	825.000,00	162.788.364,00	4.134.700,00	171.255.100,00	1.088.000,00	-	337.915.164,00
29.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	1.679.500,00	210.887.913,00	759.517.600,00	192.226.900,00	106.525.600,60	-	1.057.786.312,40
30.	Bagian Organisasi dan Tata Laksana	8.716.500,00	250.579.000,00	-	72.472.850,00	6.036.500,00	-	325.731.850,00
31.	Bagian Pemerintahan	200.000,00	73.204.000,00	500.000,00	12.910.250,00	250.000,00	-	86.564.250,00
32.	Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan	200.000,00	92.172.550,00	-	121.257.850,00	200.000,00	-	213.430.400,00
33.	Bagian Sumberdaya Alam	733.000,00	49.249.750,00	-	3.180.000,00	921.500,00	-	52.241.250,00
34.	Bagian Perlengkapan	129.282.250,00	385.543.750,00	-	553.207.400,00	93.471.250,00	-	974.562.150,00
35.	Bagian Pembangunan	185.000,00	31.809.188,00	-	42.389.775,00	172.000,00	-	74.211.963,00
36.	Bagian Perekonomian	120.000,00	19.320.615,00	-	15.122.400,00	300.000,00	-	34.263.015,00
37.	Bagian Umum dan Keuangan	140.000,00	1.934.652.479,00	915.303.685,00	114.710.000,00	195.000,00	-	2.964.611.164,00
38.	Bagian Humas dan Protokol	-	77.775.500,00	-	10.900.650,00	-	-	88.676.150,00
39.	Bagian Kesejahteraan Rakyat	50.000,00	317.152.800,00	770.385.200,00	23.195.250,00	122.000,00	-	1.110.661.250,00
40.	Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	1.851.000,00	53.114.900,00	-	28.380.850,00	2.385.000,00	-	80.961.750,00
41.	Sekretariat DPRD	263.000,00	365.619.323,00	-	258.843.850,00	455.200,00	-	624.270.973,00
42.	Kecamatan Bojonegoro	365.000,00	343.667.502,00	262.985.000,00	73.344.256,00	429.000,00	-	679.932.758,00
43.	Kecamatan Kapas	257.500,00	32.786.800,00	-	9.064.700,00	794.000,00	-	41.315.000,00
44.	Kecamatan Balen	152.000,00	45.458.300,00	7.440.000,00	8.060.000,00	160.000,00	-	60.950.300,00

No	SKPD	Persediaan 2018 (Rp)	Belanja Bahan Pakai Habis (Rp)	Belanja Bahan Material (Rp)	Belanja Cetak dan Penggandaan (Rp)	Persediaan 2019 (Rp)	Koreksi (Rp)	Beban Persediaan 2019 (Rp)
45.	Kecamatan Sumberrejo	278.000,00	24.070.205,00	-	10.629.800,00	100.000,00	-	34.878.005,00
46.	Kecamatan Kanor	287.000,00	48.642.250,00	-	10.240.000,00	400.000,00	-	58.769.250,00
47.	Kecamatan Baureno	275.000,00	58.357.454,00	21.868.300,00	21.624.600,00	1.060.000,00	-	101.065.354,00
48.	Kecamatan Sugihwaras	370.000,00	31.721.490,00	-	11.790.000,00	410.000,00	-	43.471.490,00
49.	Kecamatan Kepohbaru	73.000,00	53.613.993,00	34.748.000,00	28.301.700,00	160.000,00	-	116.576.693,00
50.	Kecamatan Kedungadem	100.000,00	72.085.886,00	19.400.000,00	16.634.600,00	250.000,00	-	107.970.486,00
51.	Kecamatan Sukosewu	-	43.413.500,00	18.000.000,00	7.600.000,00	-	-	69.013.500,00
52.	Kecamatan Trucuk	535.200,00	46.808.304,00	-	3.108.000,00	460.000,00	-	49.991.504,00
53.	Kecamatan Malo	250.000,00	36.714.000,00	6.030.000,00	4.932.900,00	650.000,00	-	47.276.900,00
54.	Kecamatan Kalitidu	165.000,00	61.394.800,00	7.965.000,00	17.414.600,00	260.000,00	-	86.679.400,00
55.	Kecamatan Dander	560.000,00	37.661.000,00	20.129.500,00	2.652.618,00	370.000,00	-	60.633.118,00
56.	Kecamatan Padangan	270.000,00	41.108.249,00	11.079.000,00	8.961.900,00	190.000,00	-	61.229.149,00
57.	Kecamatan Purwosari	618.000,00	60.404.500,00	-	19.467.500,00	556.000,00	-	79.934.000,00
58.	Kecamatan Kasiman	450.000,00	41.247.091,00	-	10.910.000,00	340.000,00	-	52.267.091,00
59.	Kecamatan Kedewan	310.500,00	40.397.500,00	-	7.295.000,00	460.000,00	-	47.543.000,00
60.	Kecamatan Ngasem	430.000,00	41.817.500,00	-	29.200.000,00	556.500,00	-	70.891.000,00
61.	Kecamatan Ngambon	220.000,00	45.721.408,00	-	4.975.600,00	290.000,00	-	50.627.008,00
62.	Kecamatan Tambakrejo	304.000,00	52.314.000,00	-	14.066.300,00	396.000,00	-	66.288.300,00
63.	Kecamatan Ngraho	200.000,00	45.409.622,00	5.200.000,00	9.438.950,00	210.000,00	-	60.038.572,00
64.	Kecamatan Margomulyo	450.000,00	24.358.111,00	-	14.879.200,00	58.000,00	-	39.629.311,00
65.	Kecamatan Temayang	230.000,00	44.260.700,00	-	25.938.150,00	230.000,00	-	70.198.850,00
66.	Kecamatan Bubulan	320.000,00	55.072.000,00	-	7.052.000,00	330.000,00	-	62.114.000,00
67.	Kecamatan Gondang	1.480.000,00	23.708.800,00	-	10.623.560,00	1.370.000,00	-	34.442.360,00
68.	Kecamatan Sekar	130.000,00	47.021.500,00	-	11.902.350,00	-	-	59.053.850,00
69.	Kecamatan Gayam	260.000,00	37.144.400,00	4.702.000,00	7.395.100,00	265.000,00	-	49.236.500,00
70.	Inspektorat	5.219.500,00	129.474.866,00	-	13.414.050,00	2.734.000,00	-	145.374.416,00
71.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.051.700,00	138.203.636,00	-	139.965.700,00	2.609.500,00	-	276.611.536,00
72.	BPKAD	5.165.000,00	229.366.078,00	-	482.491.725,00	5.329.000,00	-	711.693.803,00
73.	Badan Pendapatan Daerah	88.082.500,00	407.344.399,00	-	299.379.400,00	103.399.500,00	-	691.406.799,00
74.	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	982.500,00	150.467.800,00	5.513.800,00	105.164.750,00	1.231.000,00	-	260.897.850,00
JUMLAH		46.095.980.106,25	28.410.402.350,30	110.015.001.728,03	13.188.363.495,00	33.555.676.348,05	88.612.240,56	164.242.683.572,09

Beban Persediaan bertambah senilai Rp88.612.240,56 berasal dari koreksi atas obat dan BMHP kedaluarsa RSUD Padangan dan berkurang senilai Rp108.824.548,27 berasal dari koreksi atas utang obat RSUD Sosodoro Djatikoesoemo.

5.4.2.3 Beban Jasa-LO

	<u>LO</u>	<u>LRA</u>	<u>Selisih</u>
Beban/Belanja Jasa	458.421.246.547,97	472.748.962.827,92	14.327.716.279,95

Nilai beban jasa dalam laporan operasional per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp458.421.246.547,97, sedangkan nilai realisasi belanja jasa dalam laporan realisasi anggaran per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp472.748.962.827,92. Selisih antara beban jasa - LO dan belanja jasa - LRA adalah sebesar Rp14.327.716.279,95. Selisih tersebut dapat dijelaskan dalam perhitungan di bawah ini:

Belanja Jasa Tahun 2019	Rp	472.748.962.827,92
Penambahan		
a. Utang Jasa Pelayanan Tahun 2019	Rp	18.275.468.345,60
b. Utang Usaha Tahun 2019	Rp	11.778.841.171,80
c. Beban Sewa Tahun 2019	Rp	83.125.000,00
d. Koreksi Utang Jasa Pelayanan Tahun 2019	Rp	52.013.475,02
e. Koreksi Utang Usaha Tahun 2019	Rp	3.500,00
Jumlah Penambahan	Rp	30.189.451.492,42
Pengurangan		
a. Utang Jasa Pelayanan Tahun 2018	Rp	23.455.581.333,02
b. Utang Usaha Tahun 2018	Rp	19.479.563.801,08
c. Koreksi Persediaan Tahun 2019	Rp	1.383.202.500,00
d. Koreksi asuransi dibayar dimuka Tahun 2019	Rp	89.995.590,00
e. Koreksi Utang Usaha Tahun 2019	Rp	108.824.548,27
Jumlah Pengurangan	Rp	44.517.167.772,37
Beban Jasa - LO	Rp	458.421.246.547,97

Beban Jasa bertambah senilai Rp52.016.975,02 berasal dari koreksi atas utang Jasa Pelayanan senilai Rp52.013.475,02 dan utang telepon senilai Rp3.500,00 RSUD Sosodoro Djatikoesoemo dan berkurang sebesar Rp108.824.548,27 berasal dari koreksi utang pembelian obat pada RSUD Sosodoro Djatikusumo serta berkurang senilai Rp89.995.590,00 berasal dari koreksi atas penyelenggaraan Dukungan Pembiayaan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) bagi petani oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang dilaksanakan antara Dinas Pertanian dengan PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Kantor Cabang Surabaya Nomor : PKS 575/539-1/x/2019 melalui SP2D Nomor 7232/LS-BJ/2019 Tanggal 3 Desember 2019 senilai Rp119.994.120,00. Pelaksanaan perjanjian berlaku satu tahun dihitung sejak tanggal 4 Oktober 2019 dan berakhir pada tanggal 4 Oktober 2020.

Tabel 109. Beban Jasa - LO

No	SKPD	Utang Jaspel 2018 (Rp)	Utang Usaha 2018 (Rp)	Belanja Jasa 2019 (Rp)	Utang Jaspel 2019 (Rp)	Utang Usaha 2019 (Rp)	Koreksi (Rp)	Beban Sewa (Rp)	Beban Jasa 2019 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan	-	56.904.177,00	100.832.739.064,14	-	61.670.178,00	-	-	100.837.505.065,14
2.	Dinas Kesehatan	7.566.246.197,02	291.454.073,00	137.048.615.185,00	2.965.137.152,62	1.521.432.588,88	-	-	133.677.484.656,48
3.	RSUD DR. R. Sosodoro Jatikusumo	12.800.086.007,00	8.925.792.048,00	16.380.042.254,00	13.065.769.738,98	4.596.530.058,27	52.016.975,02	-	12.259.656.423,00
4.	RSUD Sumberrejo	1.631.020.354,00	30.072.900,00	12.481.490.058,00	1.886.629.854,00	55.318.640,00	-	-	12.762.345.298,00
5.	RSUD Padangan	1.458.228.775,00	188.815.193,00	15.130.962.899,00	357.931.600,00	239.017.481,00	-	-	14.080.868.012,00
6.	Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang	-	-	11.449.177.822,00	-	2.797.822.491,65	-	-	14.247.000.313,65
7.	Dinas PU Sumber Daya Air	-	8.795.255,00	3.495.456.465,00	-	-	-	-	3.486.661.210,00
8.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	-	9.715.069.353,08	25.573.518.540,00	-	2.387.210.880,00	-	-	18.245.660.066,92
9.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	2.932.531,00	1.477.125.071,00	-	48.000,00	-	-	1.474.240.540,00
10.	Satpol PP	-	-	7.657.292.103,00	-	-	-	-	7.657.292.103,00
11.	BPBD	-	5.821.902,00	2.705.741.782,00	-	5.099.245,00	-	-	2.705.019.125,00
12.	Dinas Pemadam Kebakaran	-	-	4.673.211.052,00	-	-	-	-	4.673.211.052,00
13.	Dinas Sosial	-	655.450,00	5.676.620.628,00	-	657.100,00	-	83.125.000,00	5.759.747.278,00
14.	Dinas Pemberdayaan Perempuan,	-	-	11.673.479.044,00	-	-	-	-	11.673.479.044,00

No	SKPD	Utang Jaspel 2018 (Rp)	Utang Usaha 2018 (Rp)	Belanja Jasa 2019 (Rp)	Utang Jaspel 2019 (Rp)	Utang Usaha 2019 (Rp)	Koreksi (Rp)	Beban Sewa (Rp)	Beban Jasa 2019 (Rp)
	Perlindungan Anak dan KB								
15.	Dinas Ketahanan Pangan	-	195.000,00	643.311.700,00	-	195.000,00	-	-	643.311.700,00
16.	Dinas Lingkungan Hidup	-	352.700,00	6.172.515.822,00	-	615.400,00	-	-	6.172.778.522,00
17.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	10.515.941,00	2.882.227.814,00	-	12.166.537,00	(1.383.202.500,00)	-	1.500.675.910,00
18.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	1.587.800,00	2.365.953.308,00	-	400.600,00	-	-	2.364.766.108,00
19.	Dinas Perhubungan	-	-	7.233.484.480,00	-	-	-	-	7.233.484.480,00
20.	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	12.615.572,00	3.716.156.991,00	-	19.895.670,00	-	-	3.723.437.089,00
21.	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	-	3.487.784,00	1.148.504.241,00	-	4.176.303,00	-	-	1.149.192.760,00
22.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	1.199.110.670,00	-	-	-	-	1.199.110.670,00
23.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	-	17.425.333,00	6.130.985.902,00	-	19.298.879,00	-	-	6.132.859.448,00
24.	Dinas Kebudayaan dan	-	1.535.000,00	11.141.102.872,78	-	1.235.000,00	-	-	11.140.802.872,78

No	SKPD	Utang Jaspel 2018 (Rp)	Utang Usaha 2018 (Rp)	Belanja Jasa 2019 (Rp)	Utang Jaspel 2019 (Rp)	Utang Usaha 2019 (Rp)	Koreksi (Rp)	Beban Sewa (Rp)	Beban Jasa 2019 (Rp)
	Pariwisata								
25.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	-	541.875.338,00	-	-	-	-	541.875.338,00
26.	Dinas Peternakan dan Perikanan	-	2.042.450,00	3.538.373.029,00	-	10.458.122,00	-	-	3.546.788.701,00
27.	Dinas Pertanian	-	7.883.382,00	3.402.127.352,00	-	7.798.855,00	(89.995.590,00)	-	3.312.047.235,00
28.	Dinas Perdagangan	-	155.179.152,00	3.305.203.314,00	-	8.729.583,00	-	-	3.158.753.745,00
29.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	-	11.502.346,00	5.159.612.153,00	-	11.369.136,00	-	-	5.159.478.943,00
30.	Bagian Organisasi dan Tata Laksana	-	-	483.048.000,00	-	-	-	-	483.048.000,00
31.	Bagian Pemerintahan	-	-	354.876.100,00	-	-	-	-	354.876.100,00
32.	Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	396.299.000,00	-	-	-	-	396.299.000,00
33.	Bagian Sumberdaya Alam	-	-	727.793.600,00	-	-	-	-	727.793.600,00
34.	Bagian Perlengkapan	-	-	1.499.392.220,00	-	-	-	-	1.499.392.220,00
35.	Bagian Pembangunan	-	-	452.087.600,00	-	-	-	-	452.087.600,00
36.	Bagian Perekonomian	-	-	338.300.200,00	-	-	-	-	338.300.200,00
37.	Bagian Umum	-	1.329.050,00	8.218.895.592,00	-	-	-	-	8.217.566.542,00

No	SKPD	Utang Jaspel 2018 (Rp)	Utang Usaha 2018 (Rp)	Belanja Jasa 2019 (Rp)	Utang Jaspel 2019 (Rp)	Utang Usaha 2019 (Rp)	Koreksi (Rp)	Beban Sewa (Rp)	Beban Jasa 2019 (Rp)
	dan Keuangan								
38.	Bagian Humas dan Protokol	-	-	2.907.361.014,00	-	-	-	-	2.907.361.014,00
39.	Bagian Kesejahteraan Rakyat	-	-	9.405.390.500,00	-	-	-	-	9.405.390.500,00
40.	Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	296.237.500,00	-	-	-	-	296.237.500,00
41.	Sekretariat DPRD	-	6.875.714,00	4.164.149.612,00	-	54.550,00	-	-	4.157.328.448,00
42.	Kec Bojonegoro	-	-	4.111.679.655,00	-	-	-	-	4.111.679.655,00
43.	Kec Kapas	-	-	333.696.000,00	-	-	-	-	333.696.000,00
44.	Kec Balen	-	-	292.457.800,00	-	1.151.000,00	-	-	293.608.800,00
45.	Kec Sumberrejo	-	2.218.870,00	262.316.920,00	-	-	-	-	260.098.050,00
46.	Kec Kanor	-	-	286.814.554,00	-	-	-	-	286.814.554,00
47.	Kec Baureno	-	-	368.913.872,00	-	-	-	-	368.913.872,00
48.	Kec Sugihwaras	-	82.500,00	232.403.400,00	-	200.579,00	-	-	232.521.479,00
49.	Kec Kepohbaru	-	-	305.147.848,00	-	-	-	-	305.147.848,00
50.	Kec Kedungadem	-	-	330.327.717,00	-	-	-	-	330.327.717,00
51.	Kec Sukosewu	-	-	270.287.064,00	-	-	-	-	270.287.064,00
52.	Kec Trucuk	-	-	280.412.400,00	-	-	-	-	280.412.400,00
53.	Kec Malo	-	501.600,00	369.732.154,00	-	459.800,00	-	-	369.690.354,00
54.	Kec Kalitidu	-	-	301.994.800,00	-	-	-	-	301.994.800,00
55.	Kec Dander	-	4.820.200,00	246.933.551,00	-	-	-	-	242.113.351,00
56.	Kec Padangan	-	455.750,00	228.418.250,00	-	467.250,00	-	-	228.429.750,00
57.	Kec Purwosari	-	-	249.047.920,00	-	-	-	-	249.047.920,00

No	SKPD	Utang Jaspel 2018 (Rp)	Utang Usaha 2018 (Rp)	Belanja Jasa 2019 (Rp)	Utang Jaspel 2019 (Rp)	Utang Usaha 2019 (Rp)	Koreksi (Rp)	Beban Sewa (Rp)	Beban Jasa 2019 (Rp)
58.	Kec Kasiman	-	846.955,00	279.251.184,00	-	1.166.866,00	-	-	279.571.095,00
59.	Kec Kedewan	-	-	307.711.550,00	-	-	-	-	307.711.550,00
60.	Kec Ngasem	-	-	456.636.500,00	-	-	-	-	456.636.500,00
61.	Kec Ngambon	-	1.710.348,00	243.215.259,00	-	-	-	-	241.504.911,00
62.	Kec Tambakrejo	-	-	279.488.660,00	-	-	-	-	279.488.660,00
63.	Kec Ngraho	-	1.902.888,00	237.223.740,00	-	3.167.756,00	-	-	238.488.608,00
64.	Kec Margomulyo	-	-	216.313.645,00	-	1.616.820,00	-	-	217.930.465,00
65.	Kec Temayang	-	189.724,00	294.272.300,00	-	450.000,00	-	-	294.532.576,00
66.	Kec Bubulan	-	-	242.039.696,00	-	-	-	-	242.039.696,00
67.	Kec Gondang	-	-	256.546.872,00	-	-	-	-	256.546.872,00
68.	Kec Sekar	-	-	194.231.250,00	-	-	-	-	194.231.250,00
69.	Kec Gayam	-	-	335.472.350,00	-	-	-	-	335.472.350,00
70.	Inspektorat	-	6.939.860,00	755.266.238,00	-	8.497.403,00	-	-	756.823.781,00
71.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	4.327.815.160,00	-	-	-	-	4.327.815.160,00
72.	BPKAD	-	815.000,00	5.127.066.715,00	-	223.400,00	-	-	5.126.475.115,00
73.	Badan Pendapatan Daerah	-	-	2.027.376.868,00	-	-	-	-	2.027.376.868,00
74.	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	-	240.000,00	4.618.603.044,00	-	240.000,00	-	-	4.618.603.044,00
	JUMLAH	23.455.581.333,02	19.479.563.801,08	472.748.962.827,92	18.275.468.345,60	11.670.016.623,53	(1.421.181.114,98)	83.125.000,00	458.421.246.547,97

5.4.2.4 Beban Pemeliharaan – LO

	LO	LRA	Selisih
Beban/Belanja Pemeliharaan	32.503.004.750,38	26.303.315.336,38	6.199.689.414,00

Beban pemeliharaan dalam laporan operasional per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp32.503.004.750,38, sedangkan belanja pemeliharaan dalam laporan realisasi anggaran per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp26.303.315.336,38. Selisih antara beban pemeliharaan - LO dan belanja pemeliharaan - LRA adalah sebesar Rp6.199.689.414,00. Selisih tersebut terjadi karena jenis belanja pada BLUD di LRA tidak diuraikan per rincian obyek belanja, sehingga belanja pemeliharaan pada BLUD termasuk dalam belanja barang dan jasa BLUD.

Tabel 110. Beban Pemeliharaan - LO

No	SKPD	Belanja Pemeliharaan (Rp)	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Dinas Pendidikan	1.599.852.226,00	112.964.541,00	1.712.816.767,00
2.	Dinas Kesehatan	1.995.038.176,00	427.590.339,00	2.422.628.515,00
3.	RSUD DR. R. Sosodoro Jatikusumo	4.546.434.839,00	-	4.546.434.839,00
4.	RSUD Sumberrejo	565.806.023,00	-	565.806.023,00
5.	RSUD Padangan	1.166.638.552,00	-	1.166.638.552,00
6.	Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang	337.250.000,00	216.974.900,00	554.224.900,00
7.	Dinas PU Sumber Daya Air	43.529.000,00	909.635.000,00	953.164.000,00
8.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	3.045.290.000,00	731.305.160,00	3.776.595.160,00
9.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	253.338.000,00	60.978.000,00	314.316.000,00
10.	Satpol PP	3.350.000,00	149.337.260,00	152.687.260,00
11.	BPBD	190.470.234,00	219.764.000,00	410.234.234,00
12.	Dinas Pemadam Kebakaran	376.151.250,00	715.534.100,00	1.091.685.350,00
13.	Dinas Sosial	161.838.000,00	44.873.700,00	206.711.700,00
14.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB	135.018.543,00	164.509.200,00	299.527.743,00
15.	Dinas Ketahanan Pangan	4.928.800,00	24.411.550,00	29.340.350,00
16.	Dinas Lingkungan Hidup	793.650.575,00	677.569.250,00	1.471.219.825,00
17.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	71.133.000,00	45.408.545,00	116.541.545,00
18.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	63.876.500,00	63.876.500,00
19.	Dinas Perhubungan	4.643.639.001,38	236.754.300,00	4.880.393.301,38
20.	Dinas Komunikasi dan Informatika	156.955.600,00	36.921.600,00	193.877.200,00
21.	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	-	33.134.100,00	33.134.100,00
22.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	56.043.800,00	56.043.800,00
23.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	6.000.000,00	20.826.200,00	26.826.200,00
24.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	949.949.818,00	39.978.800,00	989.928.618,00

No	SKPD	Belanja Pemeliharaan (Rp)	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor (Rp)	Jumlah (Rp)
25.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	34.656.250,00	33.593.300,00	68.249.550,00
26.	Dinas Peternakan dan Perikanan	109.485.033,00	65.599.700,00	175.084.733,00
27.	Dinas Pertanian	120.620.500,00	44.584.264,00	165.204.764,00
28.	Dinas Perdagangan	264.383.533,00	36.286.600,00	300.670.133,00
29.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	329.710.200,00	51.063.450,00	380.773.650,00
30.	Bagian Organisasi dan Tata Laksana	-	11.405.000,00	11.405.000,00
31.	Bagian Pemerintahan	-	39.586.150,00	39.586.150,00
32.	Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan	4.760.000,00	19.673.000,00	24.433.000,00
33.	Bagian Sumberdaya Alam	13.954.000,00	19.560.400,00	33.514.400,00
34.	Bagian Perlengkapan	-	40.532.500,00	40.532.500,00
35.	Bagian Pembangunan	-	25.206.800,00	25.206.800,00
36.	Bagian Perekonomian	-	6.500.000,00	6.500.000,00
37.	Bagian Umum dan Keuangan	1.567.028.216,00	657.771.100,00	2.224.799.316,00
38.	Bagian Humas dan Protokol	3.850.000,00	40.664.900,00	44.514.900,00
39.	Bagian Kesejahteraan Rakyat	-	6.925.000,00	6.925.000,00
40.	Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	-	16.066.070,00	16.066.070,00
41.	Sekretariat DPRD	168.735.000,00	617.751.250,00	786.486.250,00
42.	Kecamatan Bojonegoro	693.080.763,00	29.461.208,00	722.541.971,00
43.	Kecamatan Kapas	8.000.000,00	20.756.000,00	28.756.000,00
44.	Kecamatan Balen	-	11.354.000,00	11.354.000,00
45.	Kecamatan Sumberrejo	6.575.000,00	6.670.300,00	13.245.300,00
46.	Kecamatan Kanor	43.621.500,00	22.120.500,00	65.742.000,00
47.	Kecamatan Baureno	-	5.024.000,00	5.024.000,00
48.	Kecamatan Sugihwaras	10.550.000,00	14.066.500,00	24.616.500,00
49.	Kecamatan Kepohbaru	10.997.740,00	26.626.000,00	37.623.740,00
50.	Kecamatan Kedungadem	-	7.975.000,00	7.975.000,00
51.	Kecamatan Sukosewu	6.500.000,00	38.206.500,00	44.706.500,00
52.	Kecamatan Trucuk	3.159.000,00	19.109.500,00	22.268.500,00
53.	Kecamatan Malo	-	15.973.000,00	15.973.000,00
54.	Kecamatan Kalitidu	6.750.000,00	28.427.206,00	35.177.206,00
55.	Kecamatan Dander	-	11.285.000,00	11.285.000,00
56.	Kecamatan Padangan	-	10.524.500,00	10.524.500,00
57.	Kecamatan Purwosari	22.500.000,00	15.320.500,00	37.820.500,00
58.	Kecamatan Kasiman	23.000.000,00	24.833.000,00	47.833.000,00
59.	Kecamatan Kedewan	14.740.000,00	14.462.350,00	29.202.350,00
60.	Kecamatan Ngasem	-	11.154.500,00	11.154.500,00
61.	Kecamatan Ngambon	300.000,00	18.232.000,00	18.532.000,00
62.	Kecamatan Tambakrejo	7.736.000,00	15.128.500,00	22.864.500,00
63.	Kecamatan Ngraho	-	17.407.000,00	17.407.000,00
64.	Kecamatan Margomulyo	5.295.530,00	23.340.500,00	28.636.030,00
65.	Kecamatan Temayang	15.443.100,00	30.059.500,00	45.502.600,00

No	SKPD	Belanja Pemeliharaan (Rp)	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor (Rp)	Jumlah (Rp)
66.	Kecamatan Bubulan	27.130.000,00	11.592.500,00	38.722.500,00
67.	Kecamatan Gondang	1.584.000,00	34.592.360,00	36.176.360,00
68.	Kecamatan Sekar	18.350.000,00	25.682.900,00	44.032.900,00
69.	Kecamatan Gayam	-	12.153.100,00	12.153.100,00
70.	Inspektorat	30.415.200,00	82.537.257,00	112.952.457,00
71.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	25.365.400,00	25.365.400,00
72.	BPKAD	45.145.900,00	201.732.700,00	246.878.600,00
73.	Badan Pendapatan Daerah	187.829.000,00	38.468.600,00	226.297.600,00
74.	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	24.145.000,00	35.910.438,00	60.055.438,00
	JUMLAH	24.876.292.102,38	7.626.712.648,00	32.503.004.750,38

5.4.2.5 Beban Perjalanan Dinas - LO

	<u>LO</u>	<u>LRA</u>	<u>Selisih</u>
Beban/Belanja Perjalanan Dinas	70.629.433.500,00	69.689.684.894,00	939.748.606,00

Beban perjalanan dinas dalam laporan operasional per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp70.629.433.500,00, sedangkan belanja pemeliharaan dalam laporan realisasi anggaran per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp69.689.684.894,00. Selisih antara beban perjalanan dinas - LO dan belanja perjalanan dinas - LRA adalah sebesar Rp939.748.606,00. Selisih tersebut terjadi karena jenis belanja pada BLUD di LRA tidak diuraikan per rincian obyek belanja, sehingga belanja perjalanan dinas pada BLUD termasuk dalam belanja barang dan jasa BLUD.

Tabel 111. Beban Perjalanan Dinas - LO

NO	SKPD	Belanja Perjalanan Dinas (Rp)
1.	Dinas Pendidikan	503.288.166,00
2.	Dinas Kesehatan	15.005.547.019,00
3.	RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikusumo	547.676.816,00
4.	RSUD Sumberrejo	174.304.790,00
5.	RSUD Padangan	217.767.000,00
6.	Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang	815.405.070,00
7.	Dinas PU Sumber Daya Air	717.625.652,00
8.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	352.752.883,00
9.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	477.861.115,00
10.	Satpol PP	1.090.352.111,00
11.	BPBD	383.052.268,00
12.	Dinas Pemadam Kebakaran	702.858.903,00
13.	Dinas Sosial	423.139.356,00
14.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB	828.736.113,00
15.	Dinas Ketahanan Pangan	368.454.296,00
16.	Dinas Lingkungan Hidup	548.070.161,00
17.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	824.345.888,00
18.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.044.620.587,00

NO	SKPD	Belanja Perjalanan Dinas (Rp)
19.	Dinas Perhubungan	699.610.815,00
20.	Dinas Komunikasi dan Informatika	713.872.362,00
21.	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	402.409.977,00
22.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	391.615.902,00
23.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	231.817.182,00
24.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	857.666.029,00
25.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	312.159.722,00
26.	Dinas Peternakan dan Perikanan	974.811.221,00
27.	Dinas Pertanian	701.117.464,00
28.	Dinas Perdagangan	702.574.715,00
29.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	1.138.246.753,00
30.	Bagian Organisasi dan Tata Laksana	309.049.663,00
31.	Bagian Pemerintahan	396.908.892,00
32.	Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan	288.957.180,00
33.	Bagian Sumberdaya Alam	444.199.870,00
34.	Bagian Perlengkapan	244.879.989,00
35.	Bagian Pembangunan	241.508.840,00
36.	Bagian Perekonomian	154.004.791,00
37.	Bagian Umum dan Keuangan	1.243.407.407,00
38.	Bagian Humas dan Protokol	3.558.865.064,00
39.	Bagian Kesejahteraan Rakyat	329.960.000,00
40.	Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	403.214.952,00
41.	Sekretariat DPRD	20.954.740.775,00
42.	Kecamatan Bojonegoro	28.681.730,00
43.	Kecamatan Kapas	194.613.700,00
44.	Kecamatan Balen	265.595.000,00
45.	Kecamatan Sumberrejo	220.935.000,00
46.	Kecamatan Kanor	133.070.000,00
47.	Kecamatan Baureno	223.823.000,00
48.	Kecamatan Sugihwaras	151.129.600,00
49.	Kecamatan Kepohbaru	185.070.000,00
50.	Kecamatan Kedungadem	197.243.700,00
51.	Kecamatan Sukosewu	212.020.000,00
52.	Kecamatan Trucuk	112.190.800,00
53.	Kecamatan Malo	185.867.500,00
54.	Kecamatan Kalitidu	201.725.000,00
55.	Kecamatan Dander	170.150.000,00
56.	Kecamatan Padangan	127.695.000,00
57.	Kecamatan Purwosari	181.770.000,00
58.	Kecamatan Kasiman	136.851.000,00
59.	Kecamatan Kedewan	130.400.000,00
60.	Kecamatan Ngasem	141.195.000,00
61.	Kecamatan Ngambon	120.229.000,00
62.	Kecamatan Tambakrejo	196.979.000,00
63.	Kecamatan Ngraho	131.545.000,00
64.	Kecamatan Margomulyo	176.925.500,00
65.	Kecamatan Temayang	140.205.000,00
66.	Kecamatan Bubulan	133.335.000,00
67.	Kecamatan Gondang	135.295.000,00

NO	SKPD	Belanja Perjalanan Dinas (Rp)
68.	Kecamatan Sekar	164.086.000,00
69.	Kecamatan Gayam	196.960.000,00
70.	Inspektorat	691.539.335,00
71.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.241.226.542,00
72.	BPKAD	1.310.174.285,00
73.	Badan Pendapatan Daerah	1.269.119.205,00
74.	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	800.330.844,00
	JUMLAH	70.629.433.500,00

5.4.2.6 Beban Subsidi –LO

	LO	LRA	Selisih
Beban/Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00

Nilai Beban Subsidi – LO sama dengan realisasi belanja subsidi LRA yaitu Rp0,00. Pada tahun ini tidak ada realisasi belanja subsidi.

5.4.2.7 Beban Hibah – LO

	LO	LRA	Selisih
Beban/Belanja Hibah	245.406.205.604,42	162.422.857.533,00	82.983.348.071,42

Nilai beban Hibah dalam laporan operasional per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp245.406.205.604,42, sedangkan nilai realisasi belanja Hibah dalam laporan realisasi anggaran per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp162.422.857.533,00. Selisih antara beban Hibah-LO dan belanja Hibah-LRA adalah sebesar Rp82.983.348.071,42. Selisih tersebut dapat dijelaskan dalam perhitungan di bawah ini:

Belanja Hibah Tahun 2019	Rp	162.422.857.533,00
Penambahan		
Belanja Hibah Barang Tahun 2019	Rp	82.983.348.071,42
Jumlah Penambahan	Rp	82.983.348.071,42
Pengurangan		
Hibah yang belum diserahkan pada pihak ketiga	Rp	-
Jumlah Pengurangan	Rp	-
Beban Hibah -LO	Rp	245.406.205.604,42

Tabel 112. Beban Hibah - LO

No	SKPD	Belanja Hibah (Rp)	Koreksi (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Dinas Pendidikan	1.356.227.125,00	-	1.356.227.125,00
2.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	64.698.547.593,42	-	64.698.547.593,42
3.	Dinas Lingkungan Hidup	693.374.000,00	-	693.374.000,00
4.	Dinas Peternakan dan Perikanan	138.820.000,00	-	138.820.000,00
5.	Dinas Pertanian	12.046.263.953,00	-	12.046.263.953,00
6.	Bagian Perlengkapan	4.050.115.400,00	-	4.050.115.400,00

No	SKPD	Belanja Hibah (Rp)	Koreksi (Rp)	Jumlah (Rp)
7.	PPKD	162.422.857.533,00	-	162.422.857.533,00
	JUMLAH	245.406.205.604,42	-	245.406.205.604,42

5.4.2.8 Beban Bantuan Sosial – LO

	LO	LRA	Selisih
Beban/Belanja Bantuan Sosial	64.475.421.718,32	18.113.000.000,00	46.362.421.718,32

Nilai beban Bantuan Sosial dalam laporan operasional per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp64.475.421.718,32, sedangkan nilai realisasi belanja Bantuan Sosial dalam laporan realisasi anggaran per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp18.113.000.000,00. Selisih antara beban Bantuan Sosial - LO dan belanja Bantuan Sosial LRA adalah sebesar Rp46.362.421.718,32. Selisih tersebut dapat dijelaskan dalam perhitungan di bawah ini:

Belanja Bansos Tahun 2019	Rp 18.113.000.000,00
Penambahan	
Belanja Bansos Barang	Rp 46.362.421.718,32
Jumlah Penambahan	Rp 46.362.421.718,32
Pengurangan	
Bansos Yang Belum Diserahkan Pada Pihak Ketiga	-
Jumlah Pengurangan	-
Beban Bantuan Sosial - LO	Rp 64.475.421.718,32

Tabel 113. Beban Bantuan Sosial - LO

No	SKPD	Belanja Bantuan Sosial (Rp)	Koreksi (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	45.029.377.108,32	-	45.029.377.108,32
2.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	475.169.250,00	-	475.169.250,00
3.	Dinas Sosial	708.148.000,00	-	708.148.000,00
4.	Dinas Ketahanan Pangan	149.727.360,00	-	149.727.360,00
5.	PPKD	18.113.000.000,00	-	18.113.000.000,00
	JUMLAH	64.475.421.718,32	-	64.475.421.718,32

5.4.2.9 Beban Penyusutan - LO

Beban penyusutan-LO merupakan penurunan manfaat ekonomis dari suatu aset tetap selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Metode yang digunakan adalah metode garis lurus. Untuk tanah, konstruksi dalam pengerjaan, buku-buku perpustakaan, hewan ternak dan tanaman tidak disusutkan. Beban penyusutan hanya diakui dalam laporan operasional. Besarnya beban penyusutan selama tahun 2019 adalah sebesar Rp387.541.947.446,56.

Bertambah senilai Rp3.480.272.518,00 koreksi atas aset PD Pasar yang diserahterimakan. Berkurang senilai Rp738.037.060,00 berasal dari koreksi kurang volume pembangunan Pasar Ngasem pada Dinas Perdagangan senilai Rp229.720,00 dan senilai Rp737.807.340,00 yang berasal dari koreksi kurang

volume pemeriksaan BPK PDDT belanja Tahun 2019 serta koreksi dampak dari perubahan pengaturan Intra ke Ekstrakomptabel Rp1.128.541.657,00.

Tabel 114. Beban Penyusutan– LO

No	Nama SKPD	Akumulasi Penyusutan Audited 2018	Koreksi Ekuitas	Akumulasi Penyusutan 2018 Terkoreksi	Beban Penyusutan 2019	Akumulasi Penyusutan 2019
1.	Dinas Pendidikan	289.742.663.935,70	27.917.188.837,57	261.825.475.098,13	28.182.376.913,00	290.007.852.011,13
2.	Dinas Kesehatan	93.572.102.884,88	18.437.630.642,38	75.134.472.242,50	17.081.651.942,00	92.216.124.184,50
3.	RSUD Sosodoro Djatikusumo	177.660.496.452,10	37.508.442.828,10	140.152.053.624,00	38.391.841.170,00	178.543.894.794,00
4.	RSUD Sumberrejo	40.729.719.262,39	8.381.567.332,39	32.348.151.930,00	13.311.018.584,00	45.659.170.514,00
5.	RSUD Padangan	51.392.441.001,29	11.478.861.926,29	39.913.579.075,00	17.736.782.828,00	57.650.361.903,00
6.	Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang	1.220.535.589.019,10	191.287.449.539,81	1.029.248.139.479,29	194.291.082.408,56	1.223.539.221.887,85
7.	Dinas PU Sumber Daya Air	40.383.751.161,00	5.975.442.543,00	34.408.308.618,00	7.779.816.989,00	42.188.125.607,00
8.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	119.662.133.185,63	18.797.175.456,63	100.864.957.729,00	19.708.268.344,00	120.573.226.073,00
9.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.466.818.529,17	65.210.145,17	2.401.608.384,00	115.066.520,00	2.516.674.904,00
10.	Satpol PP	2.915.823.940,00	38.493.370,00	2.877.330.570,00	708.314.363,00	3.585.644.933,00
11.	BPBD	5.240.158.461,52	560.303.342,52	4.679.855.119,00	1.004.387.059,00	5.684.242.178,00
12.	Dinas Pemadam Kebakaran	14.844.201.480,75	1.511.725.295,75	13.332.476.185,00	4.365.407.074,00	17.697.883.259,00
13.	Dinas Sosial	2.194.284.904,21	274.752.022,21	1.919.532.882,00	206.753.349,00	2.126.286.231,00
14.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB	8.389.578.811,28	611.009.435,28	7.778.569.376,00	1.366.933.291,00	9.145.502.667,00
15.	Dinas Ketahanan Pangan	1.054.283.961,00	61.582.182,00	992.701.779,00	97.252.260,00	1.089.954.039,00
16.	Dinas Lingkungan Hidup	14.316.182.096,84	1.535.032.456,84	12.781.149.640,00	2.511.540.551,00	15.292.690.191,00
17.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.502.776.726,90	624.092.852,90	4.878.683.874,00	669.005.206,00	5.547.689.080,00
18.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.290.516.785,93	210.468.696,93	2.080.048.089,00	191.078.182,00	2.271.126.271,00
19.	Dinas Perhubungan	16.717.442.110,49	2.818.233.187,49	13.899.208.923,00	2.138.075.563,00	16.037.284.486,00
20.	Dinas Komunikasi dan Informatika	10.769.858.237,80	1.093.947.887,80	9.675.910.350,00	2.329.474.794,00	12.005.385.144,00
21.	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	1.349.374.942,48	72.645.601,48	1.276.729.341,00	140.929.040,00	1.417.658.381,00
22.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.565.966.832,00	(129.406.758,00)	1.695.373.590,00	945.803.644,00	2.641.177.234,00
23.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	5.882.229.766,42	977.478.287,42	4.904.751.479,00	1.319.231.994,00	6.223.983.473,00
24.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	4.656.928.539,33	1.062.810.801,33	3.594.117.738,00	1.087.970.462,00	4.682.088.200,00
25.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.744.327.391,68	352.705.572,68	1.391.621.819,00	158.283.326,00	1.549.905.145,00
26.	Dinas Peternakan dan Perikanan	6.772.271.950,07	622.226.933,07	6.150.045.017,00	893.330.351,00	7.043.375.368,00
27.	Dinas Pertanian	38.390.116.871,73	(6.782.927.548,27)	45.173.044.420,00	4.589.582.848,00	49.762.627.268,00
28.	Dinas Perdagangan	10.224.887.445,70	1.921.800.781,70	8.303.086.664,00	5.728.458.783,00	14.031.545.447,00
29.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	2.429.695.449,91	317.858.591,91	2.111.836.858,00	468.891.973,00	2.580.728.831,00
30.	Bagian Organisasi dan Tata Laksana	624.890.170,00	50.348.321,00	574.541.849,00	88.212.619,00	662.754.468,00
31.	Bagian Pemerintahan	478.712.022,00	34.743.321,00	443.968.701,00	249.845.108,00	693.813.809,00
32.	Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan	421.983.310,00	26.707.418,00	395.275.892,00	63.620.373,00	458.896.265,00

No	Nama SKPD	Akumulasi Penyusutan Audited 2018	Koreksi Ekuitas	Akumulasi Penyusutan 2018 Terkoreksi	Beban Penyusutan 2019	Akumulasi Penyusutan 2019
33.	Bagian Sumberdaya Alam	756.733.940,00	106.877.055,00	649.856.885,00	145.610.318,00	795.467.203,00
34.	Bagian Perlengkapan	7.265.605.665,30	3.090.522.336,30	4.175.083.329,00	2.431.387.738,00	6.606.471.067,00
35.	Bagian Pembangunan	425.085.805,00	25.869.287,00	399.216.518,00	65.144.011,00	464.360.529,00
36.	Bagian Perekonomian	468.136.380,00	31.568.230,00	436.568.150,00	83.972.934,00	520.541.084,00
37.	Bagian Umum dan Keuangan	32.108.579.290,37	5.212.588.873,37	26.895.990.417,00	6.051.743.909,00	32.947.734.326,00
38.	Bagian Humas dan Protokol	1.391.419.785,20	93.088.410,20	1.298.331.375,00	520.448.194,00	1.818.779.569,00
39.	Bagian Kesejahteraan Rakyat	475.950.410,00	32.012.294,00	443.938.116,00	87.689.310,00	531.627.426,00
40.	Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	194.865.380,00	99.013.065,00	95.852.315,00	168.018.347,00	263.870.662,00
41.	Sekretariat DPRD	6.321.138.657,97	407.311.445,97	5.913.827.212,00	467.246.861,00	6.381.074.073,00
42.	Kec Bojonegoro	3.812.551.053,50	505.924.519,50	3.306.626.534,00	609.650.679,00	3.916.277.213,00
43.	Kec Kapas	1.705.072.182,00	87.925.623,00	1.617.146.559,00	215.437.500,00	1.832.584.059,00
44.	Kec Balen	1.737.962.460,00	240.359.913,00	1.497.602.547,00	186.567.052,00	1.684.169.599,00
45.	Kec Sumberrejo	1.775.745.022,07	113.371.827,07	1.662.373.195,00	208.710.040,00	1.871.083.235,00
46.	Kec Kanor	1.731.186.870,40	60.111.040,40	1.671.075.830,00	175.435.050,00	1.846.510.880,00
47.	Kec Baureno	1.824.386.241,89	339.337.520,89	1.485.048.721,00	192.499.346,00	1.677.548.067,00
48.	Kec Sugihwaras	1.421.433.005,52	84.739.575,52	1.336.693.430,00	192.232.094,00	1.528.925.524,00
49.	Kec Kepohbaru	1.791.382.204,40	133.891.790,40	1.657.490.414,00	222.996.189,00	1.880.486.603,00
50.	Kec Kedungadem	1.749.911.560,00	99.841.089,00	1.650.070.471,00	217.850.806,00	1.867.921.277,00
51.	Kec Sukosewu	1.445.680.856,60	119.971.981,60	1.325.708.875,00	222.349.731,00	1.548.058.606,00
52.	Kec Trucuk	1.203.460.649,80	158.826.188,80	1.044.634.461,00	144.340.830,00	1.188.975.291,00
53.	Kec Malo	1.552.910.710,00	48.159.692,00	1.504.751.018,00	131.794.182,00	1.636.545.200,00
54.	Kec Kalitidu	1.560.449.966,00	88.825.198,00	1.471.624.768,00	185.382.318,00	1.657.007.086,00
55.	Kec Dander	1.398.573.650,00	87.508.045,00	1.311.065.605,00	167.966.491,00	1.479.032.096,00
56.	Kec Padangan	1.405.822.670,00	71.446.480,00	1.334.376.190,00	143.651.550,00	1.478.027.740,00
57.	Kec Purwosari	1.320.031.610,00	37.363.357,00	1.282.668.253,00	147.122.094,00	1.429.790.347,00
58.	Kec Kasiman	1.098.557.452,00	90.856.084,00	1.007.701.368,00	131.324.173,00	1.139.025.541,00
59.	Kec Kedewan	1.034.427.471,00	41.467.839,00	992.959.632,00	124.891.838,00	1.117.851.470,00
60.	Kec Ngasem	1.455.369.530,00	102.345.619,00	1.353.023.911,00	207.456.559,00	1.560.480.470,00
61.	Kec Ngambon	765.306.316,00	98.121.001,00	667.185.315,00	98.261.181,00	765.446.496,00
62.	Kec Tambakrejo	1.293.733.111,00	138.146.547,00	1.155.586.564,00	128.828.294,00	1.284.414.858,00
63.	Kec Ngraho	1.416.129.201,76	105.755.419,76	1.310.373.782,00	198.841.300,00	1.509.215.082,00
64.	Kec Margomulyo	929.908.228,00	59.490.397,00	870.417.831,00	140.574.791,00	1.010.992.622,00
65.	Kec Temayang	1.014.738.950,00	67.090.863,00	947.648.087,00	147.517.855,00	1.095.165.942,00
66.	Kec Bubulan	813.264.020,00	45.869.379,00	767.394.641,00	135.672.457,00	903.067.098,00
67.	Kec Gondang	936.904.254,00	85.629.656,00	851.274.598,00	111.760.780,00	963.035.378,00
68.	Kec Sekar	898.218.395,80	36.755.750,80	861.462.645,00	104.845.263,00	966.307.908,00
69.	Kec Gayam	1.655.739.222,00	213.548.896,00	1.442.190.326,00	350.742.163,00	1.792.932.489,00
70.	Inspektorat	2.036.206.113,40	(88.560.026,60)	2.124.766.140,00	337.908.158,00	2.462.674.298,00
71.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.120.203.490,00	162.168.569,00	1.958.034.921,00	230.246.381,00	2.188.281.302,00
72.	BPKAD	13.491.367.186,93	1.218.914.351,93	12.272.452.835,00	1.554.205.443,00	13.826.658.278,00
73.	Badan Pendapatan Daerah	5.160.239.490,00	479.497.626,00	4.680.741.864,00	875.999.413,00	5.556.741.277,00
74.	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	3.952.539.239,79	598.335.643,79	3.354.203.596,00	1.357.335.912,00	4.711.539.508,00
	Jumlah	2.311.839.135.337,00	342.547.489.758,08	1.969.291.645.578,92	387.541.947.446,56	2.356.833.593.025,48

5.4.2.10 Beban Amortisasi –LO

Beban Amortisasi-LO merupakan penurunan manfaat ekonomis dari aset tak berwujud selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Beban Amortisasi hanya diakui dalam laporan operasional. Besarnya beban amortisasi selama Tahun 2019 adalah Rp861.787.595,67.

Tabel 115. Beban Amortisasi - LO

No	SKPD	Akumulasi Amortisasi 2018	Akumulasi Amortisasi 2019	Beban Amortisasi 2019
1.	Dinas Pendidikan	-	15.930.000,00	15.930.000,00
2.	Dinas Kesehatan	53.800.000,00	69.266.000,00	15.466.000,00
3.	RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikusumo	356.504.400,00	363.129.400,00	6.625.000,00
4.	RSUD Sumberrejo	356.298.000,00	366.198.000,00	9.900.000,00
5.	RSUD Padangan	138.506.000,00	139.506.000,00	1.000.000,00
6.	Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang	680.012.800,00	899.516.800,00	219.504.000,00
7.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	294.720.600,00	438.431.890,67	143.711.290,67
8.	Satpol PP	-	19.800.000,00	19.800.000,00
9.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	142.225.000,00	160.190.000,00	17.965.000,00
10.	Dinas Perhubungan	66.334.400,00	162.653.920,00	96.319.520,00
11.	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.450.662.568,00	1.523.195.065,00	72.532.497,00
12.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	262.350.000,00	267.350.000,00	5.000.000,00
13.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	40.000.000,00	50.000.000,00	10.000.000,00
14.	Dinas Pertanian	48.124.000,00	48.124.000,00	-
15.	Bagian Organisasi dan Tata Laksana	202.950.000,00	215.850.000,00	12.900.000,00
16.	Bagian Umum dan Keuangan	69.640.000,00	69.640.000,00	-
17.	Bagian Humas dan Protokol	5.000.000,00	5.000.000,00	-
18.	Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	-	18.080.000,00	18.080.000,00
19.	Sekretariat DPRD	96.337.500,00	96.337.500,00	-
20.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	164.427.960,00	240.162.248,00	75.734.288,00
21.	BPKAD	149.205.000,00	219.155.000,00	69.950.000,00
22.	Badan Pendapatan Daerah	354.675.000,00	400.138.000,00	45.463.000,00
23.	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	17.721.000,00	23.628.000,00	5.907.000,00
	JUMLAH	4.949.494.228,00	5.811.281.823,67	861.787.595,67

5.4.2.11 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih –LO

Beban penyisihan piutang tak tertagih–LO merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar prosentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Beban penyisihan piutang tak tertagih hanya diakui dalam laporan operasional. Besarnya beban penyisihan piutang tak tertagih 2019 berkurang senilai Rp30.208.400 berasal dari koreksi atas penyisihan piutang transfer yang tingkat ketertagihannya diasumsikan 100%.

Tabel 116. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - LO

No	SKPD	Akumulasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih 2018 (Rp)	Akumulasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih 2019 (Rp)	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih 2019 (Rp)
1.	Dinas Kesehatan	17.463.572,25	5.887.040,50	(11.576.531,75)
2.	RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikusumo	188.775.785,95	266.906.930,61	78.131.144,66
3.	RSUD Sumberrejo	3.464.069,12	15.207.133,31	11.743.064,19
4.	RSUD Padangan	15.259.487,64	18.769.594,78	3.510.107,14
5.	Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang	-	14.778.211,37	14.778.211,37
6.	Dinas Ketahanan Pangan	310.890.000,00	267.790.000,00	(43.100.000,00)
7.	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	1.987.279.874,31	2.076.548.385,52	89.268.511,21
8.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	532.980,00	6.334.922,10	5.801.942,10
9.	Dinas Peternakan dan Perikanan	6.900.825.806,57	7.063.255.243,77	162.429.437,20
10.	Dinas Pertanian	2.076.616.000,00	1.964.516.000,00	(112.100.000,00)
11.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	1.758.132.100,21	1.931.470.958,63	173.338.858,42
12.	Bagian Perekonomian	274.600.000,00	258.150.000,00	(16.450.000,00)
13.	PPKD	62.045.129,00	81.505.000,00	19.459.871,00
14.	Badan Pendapatan Daerah	8.383.349.725,94	9.105.736.470,09	722.386.744,15
JUMLAH		21.979.234.530,99	23.076.855.890,68	1.097.621.359,69

5.4.2.12 Beban Penyusutan Aset Lain-Lain

Beban Penyusutan Aset Lain-Lain merupakan beban penyusutan aset tetap yang direklasifikasi ke dalam aset lain-lain sebesar Rp17.080.316.113,00.

5.4.2.13 Beban Lain-Lain

Beban Lain-Lain bertambah senilai Rp286.436.928,00 berasal dari koreksi belanja aset yang nilainya dibawah kapitalisasi selama Tahun 2019 senilai Rp 257.437.428,00 serta Rp. 28.999.500,00 yang berasal dari rugi selisih kurs atas piutang komitmen fee tahun 2018 pada PT ADS yang belum terbayar sampai dengan 31 Desember 2019.

5.4.2.14 Beban Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

Beban Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa besarnya sama dengan belanja bagi hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa LRA. Besarnya beban Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 2019 adalah Rp15.232.584.477,00.

5.4.2.15 Beban Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

Beban Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa besarnya adalah sama dengan Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa LRA yaitu sebesar Rp1.168.158.541.718,00 dikurangi dengan beban dana desa senilai Rp367.201.310.000,00 sehingga nilainya menjadi Rp800.957.231.718,00.

5.4.3. SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI

Surplus dari operasi merupakan selisih lebih antara pendapatan dan beban dalam satu periode pelaporan. Jumlah surplus dari kegiatan operasi per 31 Desember 2019 adalah Rp2.320.414.676.932,72.

5.4.3.1 Surplus dari Kegiatan Non Operasional

Surplus dari kegiatan non operasional merupakan selisih lebih atas pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin. Jumlah surplus dari kegiatan non operasional per 31 Desember 2019 adalah Rp26.517.178.730,94 yang berasal dari penjualan barang bekas proyek yang tidak terpakai senilai Rp8.928.000,00 dan koreksi pencatatan divestasi PD Pasar sebesar Rp26.508.250.730,94. Sedangkan penjualan hasil perikanan pada Dinas Peternakan dan Perikanan senilai Rp24.260.000,00 yang semula tercatat sebagai surplus penjualan aset non lancar direklasifikasi menjadi Pendapatan Asli Daerah lain-lain.

5.4.3.2 Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Defisit dari kegiatan non operasional merupakan selisih kurang atas pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin. Jumlah defisit dari kegiatan non operasional per 31 Desember 2019 adalah Rp26.838.432.269,06 berasal dari penghapusan investasi permanen PD Pasar karena pembubaran.

5.4.4. POS LUAR BIASA

Pos Luar Biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- (1) Kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran;
- (2) Tidak dapat diharapkan terjadi berulang-ulang;
- (3) Kejadian diluar kendali entitas pemerintah.

Jumlah pos luar biasa per 31 Desember 2019 sebesar (Rp632.000.000,00). Jumlah tersebut berasal dari realisasi belanja tak terduga 2019 senilai Rp632.000.000,00.

5.4.5. SURPLUS DEFISIT LO

Surplus defisit LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan kejadian luar biasa. Saldo surplus defisit LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas. Surplus Defisit LO per 31 Desember 2019 adalah Rp2.346.299.855.663,66.

5.5. LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris.

Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas pemerintah. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris.

5.5.1. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Jumlah total dari arus kas aktivitas operasi pada TA 2019 adalah Rp1.489.485.651.521,57. Jumlah tersebut didapat dari arus kas masuk Rp4.769.794.989.733,96 dikurangi dengan arus kas keluar Rp3.280.309.338.212,39.

	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
Arus Kas Masuk	4.769.794.989.733,96	4.823.298.214.353,20
Arus Kas Keluar	3.280.309.338.212,39	2.484.087.423.668,90
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	1.489.485.651.521,57	2.339.210.790.684,30

Arus Kas Masuk sebesar Rp4.769.794.989.733,96 terdiri dari :

Tabel 117. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi

No	Uraian	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
1	Pajak Daerah	108.830.092.963,18	94.593.395.280,00
2	Retribusi Daerah	28.683.142.118,25	19.844.707.742,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.816.223.663,52	18.121.803.634,95
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	406.888.853.211,01	292.154.036.663,07
5	Dana Bagi Hasil Pajak	202.380.620.388,00	251.636.029.601,00
6	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	1.973.193.312.507,00	2.281.171.868.831,00
7	Dana Alokasi Umum	975.387.399.000,00	932.357.598.649,00
8	Dana Alokasi Khusus	371.450.350.093,00	349.495.303.481,00
9	Dana Otonomi Khusus	-	-
10	Dana Penyesuaian	33.175.993.000,00	17.250.000.000,00
11	Dana Desa	367.201.310.000,00	-
12	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	173.083.787.290,00	147.434.223.898,00
13	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-
14	Pendapatan Hibah	98.596.160.000,00	90.715.879.573,18
15	Pendapatan Lainnya	14.107.745.500,00	328.523.367.000,00
	Jumlah Arus Kas Masuk	4.769.794.989.733,96	4.823.298.214.353,20

Realisasi belanja dan pendapatan dari BLUD dalam hal ini RSUD Sosodoro Djatikoesoemo, RSUD Sumberrejo, RSUD Padangan dan FKTP dikonsolidasikan langsung dengan laporan arus kas Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Arus Kas Keluar sebesar Rp3.280.309.338.212,39 terdiri dari :

Tabel 118. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi

No	Uraian	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
1	Belanja Pegawai	1.058.724.416.043,02	1.017.533.334.032,98
2	Belanja Barang Jasa	857.025.938.441,37	671.762.552.372,57
3	Belanja Bunga	-	-
4	Belanja Subsidi	-	75.600.000,00
5	Belanja Hibah	162.422.857.533,00	127.732.077.282,35
6	Belanja Bantuan Sosial	18.113.000.000,00	3.997.500.000,00
7	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	15.232.584.477,00	12.379.745.270,00
8	Belanja Bantuan Keuangan	1.168.158.541.718,00	650.552.280.111,00
9	Belanja Tidak Terduga	632.000.000,00	54.334.600,00
	Jumlah Arus Kas	3.280.309.338.212,39	2.484.087.423.668,90

5.5.2. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Aktivitas Investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap dan aset serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas.

Arus Kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat dimasa yang akan datang.

Jumlah total dari Arus Kas Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan pada TA 2019 adalah (Rp1.304.725.115.126,38). Munculnya angka minus untuk aktivitas ini akibat dari jumlah arus kas keluar lebih besar dari arus kas masuk, dengan kata lain Pemerintah Kabupaten Bojonegoro lebih banyak mengeluarkan kas untuk menambah investasi aset dibandingkan dengan kas yang diterima dari pelepasan investasi.

	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
Arus Kas Masuk	33.188.000,00	454.027.111,00
Arus Kas Keluar	1.304.758.303.126,38	601.338.047.080,92
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan	(1.304.725.115.126,38)	(600.884.019.969,92)

Arus Kas Masuk sebesar Rp33.188.000,00 merupakan penjualan barang bekas proyek yang tidak terpakai dan penjualan hasil perikanan.

Tabel 119. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi Non Keuangan

No	Uraian	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
1	Penjualan Peralatan Kantor Tidak Terpakai	-	259.700.000,00
2	Penjualan atas aset lainnya (penjualan barang bekas proyek yang tidak terpakai)	8.928.000,00	11.288.000,00
3	Penjualan hasil perikanan	24.260.000,00	22.050.000,00
4	Penjualan Aset Tetap	-	160.989.111,00
	Jumlah Arus Kas Masuk	33.188.000,00	454.027.111,00

Arus Kas Keluar sebesar Rp1.304.758.303.126,38 terdiri dari :

Tabel 120. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi

No	Uraian	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
1	Belanja Tanah	4.151.947.000,00	725.423.250,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	200.607.141.462,11	142.873.891.529,80
3	Belanja Gedung dan Bangunan	195.316.845.448,92	153.161.358.323,09
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	877.712.795.837,56	286.469.922.122,91
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	24.739.335.657,79	17.368.341.855,12
6	Belanja Aset Lainnya	2.230.237.720,00	739.110.000,00
	Jumlah Arus Kas Keluar	1.304.758.303.126,38	601.338.047.080,92

5.5.3. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang

jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang.

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang.

Pada Tahun Anggaran 2019, jumlah total arus kas dari aktivitas pendanaan adalah Rp645.993.027,27. Jumlah total tersebut didapat dari Arus kas masuk Rp645.993.027,27 dikurangi Arus kas keluar Rp0,00.

	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
Arus Kas Masuk	645.993.027,27	1.257.393.774,83
Arus Kas Keluar	0,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	645.993.027,27	1.257.393.774,83

Arus Kas Masuk sebesar Rp645.993.027,27 terdiri dari :

Tabel 121. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pembiayaan

Uraian	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
Penerimaan kembali pinjaman	645.993.027,27	1.257.393.774,83
Jumlah Arus Kas Masuk	645.993.027,27	1.257.393.774,83

Arus Kas Keluar sebesar Rp0,00 terdiri dari :

Tabel 122. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pembiayaan

Uraian	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman dan Obligasi	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar	0,00	0,00

5.5.4. ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS

Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain transaksi perhitungan Fihak Ketiga (PFK), pemberian/penerimaan kembali uang persediaan kepada/dari bendahara pengeluaran, serta kiriman uang.

Pada TA 2019, jumlah total Arus Kas Aktivitas Transitoris adalah sebesar Rp26.295.761,65. Jumlah total tersebut didapat dari Arus Kas Masuk Rp196.550.497.864,00 dikurangi Arus Kas Keluar Rp196.524.202.102,35.

	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
Arus Kas Masuk	196.550.497.864,00	153.278.046.130,00
Arus Kas Keluar	196.524.202.102,35	153.304.386.962,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	26.295.761,65	(26.340.832,00)

Aktivitas Transitoris Tahun 2019 terdiri atas penerimaan dan pengeluaran pajak selama Tahun 2019 serta sisa kas di bendahara pengeluaran Tahun 2019 dan Tahun 2018.

Perhitungan pihak ketiga (PFK) belanja gaji pegawai dan perhitungan pajak belanja yang harus disetorkan ke pihak ketiga dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 123. Rincian Pajak Belanja

No	Jenis Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)
1	Taperum	837.737.000,00	837.737.000,00
2	Askes	13.666.090.220,00	13.666.090.220,00
3	Pajak Penghasilan Ps 21	35.982.147.044,00	35.982.147.044,00
4	Pajak Penghasilan Ps 22	3.075.445.969,00	3.075.445.969,00
5	Pajak Penghasilan Ps 23	601.501.539,00	601.501.539,00
6	Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	14.222.567.366,00	14.222.567.366,00
7	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	79.067.254.859,00	79.067.254.859,00
8	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	993.976.086,00	993.976.086,00
9	Iuran Jaminan Kematian	2.981.921.787,00	2.981.921.787,00
10	IWP 2%	9.033.753.020,00	9.033.753.020,00
11	IWP 8%	36.061.665.422,00	36.061.665.422,00
Jumlah		196.524.060.312,00	196.524.060.312,00

Penerimaan dan pengeluaran Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran merupakan arus masuk dan keluar kas berupa Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan selama tahun 2019. Selisih antara penerimaan dan pengeluaran kas sebesar Rp26.295.761,65 terinci sebagai berikut :

Tabel 124. Rincian Selisih Penerimaan dan Pengeluaran UP Bendahara Pengeluaran

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Penerimaan Sisa UP Bendahara Pengeluaran Tahun lalu	26.437.552,00
2	Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran akhir Tahun 2019	0,00
3	Koreksi SiLPA	141.790,35
TOTAL		26.295.761,65

Koreksi SiLPA sebesar Rp141.790,35 merupakan kas di BLUD Akademi Kebidanan Pemkab Bojonegoro yang tidak lagi menjadi BLUD dikarenakan pengelolaannya berpindah ke Kementerian Kesehatan.

5.5.5. KENAIKAN/PENURUNAN BERSIH KAS

	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
Kenaikan/Penurunan Bersih Kas	185.432.825.184,11	1.739.557.823.657,21

Kenaikan kas bersih selama periode Tahun 2019 sebesar Rp185.432.825.184,11. Perhitungan kenaikan kas bersih adalah sebagai berikut:

Tabel 125. Perhitungan Kenaikan/Penurunan Bersih Kas

No.	Uraian	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
1.	Arus kas bersih dari aktivitas operasi	1.489.485.651.521,57	2.339.210.790.684,30
2.	Arus kas bersih dari aktivitas investasi	(1.304.725.115.126,38)	(600.884.019.969,92)
3.	Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	645.993.027,27	1.257.393.774,83

No.	Uraian	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
4.	Arus Kas Bersih dari aktivitas transitoris	26.295.761,65	(26.340.832,00)
JUMLAH		185.432.825.184,11	1.739.557.823.657,21

5.5.6. SALDO AWAL KAS DI BUD

	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
Saldo Awal Kas di BUD	2.017.375.686.128,15	277.817.862.470,94

Saldo Awal Kas di BUD sebesar Rp2.017.375.686.128,15 merupakan saldo Kas seluruh bendahara entitas di lingkup Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2018, terinci sebagai berikut:

Tabel 126. Perhitungan Saldo Awal Kas

No	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Kas Awal di BUD	1.960.162.109.889,91	sudah termasuk kas awal di bendahara pengeluaran sebesar Rp26.437.552,00
2	Kas Awal di Bendahara Penerimaan	475.031.443,00	-
3	Kas Awal di BLUD	41.658.898.631,88	Saldo Kas BLUD di 3 RSUD dan Akbid
4	Kas Awal Lainnya	15.079.646.163,36	Saldo Kas JKN di 36 FKTP dan Saldo Kas Bos
Saldo Awal Kas di BUD		2.017.375.686.128,15	

5.5.7. SALDO AKHIR KAS

Saldo Akhir Kas sebesar Rp2.202.808.511.312,26 merupakan saldo kas seluruh bendahara entitas di lingkup Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per tanggal 31 Desember 2019. Perhitungan saldo akhir kas sebagai berikut:

Tabel 127. Perhitungan Saldo Akhir Kas

No	Uraian	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
1	Kenaikan/Penurunan kas bersih selama periode	185.432.825.184,11	1.739.557.823.657,21
2	Saldo awal kas di BUD	2.017.375.686.128,15	277.817.862.470,94
3	Saldo kas di bendahara pengeluaran	-	26.437.552,00
Saldo Akhir Kas		2.202.808.511.312,26	2.017.402.123.680,15

Saldo akhir kas pada Laporan Arus Kas senilai Rp2.202.808.511.312,26, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 128. Rincian Perhitungan Saldo Akhir Kas

No	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Kas akhir di BUD	2.141.077.698.064,92	-
2	Kas akhir di Bendahara Penerimaan	300.012,00	-
3	Kas akhir di Bendahara Pengeluaran	-	-
4	Kas akhir di BLUD	46.900.433.988,85	Saldo Kas BLUD di 3 RSUD
5	Saldo Akhir Kas di FKTP	9.566.402.632,52	Saldo Akhir Kas JKN di 36 FKTP

No	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
6	Saldo Akhir Kas Bos	5.263.676.613,97	-
7	Saldo Akhir Setara Kas	-	-
Saldo Akhir Kas		2.202.808.511.312,26	-

5.6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan keuangan yang menunjukkan perubahan ekuitas selama satu periode.

5.6.1. EKUITAS AWAL

Nilai ekuitas awal pada tanggal 1 Januari 2019 adalah sebesar Rp8.210.742.208.604,64.

5.6.2. SURPLUS (DEFISIT) LO

Jumlah Surplus LO untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 adalah Rp2.346.299.855.663,66. Jumlah tersebut merupakan pindahan dari Laporan Operasional.

5.6.3. KOREKSI NILAI PERSEDIAAN

Koreksi Nilai Persediaan merupakan koreksi atas persediaan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang seharusnya masuk inventaris non aset tetap sebesar (Rp1.383.202.500,00).

5.6.4. KOREKSI EKUITAS LAINNYA

Koreksi Ekuitas Lainnya merupakan koreksi atas pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan. Nilai koreksi aset per 31 Desember 2019 adalah Rp2.154.586.145.182,22 terdiri atas:

- (1) Koreksi Saldo Akbid senilai (Rp141.790,35);
- (2) Koreksi Ekuitas atas akumulasi penyusutan 2018 senilai Rp342.547.489.758,08;
- (3) Koreksi ekuitas senilai Rp132.158.936.184,17, yang terdiri dari:

a. Penambahan:

- Koreksi ekuitas atas aset tanah yang sebelumnya tercatat dengan nilai Rp1,00 dan Rp0,00 dilakukan penaksiran harga perolehan dengan pendekatan NJOB setempat sebesar Rp1.152.599.197,00;
- Penambahan Aset tetap tanah dibawah Jalan dan Bahu Jalan Kabupaten Tahap 6 Surat Persetujuan Bupati Bojonegoro Nomor 032/1153/412,303/2019 perihal Persetujuan Penetapan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah Dalam Rangka Pencatatan Aset Tetap Tanah dibawah jalan dan Bahu Jalan Kabupaten Tahap 6 sebesar Rp126.169.004.000,00;
- Koreksi Ekuitas sebesar Rp1.845.348.000,00 untuk Aset yang sebelumnya dicatat dengan nilai Rp0,00 dengan pendekatan Harga Taksiran NJOP setempat untuk Aset 3 Bidang Tanah yang berlokasi Jl. Raya Dander Kecamatan Dander dengan Luas 15.230m² senilai Rp1.568.690.000,00 penggunaan Tirtawana Dander; Luas 189m² untuk penggunaan Taman Wisata Wahana Dander Rp19.467.000,00; Luas 2.497m² penggunaan Tirtawana Dander Rp257.191.000,00, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- Koreksi ekuitas untuk tanah Eks Bengkok Kelurahan Sumbang deangan luas 5953m² yang sebelumnya tercatat dengan nilai Rp1,00, Kecamatan Bojonegoro sebesar Rp160.730.999,00

- Koreksi ekuitas sebesar Rp1.841.174.996,00 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atas 4 bidang tanah yang sebelumnya masing-masing tercatat dengan nilai Rp1,00 dan 1 bidang tanah yang sebelumnya tercatat dengan nilai Rp0,00 dilakukan penaksiran harga perolehan dengan pendekatan NJOB setempat yaitu:
 - a) Sebidang tanah untuk tempat peribadatan (Masjid Al- Muswa Djabah) yang terletak di Kelurahan Kadipaten Kecamatan Bojonegoro dengan luas tanah 2,535 m² Rp1.197.366.000,00;
 - b) Tanah lokasi Desa Banjarsari Kecamatan Trucuk 214m² dengan Sertifikat Hak Pakai No. 10 Tahun 2017 tanah untuk PAUD dan TK Rp.22.042.000,00;
 - c) Tanah lokasi Desa Banjarsari Kecamatan Trucuk Luas 244m² dengan Sertifikat Hak Pakai No. 09 Tahun 2017, tanah untuk PAUD dan TK Rp.25.132.000,00 dan
 - d) Tanah lokasi Desa Banjarsari Kecamatan Trucuk Luas 175 sebidang tanah untuk masjid dengan Sertifikat Hak Pakai No. 08 Tahun 2017 Rp18.025.000,00;
 - e) Tanah dengan lokasi Desa Talok Kec. Kalitidu dengan luas tanah 21.430m² dengan Sertifikat No. 05 Tanggal 19 Desember 2017 dengan nilai taksiran harga Rp578.610.000,00.
- Hadiah/Penghargaan pemenang lomba/pemilihan petugas operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi teladan kategori UPT/Pengamat Pengairan Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor:032/22613/104.4/2018 berupa 1 unit kendaraan dinas roda 3 merk Viar Type V30R; 1 unit kendaraan dinas roda 2 Merk Honda Type B5D02M29M2P J M/T; PC Merk HP Type Core i3-7100U dan Printer merk EPSON L120 Ink Tank Printer pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air sebesar Rp61.830.500,00;
- Penambahan aset dari belanja barang dan jasa sebesar Rp11.200.000,00 yang terdiri atas 1 unit LED Rp1.700.000,00; 2 unit gerobak sampah @ Rp4.750.000,00 dari Dinas Peternakan dan Perikanan;
- Kurang catat honda Revo nopol S4729CP pada Kecamatan Sugihwaras sebesar Rp10.825.000,00;
- Koreksi ekuitas untuk aset kurang catat sebesar Rp709.500.000,00 yang terdiri dari 3 kendaraan dinas nopol S1079BP Rp417.500.000,00; Nopol S1154AP Rp102.000.000,00; dan Nopol S1235AP Rp190.000.000,00;
- Koreksi ekuitas aset dari utang belanja 2018 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya sebesar Rp52,17;
- Denda yang dipotongkan termyn dari Dinas Perdagangan sebesar Rp29.688.439,00 yang berasal dari Tahun 2019 Rp23.750.751,00 dan Tahun 2018 Rp.5.937.688,00;
- Situs perahu kuno Desa Padang Kec. Trucuk sebesar Rp1,00;
- Aset yang belum diakui pada tahun 2018 sebesar Rp167.035.000,00.

b. Pengurangan:

- Koreksi ekuitas untuk aset tanah kas desa yang tercatat pada KIB A SD dan SMP sebesar Rp8.743.228.570,00;
- Koreksi Ekuitas sebesar Rp42.457.500.000,00 untuk 4 lokasi Tanah berdasarkan Berita Acara Serah Terima Sebagian Urusan

Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Dalam Bidang Pekerjaan Umum Pengairan Kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro Tanggal 5 Agustus Tahun 1996 terdapat lebih saji Rp73.957.500.000,00 dengan rincian Aset Tanah Kantor Cabang Seksi Pengairan Sumberjo Desa Tlumbung Kec. Sumberrejo senilai Rp4.995.000.000,00 tercatat dengan harga Rp5.000.000,00 sedangkan di KIB A Dinas PU SDA tercatat Rp5.000.000.000,00 dan Tanah kantor Cabang Seksi Pengairan Baureno, Desa Ketawang Kec. Boureno senilai Rp3.996.000.000,00 yang seharusnya Rp4.000.000,00 namun di KIB A Dinas PU SDA tercatat Rp4.000.000.000,00, dan Aset tanah setren di Desa Jatiblimbing Kecamatan Dander yang digunakan untuk rumah juru pirang lebih saji Rp3.496.500.000,00 seharusnya Rp3.500.000,00 tercatat Rp.3.500.000.000,00;

- Koreksi ekuitas untuk kendaraan dinas Puskesmas Ngasem lebih saji sebesar Rp23.000.000,00;
 - Pokja kendaraan operasional metrologi legal yang gagal lelang pada Dinas Perdagangan sebesar Rp1.440.000,00;
 - Koreksi ekuitas untuk aset tralis SMPN SATAP Sugihwaras Kecamatan Ngraho sebesar Rp1.020.000,00;
 - Koreksi ekuitas untuk pekerjaan Rehabilitasi gedung DPRD (sesuai data kontrak yaitu pekerjaan penggantian plafon, wallpaper, dll) sebesar Rp206.440.000,00;
 - Koreksi ekuitas untuk aset yang seharusnya masuk belanja barang dan jasa namun perencanaan masuk belanja modal, Perencanaan Gedung PMI Jl. Sawunggaling sebesar Rp23.682.120,00;
 - Koreksi ekuitas untuk pembulatan dari Dinas Pendidikan sebesar Rp0,06;
 - Koreksi ekuitas atas lebih saji KDP Tahun 2018 Rehabilitasi ruang kelas SDN Turi 4 Kec. Tambakrejo sebesar Rp406.947.788,27;
 - Koreksi ekuitas atas lebih saji KDP Tahun 2018 Pembangunan Saluran Drainase Jl. Serma Abdullah RW. 1 Desa Pacul Kecamatan Bojonegoro sebesar Rp711.324.349,00;
 - Koreksi ekuitas atas lebih saji KDP Tahun 2018 Pembangunan Saluran Drainase IKK Kedungadem Desa Drokilo sebesar Rp42.942.020,00.
 - Koreksi atas obat dan BMHP kedaluarsa Tahun 2012-2018 pada RSUD padangan senilai Rp472.977.453,49
 - Koreksi atas penyusutan JIJ Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga senilai Rp2.192.259.660,00.
 - Koreksi dampak dari perubahan pengaturan intrakomptable ke ekstrakomptable sebesar Rp26.028.910.310,20.
- (4) Lebih saji utang Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya serta Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Tahun 2018 sebesar Rp1.753.223.155,27.
- (5) Koreksi ekuitas akumulasi penyusutan aset lain-lain berubah kondisi menjadi baik sebesar Rp9.057.900.000,00
- (6) Koreksi pencatatan investasi permanen PT ADS yang semula menggunakan metode cost menjadi metode ekuitas sebesar Rp1.701.141.922.687,15.
- (7) Koreksi atas penyertaan yang selama ini belum ditentukan statusnya pada PDAM Kabupaten Bojonegoro Rp33.041.494.067,79 ,

- (8) Koreksi tanah Puskesmas Pembantu Meduri pada UPTD Puskesmas Margomulyo yang semula bernilai Rp1,00 sebesar Rp20.139.999,00.
- (9) Koreksi atas pencatatan penyisihan piutang komitmen fee yang tingkat ketertagihannya diasumsikan 100 % sebesar Rp72.405.000,00.
- (10) Koreksi atas utang pengembalian jasa giro pada BLUD RSUD Sosodoro Djatikoesoemo Rp10.000.000,00.
- (11) Koreksi dampak dari perubahan pengaturan intra komptabel menjadi ekstrakomptabel sebesar Rp16.094.448.392,13.

5.6.5. EKUITAS AKHIR

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 adalah Rp12.710.245.006.950,50.

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. KONDISI GEOGRAFIS

Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu wilayah provinsi Jawa Timur yang tercatat berpenduduk sebanyak 1,2 juta lebih pada tahun 2016 dengan luas wilayah lebih dari 2 ribu km², yang terletak diantara 111° 25' dan 112° 09' bujur timur dan 6° 59' dan 7° 37' lintang selatan. Topografi Kabupaten Bojonegoro menunjukkan bahwa di sepanjang daerah aliran Sungai Bengawan Solo merupakan daerah dataran rendah, sedangkan di bagian selatan merupakan dataran tinggi di sepanjang kawasan Gunung Pandan, Gunung Kramat dan Gunung Gajah. Dilihat secara keseluruhan 81,29% dari luas wilayah Kabupaten Bojonegoro berada pada ketinggian di bawah 25 m lebih, selebihnya 18,71% berada pada ketinggian di bawah 25 m. Luas kemiringan 2-14,99% (36,16%) dan sisanya (8,74%) kemiringannya di atas 15%. Dari wilayah seluas di atas, sebanyak 40,14% merupakan Hutan Negara, sedangkan yang digunakan untuk lahan sawah tercatat sekitar 32,58%. Sebagai daerah yang beriklim tropis, Kabupaten Bojonegoro hanya mengenal dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan.

6.2. BATAS WILAYAH ADMINISTRASI KABUPATEN BOJONEGORO

Batas wilayah Kabupaten Bojonegoro sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Kabupaten Tuban;
- Timur berbatasan dengan Kabupaten Lamongan;
- Selatan berbatasan dengan Kabupaten Madiun, Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Jombang;
- Barat berbatasan dengan Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Blora (Jawa Tengah).

6.3. PEMBAGIAN DAN KEBIJAKAN PERWILAYAHAN

Secara administratif Kabupaten Bojonegoro terbagi dalam 28 Kecamatan, 430 desa atau sekitar 1.327 dusun/lingkungan yang terdiri dari 1.971 RW dan 7.458 RT. Wilayah Kabupaten Bojonegoro sebagian besar digunakan untuk sektor pertanian, dengan luas sawah 71,44 ribu hektar. Tanaman utamanya adalah padi sekitar 110,258 ribu hektar dan lainnya digunakan sebagai lahan tanaman palawija, sayur-sayuran dan tembakau pada musim kemarau.

6.4. PENGGABUNGAN ATAU PEMEKARAN ENTITAS AKUNTANSI TAHUN BERJALAN

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memiliki 3 (tiga) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yaitu RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo, RSUD Sumberrejo dan RSUD Padangan. Selaku BLUD ketiga RSUD tersebut memiliki fleksibilitas dalam tata kelola keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku. RSUD Dr. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro sebagai salah satu entitas akuntansi yang ada di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah menerapkan PPK BLUD berdasarkan keputusan Bupati Nomor 188/412/KEP/412.12/2009 tanggal 28 November 2009, RSUD Sumberrejo telah menerapkan PPK BLUD berdasarkan keputusan Bupati Nomor 188/226/KEP/412.013/2017 tanggal 1 Agustus 2017 dan RSUD Padangan juga telah menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) berdasarkan pada Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 188/225/KEP/412.013/2017 tanggal 1 Agustus 2017.

Berdasarkan keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 974/KPT/I/2018 tanggal 8 Nopember 2018 tentang Izin Pembukaan Program Studi di Luar Kampus Utama yang Diselenggarakan oleh Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya di Kabupaten Bojonegoro, maka Akademi Kebidanan Pemkab Bojonegoro tidak lagi menjadi BLUD dikarenakan pengelolaannya berpindah ke Kementerian Kesehatan.

Di samping itu Kabupaten Bojonegoro mempunyai Perusahaan Daerah namun tidak termasuk dalam entitas akuntansi, yaitu:

- a) Bidang Perbankan:
PD Bank Perkreditan Rakyat (BPR) ;
- b) Bidang Konstruksi:
PT Bojonegoro Bangun Sarana (BBS) ;
- c) Bidang Jasa lainnya:
(1) PDAM Kab. Bojonegoro;
(2) PT. Griya Dharma Kusuma
- d) Bidang Pertambangan:
PT. Asri Dharma Sejahtera (ADS).

6.5. LAIN-LAIN

Sebagaimana diamanatkan Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menindaklanjuti dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Didalam Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2016 diatur tentang pembentukan Perangkat Daerah yang terdiri dari

- a) Sekretariat Daerah;
- b) Sekretariat DPRD;
- c) Inspektorat;
- d) Dinas;
- e) Badan; dan
- f) Kecamatan.

Pembentukan Perangkat Daerah tersebut dilakukan berdasarkan asas:

- a) Intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah, maksudnya adalah penentuan jumlah dan susunan Perangkat daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu urusan pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan urusan pemerintahan.
- b) Efisiensi, maksudnya adalah pembentukan perangkat daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna paling tinggi yang dapat diperoleh.
- c) Efektivitas, maksudnya adalah pembentukan perangkat daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.
- d) Pembagian habis tugas, maksudnya pembentukan perangkat daerah yang membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada perangkat daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu perangkat daerah.
- e) Rentang kendali, maksudnya penentuan jumlah perangkat daerah dan jumlah unit kerja pada perangkat daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian unit kerja bawahan.
- f) Tata kerja yang jelas, maksudnya pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dan unit kerja pada perangkat daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik vertikal maupun horisontal.
- g) Fleksibilitas, maksudnya penentuan tugas dan fungsi perangkat daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun susunan perangkat daerah itu terdiri dari

- a) Sekretariat Daerah yang bertipe A, maksudnya adalah sekretariat daerah yang terdiri atas paling banyak tiga asisten, masing-masing Asisten terdiri atas paling banyak empat bagian, dan masing-masing Bagian terdiri atas paling banyak 3 sub bagian.

- b) Sekretariat DPRD yang bertipe A, maksudnya adalah Sekretariat DPRD yang terdiri atas paling banyak empat bagian dan masing masing bagian terdiri atas paling banyak 3 sub bagian.
- c) Inspektorat yang bertipe A, maksudnya adalah Inspektorat yang terdiri atas satu sekretariat dan paling banyak empat Inspektur Pembantu. Sekretariat terdiri atas tiga sub bagian.
- d) Dinas yang terbagi menjadi dua tipe yaitu A dan B. Tipe A maksudnya dinas yang terdiri atas satu sekretariat dan paling banyak empat bidang. Sekretariat terdiri atas tiga sub bagian dan bidang terdiri atas paling banyak tiga seksi. Tipe B maksudnya dinas yang terdiri atas satu sekretariat dan paling banyak tiga bidang. Sekretaris terdiri atas dua sub bagian dan bidang terdiri atas paling banyak tiga seksi.

Dinas terdiri dari:

1. Dinas Pendidikan bertipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
2. Dinas Kesehatan bertipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
3. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang bertipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, sub urusan jalan, sub urusan jasa konstruksi dan sub urusan penataan ruang (sebelumnya bagian dari Dinas Pekerjaan Umum)
4. Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air bertipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, sub urusan sumber daya air (sebelumnya Dinas Pengairan)
5. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya bertipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, serta urusan pemerintahan bidang pertanahan (sebelumnya bagian dari Dinas Pekerjaan Umum)
6. Dinas sosial bertipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial (sebelumnya bagian dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial)
7. Dinas Pemadam Kebakaran bertipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan kebakaran (sebelumnya bagian dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah)
8. Satuan Polisi Pamong Praja bertipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan ketentraman dan ketertiban umum
9. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana bertipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana (sebelumnya Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana)
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bertipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa (sebelumnya Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa)
12. Dinas Perhubungan bertipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan

13. Dinas Komunikasi dan Informatika bertipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, dan urusan pemerintahan bidang statistik, serta urusan pemerintahan bidang persandian.
14. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga bertipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga (sebelumnya bagian dari Dinas Pendidikan).
15. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro bertipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah (sebelumnya Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah)
16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bertipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan secara melekat menyelenggarakan pelayanan perizinan terpadu satu pintu (sebelumnya Badan Perijinan)
17. Dinas Ketahanan Pangan bertipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan (sebelumnya Kantor Ketahanan Pangan)
18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan bertipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan (sebelumnya Kantor Arsip dan Perpustakaan)
19. Dinas lingkungan Hidup bertipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup (gabungan dari Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan)
20. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja bertipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja (gabungan dari sebagian Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial dan sebagian Dinas Perindustrian dan Perdagangan)
21. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bertipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan urusan pemerintahan bidang pariwisata
22. Dinas Perdagangan bertipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan (sebagian Dinas Perindustrian dan Perdagangan)
23. Dinas Pertanian bertipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan sarana pertanian, sub urusan prasarana pertanian, sub urusan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, dan sub urusan perizinan usaha pertanian khususnya pada bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura
24. Dinas Peternakan dan Perikanan bertipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan:
 - (a) Bidang pertanian, terdiri dari
 - (1) Sub urusan sarana pertanian dengan fungsi / layanan :
 - (a) Pengelolaan sumber daya genetik hewan
 - (b) Pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan
 - (c) Pengawasan obat hewan ditingkat pengecer
 - (d) Pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak
 - (e) Penyediaan benih/bibit ternak hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam satu daerah propinsi lain
 - (2) Sub urusan prasarana pertanian dengan fungsi/layanan :
 - (a) Pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun / galur ternak
 - (b) Pengembangan lahan penggembalaan umum
 - (3) Sub urusan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner

- (4) Sub urusan perizinan usaha pertanian fungsi / layanan
 - (a) Penertiban izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan dan
 - (b) Penertiban izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan
- (b) Bidang kelautan dan perikanan sub urusan perikanan tangkap dan sub urusan perikanan budidaya
- e) Badan, keseluruhan bertipe A, maksudnya adalah badan yang terdiri atas satu sekretariat dan paling banyak empat bidang. Sekretariat terdiri atas tiga sub bagian dan masing-masing bidang terdiri atas paling banyak tiga sub bidang.
Badan terdiri dari:
 1. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan bertipe A, melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan (sebelumnya Badan Kepegawaian Daerah)
 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bertipe A, melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan
 3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah bertipe A, melaksanakan fungsi penunjang keuangan (sebelumnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah)
 4. Badan Pendapatan Daerah bertipe A, melaksanakan fungsi penunjang keuangan (sebelumnya Dinas Pendapatan Daerah)
- f) Kecamatan, keseluruhan bertipe A, maksudnya Kecamatan yang terdiri atas satu sekretariat dan paling banyak lima seksi. Sekretariat terdiri atas paling banyak dua sub bagian.
Kecamatan terdiri dari:
 - (1) Kecamatan Bojonegoro bertipe A
 - (2) Kecamatan Kapas bertipe A
 - (3) Kecamatan Balen bertipe A
 - (4) Kecamatan Sumberrejo bertipe A
 - (5) Kecamatan Kanor bertipe A
 - (6) Kecamatan Baureno bertipe A
 - (7) Kecamatan Sugihwaras bertipe A
 - (8) Kecamatan Kepohbaru bertipe A
 - (9) Kecamatan Kedungadem bertipe A
 - (10) Kecamatan Sukosewu bertipe A
 - (11) Kecamatan Trucuk bertipe A
 - (12) Kecamatan Malo bertipe A
 - (13) Kecamatan Kalitidu bertipe A
 - (14) Kecamatan Dander bertipe A
 - (15) Kecamatan Padangan bertipe A
 - (16) Kecamatan Purwosari bertipe A
 - (17) Kecamatan Kasiman bertipe A
 - (18) Kecamatan Kedewan bertipe A
 - (19) Kecamatan Ngasem bertipe A
 - (20) Kecamatan Ngambon bertipe A
 - (21) Kecamatan Tambakrejo bertipe A
 - (22) Kecamatan Ngraho bertipe A
 - (23) Kecamatan Margomulyo bertipe A
 - (24) Kecamatan Temayang bertipe A
 - (25) Kecamatan Bubulan bertipe A

- (26) Kecamatan Gondang bertipe A
- (27) Kecamatan Sekar bertipe A
- (28) Kecamatan Gayam bertipe A

Dalam rangka memenuhi akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa, Bupati/ Wali Kota wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa pada pemerintah desa di wilayahnya sesuai dengan Pasal 74 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam kaitan itu, Pemerintah Desa harus menyusun Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes yang disampaikan kepada Bupati/Walikota. Selanjutnya, Pemerintah Daerah menyusun Laporan dimaksud dalam bentuk ikhtisar yang dilampirkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Ikhtisar Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Kabupaten Bojonegoro tercantum dalam **Lampiran 1**.

BAB VII PENUTUP

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja yang dilaksanakan selama satu periode, untuk Tahun Anggaran 2019. Informasi yang di sajikan dalam Laporan Keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna, baik untuk perencanaan, pengendalian maupun pengambilan keputusan. Laporan keuangan ini disajikan dengan kondisi yang sebenarnya, transparan, andal, komparatif sehingga mudah untuk dipahami.

Laporan Keuangan yang disusun telah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Sistematika penyusunan dalam CaLK telah disesuaikan sebagaimana sistematika penulisan CaLK dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang terakhir kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Dengan adanya catatan atas laporan keuangan, menjadikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro lebih informatif dan diharapkan dapat membantu pembaca laporan dalam memahami informasi keuangan yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, sehingga tidak mempunyai potensi kesalahpahaman bagi pengguna laporan dalam menganalisis informasi yang ada.

Demikian semoga Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2019 ini dapat bermanfaat untuk lebih meningkatkan kinerja di masa yang akan datang untuk menjadikan Bojonegoro lebih baik.

Bojonegoro, 29 Juni 2020

BUPATI BOJONEGORO

